



# RKPD

## Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

(Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2019  
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

*"Penguatan Terhadap Sistem, Sarana, Potensi Dan  
Sumber Daya Pendukung Untuk Mewujudkan  
Masyarakat Kota Dumai Yang Makmur Dan Madani"*

PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2019





WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 2 Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 - 2021.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2020

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2020.
- (4) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2020 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
  - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2020.
  - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).



Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. BAB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

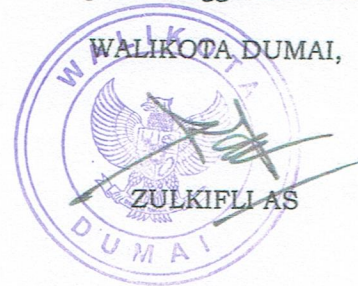
BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 28 Juni 2019



Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 28 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 28 SERI E



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020. RKPD Kota Dumai Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menetapkan 7 (Tujuh) Prioritas Daerah dan dengan tema pembangunan Tahun 2020 ***“Penguatan Terhadap Sistem, Sarana, Potensi Dan Sumber Daya Pendukung Untuk Mewujudkan Masyarakat Kota Dumai Yang Makmur Dan Madani”***. Kemudian Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 sebagai penjabaran tahun Keempat periode Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen Perangkat Daerah dan Stakeholder dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum



APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Dumai tahun 2020. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai tahun 2016 – 2021 nantinya.

Akhirnya, Kami berharap semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-19
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPd	I-21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>II-1</b>
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
b. Letak dan Kondisi Geografis	II-1
c. Topografi	II-2
d. Geologi	II-3
e. Hidrologi	II-4
f. Klimatologi	II-5
g. Demografi	II-6
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-18
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-18
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-38
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-43
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-50
2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-50
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-115
2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan	II-160
2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang	II-170
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-178
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-178
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-178
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-182
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-187
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd SAMPAI TAHUN 2018 dan REALISASI RPJMD Tahun ke 2	II-195
2.2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2019	II-196
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-202
2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-202
a. Aspek Geografi dan Demografi	II-203
b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-204
c. Aspek Pelayanan Umum	II-206
d. Aspek Daya Saing Daerah	II-207
e. Isu Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sustainable	II-215



	<i>development goals (SDG's) Tahun 2019</i>	
2.3.2	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	II-227
	A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-227
	B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-233
	C. Urusan Pilihan	II-243
	D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	II-246
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>III-1</b>
3.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1	KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN TAHUN 2020	III-2
3.1.2	TELAAHAN KEBIJAKAN PROVINSI YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI	III-19
3.1.3	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA DUMAI SECARA UMUM	III-21
3.1.4	TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020	III-22
3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-25
3.2.1	PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III-26
3.2.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-30
	3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-30
	3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-35
	3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-50
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020</b>		<b>IV-1</b>
4.1	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020	IV-1
4.1.1	Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021	IV-1
4.1.2	Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	IV-3
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	IV-11
4.1.4	Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020	IV-14
4.1.5	Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2020	IV-14
4.1.6	Skala Prioritas Penyusunan RKPd Tahun 2020 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020	IV-26
4.2	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020	IV-28
4.3	PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TARGET 2020 TERHADAP PRIORITAS RKPd TAHUN 2020	IV-48
4.4	PELAKSANAAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDG'S) TARGET 2020 KEDALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020	IV-49
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2020</b>		<b>V-1</b>
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>VI-1</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b>		<b>VII-1</b>
<b>LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd SAMPAI TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD KOTA DUMAI 2016-2021</b>		
<b>LAMPIRAN II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPd) TAHUN 2020</b>		

# DAFTAR TABEL

## BAB. I. PENDAHULUAN

Tabel 1. 1	Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020.....	Tabel 1. 1
------------	---	------------

## BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Sungai-sungai yang mengalir menurut kecamatan di Kota Dumai.....	II -4
Tabel 2.2	Banyaknya hari hujan di kota dumai selama tahun 2010-2017.....	II -5
Tabel 2.3	Banyaknya curah hujan di kota dumai selama tahun 2010-2017 .....	II -6
Tabel 2.4	Laju pertumbuhan penduduk kota dumai tahun 2002-2017.....	II -7
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2010-2017 Menurut Kecamatan.....	II -7
Tabel 2.6	Kepadatan penduduk kota dumai tahun 2010-2017.....	II -8
Tabel 2.7	Rasio jenis kelamin penduduk kota dumai tahun 2002-2017.....	II -10
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Dumai Tahun 2017.....	II -10
Tabel 2.9	Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai.....	II -13
Tabel 2.10	Banyaknya Kejadian Kebakaran per Bulan di Kota Dumai.....	II -14
Tabel 2.11	PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.....	II -19
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Kota Dumai Tahun 2013-2017.....	II -20
Tabel 2.13	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.....	II -23
Tabel 2.14	Kontribusi Sektoral PDRB 2013-2017.....	II -24
Tabel 2.15	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2013-2017.....	II -24
Tabel 2.16	Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2013-2017.....	II -26
Tabel 2.17	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2013-2017.....	II -27
Tabel 2.18	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2017.....	II -27
Tabel 2.19	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2013-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau.....	II -28
Tabel 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -31
Tabel 2.21	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2014-2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau .....	II -33
Tabel 2.22	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -36
Tabel 2.23	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017.....	II -36
Tabel 2.24	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017.....	II -37
Tabel 2.25	Penerima Batuan Iuran (PBI).....	II -43
Tabel 2.26	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar.....	II -44
Tabel 2.27	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.....	II -45
Tabel 2.28	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar.....	II -45
Tabel 2.29	Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar.....	II -46
Tabel 2.30	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.....	II -46
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Tahun 2018... ..	II -46
Tabel 2.32	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	II -47
Tabel 2.33	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga.....	II -48
Tabel 2.34	Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2018.....	II -49
Tabel 2.35	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota .....	II -50



	Dumai Tahun 2011-2018.....	
Tabel 2.36	Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2017...	II -52
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2018.	II -52
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2012-2017.....	II -55
Tabel 2.39	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2012-2018.....	II -56
Tabel 2.40	Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2016-2018.....	II -58
Tabel 2.41	Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2016-2018.....	II -59
Tabel 2.42	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2012 – 2018.....	II -60
Tabel 2.43	Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -61
Tabel 2.44	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -63
Tabel 2.45	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2018..	II -64
Tabel 2.46	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai.....	II -65
Tabel 2.47	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2011-2018.....	II -66
Tabel 2.48	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -67
Tabel 2.49	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2017.....	II -69
Tabel 2.50	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai.....	II -70
Tabel 2.51	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2016–2017.....	II -81
Tabel 2.52	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2018.....	II -85
Tabel 2.53	Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -86
Tabel 2.54	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -86
Tabel 2.55	Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2018.....	II -86
Tabel 2.56	Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai.....	II -88
Tabel 2.57	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -88
Tabel 2.58	Indikator SPM Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018.....	II -92
Tabel 2.59	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2010-2018.....	II -93
Tabel 2.60	Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2017 dan 2018 per Kecamatan.....	II -95
Tabel 2.61	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2017.....	II -95
Tabel 2.62	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -97
Tabel 2.63	Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -98
Tabel 2.64	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -99
Tabel 2.65	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai.....	II -101
Tabel 2.66	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai.....	II -102
Tabel 2.67	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2018.....	II -103
Tabel 2.68	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -105
Tabel 2.69	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -105
Tabel 2.70	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018...	II -106
Tabel 2.71	Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -107
Tabel 2.72	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai.....	II -108
Tabel 2.73	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai.....	II -108

Tabel 2.74	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai.....	II -109
Tabel 2.75	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai.....	II -109
Tabel 2.76	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai.....	II -109
Tabel 2.77	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai.....	II -110
Tabel 2.78	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2012-2018.....	II -110
Tabel 2.79	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2018.....	II -116
Tabel 2.80	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2012- 2018.....	II -113
Tabel 2.81	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2012-2018.....	II -118
Tabel 2.82	Tingkat Partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai, Tahun 2015 dan 2017.....	II -118
Tabel 2.83	Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2018.....	II -119
Tabel 2.84	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2012- 2018.....	II -119
Tabel 2.85	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2012-2018.....	II -120
Tabel 2.86	Perusahaan Wajib Lapor Tahun 2011-2016.....	II -120
Tabel 2.87	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2018.....	II -121
Tabel 2.88	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2010-2018.....	II -122
Tabel 2.89	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja.....	II -123
Tabel 2.90	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -124
Tabel 2.91	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2017.....	II -119
Tabel 2.92	Pencapaian Skor Pola Harapan Pangan Kota Dumai.....	II -126
Tabel 2.93	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -126
Tabel 2.94	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani.....	II -128
Tabel 2.95	Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan.....	II -131
Tabel 2.96	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -132
Tabel 2.97	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -133
Tabel 2.98	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai.....	II -134
Tabel 2.99	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2018.....	II -135
Tabel 2.100	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2017-2018.....	II -135
Tabel 2.101	Batas Ambang Baku Mutu Air Sumur.....	II -136
Tabel 2.102	Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2017-2018.....	II -138
Tabel 2.103	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai.....	II -138
Tabel 2.104	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2017-2018.....	II -139
Tabel 2.105	Kepemilikan KTP Tahun 2011-2018.....	II -140
Tabel 2.106	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2011-2018.....	II -141
Tabel 2.107	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2011-2018.....	II -141
Tabel 2.108	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -142
Tabel 2.109	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2012-2017.....	II -143
Tabel 2.110	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai.....	II -143
Tabel 2.111	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2012-2017.....	II -144
Tabel 2.112	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -145
Tabel 2.113	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2011-2018.....	II -145
Tabel 2.114	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -146
Tabel 2.115	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -146
Tabel 2.116	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rp.) Tahun 2011-2018.....	II -147
Tabel 2.117	Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2018.....	II -148
Tabel 2.118	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai.....	II -150
Tabel 2.119	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010-2018.....	II -150
Tabel 2.120	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2012-2018.....	II -151
Tabel 2.121	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015-2018.....	II -151



Tabel 2.122	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2016 - 2018.....	II -151
Tabel 2.123	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai.....	II -152
Tabel 2.124	Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2012-2018.....	II -153
Tabel 2.125	Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai.....	II -154
Tabel 2.126	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai.....	II -155
Tabel 2.127	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai.....	II -155
Tabel 2.128	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2018.....	II -156
Tabel 2.129	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai.....	II -156
Tabel 2.130	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -157
Tabel 2.131	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai.....	II -157
Tabel 2.132	Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.....	II -158
Tabel 2.133	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2010-2018.....	II -159
Tabel 2.134	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2012-2018.....	II -160
Tabel 2.135	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai.....	II -160
Tabel 2.136	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.....	II -162
Tabel 2.137	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina.....	II -162
Tabel 2.138	Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017.....	II -163
Tabel 2.139	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2010-2017 (%).....	II -164
Tabel 2.140	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai.....	II -164
Tabel 2.141	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai.....	II -166
Tabel 2.142	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2017.....	II -167
Tabel 2.143	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.....	II -168
Tabel 2.144	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2017.....	II -168
Tabel 2.145	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -168
Tabel 2.146	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.....	II -169
Tabel 2.147	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015-2018.....	II -173
Tabel 2.148	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2012-2018.....	II-174
Tabel 2.149	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2011-2018.....	II-176
Tabel 2.150	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2011-2018.....	II-177
Tabel 2.151	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2010-2018.....	II-178
Tabel 2.152	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.....	II-178
Tabel 2.153	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai.....	II-179
Tabel 2.154	Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2013-2018.....	II-180
Tabel 2.155	Banyaknya Hotel di Kota Dumai.....	II-182
Tabel 2.156	Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2010-2017.....	II-183
Tabel 2.157	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai.....	II-183
Tabel 2.158	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai.....	II-184
Tabel 2.159	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II-188
Tabel 2.160	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai.....	II-189
Tabel 2.161	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai.....	II-189
Tabel 2.162	Pencapaian Kinerja Sasaran dan Penyerapan Anggaran.....	II -197
Tabel 2.163	Sandingan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Kota Dumai, Provinsi dan Nasional).....	II -201
Tabel 2.164	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun.....	II -216



Tabel 2.165	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.....	II -219
Tabel 2.166	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	II -220
Tabel 2.167	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia.....	II -222
Tabel 2.168	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan.....	II -223
Tabel 2.169	Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi.....	II -224
Tabel 2.170	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi.....	II -225
Tabel 2.171	Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara.....	II -225
Tabel 2.172	Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan.....	II -225
Tabel 2.173	Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan.....	II -226

### **BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2017.....	III - 4
Tabel 3.2	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017.....	III - 9
Tabel 3.3	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017.....	III - 10
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2017 s.d 2021.....	III - 27
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2016 s.d 2020...	III - 31
Tabel 3.6	Rekap Perbandingan Belanja Langsung Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2020.....	III - 33
Tabel 3.7	Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2020 berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.....	III - 36
Tabel 3.8	Rekap Perbandingan usulan belanja pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus T.A 2020.....	III - 40
Tabel 3.9	Lampiran rekapitulasi usulan DAK Kota Dumai tahun 2020.....	III - 41
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2017 - 2021.....	III - 47

### **BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	IV - 12
Tabel 4.2	Arah Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020.	IV - 15
Tabel 4.3	Perbandingan Prioritas Tahun 2019 dan 2020.....	IV - 28
Tabel 4.4	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020.....	IV - 29
Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2020 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020.....	IV - 31
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Provinsi Riau Tahun 2020 kedalam prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020.....	IV - 32
Tabel 4.7	Sinkronisasi SPM Tahun 2020 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	IV - 33
Tabel 4.8	Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2020.....	IV - 35

### **BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2020**

Tabel 5.1	Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2020.....	V - 1
Tabel 5.2	Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020.....	V - 15
Tabel 5.3	Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai, Prioritas Provinsi Riau Tahun 2020 .....	V - 25
Tabel 5.4	Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai dan Prioritas Nasional Tahun 2020 .....	V - 25

**BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Tabel 6. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai.....	VI - 1
Tabel 6. 2	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2020.....	VI - 4
Tabel 6. 3	Indikator Kinerja Utama .....	VI - 11



## DAFTAR GAMBAR

### BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1. 1	Diagram Alir Penyusunan RKPDP.....	I -2
Gambar 1. 2	Hubungan RPJMD dengan RKPDP.....	I -7
Gambar 1. 3	Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.....	I -7

### BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Kota Dumai.....	II -2
Gambar 2.2	Diagram Pie kemiringan Lereng Kota Dumai.....	II -3
Gambar 2.3	Piramida penduduk Kota Dumai Tahun 2017.....	II -12
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai .....	II -15
Gambar 2.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2017 Kota Dumai Terhadap Provinsi Riau.....	II -21
Gambar 2.6	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai 2013-2017.....	II -25
Gambar 2.7	Struktur Perekonomian regional antar kabupaten/kota se-Riau 2017.....	II -25
Gambar 2.8	Perkembangan angka kemiskinan kota Dumai Tahun 2012-2017.....	II -29
Gambar 2.9	Perkembangan angka kemiskinan tahun 2012-2017 kota Dumai dan Provinsi Riau.....	II -29
Gambar 2.10	Persentase penduduk miskin tahun 2012-2017.....	II -30
	Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -31
Gambar 2.12	Kurva indeks gini Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -32
Gambar 2.13	Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau.....	II -34
Gambar 2.14	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2017.....	II -37
Gambar 2.15	Angka Melek huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -39
Gambar 2.16	Angka Rata-rata lama sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -40
Gambar 2.17	Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2010-2017.....	II -40
Gambar 2.18	Perkembangan angka harapan hidup kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -41
Gambar 2.19	Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -54
Gambar 2.20	Perkembangan angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -55
Gambar 2.21	Persentase Ruang Kelas SD/MI di kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2016-2018.....	II -58
Gambar 2.22	Persentase ruang Kelas SMP di kota Dumai Dengan Kondidi Baik 2016-2018.....	II -59
Gambar 2.23	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2012-2018.....	II -60
Gambar 2.24	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -62
Gambar 2.25	Gambar 2.25 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2010-2018.....	II -63
Gambar 2.26	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2010-2018.....	II -64
Gambar 2.27	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai.....	II -65
Gambar 2.28	Guru Bersertifikasi Tahun 2011-2018.....	II -65
Gambar 2.29	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -67
Gambar 2.30	Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2017....	II -68
Gambar 2.31	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2017.....	II -69
Gambar 2.32	Angka Prevalensi Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2018.....	II -71

Gambar 2.33	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2010-2018.....	II -73
Gambar 2.34	Guru bersertifikasi tahun 2011-2018.....	II -74
Gambar 2.35	Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2018.....	II -76
Gambar 2.36	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai .....	II -78
Gambar 2.37	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA.	II -82
Gambar 2.38	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2018.....	II -83
Gambar 2.39	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai .....	II -84
Gambar 2.40	Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2010-2018.....	II -94
Gambar 2.41	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -96
Gambar 2.42	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai.....	II -97
Gambar 2.43	Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -98
Gambar 2.44	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai.....	II -99
Gambar 2.45	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2010-2016 .....	II -100
Gambar 2.46	Jumlah Pelanggan Kota Dumai .....	II -101
Gambar 2.47	Jumlah Kawasan Kumuh.....	II -104
Gambar 2.48	Rumah Layak Huni.....	II -104
Gambar 2.49	Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin.....	II -105
Gambar 2.50	Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja.....	II -124
Gambar 2.51	Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 - 2017.....	II -126
Gambar 2.51	Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin .....	II -105
Gambar 2.52	Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -158
Gambar 2.53	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2010-2018.....	II -159
Gambar 2.54	Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2011-2018 .....	II -161
Gambar 2.55	Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai Tahun 2011-2018.....	II -165
Gambar 2.56	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai.....	II -167
Gambar 2.57	Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai Tahun 2013-2018.....	II -180
Gambar 2.58	Fokus Sustainable Development Goals (SDGs) .....	II -215
<b>BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>		
Gambar 3.1	Pertumbuhan ekonomi provinsi riau dan kota dumai .....	III -4
Gambar 3.2	Inflasi tahun kalender kota dumai menurut kelompok pengeluaran ..	III -6
Gambar 3.3	Inflasi bulanan kota dumai tahun 2017 .....	III -7
Gambar 3.4	IPM kota dumai, IPM provinsi riau dan IPM Nasional tahun 2010-2017 .....	III -10
Gambar 3.5	Perkembangan IPM kota dumai berdasarkan AHH, HLS dan pengeluaran perkapita .....	III -11
Gambar 3.6	Kurva indeks Gini kota dumai tahun 2011-2017 .....	III -12
Gambar 3.7	Perbandingan indeks Gini Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2014-2017.....	III -13
Gambar 3.8	Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2015-2018 ,.....	III -14
Gambar 3.9	Kondisi perbandingan Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2015-2018.....	III -15
Gambar 3.10	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional dan	III -16



	Propinsi Riau Tahun 2014-2017.....	
Gambar 3.11	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2018 ...	III -16
Gambar 3.12	Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2020 berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 .....	III -40
<b>BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019</b>		
Gambar 4.1	Prioritas Pemerintah Pusat Tahun 2020 .....	IV- 26



# BAB I PENDAHULUAN

# **BAB I**

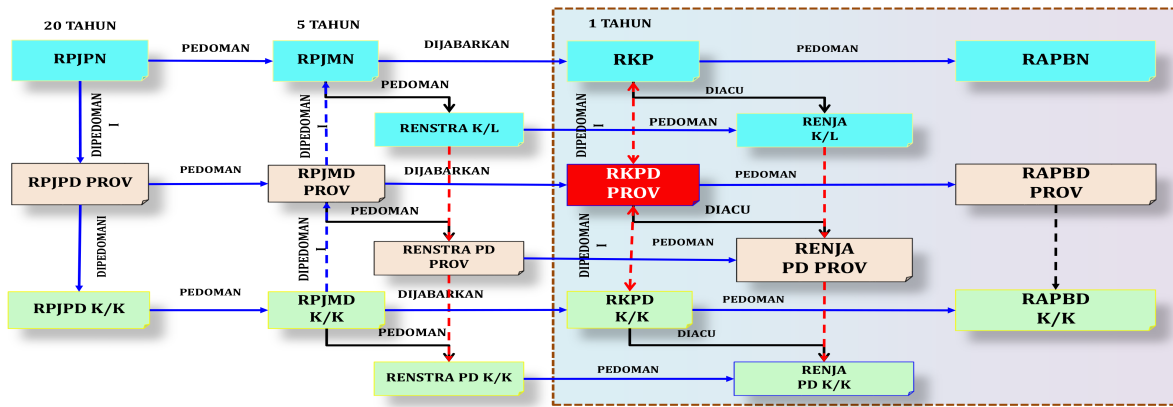
## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.





Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RKPD  
 Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Kota Dumai tahun 2020 yang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 tahun ke-4.** Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2020 ini sudah mengacu kepada dua peraturan pokok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2020 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, rancangan awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2020, RKP Tahun 2020, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up top-down*. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program *Dedicated* yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);



11. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Rancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, rancangan awal

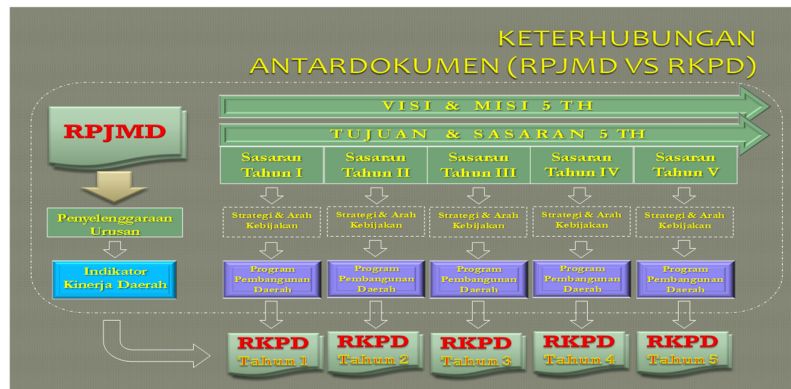
RKPD Provinsi Riau Tahun 2020, RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

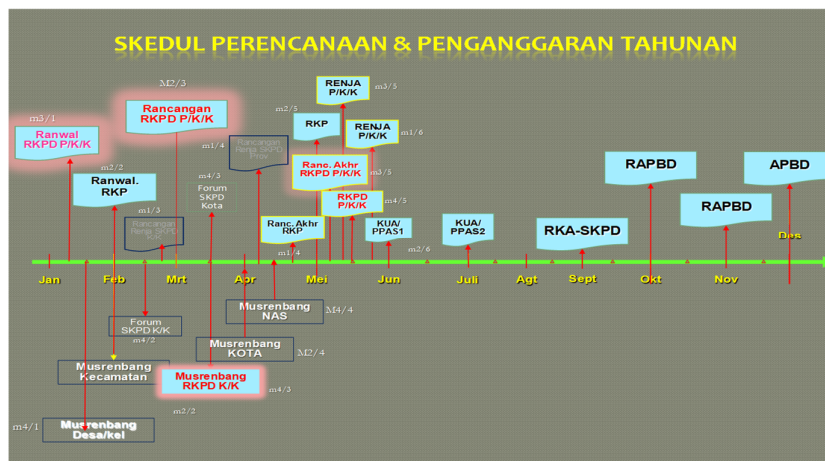
1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

RKPD Kota Dumai Tahun 2020 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun keempat pada perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2020 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun keempat (2020) yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah ***Melakukan penguatan terhadap sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai yang makmur dan madani.***

. Kebijakan umum tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 7 prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2020 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2020. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2020 dapat dilihat secara rinci pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2020.



Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan RKP  
 Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017



Gambar 1.3 Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan  
 Sumber: Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

2. Hubungan RKP Kota Dumai Tahun 2019 dengan RKP Provinsi Riau Tahun 2020

Penyusunan RKP Kota Dumai Tahun 2020 berpedoman pada RKP Provinsi Riau Tahun 2020. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-1 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKP Provinsi Riau Tahun 2020 adalah ***“Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kita Tingkatkan Daya Saing Industri, Pertanian dan Pariwisata Riau”***. Untuk pencapaian tema yang telah



ditetapkan, maka prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah (1). Sumber daya manusia; (2). Infrastruktur; (3). Industri; (4). Pertanian dan (5). Pariwisata.

Adapun sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tersebut tersaji pada Tabel 1.1. di bawah ini :

Tabel 1.1. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan PERDA wajib belajar 12 tahun</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>• Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin</li> <li>• Memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin dan tidak mampu</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik</li> <li>• Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.</li> <li>• Menghapuskan pungutan yang tidak perlu yang memberatkan wali murid.</li> </ul>	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pendidikan Menengah</li> <li>2. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</li> <li>3. Program Bantuan Operasional Sekolah</li> <li>4. Program Peningkatan Mutu Kependidikan dan Tenaga Pendidik</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan terutama masyarakat</li> </ul>	2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Program Pembiayaan Kesehatan</li> <li>3. Program Peningkatan</li> </ol>

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<p>miskin dan kurang mampu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan</li> </ul>		<p>Pelayanan Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</li> <li>Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes</li> <li>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan jumlah SDM berkualitas</li> <li>meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM</li> <li>Meningkatkan akses dan perluasan pembiayaan koperasi dan UMKM, Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM</li> </ul>	3. Meningkatkan daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Kelembagaan Koperas</li> <li>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM</li> <li>Program Pengembangan Industri Unggulan, Kecil dan Menengah</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa</li> </ul>	4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan seperti Al-quran Center, Madrasah dan Pondok Pesantren</li> </ul>	5. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	1. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan fungsi kelembagaan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat</li> <li>meningkatkan kebebasan masyarakat berdemokrasi</li> </ul>	6. Meningkatkan kehidupan berdemokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>Program Pendidikan Politik</li> </ol>
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Merata dan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun konektivitas, memantapkan jalan dan jembatan serta pelabuhan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi</li> <li>Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan dengan meningkatkan ketersediaan air baku yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum perpipaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum</li> <li>Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan cara meningkatkan infrastruktur energi keseluruhan wilayah dan mempercepat penyediaan dan pemanfaatan</li> </ul>	1. Pembangunan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>Program Preservasi Jalan dan Jembatan</li> <li>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</li> <li>Program Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan</li> <li>Program Penataan Ruang</li> <li>Program Pengembangan Perumahan</li> <li>Program Perhubungan Darat</li> <li>Program Perhubungan Laut</li> <li>Program Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan</li> </ol>



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan memenuhi akses sanitasi masyarakat dengan membangun sarana prasarana sanitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dalam meningkatkan ketersediaan jaringan telekomunikasi, internet dalam menunjang pembangunan social dan ekonomi</li> </ul> </li> <li>• Membangun konektivitas antar pulau (merangkai pulau)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dengan upaya memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan, meningkatkan</li> </ul>	2. Pembangunan Lingkungan	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 3. Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 4. Program Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<p>kapasitas kelembagaan catchment area, menurunkan sedimentasi pada DAS utama dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan menurunkan tingkat pencemaran lingkungan hidup.</li> <li>• Meningkatkan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau.</li> <li>• Meningkatkan penanggulangan abrasi terutama di wilayah pesisir.</li> </ul>		
<p>3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri (KI), dan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM)</li> <li>• Membangun kawasan industri, Meningkatkan dan membangun infrastruktur</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi hasil industry</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya local</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Investasi</li> <li>2. Program Penyelenggaraan Perizinan</li> <li>3. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>4. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri</li> <li>5. Program Pembangunan Sumberdaya Industri</li> <li>6. Program</li> </ol>

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<p>jalan, jembatan menuju kawasan industri, membangun fasilitas air bersih, energi listik dan pengolahan limbah pada kawasan industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi industri dan nilai tambah yang berbasis sumber daya alam lokal yang efisien dan meningkatkan keunggulan kompetitif (daya saing produk industri) menghadapi pasar regional dan global</li> <li>• optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya, memperbaiki iklim dan promosi Investas</li> </ul>	<p>3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing industri</p> <p>4. Meningkatkan daya tarik investasi</p> <p>5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan memberdayakan usaha dan ekonomi masyarakat miskin, bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu.</p> <p>6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga</p>	<p>Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>1. Program Peningkatan Produksi Pertanian</p> <p>2. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian</p> <p>3. Program Peningkatan Produksi Perkebunan</p> <p>4. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perkebunan</p> <p>5. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak</p> <p>6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</p> <p>7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>8. Program Penempatan Tenaga Kerja</p>

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
		<p>kerja.</p> <p>7. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan, dengan meningkatkan nilai patriotisme, budaya prestasi, semangat profesionalisme, partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.</p> <p>8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.</p>	<p>9. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>10. Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan</p> <p>11. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga</p>
<p>4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penerapan Budaya Melayu dari potensi budaya melayu yang ada</li> <li>Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana untuk mengoptimalkan dan pengembangan potensi budaya melayu serta pusat kebudayaan Melayu</li> <li>Melestarikan budaya Melayu, dengan melindungi, mengembangkan dan aktualisasi nilai, tradisi budaya melayu</li> </ul>	<p>1. Kebudayaan</p>	<p>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan</p> <p>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, media desain dan IPTEK</p>



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya lokal.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun dan memelihara jalan dan jembatan ke lokasi destinasi pariwisata. Menyediakan sarana prasarana di lokasi destinasi pariwisata, dengan membangun sarana dan prasarana di lokasi destinasi pariwisata</li> <li>Meningkatkan pengelolaan potensi pariwisata, mengembangkan kelembagaan pariwisata</li> <li>mengembangkan ekonomi kreatif yang terpadu dengan peningkatan promosi pariwisata.</li> </ul>	2. Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</li> <li>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata</li> </ol>
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi		1. Melakukan penataan dan reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen kearsipan, meningkatkan kualitas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Reformasi Birokrasi</li> <li>Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</li> <li>Program Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip</li> <li>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li> <li>Program Pelayanan Administrasi</li> </ol>

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
		<p>sehingga mampu bekerja secara profesional dan responsif.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>3. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan keuangan (pendapatan dan belanja) daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, membenahi pengelolaan barang daerah yang tertib dan lebih baik serta meningkatkan efektivitas kerjasama pembangunan antar daerah.</p> <p>4. Meningkatkan peran dan kontribusi BUMD dalam menopang keuangan daerah.</p> <p>5. Mewujudkan keuangan inklusif terutama ekonomi dan keuangan syariah. Konversi Bank Riau Kepri Konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah.</p> <p>6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang</p>	<p>Aparatur Sipil Negara</p> <p>7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur</p> <p>8. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>9. Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah</p> <p>10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>11. Program Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan</p> <p>12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>13. Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>14. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah</p>

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
		kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana teknologi informasi.  7. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik dan respon terhadap pengaduan masyarakat	

Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2020

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2020 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2020.

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dengan RKP Tahun 2020 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahun kelima pada RPJMN 2015-2019. RKP Tahun 2020 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah “ **Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas** ”. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas

untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan program prioritas:
  - i. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan;
  - ii. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
  - iii. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
  - iv. Pengentasan Kemiskinan
  - v. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
- 2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan program prioritas:
  - i. Perluasan Infrastruktur Dasar;
  - ii. Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana;
  - iii. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
  - iv. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan; dan
  - v. Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan program prioritas:
  - i. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM;
  - ii. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil;
  - iii. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan lapangan Kerja;
  - iv. Peningkatan Ekspor Bernilai PP Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
  - v. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
- 4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan, dengan program prioritas:
  - i. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;



- ii. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air; dan
  - iii. Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
  - iv. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan;
  - v. Penguatan Ketahanan
- 5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, dengan program prioritas:
- i. Penguatan Kemampuan Pertahanan;
  - ii. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Nasional;
  - iii. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi;
  - iv. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; dan
  - v. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2020 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional (untuk lebih jelas akan dijelaskan pada Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020).

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2020 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2020 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2020;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2020, baik yang berskala nasional maupun lokal.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2020, baik yang berskala nasional maupun lokal.

## **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

- c c Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2020.

## **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

# **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

## **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Menyajikan kondisi umum geografis Kota Dumai, diantaranya: kondisi geografi Kota Dumai, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

### **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.



### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2018 dan Realisasi RPJMD.**

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Mencantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19.

### **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.**

Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

#### **2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Menyajikan permasalahan prioritas daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

#### **2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. \sub subbab ini menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

### **4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020**

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2020 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2020.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



# BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

###### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 1.727,38 km<sup>2</sup>. Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

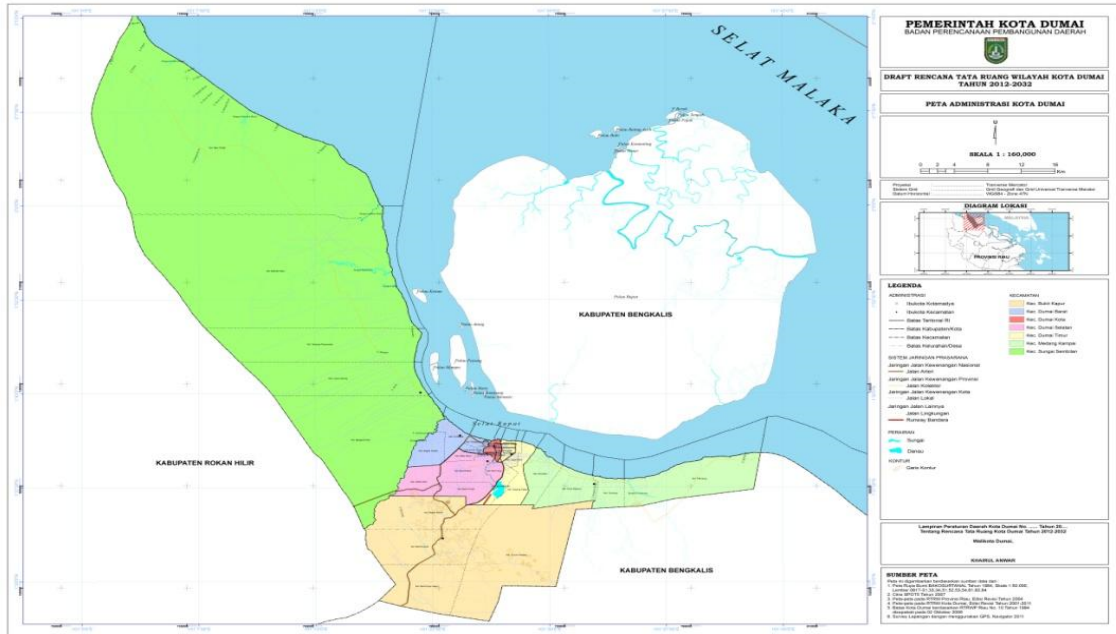
- Utara : Selat Rupat, Kabupaten Bengkalis.
- Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Barat : Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

###### b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Dumai merupakan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" -101°28'13" Bujur Timur dan 1°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km<sup>2</sup>.

Kota Dumai memiliki 15 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannya sepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Berikut gambar 2.1 Peta Kota Dumai.

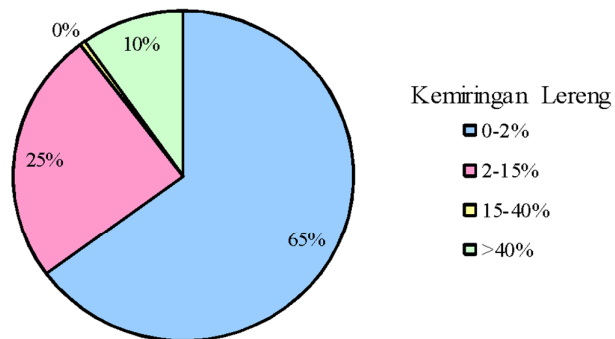




Gambar 2.1 Peta Kota Dumai(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

### c. Topografi

Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng  $0 < 3\%$ , di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang. Kota Dumai berada pada ketinggian antara 1–50 meter di atas permukaan laut, dan secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2%, sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng  $>40\%$ , yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

#### d. Geologi

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi Alluvium Muda dan Alluvium Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai. Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuartar yang membentuk lahan bergambut.

Pada umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari jenis Podsolid Merah Kuning dari batuan endapan dan jenis alluvial di kawasan yang relatif tinggi (bagian Selatan Kota Dumai), serta tanah jenis organosol (tanah bergambut) dan gley hamus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah di wilayah pesisir Kota Dumai. Karakter negatif lahan gambut ini memiliki bahan organik yang tinggi, volume udara tanah yang besar dan mudah menyerap air sehingga akan mengurangi daya tekan dan daya beban.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada

lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

#### e. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 51 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.

Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	-
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perpat 6. Sungai Parit 7. Sungai Sepi 8. Sungai Tiram 9. Sungai Pauh 10. Sungai Bakau Tua 11. Sungai Teluk Dalam 12. Sungai Teluk Kijuk 13. Sungai Tengar Besar 14. Sungai Tengar Kecil 15. Sungai Tawar Kecil 16. Sungai Tawar Besar 17. Sungai Sempit Kecil 23. Sungai Geniot 24. Sungai Geniot Kecil 25. Sungai Buluhala 26. Sungai Teras 27. Sungai Penyengat 28. Sungai Ilir 29. Sungai Danau 30. Sungai Hulu 31. Sungai Sembilan 32. Sungai Mampu 33. Sungai Mampu Kecil 34. Sungai Nerbit Kecil 35. Sungai Nerbit Besar 36. Sungai Paul 37. Sungai Mesjid 38. Sungai Banain 39. Sungai Saliyo

No	Kecamatan	Nama Sungai
		18. Sungai Sempit Besar 19. Sungai Tembuan 20. Sungai Tianjung 21. Sungai Santahalu 22. Sungai Penempul 40. Sungai Bulu Ala 41. Sungai Tambuan 42. Sungai Teritib 43. Sungai Selat Mati
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	-
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	-

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## f. Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2017 berkisar antara 70-84%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2017 berkisar antara 26,8°C-33,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2017 terjadi pada bulan Februari sedangkan terkecil terjadi pada bulan Juni dengan nilai berturut-turut sebesar 418,0 mm<sup>3</sup> dan 95,0 mm<sup>3</sup>. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari, April dan Mei yaitu sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Juni yaitu sebanyak 6 hari. Berikut Tabel 2.2 dan 2.3. Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2017. Dan Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2017 Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2017

Bulan	Tahun (Hari)							
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017
Januari	15	19	13	13	13	13	16	20
Februari	12	6	11	11	11	11	11	21
Maret	12	15	11	11	11	11	9	12
April	13	16	11	11	11	11	17	21
Mei	17	5	14	14	14	14	15	21
Juni	13	9	7	7	7	7	15	6
Juli	17	9	14	14	14	14	13	9
Agustus	13	8	18	18	18	18	9	17
September	tad	15	7	7	7	7	13	20
Oktober	tad	22	17	17	17	17	15	20
Nopember	tad	26	21	21	21	21	21	20
Desember	tad	14	24	24	24	24	20	19
	112	164	168	168	168	168	174	206

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Tabel 2.3 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2017

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )							
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017
Januari	144,0	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6	411,7
Februari	58,0	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3	418,0
Maret	329,0	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0	182,6
April	207,0	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2	181,0
Mei	330,0	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3	145,0
Juni	331,0	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6	95,0
Juli	425,0	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4	106,7
Agustus	188,0	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7	237,5
September	Tad	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7	237,8
Oktober	Tad	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3	179,4
Nopember	Tad	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0	238,3
Desember	Tad	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5	166,0
	2.012,0	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6	2599

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## g. Demografi

### 1. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai menunjukkan penurunan selama periode 2002-2017. Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 laju pertumbuhan penduduknya cenderung stagnan dengan besar pertumbuhan penduduk sebesar 4,83%. Mulai tahun 2005 sampai tahun 2008 terus mengalami penurunan dengan besaran pertumbuhan di tahun 2008 sebesar 2,45%. Namun di tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan penduduk Kota Dumai kembali mengalami peningkatan menjadi 4,08%. Kemudian mengalami penurunan yang sangat tajam di tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 1,37%, namun pertumbuhannya kembali mengalami peningkatan di tahun 2011 dan 2012. Mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah penduduk Kota Dumai tidak mengalami pertumbuhan, atau dengan kata lain pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan dengan total pertumbuhan di tahun 2017 sebesar 1,96%. Selama periode 2002-2017, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai tertinggi terjadi pada pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,74%, sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 dengan angka pertumbuhan sebesar 1,37%. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai tahun 2002-



2017 adalah sebesar 3,29%. Selain kematian penduduk, kegiatan transmigrasi dan banyaknya minat menjadi tenaga kerja ke luar daerah maupun luar negeri menjadi salah satu indikator berkurangnya jumlah penduduk di beberapa kecamatan. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2017 dapat dilihat pada table 2.4.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2017

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2002	99.514	92.476	191.990	4,83
2003	106.696	94.567	201.263	4,83
2004	111.851	99.133	210.984	4,83
2005	112.924	106.427	219.351	3,97
2006	112.958	112.291	225.249	2,69
2007	115.902	115.219	231.121	2,61
2008	121.739	118.814	240.553	4,08
2009	129.992	120.375	250.367	4,08
2010	131.465	122.338	253.803	1,37
2011	133.645	126.268	259.913	2,41
2012	137.715	130.307	268.022	3,12
2013	140.776	133.313	274.089	2,26
2014	143.900	136.209	280.109	2,20
2015	146.792	139.175	285.967	2,09
2016	149.791	142.117	291.908	2,08
2017	152.731	144.907	297.638	1,96

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2010-2017 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata tertinggi selama periode 2010-2017 terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 2,46%. Berikut ini tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Selama Tahun 2010-2017.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2010-2017 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)								Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Bukit Kapur	38.051	40.133	42.082	45.933	42.399	43.403	44.447	45.479	2,46
Medang Kampai	10.199	10.611	10.983	11.235	11.240	11.470	11.701	11.923	2,19
Sungai Sembilan	27.465	28.767	29.920	32.065	30.475	31.158	31.860	32.546	2,35
Dumai Barat	35.785	37.423	38.871	38.068	39.688	40.572	41.479	42.364	2,34
Dumai Timur	54.854	56.946	58.793	60.482	60.450	61.685	62.932	64.127	2,19
Dumai Kota	41.504	41.887	42.122	41.815	45.264	46.063	46.844	47.570	1,96

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)								Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Dumai Selatan	45.945	47.209	48.752	50.429	50.593	51.616	52.645	53.629	2,17
<b>Kota Dumai</b>	<b>253.803</b>	<b>262.976</b>	<b>271.523</b>	<b>280.027</b>	<b>280.199</b>	<b>285.967</b>	<b>291.908</b>	<b>297.638</b>	<b>2,23</b>

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## 2. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Tiga kecamatan di Kota Dumai dengan kepadatan penduduk paling tinggi berturut-turut adalah Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Kota. Kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di ketiga kecamatan tersebut disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk di Kota Dumai mencapai 297.638 jiwa, dengan jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 64.127 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Dumai Kota yaitu sebesar 3.659 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan berturut-turut sebesar 33 jiwa/km<sup>2</sup>. Kedua kecamatan tersebut merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2001. Berikut ini tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2017.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2017

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bukit Kapur	200,00	190	201	210	230	212	217	222	227
Medang Kampai	373,00	27	28	29	30	30	31	31	33

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sungai Sembilan	975,38	28	29	31	33	31	32	33	33
Dumai Barat	44,98	796	832	864	846	882	902	922	942
Dumai Timur	47,52	1.154	1.198	1.237	1.273	1.272	1.298	1.324	1.349
Dumai Kota	13,00	3.193	3.222	3.240	3.217	3.482	3.543	3.603	3.659
Dumai Selatan	73,50	625	642	663	686	688	702	716	730
Kota Dumai	1.727,38	147	152	157	157	162	165	169	172

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

### 3. Struktur Penduduk

#### a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kota Dumai pada tahun 2017 sebesar 105,40, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kota Dumai terdapat 105 penduduk laki-laki. Seluruh Kecamatan di Kota Dumai memiliki *sex ratio* > 100, artinya seluruh kecamatan di Kota Dumai jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas penduduk Kota Dumai masih cukup baik. Jika angka *sex ratio* ini dibawah 100 maka bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah, karena ini mengindikasikan kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik. Disisi lain hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ke depan, terutama untuk kebijakan pembangunan yang terkait gender. Data *sex ratio* sangat berguna untuk pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara proporsional, seperti pendidikan yang berwawasan gender. Informasi terkait *sex ratio* juga penting diketahui untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan rakyat daerah.

Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2017

TAHUN	P E N D U D U K			SEX RATIO
	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	LAKI-LAKI + PEREMPUAN (Jiwa)	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
2002	99.514	92.476	191.990	108
2003	106.696	94.567	201.263	113
2004	111.851	99.133	210.984	113
2005	112.924	106.427	219.351	106
2006	112.958	112.291	225.249	101
2007	115.902	115.219	231.121	101
2008	121.739	118.814	240.553	102
2009	129.992	120.375	250.367	108
2010	131.465	122.338	253.803	107
2011	133.645	126.268	259.913	106
2012	137.715	130.307	268.022	106
2013	140.776	133.313	274.089	106
2014	143.900	136.209	280.109	106
2015	146.792	139.175	285.967	105
2016	149.791	142.117	291.908	105
2017	152.731	144.907	297.638	105

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

#### b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang terlihat pada gambar 2.3 di bawah ini yang menunjukkan bahwa Kota Dumai dikategorikan sebagai penduduk muda. Hal tersebut dikarenakan oleh presentase penduduk muda terhadap total penduduk masih cukup besar. Tabel 2.8 berikut adalah table penduduk kota Dumai berdasarkan kelompok Umur.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Dumai Tahun 2017

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN
0-4	-17,285	17,285	16,711
5-9	-15,395	15,395	14,643
10-14	-13,908	13,908	13,229
15-19	-13,320	13,320	12,222
20-24	-12,562	12,562	12,188
25-29	-13,840	13,840	13,263
30-34	-12,740	12,740	12,691
35-39	-11,914	11,914	11,574

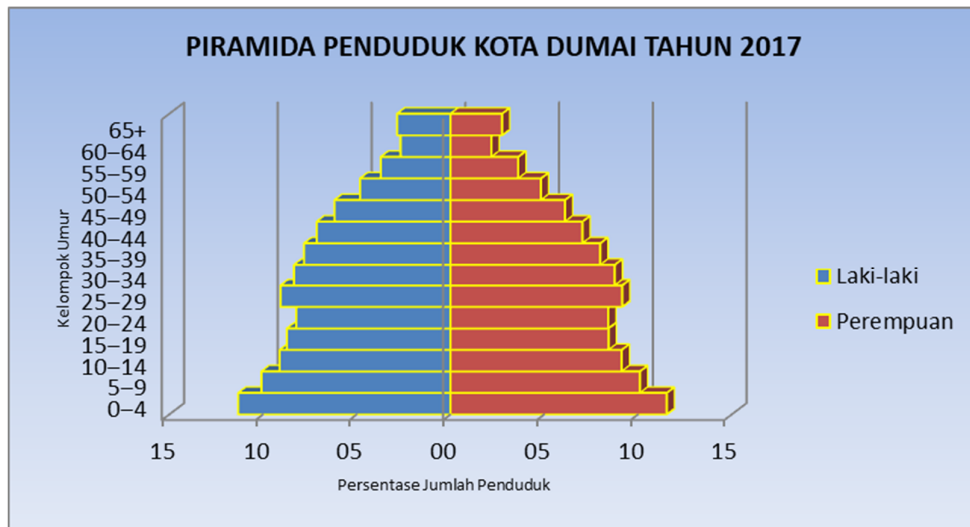
KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN
40-44	-10,892	10,892	10,195
45-49	-9,446	9,446	8,841
50-54	-7,361	7,361	6,985
55-59	-5,668	5,668	5,228
60-64	-4,061	4,061	3,157
65+	-4,339	4,339	3,980
<b>JUMLAH</b>	<b>-152,731</b>	<b>152,731</b>	<b>144,907</b>
<b>RASIO JENIS KELAMIN</b>	<b>105.40</b>		
<b>RASIO KETERGANTUNGAN (PERBANDINGAN)</b>	<b>50</b>		

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Penduduk usia produktif yang banyak merupakan potensi sumberdaya manusia suatu wilayah. Jika dilihat secara demografis struktur penduduk Kota Dumai memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Pada tahun 2017 sebanyak 66,57% penduduk termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), sedangkan 33,43% lagi merupakan penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan data tersebut, besar rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) di Kota Dumai adalah 0,50, artinya jumlah penduduk usia kerja di Kota Dumai hampir dua kali lipat penduduk usia non produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif..

Jika melihat nilai rasio ketergantungan kota Dumai maka peluang kota Dumai untuk masuk dalam kondisi Bonus demografi sangat besar. Bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam priode yang disebut dengan window of opportunity, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasa 0,50, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja. Berikut ini gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2017





Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2017  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Sedangkan perbandingan jumlah penduduk non produktif antara usia anak-anak dengan usia tua (*child to old*) adalah 11, artinya penduduk usia non produktif didominasi oleh penduduk muda yakni 11 kali lipat penduduk tua. Kedua kondisi di atas menunjukkan bahwa Kota Dumai memiliki modal pembangunan (bonus demografi) yang besar berupa penduduk usia produktif yang siap menggerakkan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Disamping itu, angka kelahiran yang tinggi juga harus diantisipasi dan disikapi secara bijak melalui kebijakan-kebijakan pembangunan karena beberapa tahun ke depan beban pemerintah daerah akan semakin besar terkait penyediaan lapangan pekerjaan maupun penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya lainnya.

#### **h. Wilayah Rawan Bencana**

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah kebakaran hutan dan lahan diwilayah Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai sembilan. . Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan ini dapat diantisipasi pada tahun 2017 dengan menumbuhkan

kesadaran baik pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu terdapat juga potensi angin puting beliung yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, maka selama periode 2016-2017 terjadi peningkatan kejadian bencana, dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut sebanyak 10 kejadian dan 25 kejadian. Berikut tabel 2.9 Banyaknya Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai

Tabel 2.9 Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai

Kabupaten/Kota	2016			2017		
	Kebakaran Hutan & Lahan			Kebakaran Hutan & Lahan		
	Hotspot	Luas Areal Terbakar	Jumlah Kejadian	Hotspot	Luas Areal Terbakar	Jumlah Kejadian
Kuantan Singingi	1017	0	0	2170	24.5	3
Indragiri Hulu	1188	36.5	5	1919	45.3	8
Indragiri Hilir	8063	75	2	1378	82	5
Pelalawan	11299	648.75	28	3296	162.16	41
Siak	12117	147.8	21	682	76.5	9
Kampar	3765	76.25	18	548	83.25	35
Rokan Hulu	7157	350	1	1869	68	10
Bengkalis	32248	115.8	24	1826	64	11
Rokan Hilir	26943	200.25	11	3198	392	16
Kepulauan Meranti	16162	487.5	20	515	236.11	19
Pekanbaru	0	54.3	10	0	12.7	6
Dumai	11782	156.5	10	395	122.75	25
RIAU	131741	2348.65	150	17796	1369.27	188

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

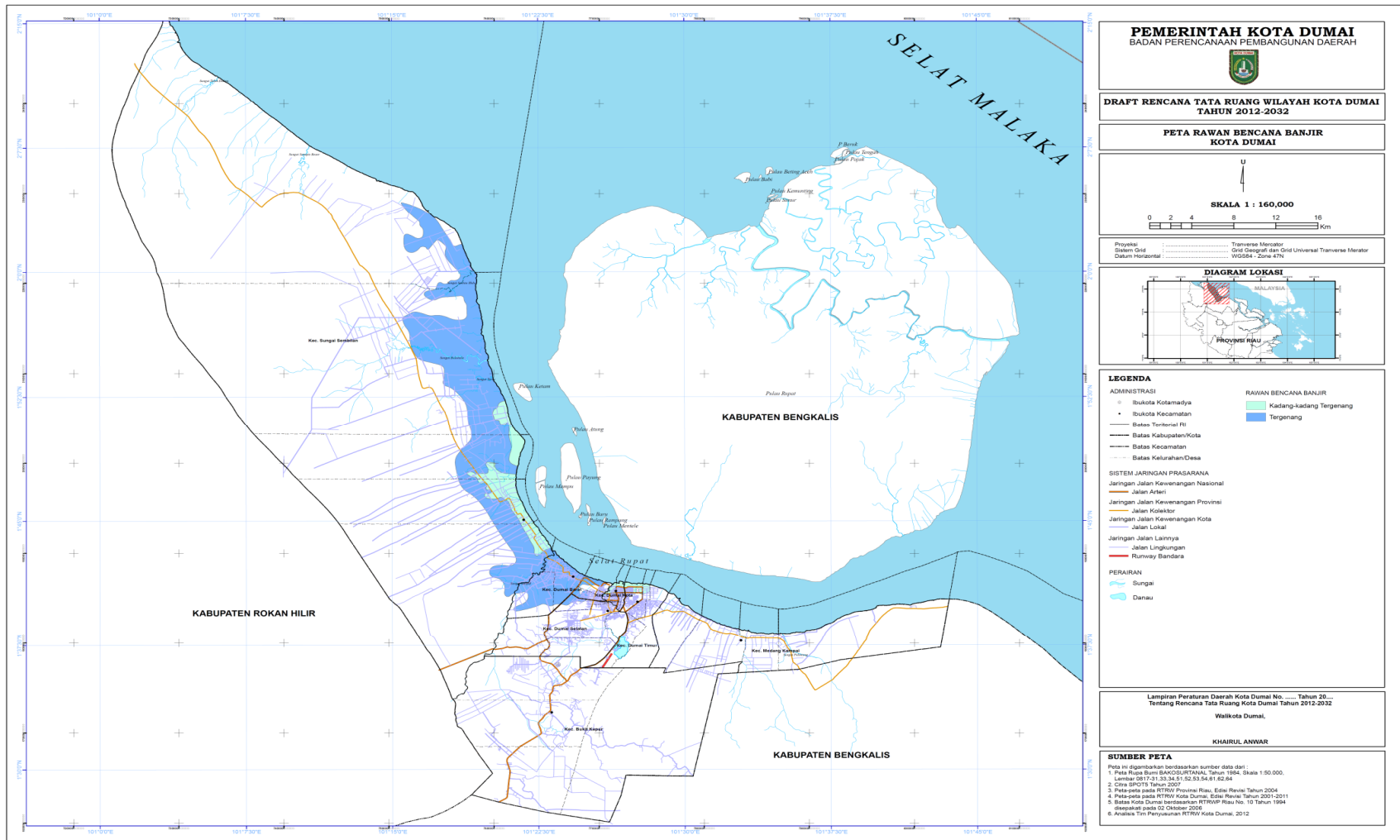
Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah kebakaran perkotaan juga merupakan potensi bencana bagi kota Dumai. Adapun jumlah kejadian kebakaran perkotaan di Kota Dumai pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Banyaknya Kejadian Kebakaran per Bulan di Kota Dumai

Bulan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	N/A			-	3	-	7	2
Februari				-	6	36	53	2
Maret				-	191	16	56	3
April				-	1	9	8	7
Mei				-	1	4	-	5
Juni				63	54	6	10	3
Juli				7	14	43	10	3
Agustus				-	1	2	83	1
September				-	3	11	14	15
Oktober				-	1	2	18	1
November				-	-	-	-	5
Desember				-	-	-	-	2
Jumlah Kejadian				70	275	129	259	49

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Begitu juga dengan masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir, maka kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama. Berikut ini Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Banjir Yang Terjadi Di Kota Dumai.



Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai  
(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2018)

### **i. Potensi Pengembangan Wilayah**

**Berdasarkan kondisi geografis**, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan.

**Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar**, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian yang terletak dikecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Dumai Selatan dan perkebunan yang terletak di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

**Berdasarkan kondisi klimatologi**, Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2017 berkisar antara 70-84%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan yang tersebar diseluruh kecamatan maupun perikanan yang terletak diwilayah Kecamatan Sungai Sembilan.

**Berdasarkan kondisi geologi**, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial*serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa

atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 m dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

**Berdasarkan kondisi hidrologi**, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air air hujan kewilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah dengan tujuan untuk mencegah abrasi, erosi dan amblesan. kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 51 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah



hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan

### **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun RKPD Kota Dumai Tahun 2020, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

#### **2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

##### **A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

###### **1. Perkembangan PDRB**

Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah harus memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Sebagai ukuran kuantitatif maka data-data PDRB tetap merupakan informasi yang berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2013-2017, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 22,4 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 30,3 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No	Kategori	Nilai PDRB ADHK (Juta Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.119.969,79	1.138.071,39	1.139.159,31	1.152.198,89	1.190.685,24
B.	Pertambangan dan penggalian	86.479,50	87.258,58	87.421,17	83.885,46	79.731,61
C.	Industri pengolahan	10.414.550,79	11.059.234,35	11.357.155,83	12.069.822,54	12.675.132,10
D.	Pengadaan listrik dan gas.	11.612,14	13.196,96	14.483,65	17.107,96	17.285,13
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.363,44	3.428,96	3.523,70	3.517,99	3.679,72
F.	Konstruksi	2.181.412,05	2.081.314,46	2.119.777,32	2.184.087,17	2.275.697,48
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.735.616,92	3.771.270,34	3.776.043,56	3.887.613,26	3.967.113,15
H.	Transportasi dan pergudangan	537.461,38	590.801,20	602.752,39	632.138,13	667.090,22
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	134.378,76	146.744,72	150.191,31	154.066,50	163.772,54
J.	Informasi dan komunikasi	206.134,11	229.294,86	245.697,40	255.850,29	269.847,31
K.	Jasa keuangan dan asuransi	471.332,89	285.154,19	265.536,84	265.883,62	263.892,89
L.	Real estate	86.988,13	90.248,56	94.773,07	96.113,61	99.409,55
M, N	Jasa perusahaan	883,50	958,60	1.032,15	1.069,38	1.143,30
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	419.717,32	421.465,77	429.988,77	430.683,13	430.859,42
P.	Jasa pendidikan	82.520,25	89.917,60	94.631,35	95.277,88	97.846,18
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	28.650,41	29.384,74	32.305,65	32.586,29	34.375,97
R, S, T, U	Jasa lainnya	84.596,52	94.630,46	102.020,06	106.501,69	115.078,72
PDRB		18.909.845,69	19.605.667,87	20.132.375,74	20.516.493,53	22.352.640,53

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan harga konstan (ADHK), selama kurun waktu tahun 2013-2017, PDRB Kota Dumai terus tumbuh. Pada Tahun 2017 PDRB ADHK Kota Dumai adalah sebesar 22,352 triliun Rupiah jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 951,64 Miliar Rupiah.

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Kota Dumai Tahun 2013-2017

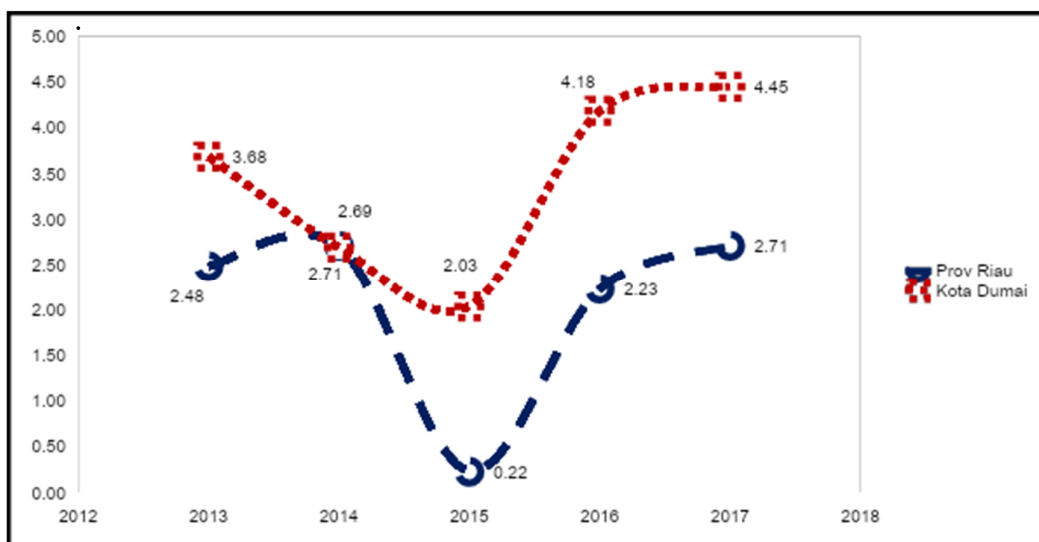
No	Sektor/Sub sector	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)					Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Tahun 2013-2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.03	1.62	0.10	1.14	3.34	1.54
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.07	0.90	0.18	-4.04	-4.96	-2.01
3.	Industri Pengolahan	3.78	6.19	2.92	5.71	5.34	5.03
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.35	13.70	9.70	18.16	1.05	10.47
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.54	2.08	2.62	0.00	4.55	2.30
6.	Konstruksi	3.02	-4.59	1.85	3.03	4.19	1.06
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.26	0.95	0.13	2.16	2.84	1.51
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.80	9.92	2.02	4.88	5.53	5.55
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.97	9.20	2.35	2.58	6.30	5.07
10.	Informasi dan Komunikasi	20.86	11.24	7.16	4.13	5.47	6.97
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.44	-39.50	-6.88	0.13	-0.75	-13.50
12.	Real Estate	4.74	3.75	5.01	1.41	3.43	3.39
13.	Jasa Perusahaan	5.81	9.09	7.29	3.88	6.54	6.69
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.75	0.42	2.02	0.16	0.04	0.66
15.	Jasa Pendidikan	5.51	8.97	5.24	0.69	2.70	4.35
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.99	2.55	9.97	0.87	5.49	4.66
17.	Jasa lainnya	11.39	11.86	7.81	4.39	8.06	8.00
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai		3.68	2.69	2.03	4.18	4.45	3.33

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada 1 (satu) sektor ekonomi pun pada PDRB Kota Dumai yang terus menerus mengalami pertumbuhan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Bahkan sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, mulai

tahun 2014 (tahun dengan pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 2013-2017) dapat dikatakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama penggerak perekonomian tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah beberapa sektor yang ada di Kota Dumai, dan sektor ini memiliki laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2013-2017 sebesar 5,03%. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2013-2017 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 10,47%. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor ini mengalami perlambatan yang signifikan di tahun 2017.

Secara umum, berdasarkan olahan data pada Tabel 2.12 terlihat bahwa perekonomian Kota Dumai berfluktuasi dari tahun 2013 sampai tahun 2017, Selama periode 2013-2015, laju pertumbuhan ekonomi kota Dumai cenderung melambat, sedangkan dari 2016-2017 pertumbuhan ekonomi kota Dumai mengalami peningkatan yang sangat bagus. Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut :



Gambar 2.5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2017 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

Dari Gambar di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2017 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Meskipun demikian, secara umum perekonomiannya sama-sama mengalami perlambatan sebelum akhirnya mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2016. Di tahun 2015 perekonomian Kota Dumai dan Provinsi Riau mengalami titik pertumbuhan terendah atau dapat dikatakan perekonomiannya melambat. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengambilan strategi dan kebijakan terkait perkembangan ekonomi Kota Dumai kedepannya. Berdasarkan hasil perhitungan sektor basis pada sektor PDRB kota Dumai, maka sektor-sektor PDRB kota Dumai pada tahun 2017 dapat ditipologikan pada:

1. Sektor basis tidak prospektif yaitu industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi ; administrasi pemerintahan, dan jasa lainnya.
2. Sektor non basis tidak prospektif yaitu jasa pendidikan; Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan & penggalian; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan analisa shift share dengan metode klasik didapatkan klasifikasi sebagai berikut :

1. Sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah Sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas ; Bangunan; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi mobil Dan Sepeda Motor; Transportasi Dan Pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan Dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya;

2. Sektor yang cenderung berpotensi adalah sektor pertambangan & penggalian; dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Sedangkan untuk Perkembangan PDRB Kota Dumai berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2013-2017 pada tabel 2.13.

Tabel 2.13 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No	Sektor/Sub sector	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,290,660.00	1,437,570.00	1,551,170.00	1,687,640.00	1,807,090.00
2.	Pertambangan dan Penggalian	93,220.00	108,900.00	120,470.00	121,860.00	116,790.00
3.	Industri Pengolahan	10,909,920.00	12,499,500.00	13,544,270.00	15,088,110.00	16,591,040.00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,560.00	11,690.00	18,030.00	24,520.00	27,100.00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,450.00	3,650.00	4,040.00	4,290.00	4,740.00
6.	Konstruksi	2,556,620.00	2,562,180.00	2,869,880.00	3,214,660.00	3,494,630.00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,014,810.00	4,589,150.00	4,691,520.00	5,000,290.00	5,250,800.00
8.	Transportasi dan Pergudangan	615,010.00	727,110.00	807,760.00	877,800.00	941,570.00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	162,080.00	200,380.00	235,070.00	260,520.00	280,820.00
10.	Informasi dan Komunikasi	198,540.00	234,990.00	270,710.00	294,250.00	333,680.00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	578,400.00	366,130.00	355,030.00	365,890.00	374,030.00
12.	Real Estate	100,010.00	113,120.00	127,220.00	134,710.00	143,280.00
13.	Jasa Perusahaan	1,070.00	1,220.00	1,420.00	1,550.00	1,660.00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	474,550.00	494,470.00	524,620.00	541,620.00	552,870.00
15.	Jasa Pendidikan	96,840.00	122,920.00	142,980.00	149,540.00	155,250.00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,350.00	37,780.00	46,880.00	49,790.00	53,470.00
17.	Jasa lainnya	95,670.00	117,700.00	142,500.00	158,360.00	175,540.00
<b>PDRB</b>		<b>21,231,760.00</b>	<b>23,628,460.00</b>	<b>25,453,570.00</b>	<b>27,975,400.00</b>	<b>30,304,360.00</b>

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwaberdasarkan harga berlaku tahun 2013 Kota Dumai terus mengami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2017 yakni Rp.30,304 Triliun Rupiah jika

dibandingkan pada tahun sebelumnya. Adapun Kontribusi Sektoral PDRB 2011-2017 dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14 Kontribusi Sektoral PDRB 2013-2017

No	Sektor/Sub sektor	Kontribusi Sektoral (%)					Pergeseran (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
a.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	6.08	6.08	6.09	6.03	5.96	-0.62
b.	Pertambangan & pengalihan	0.44	0.46	0.47	0.44	0.39	-0.09
c.	Industri pengolahan	51.38	52.90	53.21	53.93	54.75	5.45
d.	Pengadaan listrik dan gas.	0.04	0.05	0.07	0.09	0.09	0.05
e.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00
f.	Bangunan	12.04	10.84	11.27	11.49	11.53	-0.80
g.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	18.91	19.42	18.43	17.87	17.33	-3.04
h.	Transportasi dan pergudangan	2.90	3.08	3.17	3.14	3.11	0.20
i.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0.76	0.85	0.92	0.93	0.93	0.26
j.	Informasi dan komunikasi	0.94	0.99	1.06	1.05	1.10	0.19
k.	Jasa keuangan dan asuransi	2.72	1.55	1.39	1.31	1.23	-1.21
l.	Real estate	0.47	0.48	0.50	0.48	0.47	-0.02
m, n	Jasa perusahaan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
o.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	2.24	2.09	2.06	1.94	1.82	-0.57
p.	Jasa pendidikan	0.46	0.52	0.56	0.53	0.51	0.04
q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.02
r, s, t, u	Jasa lainnya	0.45	0.50	0.56	0.57	0.58	0.14
Total		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

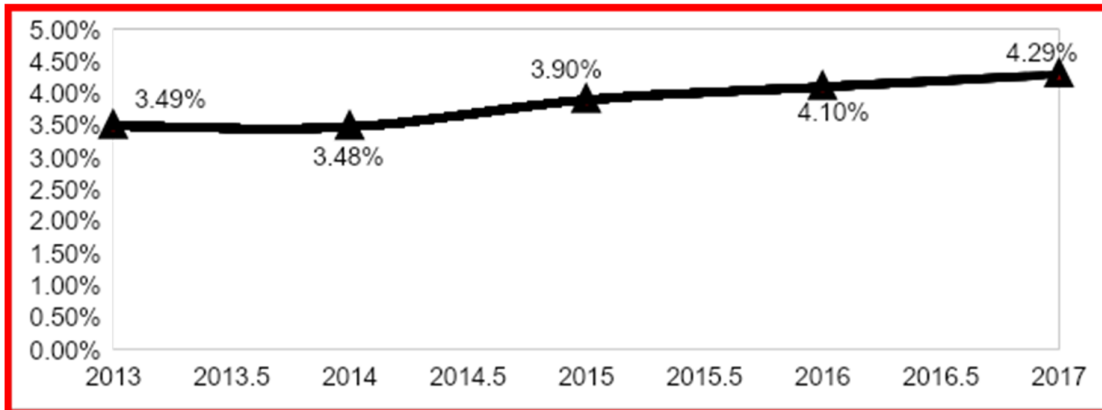
PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel 2.15 dan Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2017

Tabel 2.15 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2013-2017

TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB KOTA DUMAI (Juta Rp.)	21,231,760.00	23,628,460.00	25,453,570.00	27,975,400.00	30,304,360.00
PDRB PROVINSI RIAU (Juta Rp.)	607,498,450.00	679,395,859.00	652,761,631.00	682,290,500.00	705,678,593.00
Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)	3.49%	3.48%	3.90%	4.10%	4.29%

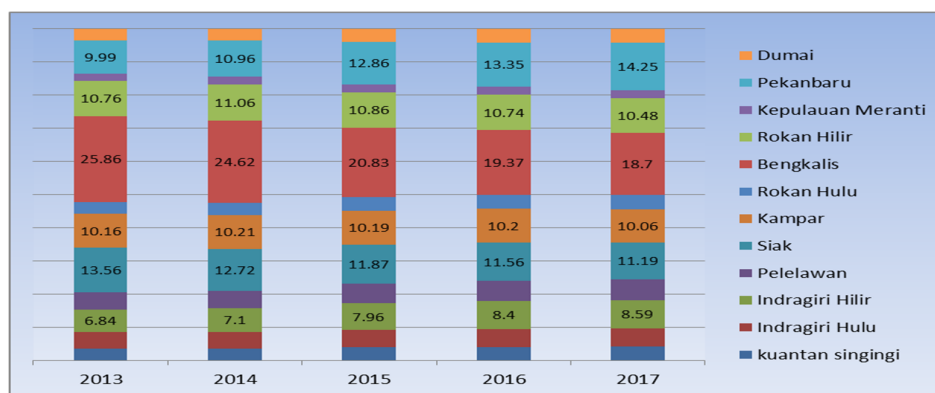
(Sumber : Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)





Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2013-2017 (Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

Dari tabel dan Gambar di atas terlihat bahwa peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2013-2017 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan besar kontribusi rata-rata 3-4%, namun besarnya kontribusi tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Riau tahun 2013-2017 berturut-turut adalah Kab. Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kab. Siak. Berikut gambar 2.7 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2013-2017



Gambar 2.7 Struktur Perekonomian Regional Antar Kabupaten/Kota Se- Riau Tahun 2013-2017 (Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

Struktur perekonomian sektoral digunakan untuk menganalisis peran sektor dalam pembangunan wilayah, dimana dominasi peran suatu sektor menunjukkan basis perekonomian wilayah. Struktur perekonomian sektoral

Kota Dumai tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.7. Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2017 struktur perekonomian Kota Dumai didominasi oleh peran sektor industri pengolahan dengan besar kontribusi rata-rata >50%. Artinya, identifikasi awal sektor utama di Kota Dumai sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah **sektor industri pengolahan**. Berdasarkan kriteria dari UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) berikut Kota Dumai masuk dalam kategori wilayah industri:

1. PDRB sektor industri <10%, wilayah non industri;
2. PDRB sektor industri 10-20%, wilayah memasuki proses industrialisasi;
3. PDRB sektor industri 20-30%, wilayah tergolong semi industri;
4. PDRB sektor industri >30%, wilayah industri.

Tabel 2.16 Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai  
Tahun 2013-2017

No	Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)					Pergeseran (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Sektor Primer	6.52	6.54	6.57	6.47	6.35	-0.71
2.	Sektor Sekunder	63.48	63.81	64.57	65.53	66.38	4.70
3.	Sektor Tertier	30.00	29.65	28.86	28.00	27.27	-3.99
<b>PDRB</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

## 2. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel 2.17 di bawah ini tersaji hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota Dumai

tahun 2013-2017 dimana Kota Dumai masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat** karena memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau

Tabel 2.17 Hasil Analisis Tipologi Klasen Kota Dumai Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	77,463.01	84,354.52	89,008.77	95,836.36	101,816.17
PDRB ADHB perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	100.6914412	109.7846371	102.8878105	104.952091	105.9909922
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	3,68	2,69	1,91	4,64	4,45
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,48	2,71	0,22	2,23	2,71
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang g cepat	Wilayah berkembang cepat

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

Pada Tabel 2.18 berikut tersaji perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dan persentasenya menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Dumai tahun 2013-2017.

Tabel 2.18 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Pengeluaran Perkapita Makanan</b>					
Nominal (Rp)	492.336	479.722	511.316	574.717	602.559
Persentase (%)	53,10	50,96	45,46	48,32	50,64
<b>Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan</b>					
Nominal (Rp)	434.894	461.705	613.344	614.756	587.256
Persentase (%)	46,90	49,04	54,54	51,68	49,36
<b>Jumlah Pengeluaran Perkapita</b>	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473	1.189.815

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2017 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 927.230,- menjadi Rp. 1.189.815,-. Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 53,10% pada tahun 2013 menjadi 50,64% di tahun 2017. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,90% pada tahun 2012 menjadi 49,36% di

tahun 2017. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

### 3. Tingkat Kemiskinan

Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2013-2017 fluktuatif seperti tersaji pada Tabel 2.19

Tabel 2.19 Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2013-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata per tahun
<b>Kota Dumai</b>						
Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	328.158	341.525	353.079	369.624	403.244	5,29
penduduk miskin(000 jiwa)	13,72	13,62	14,97	13,76	13,53	(0,35)
Persentase penduduk miskin (%)	4,98	4,83	5,26	4,74	4,57	(2,13)
<b>Provinsi Riau</b>						
Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	350.129	379.223	399.211	426.001	456.493	6,86
penduduk miskin (juta)	476,46	498,28	531,39	515,40	514,62	0,15
Persentase penduduk miskin	8,42	7,99	8,42	7,98	7,78	(1,96)

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

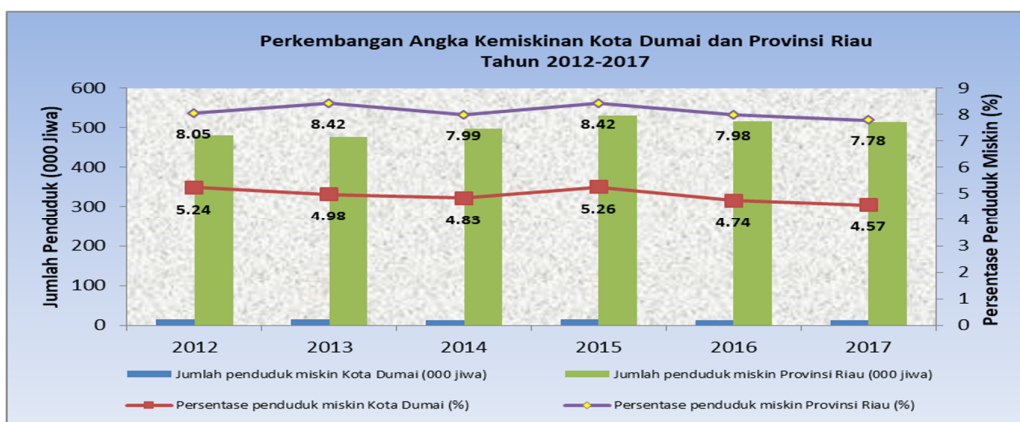
Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 4,98%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,13% menjadi 4,57% di tahun 2017. Sedangkan untuk garis kemiskinadan, Kota Dumai selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,29%, dari Rp. 328.158/ kapita/bulan pada tahun 2013 menjadi Rp.403.244,00/kapita/bulan di tahun 2017. Selama periode 2013-2017

tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau.



Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012-2017 (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

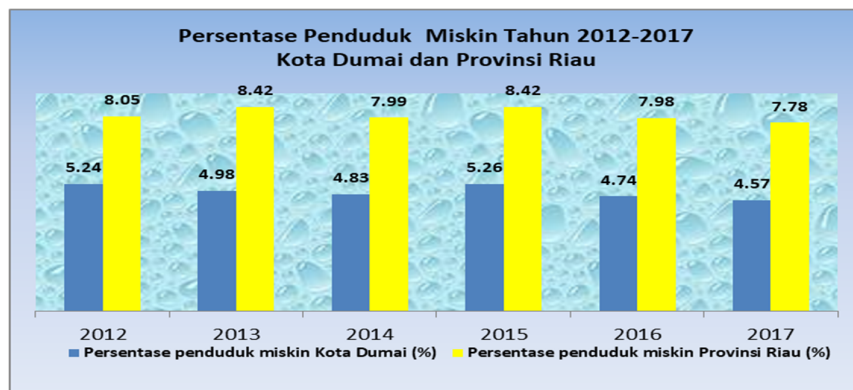
Seperti yang terlihat pada Gambar diatas dapat diasumsikan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2017 pemerintah kota dumai berhasil menekan tingkat kemiskinan sebesar 0,17%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kondusif diberbagai sektor. Berikut Gambar 2.9 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau.



Gambar 2.9 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin Provinsi Riau adalah 8,05%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan

tahunan sebesar 0,68% menjadi 7,78% di tahun 2017. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Dumai yang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,70%, 5,24% pada tahun 2012 menjadi 4,57% di tahun 2017. Berbeda dengan dua komponen kemiskinan sebelumnya, garis kemiskinan Kota Dumai selama periode 2012-2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,27%, Rp.311.891,00/ kapita/bulan pada tahun 2012 menjadi Rp.403.244,00/kapita/bulan di tahun 2017. Selama periode 2012-2017 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

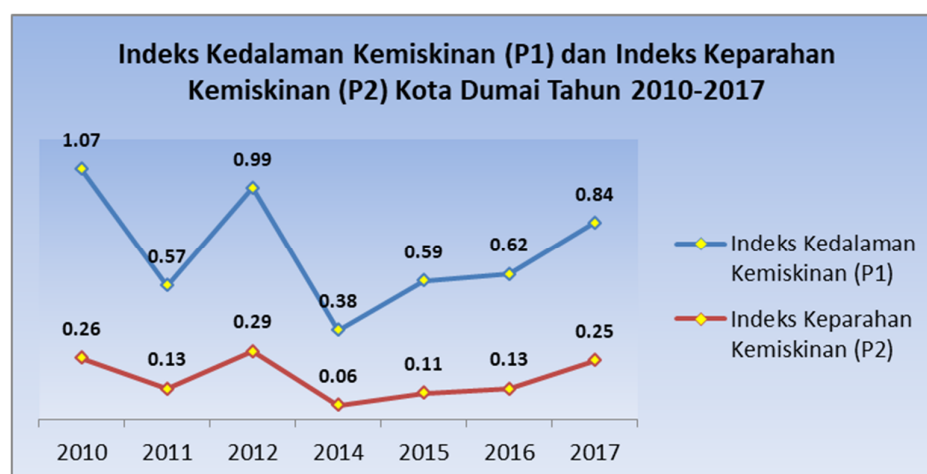
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tabel 2.20 dan Gambar 2.11 berikut tersaji perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012-2017 (tanpa data tahun 2013).

Tabel 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2017

Uraian	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,07	0,57	0,99	0,38	0,59	0,62	0,84
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,29	0,06	0,11	0,13	0,25

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)



Gambar 2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2010-2017  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

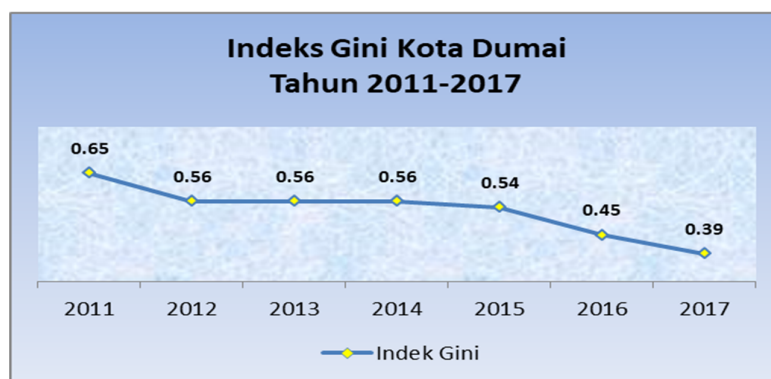
Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman tertinggi terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 1,07, kemudian turun menjadi 0,57 di tahun 2011, tetapi kembali memburuk



dengan angka indeks 0,99 di tahun 2012. Selama tiga tahun terakhir (2015-2017) angka indeks kedalaman kemiskinan Kota Dumai mengalami kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2012, hanya saja tetap perlu menjadi perhatian bersama khususnya Pemerintah Kota karena angka indeksnya cenderung mengalami peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode 2015-2017 angka indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,11 menjadi 0,25. Ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat.

#### 4. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin. Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2011-2017, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Berikut ini Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2011-2017.



Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2011-2017 (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

## 5. Inflasi

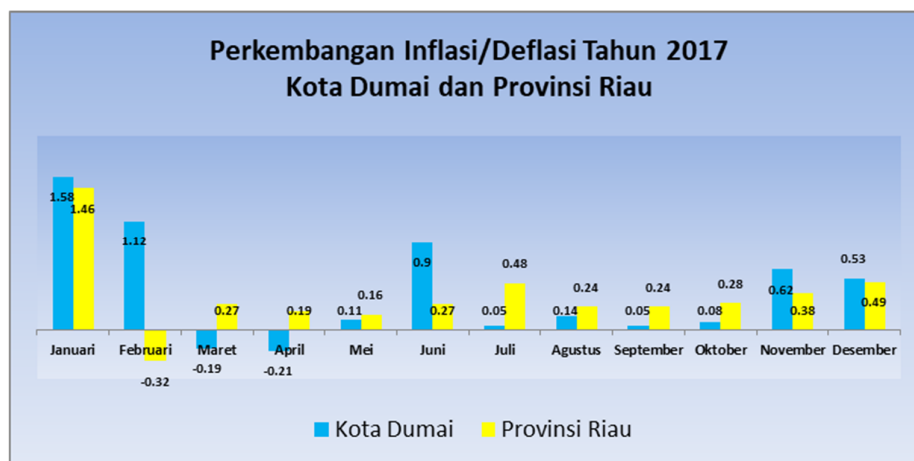
Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 (2012 = 100). IHK dengan tahun dasar tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup 2012 untuk menggantikan IHK tahun 2007 = 100, yang berlaku sejak bulan Juni tahun 2008. Pergeseran tahun dasar ini dimaksudkan agar IHK yang baru mampu mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di Indonesia, dan secara khusus diharapkan dapat menggambarkan tingkat inflasi. berikut tabel 2.21 menunjukkan perbandingan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2014-2017 dan Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Tabel 2.21 Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y)  
Tahun 2014-2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Bulan	Kota Dumai				Provinsi Riau			
	14	15	16	017	2014	2015	2016	2017
Bulanan:								
Januari	0,43	-0,37	0,65	1,58	0,80	-0,61	0,33	1,46
Februari	0,30	-0,68	0,32	1,12	0,11	-0,64	-0,34	-0,32
Maret	0,24	0,13	0,23	-0,19	0,15	-0,01	0,47	0,27
April	0,40	0,38	-0,64	-0,21	0,08	0,73	-1,10	0,19
Mei	0,14	0,98	0,06	0,11	0,16	0,53	0,20	0,16
Juni	0,66	0,59	0,79	0,90	0,58	0,70	0,43	0,27
Juli	0,83	0,78	0,46	0,05	0,96	0,61	1,06	0,48
Agustus	0,65	0,55	0,05	0,14	0,89	0,45	0,13	0,24
September	0,64	-0,23	0,64	0,05	0,42	-0,38	0,81	0,24
Oktober	0,42	0,11	0,47	0,08	0,54	-0,15	0,63	0,28
November	1,86	-0,02	0,82	0,62	1,98	0,32	1,15	0,38
Desember	1,66	0,39	0,07	0,53	1,69	1,08	0,23	0,49
Tahunan (Y on Y)	8,53	2,63	3,98	4,78	8,65	2,65	4,04	4,20

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)



Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Dari Tabel 2.21 diatas terlihat bahwa inflasi tahunan Kota Dumai selama kurun waktu 2014-2017 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2014 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi dibandingkan dengan tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2017 inflasi Kota Dumai mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,8% (dari 3,98% pada tahun 2016 menjadi 4,78% di tahun 2017). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Provinsi Riau yang menunjukkan kenaikan juga dari 4,04% pada tahun 2016 menjadi 4,20% pada tahun 2017. Kinerja perekonomian yang sudah membaik ini kemudian mulai memburuk lagi di tahun 2017 dengan angka inflasi tahunan sebesar 4,78% (meningkat 0,8%). Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2017 seperti yang tersaji pada Gambar 2.13 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama-sama terjadi di bulan Januari. Untuk Kota Dumai inflasi bulanan terendah terjadi di bulan April, sementara Provinsi Riau inflasi bulanan terendahnya terjadi di bulan februari. Secara umum tingkat inflasi bulanan yang terjadi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama, namun tingkat deflasinya sedikit berbeda antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau dimana Kota Dumai mengalami deflasi

terendah pada bulan April sementara Provinsi Riau terjadi pada bulan Februari.

## 6. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan produktivitas suatu wilayah dalam memberikan kesejahteraan dan perbaikan perekonomian bagi para pekerja yang berada dalam sektor-sektor pembentuk PDRB. Produktivitas total daerah diperoleh dengan membagi total PDRB dengan Jumlah total Pekerja yang bekerja pada sektor-sektor pembentuk PDRB. Karena keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki, maka produktivitas total daerah Kota Dumai yang dapat diukur adalah produktivitas total daerah Kota Dumai tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Produktivitas Total Daerah} &= \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}} \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}} \\ &= (25.430.569,61 \times 10^6) / 117.280 \\ &= 216.836.371,16\end{aligned}$$

Produktivitas menunjukkan nilai rupiah yang diterima pekerja yang bekerja diseluruh sektor pembentuk PDRB. Analisis komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas total daerah dengan pendapatan perkapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi dan besar produktivitas suatu sektor, semakin besar perannya bagi pembangunan.

## 7. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi

pembangunan sitem pendidikan di berbagai jenjang. Rata rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut cenderung meningkat selama tahun 2010-2017. Berikut table 2.22 Menampilkan angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018.

Tabel 2.22 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Dumai	11.87	12.07	12.27	12.40	12.46	12.75	12.97	12,98

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Selama periode 2010-2017 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2017 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96 ; 73,46. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut table 2.23 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017.

Tabel 2.23 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017

Cakupan Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46
Provinsi Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

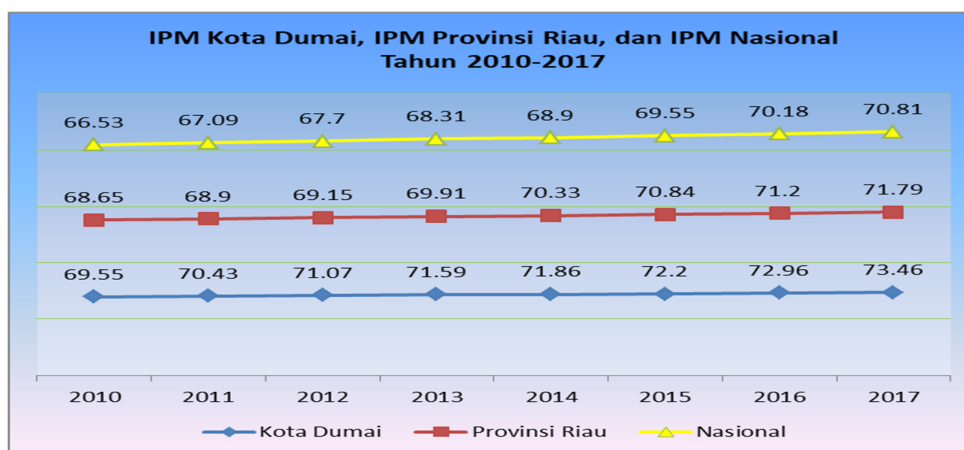
Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2010-2017, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.23 dibawah. Pada tahun 2017, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu:

Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 2.22 di atas. Pada tahun 2017 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 73,46 ; 71,79 ; 70,81. Berikut tabel 2.23 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017 dan Gambar Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2017.

Tabel 2.24 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17
Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70
Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97
Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)



Gambar 2.14 Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2017

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

### **2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

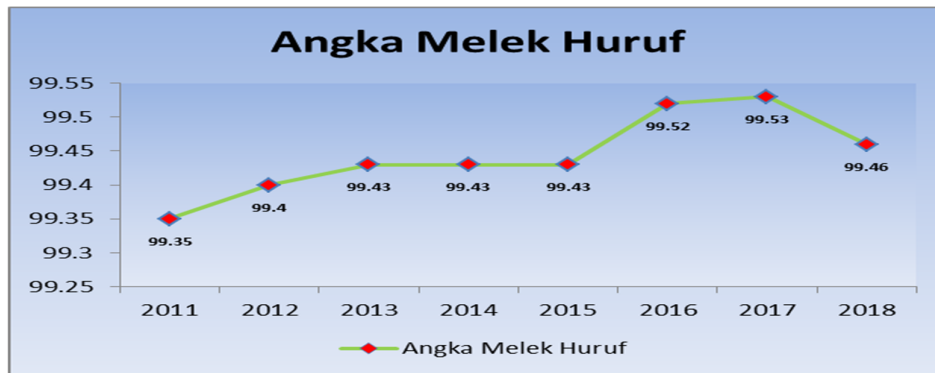
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap sektor Pendidikan dengan indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:

#### **A. Pendidikan**

##### **1. Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan tren yang sangat baik, namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2011 angka melek huruf sebesar 99,35%, dan pada tahun-tahun berikutnya, selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Angka melek huruf pada tahun 2013-2015 konstan pada angka 99,43%, hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Berikut Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018.

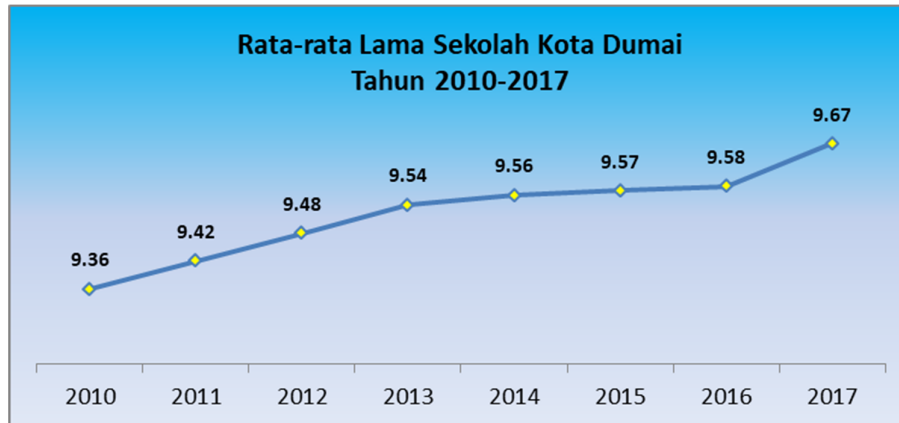




Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018  
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019)

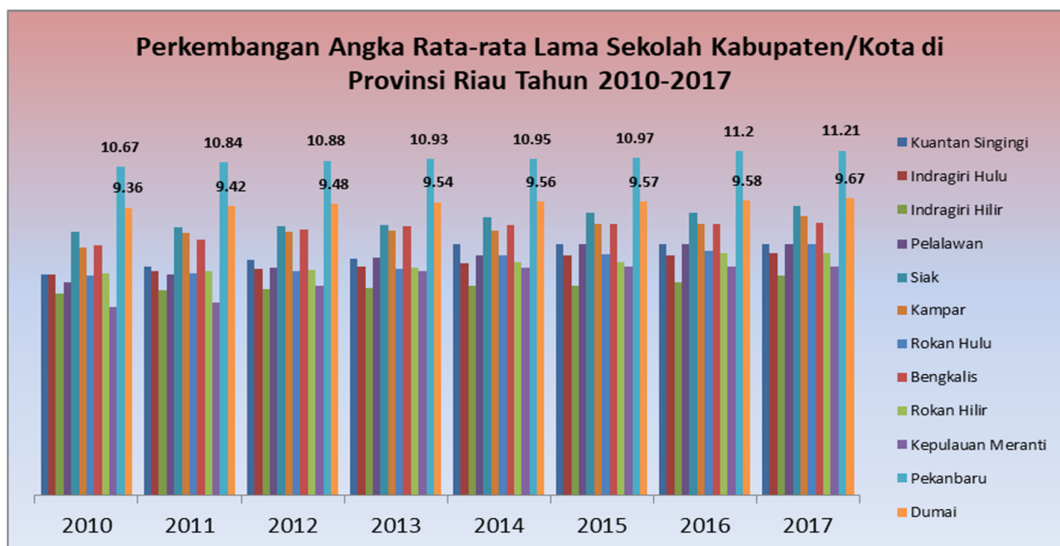
## 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partisipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijazah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2017



Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2017  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2017 terus mengalami peningkatan. menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Dumai terus meningkat dalam membiayai pendidikan. Secara tingkat Provinsi Riau, untuk angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai menempati urutan nomor 2 setelah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa kota dumai menjadi pondasi terpenting dalam pembangunan manusia dari sisi Pendidikan. Berikut Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017.

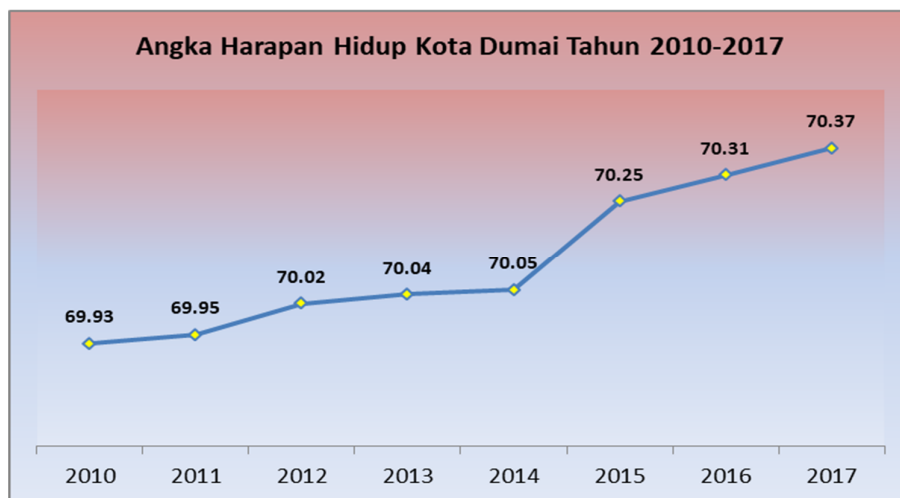


Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

### 3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.18. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2017

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## **A. Kesehatan**

### **1. Persentase Balita Gizi Buruk**

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi.

Selama tahun 2010–2017 realisasi capaian persentase balita gizi buruk adalah 0,01%. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.25 Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Sumber Dana	2015	2016	2017	2018
APBD Kota Dumai	66.113	64.514	64.949	66.200
APBN	62.158	62.158	61.414	61.166
Jumlah	128.271	126.672	126.363	127.366

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

Pada tahun 2018 terdapat 127.366 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai. Dengan kata lain, pada tahun 2018 sekitar 42% penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator- indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

#### A. Seni Budaya

Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras

serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD	107	5	5	5	66	102	103
Persentase		5%	5%	5%	63%	95,33%	96,26%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2019)

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal.

Tabel 2.27 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMP/MTs	37	23	23	24	28	28	28
Persentase		66%	66%	69%	80%	75,67%	75,67%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2018 di tingkat Sekolah Dasar baru mencapai 96,26% sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 75,67% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum muatan lokal pada Pendidikan dasar pada tahun 2018 adalah sebesar 85,97%.

Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dasar/MI	Sekolah Dasar yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib									
		2014		2015		2016		2017		2018	
Membaca Yasin Bersama	105	68	64%	68	64%	70	65%	91	85%	92	86%
Sholat Zuhur Berjamaah		34	32%	43	40%	46	43%	50	48%	51	48%
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		89	83%	89	83%	92	86%	97	91%	99	93%
Berdoa setiap memulai pelajaran		95	89%	95	89%	98	92%	101	94%	102	95%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2019)

Apabila data diatas dirata-ratakan, maka rata-rata implementasi nilai-nilai agama pada Pendidikan dasar dapat disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.29 Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Implementasi kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib	67%	69%	71%	79,21%	80,37%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2018 adalah sebesar 80,37%.

Tabel 2.30 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dsar/MI	Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib									
		2014		2015		2016		2017		2018	
Membaca Yasin Bersama	35	28	78%	29	81%	31	86%	91	85%	92	86%
Sholat Zuhur Berjamaah		18	50%	19	53%	23	64%	50	48%	51	48%
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		23	64%	25	69%	31	86%	97	91%	99	93%
Berdoa setiap memulai pelajaran		30	83%	31	86%	33	92%	101	94%	102	95%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2019)

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2018 adalah sebesar 80%.

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pada Tabel 2.31 berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2018.

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Tahun 2018

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian Kinerja 2017	Realisasi sampai Tahun 2017	Capaian Kinerja
Sanggar seni dan budaya yang dibina	85 sanggar	40 sanggar	47,06

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian Kinerja 2017	Realisasi sampai Tahun 2017	Capaian Kinerja
Jumlah grup kesenian	40	35	87,50
Jumlah Gedung Kesenian	1	0	0

(Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019)

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya dari target 85 sanggar yang dibina hanya terealisasi 40 sanggar yang dibina. Untuk jumlah grup kesenian dari target 40 grup kesenian hanya terealisasi 35 grup. Sedangkan pembangunan 1 (satu) gedung kesenian belum terealisasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan.

Jumlah grup kesenian yang terbanyak ada di Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 76 grup seperti yang tersaji pada Tabel 2.32. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 (enam) gedung kesenian di Provinsi Riau.

Tabel 2.32 Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
Kuantan Singingi	10	1
Indragiri Hulu	24	-
Indragiri Hilir	3	1
Pelalawan	1	-
Siak	2	-
Kampar	76	-
Rokan Hulu	24	-
Rokan Hilir	3	1
Bengkalis	3	1
Kep. Meranti	3	-
Pekanbaru	7	2
Dumai	1	-
Jumlah	158	6

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2019)

Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah

disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam mendukung Misi ke 7 (tujuh) yaitu ***"Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu"***. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan jati diri dan kebudayaan Melayu harus menjadi isu terpenting dalam pembangunan Kota Dumai ke depan.

## **B. Olahraga**

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya. Pada Tabel 2.33 berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabor dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.33 Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	9	28	32	114
Jumlah klub olahraga	Klub	0	112	112	100

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada di Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau

Kabupaten / Kota	Fasilitas Olahraga					
	Stadion	GOR	Padang & Lapangan	Hall	PKM	Kolam & Danau
Kuantan Singingi	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Indragiri Hilir	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Pelalawan	-	Pangkalan Kerinci	-	-	-	-
Siak	-	Sepatu Roda	-	-	-	-
Kampar	-	Kampar (Pencak Silat)	Labersa (Golf)	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	PAS (Bela Diri Tarung Drajat)	-	-
Pekanbaru	1. Grand Stadion-UNRI (Sepak Bola) 2. Kaharudin Nasution Rumbai (Sepak Bola) 3. SC Rumbai (Hockey) 4. SC Rumbai (Athletic)	1. Remaja (Bulu Tangkis) 2. Angkasa (Bulu Tangkis) 3. SC Rumbai (Senam) 4. Tribuana (Karate)	1. Chevron (Soft Ball) 2. UNRI (Kawasan Olahraga) 3. UNRI (Panjat Tebing) 4. UIR Panahan	1. SC Rumbai (Basket) 2. SC Rumbai (Renang) 3. SC Rumbai (Menembak) 4. SC Rumbai (Volly Ball) 5. UIR Volly Ball	1. UNILAK (Anggar) 2. UNRI (Yudo) 3. UIN (Taekwondo) 4. UIR (Gulat)	Danau Buatan (Sky Air)
Dumai	-	-	Chevron (Tennis Meja)	-	-	Sasana Tirta Pertamina (Renang)

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019)

## 2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

#### A. Pendidikan

##### 1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2011 hingga 2018, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 96. Angka ini menunjukkan ada sekitar 96 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 107 hal ini berarti terdapat sekitar 107 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs antara tahun 2011 hingga tahun 2018 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2011 menunjukkan nilai 44 dan pada tahun 2018 naik menjadi 55.

Tabel 2.35 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Tingkatan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs</b>								
SD/MI	96	106	101	107	106	108	107	107
SMP/MI	50	51	51	54	53	55	55	55
<b>Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas</b>								
SD/MI	1:32	1:36	1:37	1:38	1:38	1:34	1:34	1:34
SMP/MTs	1:43	1:44	1:35	1:41	1:41	1:33	1:33	1:33

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2010 adalah sebanyak 33.983 siswa dan terjadi kenaikan sebanyak 4.216 siswa pada tahun 2018 yakni menjadi 38.199 siswa. Jumlah ruang kelas juga terdapat

penambahan, pada tahun 2010 terdapat 954 ruang, kemudian bertambah sebanyak 202 ruang pada tahun 2018 menjadi 1.156 ruang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2018 yakni 1:34 artinya 1 ruang kelas manampung 34 siswa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih kekurangan ruang kelas jenjang SD.

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah siswa di tahun 2010 adalah sebanyak 13.102 siswa. Terjadi kenaikan jumlah siswa pada tahun 2018 menjadi 16.061 siswa. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan yakni 308 ruang pada tahun 2010 menjadi 487 ruang pada 2018. Pada Tabel 2.36 diatas juga dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa per jumlah ruang kelas menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dari 1:42 tahun 2010 menjadi 1:33 pada tahun 2018. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih kekurangan ruang kelas jenjang SMP.

Disamping belum terpenuhinya rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP, jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kota seperti data yang tersaji pada Tabel 2.36. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Dari tabel 2.36 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per kecamatan. Di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang jauh dari perkotaan. Hal ini juga terjadi karena

tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

Tabel 2.36 Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Sekolah (unit)		Jumlah Siswa (orang)		Jumlah Guru (orang)		Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah		Rata-rata Jumlah Guru per Sekolah	
	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
Bukit Kapur	19	12	6.551	2.518	327	171	345	209	17	14
Dumai Barat	10	6	4.297	2.119	235	146	430	353	24	24
Dumai Kota	11	6	4.481	1.967	252	125	407	328	23	21
Dumai Selatan	15	11	6.233	4.004	334	259	416	364	22	24
Dumai Timur	27	8	10.367	3.165	567	194	384	396	21	24
Medang Kampai	8	4	1.984	608	124	68	248	152	16	17
Sungai Sembilan	22	9	5.405	1.680	352	125	246	187	16	14

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, data diolah)

## 2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APK SD/MI	>100	>100	107,27	107,20	107,79	111,92
APK SMP/MTs	>100	>100	89,67	91,58	100,18	95,60

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2018)



Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2012 hingga tahun 2017 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun untuk APK jenjang SMP/MT mengalami tren perkembangan yang selalu fluktuatif dikarenakan berbagai faktor.

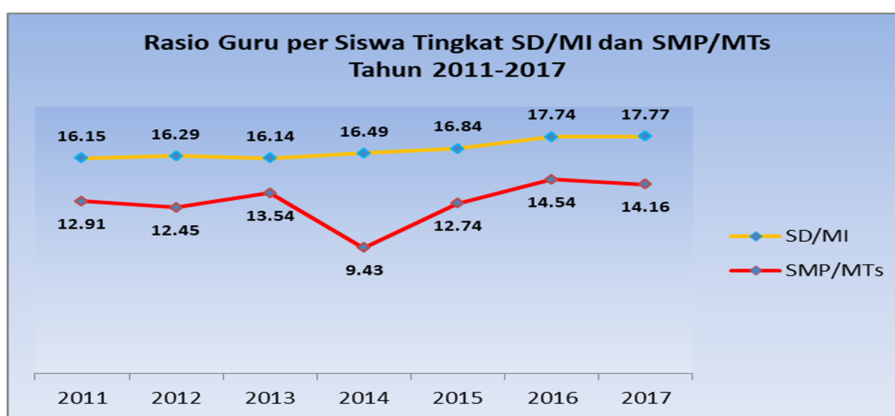
### **3. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs**

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2010 terdapat 2.240 orang guru SD di Kota Dumai dengan jumlah siswa sebanyak 47.895 orang.

Sedangkan di tahun 2018 terdapat 2.191 orang guru SD/MI dengan jumlah siswa sebanyak 39.318 orang. Berdasarkan data-data tersebut maka untuk tingkat SD/MI rasio guru per siswa pada tahun 2010 adalah 1:15,28, dimana rasio guru per siswa ini meningkat menjadi 1:17,95 di tahun 2018. Angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 adalah 1:20. Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2010-2018 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008, namun angkanya kian meningkat seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.19. Peningkatan ini diduga disebabkan oleh terkonsentrasinya jumlah siswa pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Akibatnya di daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio murid guru dalam rentang antara tahun 2010 hingga tahun 2018 tren perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah guru SMP/MTs adalah 1.167 orang dan jumlah siswa

sebanyak 13.679 orang dengan rasio guru per siswa 1:11,72. Pada tahun 2018 jumlah guru sebanyak 1.088 orang dan jumlah siswa 16.061 orang dengan rasio guru per siswa sebanyak 1:14,76. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20) terpenuhi, namun terjadi peningkatan rasio murid/guru dari tahun 2010 sebesar 1:11,72 menjadi 1:14,76 di tahun 2018. Hal ini disebabkan bahwa jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan sekolah di daerah pinggiran.



Gambar 2.19 Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

#### 4. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

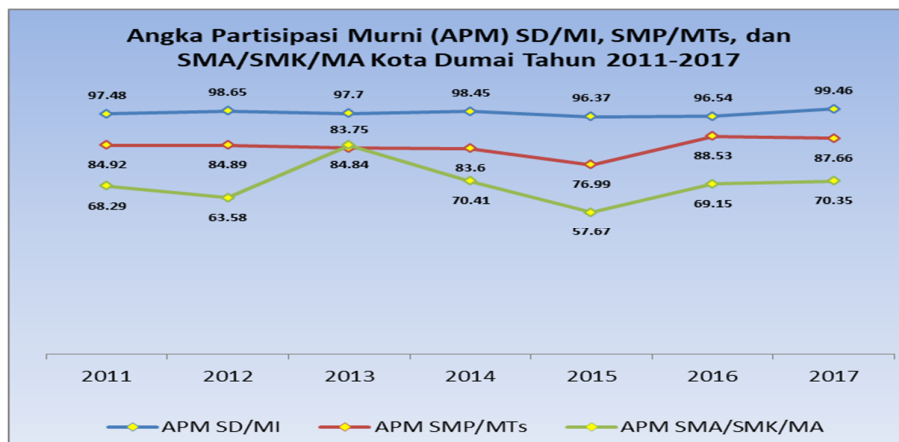
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APM SD/MI	98,65	97,70	98,45	96,37	96,54	99,46
APM SMP/MTs	84,89	83,75	83,60	76,99	88,53	87,66

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2012 hingga tahun 2017 fluktuatif. Pada tahun 2012, nilai APM SD/MI adalah sebesar 98,65%, kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif sampai tahun 2017 dengan angka partisipasi murni di tahun 2017 sebesar 99,46%. Sama halnya dengan nilai APM SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2012-2017. Secara umum nilai APM SD/MI tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.38 diatas.

Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.



Gambar 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## 5. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam persentase. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu misalnya perguruan tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Tabel 2.39 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tdk/Belum Pernah Sekolah	NA	NA	32,10%	34,30%	9,38%	9,41%	9,67%
Tidak/Belum tamat SD			11,00%	10,30%			
SD/MI/Sederajat			16,80%	16,20%	30,70%	15,53%	16,21%
SLPT/MTs			12,20%	12,00%	13,34%	11,57%	11,92%
SMA/SMK			22,40%	21,90%	36,74%	22,30%	23,26%
D I/II			0,60%	0,60%	0,85%	0,52%	0,59%
AKADEMI/D III			1,80%	1,70%	2,54%	1,78%	1,88%
S1/Sarjana			3,00%	2,90%	6,45%	3,21%	3,46%
S2/S3/Pasca Sarjana			0,10%	0,10%			

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum sampai tahun 2018 persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SMA/SMK. Selama 6 tahun, mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Pada tahun 2018 sebanyak 23,26% penduduk Kota Dumai menamatkan pendidikan SMA/SMK. Disamping itu jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD

atau tidak pernah sekolah sama sekali menurun drastis dari  $\pm 45\%$  menjadi 9,67%. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah daerah, antara lain dengan program pendidikan gratis juga mampu mendorong hal ini.

Dua hal yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Dumai diantaranya: (1) masih ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau belum lulus jenjang pendidikan SD; dan (2) masih rendahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi DI/DII/DIII/IV/S1/S2/S3. Rendahnya persentase lulusan pendidikan tinggi ini bisa disebabkan oleh kurangnya perguruan tinggi yang tersedia di Kota Dumai, juga rendahnya akreditasi perguruan tinggi yang ada sehingga banyak lulusan SMA/SMK/MA yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kota Dumai. Ketersediaan jumlah perguruan tinggi beserta akreditasinya ini juga akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang berpotensi, terampil dan mampu berdaya saing.

#### **6. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**

Indikator ini sama dengan indikator angka melek huruf pada pokok bahasan fokus kesejahteraan masyarakat bagian pendidikan.

#### **7. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik**

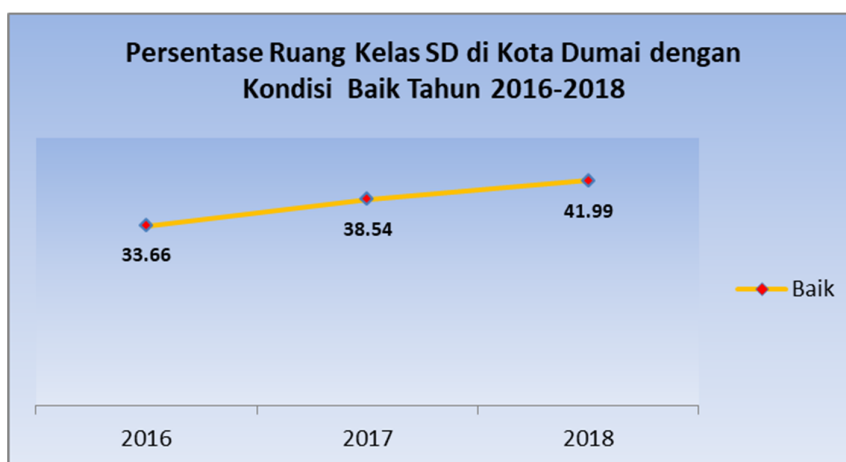
Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2017 mengalami perkembangan dibandingkan

dengan tahun 2015, yang artinya semakin banyak ruang kelas dalam kondisi baik. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Persentase ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2016 hanya sebesar 33,66%, . Pada tahun 2018 persentasenya naik menjadi 41,99% seperti yang tersaji pada Tabel 2.40 dan Gambar 2.21.

Tabel 2.40 Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2016-2018

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)			PERSENTASE RUANG KELAS (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
BAIK	437	446	443	33,66	38,54	41,99
RUSAK RINGAN	638	655	557	59,51	56,26	52,80
RUSAK BERAT	59	56	55	6,83	5,20	5,21
JUMLAH	1134	1157	1055	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)



Gambar 2.21 Persentase Ruang Kelas SD/MI di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2016-2018

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2019

## 8. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

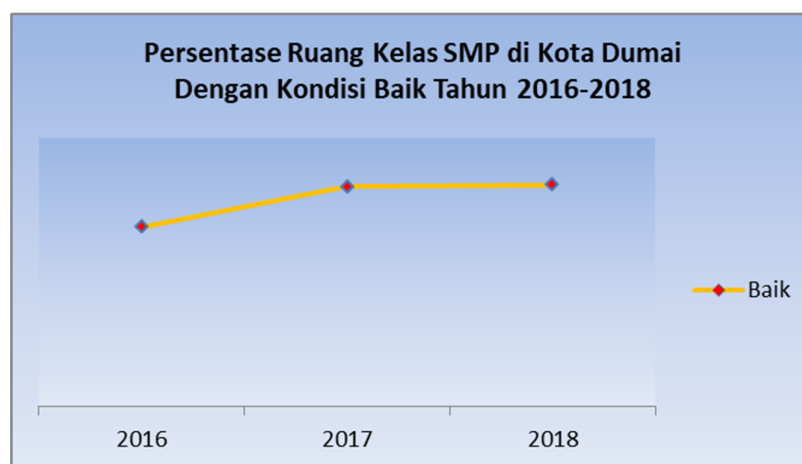
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun 2018 menunjukkan tren perkembangan yang menurun dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas untuk jenjang SMP dalam kondisi baik sebesar 20,05% dan pada tahun 2018 persentasenya mengalami penurunan menjadi 24,74%. Ruang kelas SMP dari tahun 2016

sampai tahun 2018 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pembuat kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Tabel 2.41 Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2016-2018

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)			PERSENTASE RUANG KELAS (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
BAIK	81	105	94	20,05	24,53	24,74
RUSAK RINGAN	316	310	270	78,22	72,43	71,05
RUSAK BERAT	7	13	16	1,73	3,04	4,21
JUMLAH	404	428	380	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)



Gambar 2.22 Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2016-2018

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)

## 9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4 sampai 6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah TK dan sederajat berjumlah 50 sekolah, pada tahun 2018 menjadi 128 sekolah. Dengan semakin

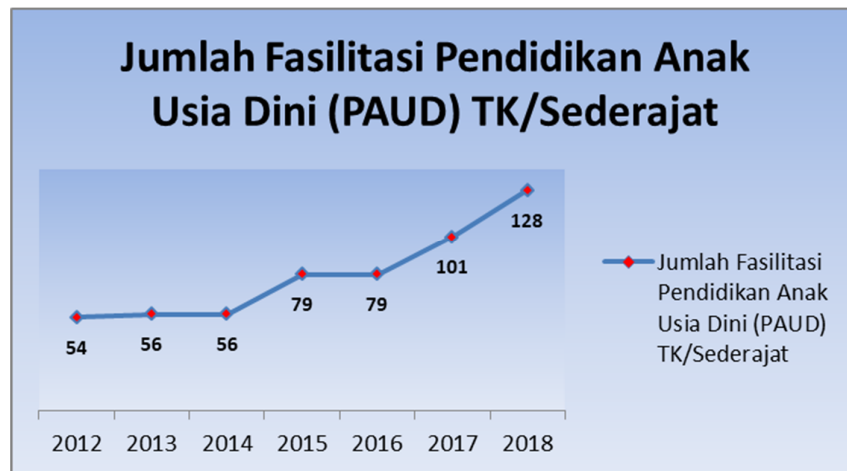


bertambahnya jumlah PAUD atau TK maka mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di kota Dumai semakin meningkat.

Tabel 2.42 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2012 - 2018

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Sederajat	54	56	56	79	79	101	128

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)



Gambar 2.23 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2012-2018

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)

## 10. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2014, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan, artinya persentase siswa yang putus sekolah semakin besar dan dalam kurun waktu antara 2015 hingga tahun 2018 tren perkembangan angka sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya penurunan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2011 adalah sebesar 0,05%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,26% dan pada

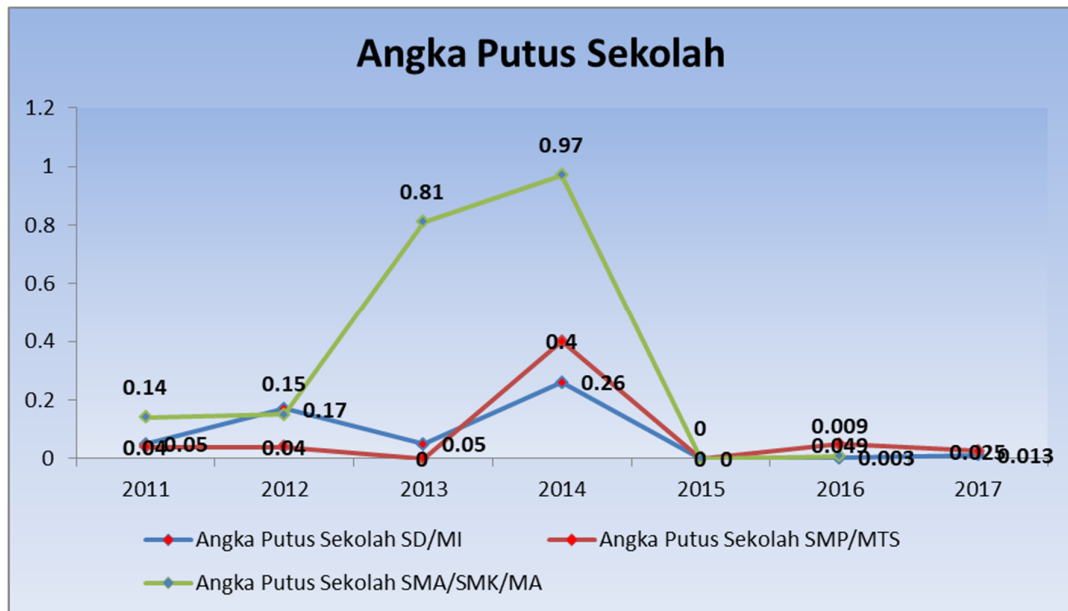
tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami penurunan menjadi 0,09%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2011 angka putus sekolah adalah sebesar 0,04%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,40% dan pada tahun 2018 angka putus sekolah mengalami penurunan menjadi 0,025%. Sedangkan pada jenjang SMA, angka putus sekolah yang awalnya 0,14% pada tahun 2011 naik menjadi 0,97% pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,009%. Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2015, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Untuk angka putus sekolah SD/MI/ dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2010-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.43 dan Gambar 2.24 berikut.

Tabel 2.43 Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai Tahun 2011-2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,05	0,17	0,05	0,26	0,00	0,003	0,013
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,04	0,04	0,00	0,40	0,00	0,049	0,025

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)



Gambar 2.24 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017  
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)

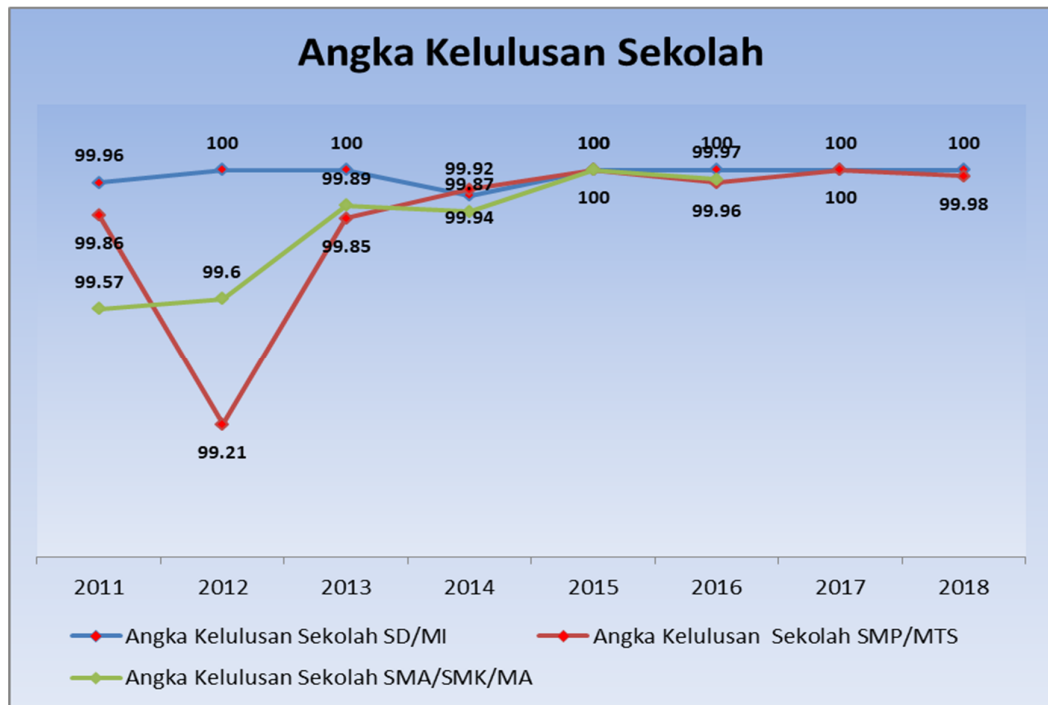
## 11. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2011 hingga tahun 2018, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2011 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 99,96% namun tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 100%. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2011 angka kelulusan 99,86% dan pada tahun 2018 angka kelulusan adalah sebesar 99,98%.

Tabel 2.44 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2017

Indikator	11	012	013	014	015	016	017	018
Kelulusan Sekolah SD/MI	99,96	100,00	100,00	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00
Kelulusan Sekolah SMP/MTS	99,86	99,21	99,85	99,94	100,00	99,96	100,00	99,98

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kkebudayaan Tahun 2019)



Gambar 2.25 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2018

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)

## 12. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

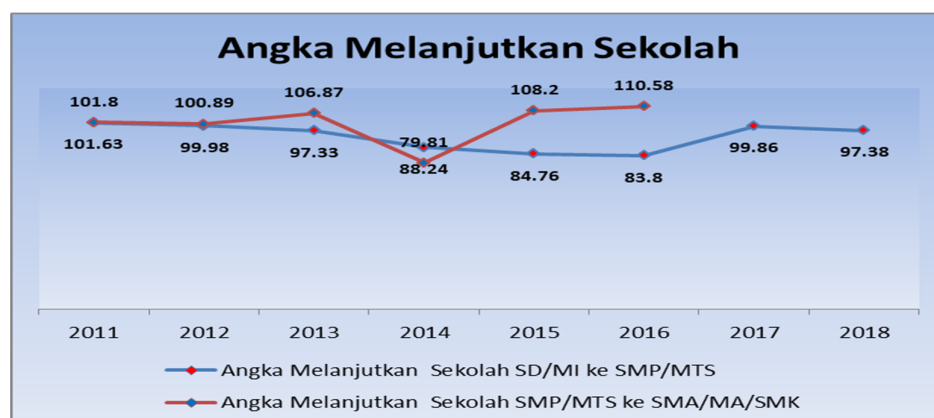
Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2011 hingga 2018 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2011 dengan nilai 101,63%. Pada tahun 2018 angka melanjutkan adalah sebesar 97,38%. Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dengan mulai

meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.45 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	101,63	99,98	97,33	88,24	84,76	83,80	99,86	97,38

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)



Gambar 2.26 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2010-2018

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)

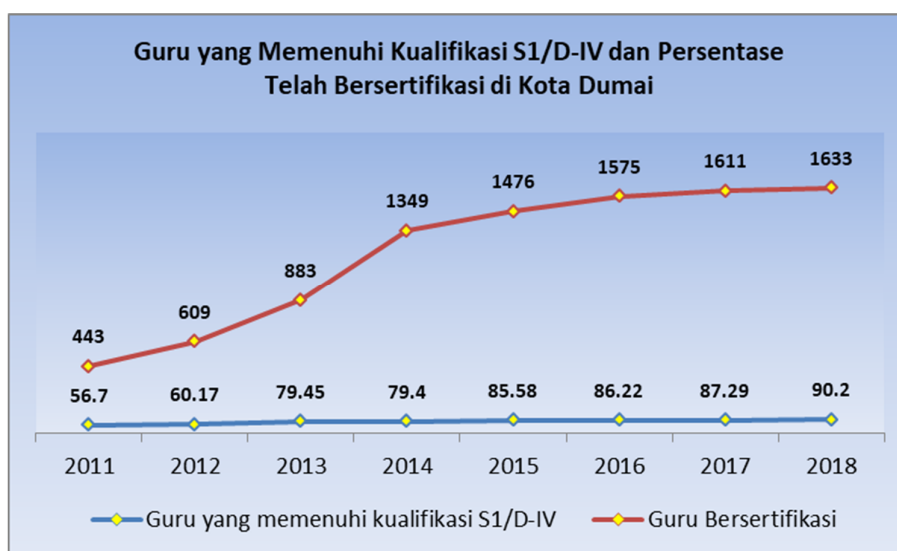
### 13. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2011 hingga tahun 2018 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2011 persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 56,7%, dan pada tahun 2018 menjadi 90,20.

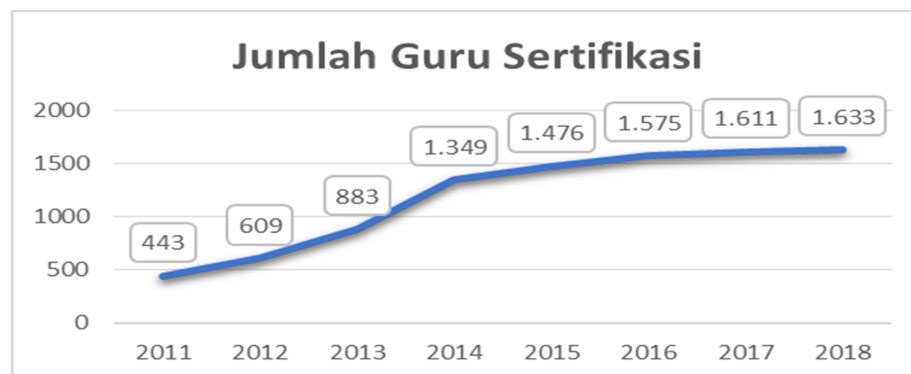
Tabel 2.46 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	56,7	60,17	79,45	79,40	85,58	86,22	87,29	90,20
Guru Bersertifikasi	443	609	883	1.349	1.476	1.575	1.611	1.633

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)



Gambar 2.27 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai  
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)



Gambar 2.28 Guru Bersertifikasi Tahun 2011-2018  
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019)

Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk

meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau murid, serta mempersiapkan murid untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

## **B. Kesehatan**

### **1. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2011-2018 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe C yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2011-2018 tersaji pada Tabel 2.47 gambar 2.33.

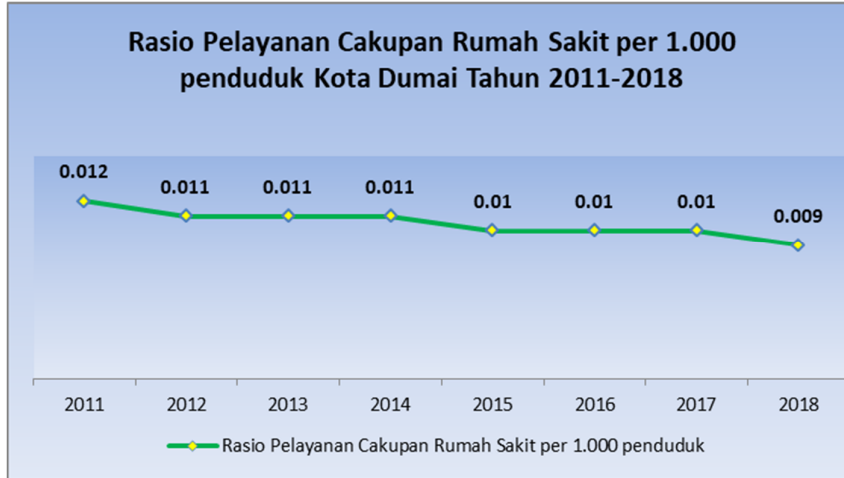
Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2011 adalah sebesar 0,012, tahun 2018 sebesar 0,009. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2011 ke tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2016, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,010 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.47 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3	3	3

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,012	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,009

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)



Gambar 2.29 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

## 2. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2011 sampai 2018 mengalami fluktuasi, dari 106 dokter pada tahun 2011 menjadi 162 dokter pada tahun 2017.

Tabel 2.48 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018

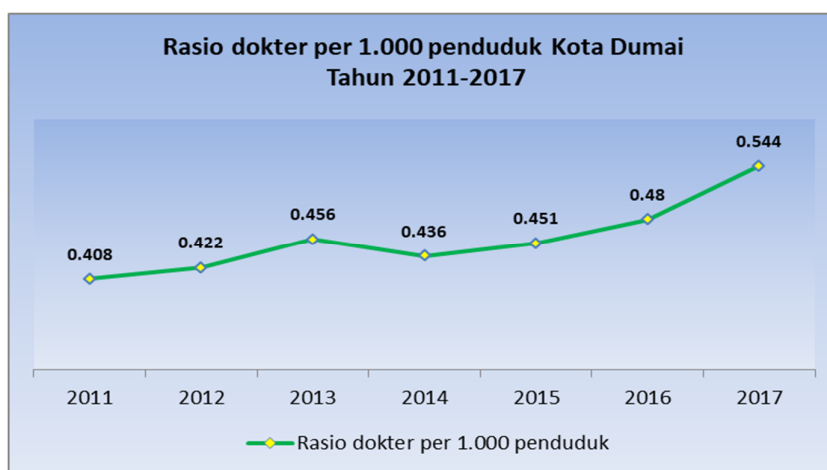
Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Dokter	106	113	125	122	129	140	162
Jumlah penduduk	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638
Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,408	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	0,544

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 0,544 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,544 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 1.838 penduduk. Jumlah



dokter di Kota Dumai mengalami fluktuasi, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Akan tetapi rasio itu kemudian turun menjadi 0,544 pada tahun 2017. Ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai, namun penambahan jumlah dokter yang melayani tidak seimbang dengan penambahan jumlah penduduk.



Gambar 2.30 Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2017  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

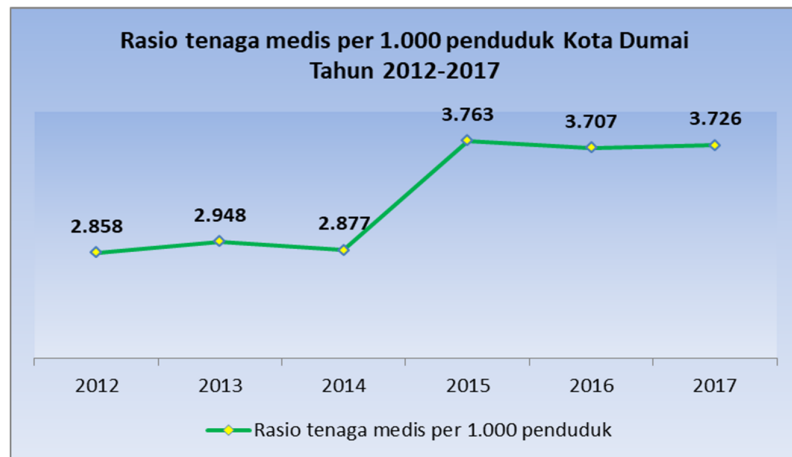
### 3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis di Kota Dumai meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2012 sampai dengan 2017, menunjukkan peningkatan dari 2,858 menjadi 3,726. Berikut ini tabel 2.49 dan Gambar 2.31 yang menunjukkan perkembangan rasio tenaga medis di Kota Dumai.

Tabel 2.49 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Tenaga Medis	766	808	806	1076	1082	1109
Jumlah penduduk	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	2.858	2.948	2.877	3.763	3.707	3.726

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)



Gambar 2.31 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2017

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit. Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain di Provinsi Riau seperti dari Bengkalis, dan Rokan Hilir. Pada tahun 2017 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.109 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 36 orang,

dokter umum sebanyak 72 orang dan dokter gigi sebanyak 23 orang. Jumlah tenaga medis ini bertambah sebanyak 12 orang dari tahun 2016. Dengan demikian pada tahun 2017 rasio dokter spesialis sebesar 12 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 24 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 8 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.50 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai

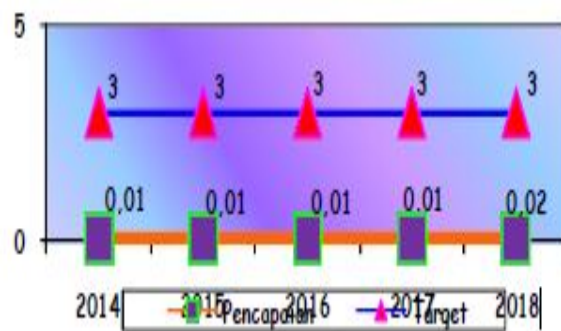
Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Dokter Spesialis	30	36	32
Dokter Umum	87	72	80
Dokter Gigi	23	23	21
Perawat	425	435	485
Bidan	314	331	336
Apoteker	41	38	21
Asisten Apoteker	17	19	37
Gizi	25	25	25
Sanitasi	10	10	9
Kesehatan Masyarakat	44	52	67
Teknisi Medis	81	68	67

(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2019)

Permasalahan penduduk pendatang atau illegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau illegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang.

Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)  $\leq 3$  standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis

marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2013 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2018 ditemukan 6 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu, Bukit Timah, Medang Kampai, Jaya Mukti dan Bukit Kayu Kapur. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2018 adalah 0,02%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 5 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2018 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Pada umumnya permasalahan kesehatan yang ada banyak merupakan kontribusi dari penduduk pendatang (ilegal) tersebut. Para penduduk pendatang (illegal) pada umumnya jarang mengakses pelayanan kesehatan dasar karena status mereka yang ilegal yang otomatis tidak mempunyai kartu identitas seperti KTP.



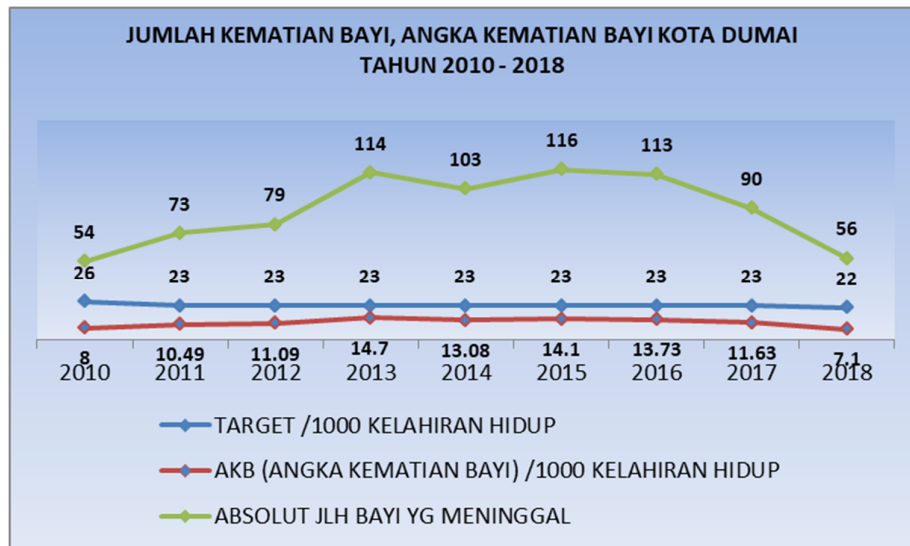
Gambar 2.32. Angka Prevalensi Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 (Sumber : Dumai dalam angka tahun 2018)

Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

#### **4. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran**

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Selama tahun 2010 – 2018 realisasi capaian Angka Kematian Bayi adalah sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2018 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2010-2018 pada Gambar 2.33. Pada tahun 2014 angka kematian bayi sudah menurun dari 14,70 di tahun 2013 menjadi 13,08 di tahun 2014, tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 14,10.

Kemudian terus mengalami penurunan sebesar 7,1 pada tahun 2018. Adapun Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.



Gambar 2.33 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2010-2018  
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

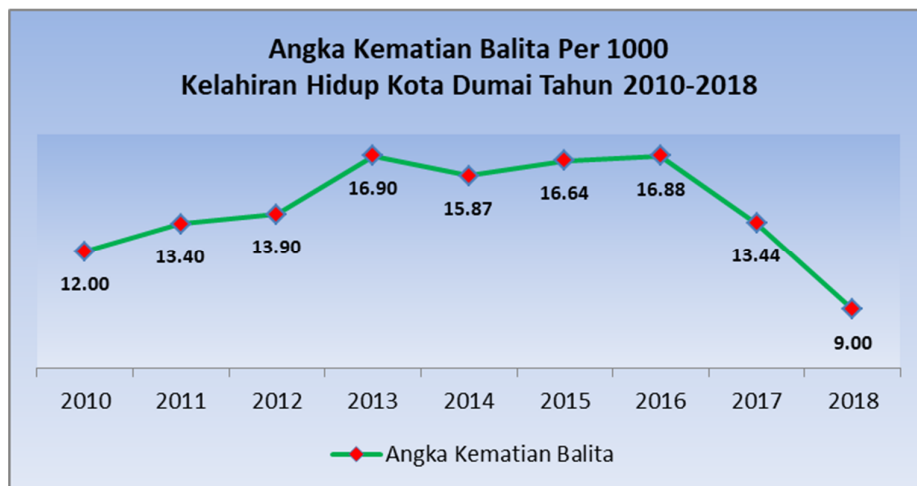
Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua.

##### 5. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 56 kasus dari 7.886 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kehidupan bayi di Kota Dumai sebesar 7.886 jiwa.

## 6. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2016 menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun 2014 angka kematian balita sudah menurun dari 16,90 di tahun 2013 menjadi 15,87 di tahun 2014, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 dan 2016 berturut-turut sebesar 16,64 dan 16,88, penyebab kematian balita masih didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia namun sejak tahun 2017 s.d tahun 2018 angka kematian balita berhasil ditekan menurun menjadi 9,00 pada tahun 2018 seperti yang tersaji pada Gambar 2.34.



Gambar 2.34 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2010-2018

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

## 7. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

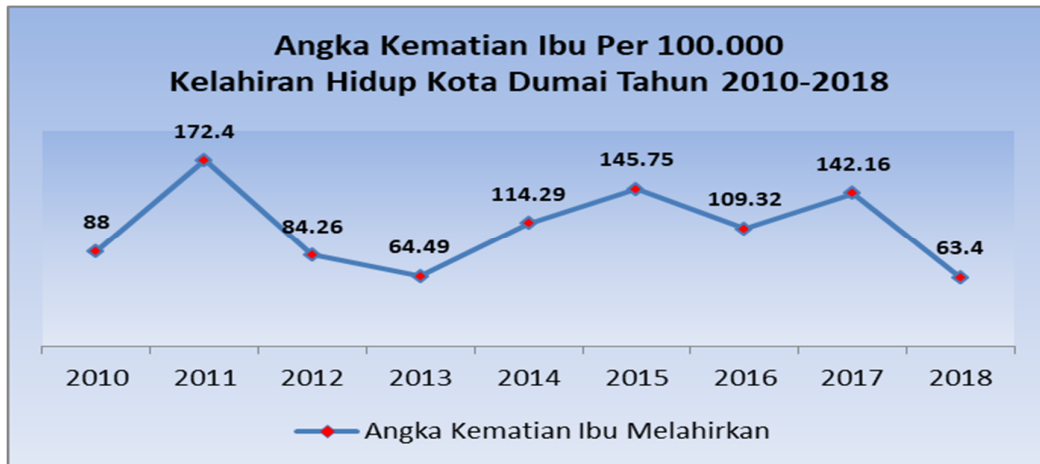
Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI

diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklamsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklamsi/pre eklamsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2018 dapat dilihat pada Gambar 2.35, adapun angka kematian ibu melahirkan di tahun 2018 adalah sebesar 63,40 per 100.000 kelahiran hidup.





Gambar 2.35 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2018  
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

Dari data angka kematian bayi dan ibu, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada kedua indikator tersebut. Hal ini terjadi karena data angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kota Dumai sulit untuk dipantau. Misal, kasus bayi yang sakit atau ibu yang melakukan persalinan di luar Kota Dumai karena tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai kemudian pindah ke Kota Dumai dan menggunakan fasilitas layanan kesehatan di Kota Dumai. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi.

#### **8. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes,

Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2010 hingga 2015 telah melewati target Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Menteri Kesehatan No 741/Menkes/Per/VII/2008, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Dumai sudah melebihi dari target nasional (80%).

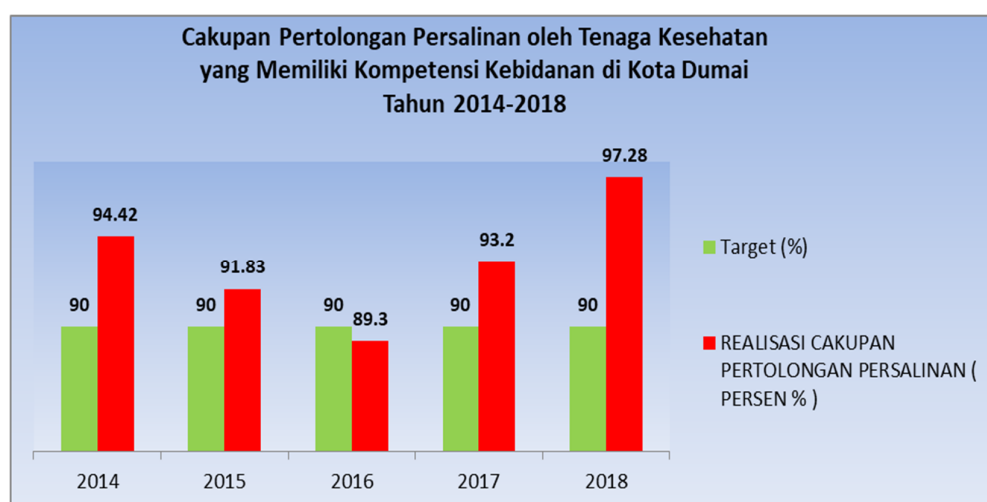
#### **9. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh

tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2011 sampai 2017 cenderung meningkat. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.

Gambar 2.36 di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung naik dari tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 angka cakupan tersebut sebesar 94,42%, dan pada tahun 2018 naik menjadi 97,28%.



Gambar 2.36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai  
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018)

Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2011 sampai 2018 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

## 10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

*Universal Child Immunization* (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

Untuk cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Berikut ini tabel cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai. Pada tahun 2012 sampai dengan 2014, cakupan kelurahan UCI telah mencapai 100%, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2014 seluruh desa/kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa

imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai , dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak.

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirrosis*) dan kanker hati. Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jelang waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan.

Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi dikota Dumai tersaji pada tabel sebagai berikut :

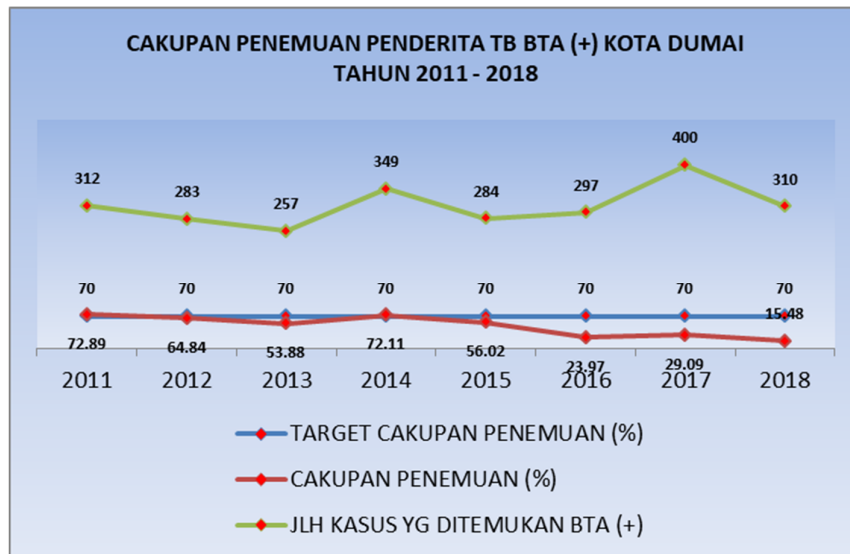
Tabel 2. 51Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2016–2017

No	Jenis Imunisasi	Tahun	
		2016	2017
1	BCG	98,88	87,93
2	Campak	69,74	68,34
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	86,78	83,11
4	Polio 1, Polio 2, Polio 3 dan Polio 4	91,52	87,15
5	Hepatitis B1, Hepatitis B2 dan Hepatitis B3	56,88	81,26

(Sumber: Dumai dalam angka tahun 2018)

### 11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penderita penyakit TBC yang meningkat justru merupakan nilai positif karena menunjukkan bahwa sistem surveilans di tingkat masyarakat telah optimal dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC untuk memeriksakan secara dini apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah pada penyakit TBC. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di kota Dumai berfluktuasi selama kurun waktu 2011-2018. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 100% pada tahun 2011, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Dumai belum mencapai target nasional. Berikut ini cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang disajikan dalam gambar 2.37 di bawah ini:



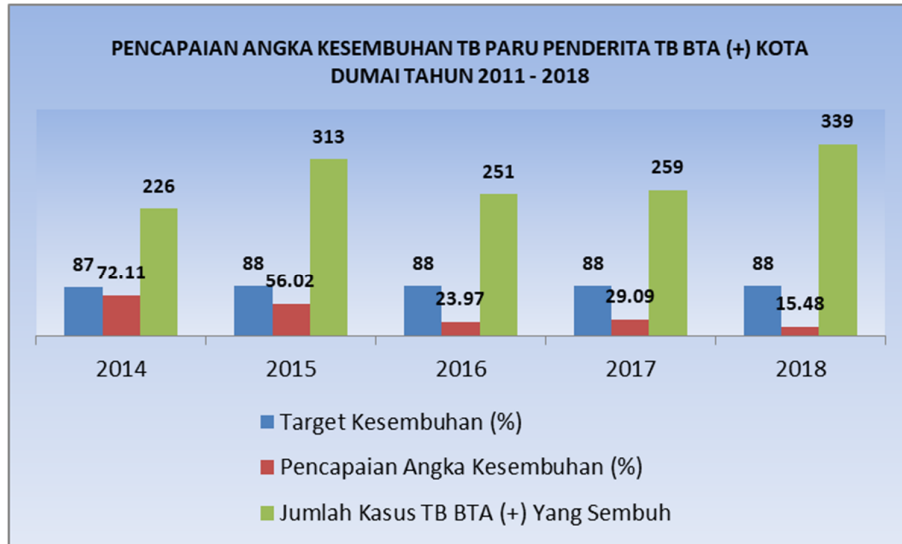
Gambar 2.37 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2019)

Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Penanganan kasus TBC ini perlu ada dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Karena penderita harus meminum obat selama 6 bulan berturut turut tanpa putus.

Faktor kebosanan dan kejenuhan akan timbul. Untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplin meminum obatnya.

Pada tahun 2018 dari total 310 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 339 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 85,39%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 86,87%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Apabila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2018 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut.

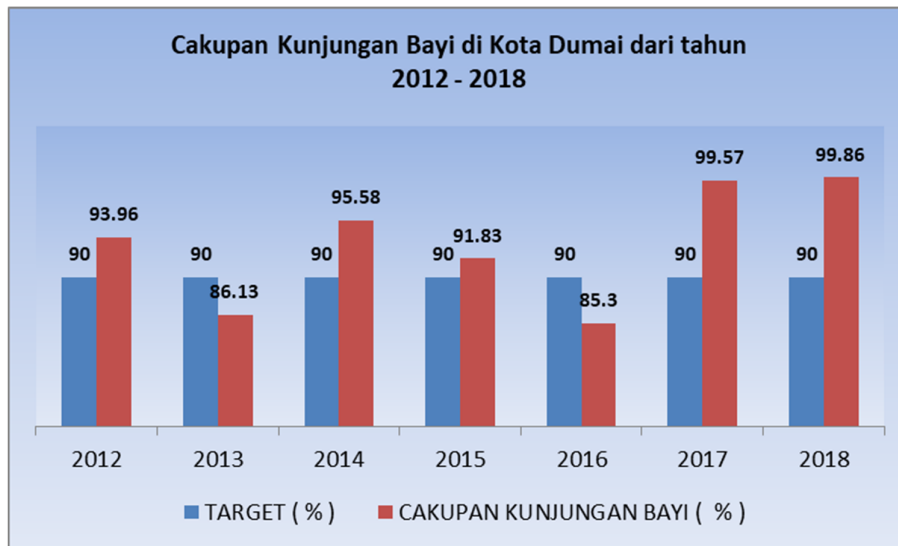


Gambar 2.38 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2018  
(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2019)

## 12. Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi sebesar 93,96% dan pada tahun 2018 sebesar 99,86%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut telah melebihi target.





Gambar 2.39 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai  
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

### 13. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer

d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.52 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2018

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	√		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	√		
	3. Purnama	√		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		√	17
	5. Bukit kayu Kapur			
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		√	8
Medang Kampai	7. Medang Kampai		√	18
Dumai Kota	8. Dumai Kota	√		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	√		
	kit Timah	√		

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2018 telah menjangkau seluruh kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142,86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.53. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 tersaji pada Tabel 2.53. Sedangkan untuk kondisi

puskesmas keliling dan ambulans yang ada di puskesmas se Kota Dumai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53 Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah puskesmas	9	9	9	10	10	10	10	10
Jumlah seluruh kecamatan	5	7	7	7	7	7	7	7
Rasio puskesmas	180	128,57	128,57	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

Tabel 2.54 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2010	254.337	9	3,54
2011	259.913	9	3,46
2012	268.022	9	3,36
2013	274.089	9	3,28
2014	280.109	10	3,57
2015	285.967	10	3,50
2016	291.908	10	3,43
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

Tabel 2.55 Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2018

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan	
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan / Sumber Dana		
1	Dumai Kota	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik	
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik	
		Ambulan mitsubishi	1 unit	2005	Kondisi rusak berat	
		Pusling/Toyota Kijang	1 unit	1995/APBD KabBengkalis	Kondisi rusak berat	
		Ambulan PSC Toyota Hiace	1 unit	2017	Baik	
		Ambulan PSC APV	1 unit	2017	Baik	
2	Bumi Ayu	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik	
3	Dumai Barat	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik	

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
4	Bukit Timah	Pusling/Isuzu	1 unit	2004/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak sedang
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
5	Bukit Kapur	Pusling/Toyota Kijang LGX	1 unit	2002/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak berat
		Pusling/Isuzu	1 unit	2003/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak berat
		Ambulance/Isuzu ELV	1 unit	Hibah CSR Pertamina 2011	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulan PSC Inova	1 unit	2017	Baik
6	Sungai Sembilan	Pusling/Toyota Kijang	1 unit	2002/APBD Kota Dumai	Kondisi rusak berat
		Pusling/Isuzu	1 unit	2006/APBD Kota Dumai	Dalam proses penghapusan
		Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Duma	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulan PSC Inova	1 unit	2017	Baik
		Ambulan Hiluck Pick UP	1 unit	2018	Baik
7	Medang Kampai	Pusling/KIA Travello	1 unit	2007/APBD Kota Dumai	Dalam proses penghapusan
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
8	Jaya Mukti	Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Dumai	Rusak berat
		Ambulance Toyota Hilux	1 unit	2018	Baik
9	Purnama	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
10	Bukit Kayu Kapur	Ambulance/Suzuki APV	1 unit	2012/APBN-P (Hibah Pusat)	Baik
		Ambulance/Mitsubishi	1 unit	2015 (Hibah Setda)	Baik

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

#### 14. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2018 sebanyak 14 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.56 Sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai

Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
Dumai Barat	1. ParitPisang Mas
Dumai Kota	2. RimbaSekampung
Bukit Kapur	3. GurunPanjang
	4. Kayu Kapur
	5. SimpangMurini
Sungai Sembilan	6. SukaDamai
	7. BasilamBaru
	8. SimpangPulai
	9. KampungSejati
	10. Sungai
	11. Sungai Teras
	12. BuluHala
Medang Kampai	13. Pelintung

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2011 sampai tahun 2018 jumlah puskesmas pembantu yang ada tetap, tetapi Kota Dumai mengalami pemekaran menjadi 33 kelurahan di Tahun 2012 seperti yang terlihat pada Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah puskesmas pembantu	13	13	13	13	13	13	13	13
Jumlah seluruh kelurahan	32	33	33	33	33	33	33	33
Rasio puskesmas pembantu	40,62	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019)

## 15. Akses Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu : puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.

b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana , kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki  $\pm$  45% dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2018 sebesar 65.960 orang.khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin. namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkupnya lebih luas yang diperuntukkan untuk warga miskin di seluruh

Indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

## **16. Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2016 (0,70%) ,Tahun 2017 (0,96%) dan pada tahun 2018 jumlah kasus HIV di kota Dumai secara kumulatif ada 260 kasus dengan prevalensi rate 0,79% terhadap penduduk beresiko HIV di kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di kota Dumai sejak tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 secara berurutan berjumlah 1000 jiwa, 540 jiwa dan 18.305 jiwa (sumber : Dumai dalam angka tahun 2018).

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria kota Dumai Tahun 2017 s/d 2018 cenderung statis 0,01 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk.

Permasalahan kesehatan masyarakat di kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2017 ada 92 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 30,91/100.000 dan pada tahun 2018 ada 135 kasus dengan insidens rate sebesar 44,51/100.000 penduduk dari target 57/100.000 penduduk dan jumlah kematian ada 2

kasus dengan CFR Case Fatality Rate sebesar 1,48%. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 300 kasus dengan melakukan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. Adapun cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD tahun 2018 yaitu 44,50 per 100.000 penduduk.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2018 Kasus penemuan TB di kota Dumai masih berkisar 15,48% yaitu ada 310 kasus dari 2002 kasus yang harus ditemukan di kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di kota Dumai. Pada tahun 2018 angka kesembuhan TB Paru sebesar 84,75% dari target 88%, dari 400 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 339 kasus

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2018 sebanyak 8.189 penderita atau IR IR 168.60/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2018 Hipertensi tercatat 23.628 Penderita (13.80 %) dan Diabetes malitus tercatat 11.390 Penderita (10,15% ) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Orang dengan



gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2018 kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 49.595 (18,91%). Screening , pemeriksaan leher rahim pada tahun 2018 dilaksanakan pada 977 (2,28% ) dari sasaran 42.819 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 105 kasus (10,75%) dan terdapat tumor 2 kasus (0,2%).

## 17. Indikator SPM Kesehatan

### SPM Kesehatan

Tabel 2.58 Indikator SPM Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018

No	Indikator SPM	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	7.982
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.055
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.627
4	Pelayanan Kesehatan Balita	40.438
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	11.090
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	112.197
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.345
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.628
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	11.390
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	357
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis	589

(Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2019)

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

#### 1. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal, adapun realisasi persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 adalah sebesar 79,09%.

#### 2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.59 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2010-2018

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang jalan kondisi baik (km)	900,9	907,2	955,5	868,1	955,6	826,2	639,1	618,9	627,3
Panjang jalan seluruhnya (km)	1.846,1	1.749,8	1.803,8	1.561,2	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	48,80%	51,85%	52,97%	55,60%	52,97%	55,57%	53,33%	51,65%	52,35%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun

2013, yakni 48,80% pada tahun 2010 naik menjadi 55,60% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 turun menjadi 52,97%, kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 55,57%. Kembali mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017 berturut-turut menjadi 53,33% dan 51,6%. Di tahun 2018 kondisinya semakin membaik karena terjadi peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 52,35%. Berikut adalah Gambar yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.40 Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2010-2018

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel 2.57 tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2017 dan 2018. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik. Pada tahun 2018 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik meningkat dari 51,65% di tahun 2017 menjadi 52,35% pada tahun 2018. Begitu pula sebaliknya, pada tahun 2018 terjadi pengurangan panjang ruas jalan, baik dalam kondisi sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Meskipun demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai masih jauh berada dibawah angka 0,65.

Tabel 2.60 Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2017 dan 2018 per Kecamatan

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Bukit Kapur	171,67	77,17	77,25	51,36	51,44	26,17	26,17	16,89	16,89
Dumai Barat	180,58	91,15	92,88	22,19	22,19	32,63	32,07	34,61	33,45
Dumai Kota	61,26	49,95	51,00	5,04	5,04	4,00	2,95	2,28	2,28
Dumai Selatan	132,42	99,23	99,47	11,15	11,39	10,39	10,39	11,42	11,42
Dumai Timur	142,31	95,71	95,88	26,56	26,73	9,79	9,79	10,08	10,08
Medang Kampai	291,86	141,59	143,10	87,17	87,86	40,91	40,52	21,50	21,06
Sungai Sembilan	218,14	64,08	67,73	37,85	39,19	57,93	55,78	56,93	56,77

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019)

### 3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

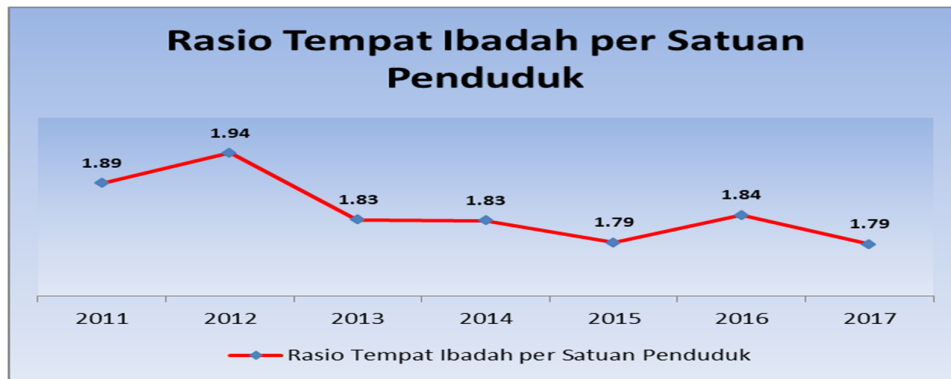
Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.61 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,89	1,94	1,83	1,83	1,79	1,84	1,79
Masjid	206	211	196	196	196	216	217
Mushola	217	219	217	217	217	216	210
Gereja Kristen	52	71	73	73	73	80	81
Gereja Katolik	4	6	6	6	6	6	6
Pura	10	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7	7
Klenteng	1	12	12	12	12	10	10

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.41. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.41 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2017  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Hingga tahun 2017 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,79. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

#### 4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

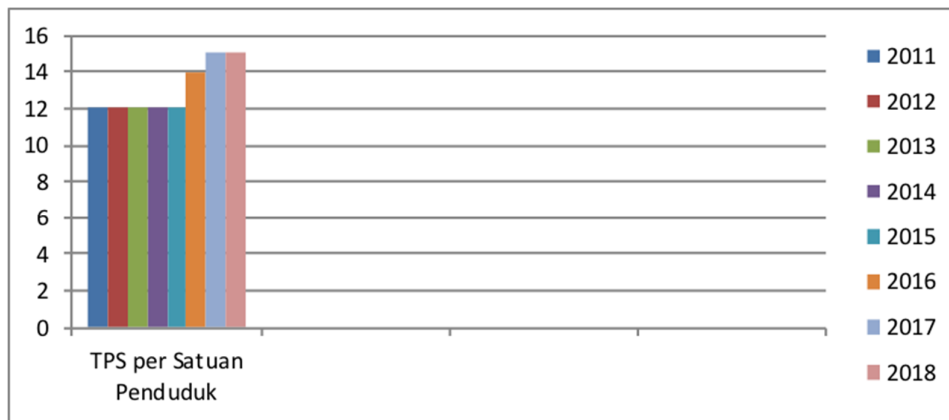
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Dalam rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2018 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel 2.59 dibawah ini:

Tabel 2.62 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
empat Pembuangan Sampah (TPS0 per Satuan Penduduk)	TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	14 TPS	15 TPS	15 TPS

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)



Gambar 2.42 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan

sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

## 5. Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

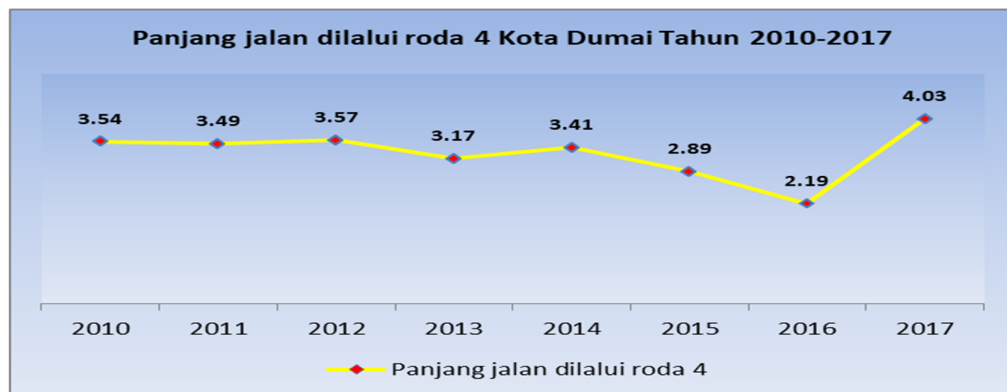
Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.63 Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2017

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan seluruhnya (km)	900,91	907,19	955,53	868,07	955,550	826,19	639,05	1198,24
Jumlah Penduduk	254.337	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638
Panjang jalan dilalui roda 4	3,54	3,49	3,57	3,17	3,41	2,89	2,19	4,03

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat berfluktuatif dari 3,54 pada tahun 2010 menjadi 4,03 di tahun 2017. Tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini. apabila digambarkan dengan Gambar maka indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai pada Gambar 2.42 seperti dibawah ini.



Gambar 2.43 Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2017

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

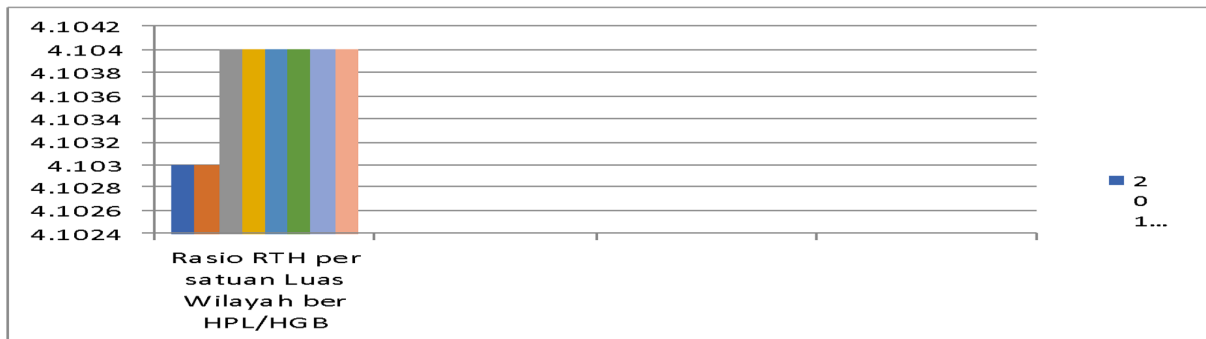
## 6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai.

Tabel 2.64 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	011	012	013	014	015	016	017	018
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)



Gambar 2.44 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

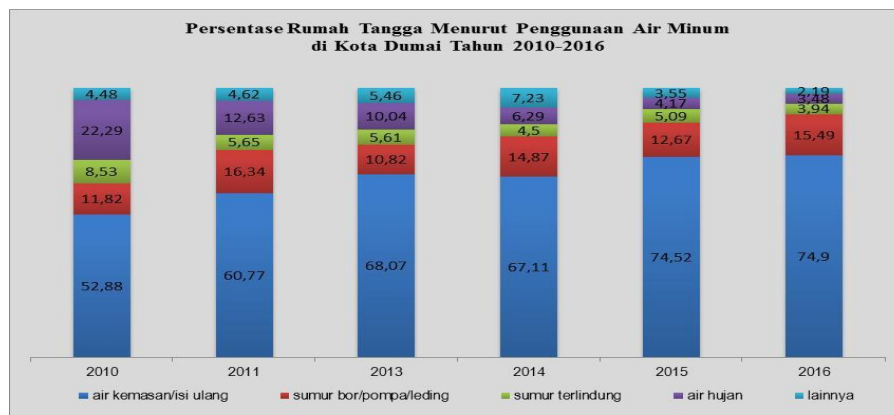
Rasio Ruang Terbuka Hijau diatas diperoleh dengan membandingkan luas RTH dengan luas wilayah. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah perkotaan Dumai yaitu wilayah diluar kawasan hutan. Dari data yang ditunjukkan oleh gambar diatas menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan yang sama yakni 4,103 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.



## D. Perumahan dan Pemukiman

### 1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Adapun perkembangan penggunaan sumber air tersebut dari tahun 2010-2016 tersaji pada Gambar 2.45 (tanpa data tahun 2012).

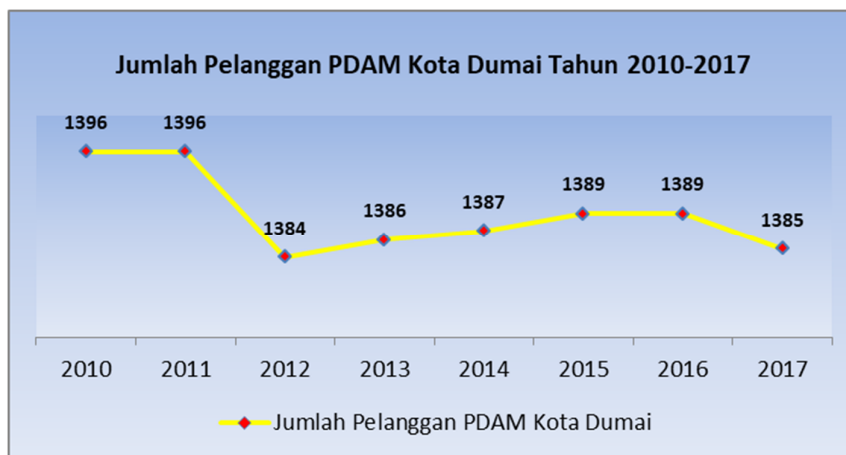


Gambar 2.45 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2010-2016  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Dari Gambar 2.45 diatas terlihat bahwa persentase penggunaan air hujan sebagai sumber utama air minum cenderung mengalami penurunan dari 22,29% pada tahun 2010 menjadi 3,48% di tahun 2016. Sedangkan penggunaan air kemasan/isi ulang dan sumur bor/pompa/leading sebagai sumber utama air minum mengalami peningkatan dari 64,70% pada tahun 2010 menjadi 90,39 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang menurun seperti yang tersaji pada Gambar 2.44. Lebih dari 76% pelanggan PDAM di tahun

2017 merupakan pelanggan non niaga. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pelanggan yang dilayani oleh PDAM Kota Dumai belum belum menjangkau seluruh penduduk kota.



Gambar 2.46 Jumlah Pelanggan Kota Dumai  
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## 2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai.

Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	48.511	54.873	59.766	64.162	68.432	94.761
Jumlah rumah tangga	67.006	68.522	70.027	71.492	72.977	83.863
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	72,40	80,08	85,35	89,75	93,77	88,50

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai tahun 2010-2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel 2.62 terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Pada tahun 2017 sebanyak 88,85% rumah tangga telah teraliri aliran listrik.

### 3. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Data yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 127,6 Ha yaitu seluas 60,83 Ha. Berdasarkan draft rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 127,6 Ha kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.66 Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Laksamana Rimbas	Dumai Kota	Laksamana	21,55
		Rimba Sekampung	
Dumai Kota	Dumai Kota	Dumai Kota	6,32
Bukit Bintang Jadi	Dumai Kota dan Dumai Selatan	Bukit Datuk	21,46
		Bintang	
		Sukajadi	
STDI Rimbas	Dumai Barat dan Dumai Kota	Simpang Tetap Darul Ihsan	13,97
		Rimba Sekampung	
Pangkalan	Dumai Barat	Pangkalan Sesai	11,30

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Buluh Kasap	Dumai Timur	Buluh Kasap	7,15
Mukti Palas	Dumai Ttimur	Jaya Mukti	21,00
		Tanjung Palas	
Teluk Binjai	Dumai Timur	Teluk Binjai	9,16
Bumi Ayu	Dumai Selatan	Bumi Ayu	5,61
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	10,08
Total			127,60

(sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019)

Dari tabel diatas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018 dapat dihitung persentase lingkungan permukiman kumuh kota Dumai tahun 2018 yaitu 0,03 %. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Dumai tahun 2018 yaitu 47,67 %.

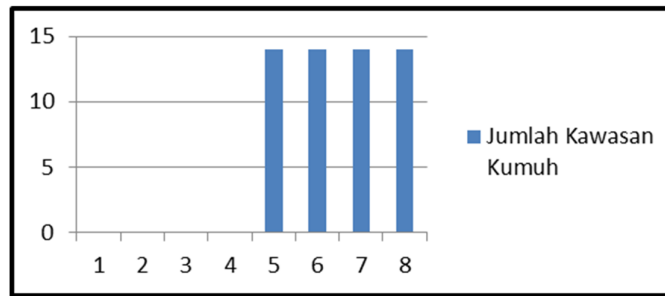
#### 4. Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 14 Ha kawasan kumuh perkotaan dan Rumah tidak layak huni sebanyak 1.884 pada tahun yang tersaji pada Tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67 Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2018

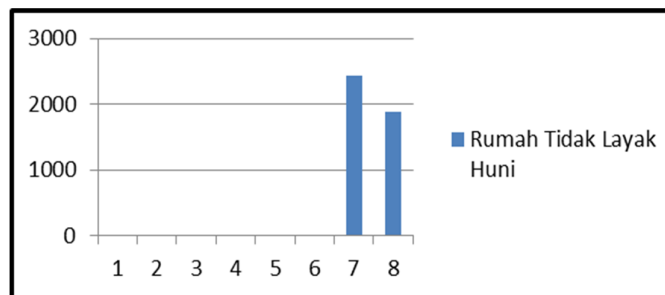
Indikator	2015	2016	2017	2018	Sumber
Jumlah Kawasan Kumuh	14	14	14	14	Kotaku Provinsi Riau
Rumah Tidak Layak Huni	NA	NA	2.432	1.884	Kotaku Provinsi Riau

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2019)



Gambar 2.47 Jumlah Kawasan Kumuh

(Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2018)



Gambar 2.48 Rumah Layak Huni

(Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2018)

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dari tahun 2013 sampai tahun 2018 terdapat 1.231 berkas pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk ke OPD terkait, tetapi hanya sebanyak 32,74% (403 berkas) yang memperoleh izin, 0,89% (11 berkas) ditolak dan sisanya 66,37% (817 berkas) masih *pending*.

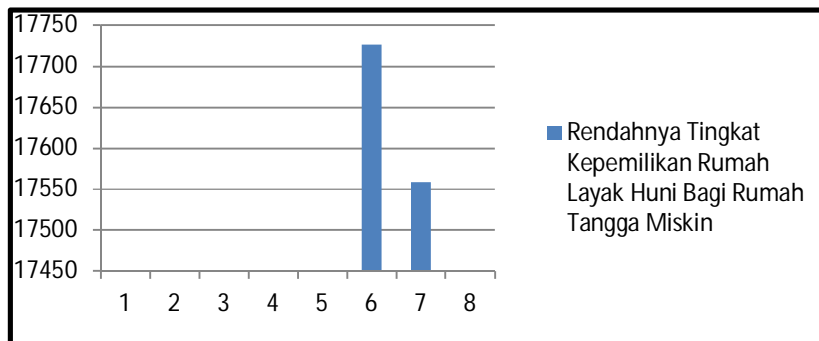
##### 5. Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan data dari Dumai dalam angka tahun 2018 Jumlah kepala keluarga kota Dumai tahun 2017 yaitu 83.863 kk dimana dapat diasumsikan satu kk sama dengan satu rumah, sehingga jumlah rumah dikawasan permukiman kota Dumai tahun 2017 yaitu 83.863 unit dimana jumlah Rumah tidak layak huni hasil verivali oleh pemerintah Kota Dumai adalah 3779 unit, dengan menggunakan variabel terkait dapat dihitung jumlah rumah layak huni kota Dumai tahun 2017 yaitu 80.084 unit, sehingga angka rasio rumah layak huni kota Dumai tahun 2017 yaitu 0,27.

Tabel 2.68 Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2016	2017	2018	Sumber
Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	17.726	17.559	16.918	BKKBN

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2019)



Gambar 2.49 Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2018)

## E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel 2.69 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Polisi Pamong Praja	136	99	91	86	90	98	26	

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk per 10.000*	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33
Rasio jumlah pamong praja	5,23	3,69	3,32	3,07	3,15	3,36		

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2019)

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin naik terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai.

## 2. Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembanding pada indikator ini adalah jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS Kota Dumai.

Tabel 2.70 Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018
Jumlah Linmas	1.584	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599	1.599	1.590	1.590
Jumlah penduduk per 10.000*	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,19	28,02	28,70
Rasio linmas	60,94	59,10	58,01	56,87	55,92	54,78	54,78	56,74	55,40

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019)

## 3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten/kota. adapun reliasai cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) adalah sebesar 30%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut

memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan social kemasyarakatan. Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir.

#### 4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota merupakan perbandingan antara Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dengan Luas wilayah kabupaten/kota. adapun realisasi cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota adalah sebesar 3,50%.

#### 5. Persentase Penegakan PERDA.

Persentase Penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi Jumlah pelanggaran PERDA pada tahun 2018 adalah sebesar 100%. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai dengan target Pengawasan sebesar 200 pengusaha terealisasi juga 200 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

#### 6. Persentase Peningkatan Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

Persentase peningkatan pos siskamling merupakan perbandingan antara jumlah siskamling dengan jumlah kelurahan. Persentase pos siskamling dihitung untuk mendapatkan jumlah siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan. Pos siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut adalah tabel yang berisikan informasi mengenai persentase peningkatan pos siskamling per jumlah kelurahan.

Tabel 2.71 Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pos Siskamling	173	173	173	173	173	173	173	173
Jumlah kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	33
Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019)



Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada penambahan jumlah siskamling disetiap kelurahan di Kota Dumai selama kurun waktu 2011-2018.

## 7. Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72 Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	49%	92%	90%	95%	96%	96%	75%	81%	92%

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2019)

Pada tahun 2018 terdapat 1.007 kegiatan penertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dimana 80% jenis kegiatan penertibannya adalah penertiban PKL.

## 8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran k3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP. adapun reliasasi Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah sebesar 55%.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2011 ada sebanyak 132 kasus dan pada tahun 2018 kasus pelanggaran K3 di kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 156 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	132	231	236	235	238	238	155	156

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2019)

## 9. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dari data kantor kesbanglinmas Kota Dumai, petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan pada tahun 2011 adalah sebanyak 1.584 dan tahun 2018 menjadi 1.590. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.74 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.584	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599	1.590	1.590

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2019)

## 10. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2018 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.75 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	123	60	25	23	29	19	8

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2019)

## 11. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2011 hingga 2018 berjumlah 1 (satu) kegiatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg.	-	1 Keg	-.	1 Keg	1 Keg.	1 Keg.	-

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2019)

## 12. Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman telah terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 10 unit rumah yang terbakar yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kejadian kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebanyak 66 unit dan 26 unit. Banyaknya kejadian kebakaran rumah penduduk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Banyak kejadian kebakaran rumah penduduk	63 unit	34 unit	38 unit	66 unit	26 unit	10 unit

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2019)

### F. Sosial

Peningkatan sarana sosial di Kota Dumai terus ditingkatkan melalui proses pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. Diharapkan melalui pembangunan sarana dan prasarana ini, diharapkan dapat memadukan penanganan berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang termarginalkan di Kota Dumai. Adapun kondisi aspek sosial di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2012-2018 tersaji pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78 Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2012-2018

Uraian	TAHUN							SAT
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial								
Penduduk rawan								

Uraian	TAHUN							SAT
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Sosial dan Sarana								
1). Anak Jalanan	35	35	35	8	8	4	4	Jiwa
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	81	106	106	27	27	12	12	Jiwa
3). Fakir Miskin	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	15.882	17.998	KK
4). Bayi Terlantar	18	18	18	32	32	334	307	Jiwa
5). Anak Terlantar	87	87	87	151	151	2292	2132	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	191	191	191	760	760	595	571	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	392	392	392	122	122	423	424	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda								Jiwa
9). Tuna Susila	96	96	96	356	356			Jiwa
10). Bekas Narapidana	61	61	61	38	38			Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	159	159	159	159				Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	23	23	23	30	30	196	196	Jiwa
Jumlah Panti Asuhan								
1). Panti Sosial Asuhan Anak	12	12	12	12	11	11	11	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja				1				Buah
3). Panti Sosial Tresna Wrida					1	1	1	Buah
Rumah singgah			1	1	1	1	1	Buah
Jumlah PMKS		182,074	183,963		182,009	19.738	21.644	Buah
1). PMKS Yang Tertangani		60,194	61,124		60,453	127	87	Orang
2). PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan		61,686	61,715		61,103	19.738	21.644	Buah
3). PMKS Yang Diberikan Bantuan		60,194	61,124		60,453	12.389	14.430	KK
4). Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial		97.58 %	99.04 %		98.99 %	62.77 %	66.67 %	
5) Persentase PMKS yang tertangani		33.06 %	33.23 %		33.21 %	643.43 %	401.96 %	
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33	33	33	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7	7	7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat	64	64	66	66	66	66	66	Orang

Uraian	TAHUN							SAT
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(PSM)								
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	30	30	30	34	32	52	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12	12	12	12	12	11	11	LKS
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	5	5	5	6	14	30	31	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8). Keluarga Pioner	-	-	-	-	-	-	-	Buah
9). Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	5	5	5	5	4	4	Buah
10). Penyuluh Sosial	8	8	8	8	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesjahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	Orang
12). Dunia Usaha	-	-	-	-	-	-	-	Buah

(Sumber: Dinas Sosial Tahun 2019)

### 1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Target dari indikator sasaran ini yaitu 48% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 47% dengan capaian 98%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH). Disamping itu bagi keluarga miskin pemerintah Pusat juga menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2013. Di Tahun 2018 jumlah penerima bantuan keluarga penerima manfaat sebanyak 5.410 KPM dengan nilai sebesar Rp. 1.440.953.500 ,- yang digelontorkan setiap triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sangat miskin telah meningkat kesejahteraannya. Kegiatan Penyaluran beras bagi keluarga kurang

mampu. Adapun kegiatan ini Pemerintah melaksanakan program raskin/rastra para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mendapatkan bantuan berupa beras 15 (lima belas) kg /bulan per RTM yang diperuntukan kepada 8.481 RTM Kota Dumai yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tigapuluh tiga) Kelurahan.

## **2. Persentase PMKS yang tertangani**

Target dari indikator sasaran ini yaitu 26% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 19% dengan capaian 73%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan dan anak nakal. Adapun kegiatan ini dikirimnya anak putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru sebanyak 15 orang. Kegiatan Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun kegiatan ini pada tahun 2018 telah melakukan pengiriman pasien gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau sebanyak 38 orang. Kegiatan Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan. Adapun kegiatan ini melakukan penanganan dan pendampingan melalui Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) sebanyak 5 kasus yang ditangani langsung oleh Pekerja Sosial sedangkan untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun ini sebanyak 29 kasus/orang yang penanganannya langsung dilakukan oleh Pekerja Sosial mulai dari tingkat Kelurahan, Polres dan Kejaksaan.

## **3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 80% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 49% dengan capaian 61%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH). Disamping itu bagi keluarga miskin pemerintah Pusat juga menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2013. Di

Tahun 2018 jumlah penerima bantuan keluarga penerima manfaat sebanyak 5.410 KPM dengan nilai sebesar Rp. 1.440.953.500,- yang digelontorkan setiap triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sangat miskin telah meningkat kesejahteraannya. Kegiatan Penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu. Adapun kegiatan ini Pemerintah melaksanakan program raskin/rastra para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mendapatkan bantuan berupa beras 15 (lima belas) kg /bulan per RTM yang diperuntukan kepada 8.481 RTM Kota Dumai yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tigapuluh tiga) Kelurahan. Kegiatan Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE). Adapun kegiatan ini Kota Dumai memiliki 30 kelompok usaha bersama (KUBE) yang beranggotakan 1 (satu) Kelompok sebanyak 10 orang. Program ini merupakan program Kementrian Sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin yang mau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini menerima bantuan melalui dana dekosentrasi dari Dinas Sosial Provinsi Riau sebesar Rp. 20.000.000,-/Kelompok

#### **4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 100% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 100% dengan capaian 100%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangku tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Adapun kegiatan ini pada tahun 2018 yaitu Penanganan dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Pada tahun 2018 Korban bencana yang telah menerima bantuan sosial di Kota Dumai melalui Dinas Sosial Kota Dumai sebanyak 209 KK.

## **5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.**

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 6% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 5% dengan capaian 83%. Kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) merupakan kegiatan Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi Lansia miskin Kota Dumai mendapatkan bantuan langsung dari Kementerian Sosial RI sebanyak 30 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.210.500.

### **2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **A. Ketenagakerjaan**

##### **1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) merupakan perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatat. Adapun realisasi besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kinerja bersama (PB) pada tahun 2018 adalah sebesar 35%.

##### **2. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar. dan realisasi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2018 adalah sebesar 35%.

##### **3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Adapun realisasi dari besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2018 adalah sebesar 73%.



#### 4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79 Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,72	64,14	65,26	66,94		65,53	64,17
PHK	-	101		19	18	32	46
Kasus PHK	-	101	11	19	18	32	26
Orang Terkena PHK	-	101	124		65 orang	75 orang	46
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Minimum	-	2.057.011	2.087.791	2.576.207	Berdasarkan PP 78 Tahun 2105 tentang Pengupah menyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian		Berdasarkan PP 78 Tahun 2105 tentang Pengupah menyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian
Rata-Rata Upah Minimum	-	1.490.000	1.995.552	2.200.000	2.453.000	2.655.372,50	2.886.655.44
Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha							
L. Usaha Angkutan, Pengangkutan dan Komunikasi	-	6	9	11	16	Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dan disahkan menjadi undang-undang provinsi sehingga data	Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dan disahkan menjadi undang-undang provinsi sehingga data
L. Usaha Bangunan	-	102	35	39	41		
L. Usaha Industri Pengolahan	-	12	52	2	14		
L. Usaha Jasa Kearsyarakatan	-	8	3	-	3		

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Keuangan, Ansuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	-	24	8	11	16	ah menjadi kewenangan provinsi hingga data tahun 2017 yang tidak pernah disampaikan ke kab/kota	untuk tahun 2017 yang tidak pernah disampaikan ke kab/kota
L. Usaha Listrik, Gas dan Air	-	-	17	140	137		
L. Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	-	31	11	15	27		
L. Usaha Pertambangan dan Penggalian	-	1	15	5	7		
L. Usaha Pertanian, Perhutanan, Perburuhandan dan Perikanan	-	2	12	6	11		

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## 5. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2012- 2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	472	1098	1308	315	1200	1210	2112

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2019)

## 6. Jumlah Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laki-laki	2,663	2,502	3,174	3,461	3,511	8,288
Perempuan	1,940	2,359	1,378	1,757	1,656	3,846
<b>Jumlah</b>	<b>4,603</b>	<b>4,861</b>	<b>4,552</b>	<b>5,218</b>	<b>5,167</b>	<b>12,134</b>

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 2,29 persen dari 11,23 persen di tahun 2015 menjadi 8,94 persen di tahun 2017. Berikut tabel sebagai berikut :

Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Dumai, Tahun 2015 dan 2017

Uraian	2015	2017
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	66,94	65,53
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	11,23	8,94

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu 76 dan capaian indikator sampai tahun 2018 yaitu 84,57 atau sebesar 111,27% Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, Kegiatan Sosialisasi pelayanan terpadu, Kegiatan Peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Kegiatan Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Survey penerbitan perizinan.

Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Dumai Tahun 2018

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp.5.788.267.749.29 6,-	Rp.2.006.313.400.00 0,-	31,42
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	76	84,57	111,27

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2019)

## 7. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai  
Tahun 2012- 2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Keselamatan dan Perlindungan	86	195	151	165	-	-	-

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

(Keterangan : Data Tahun 2017 dan 2018 Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi)

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2016-2017 tidak pernah disampaikan ke kabupaten/kota.

## 8. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun kota Dumai pada tahun 2018 yaitu sebanyak 290 pekerja. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	-	30	19	39	12	14	55

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2019)

Data perusahaan wajib lapor sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86 Perusahaan Wajib Lapor Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
		LK	PR	LK	PR
2011	121	1986	201	-	-
2012	125	5837	527	20	-
2013	186	8210	1113	114	1
2014	155	8912	1030	23	-
2015	232	10384	1075	11	-
2016	272	13923	1564	66	1

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

(Keterangan : Data Tahun 2017 dan 2018 Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimanasudahmenjadikewenanganprovinsi)

## B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR merupakan perbandingan antara jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Adapun realisasi proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah sebesar 16,67%.

### 2. Rasio KDRT

Rasio KDRT merupakan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah Rumah Tangga. Adapun realisasi rasio KDRT sebesar 0,014% dimana jumlah KDRT sebesar 12 kasus.

### 3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2011 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 2.986 dan pada tahun 2018 naik menjadi 5.201.

Tabel 2.87 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	2.986	2.986	2.986	3.046	3.974	5.202	5.201

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2019)

### 4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja.

Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2011 partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 1.474 pada naik menjadi 10.442 pada tahun 2018. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan kota Dumai tahun 2011-2018.

Tabel 2.88 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2010-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Partisipasi angkatan kerja perempuan	1.474	2.359	2.359	1.378	3.857	10.442	10.442	10.442

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2019)

## 5. Pengarus Utamaan Gender

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Sampai tahun 2016 di Kota Dumai terdapat beberapa permasalahan terkait pengarusutamaan gender yang perlu diperhatikan bersama, diantaranya:

- 1) Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Dumai, masih ada OPD yang belum melaksanakan/menyusun anggaran pembangunan berdasarkan analisis gender pada program/kegiatan di OPD yang bersangkutan dengan rincian:
  - a. dari 34 OPD yang ada, baru 2 OPD yang responsif gender;
  - b. dari total 33 kantor kelurahan di Kota Dumai, seluruhnya belum responsif gender;
  - c. dari 10 Puskesmas yang ada, baru 7 Puskesmas yang responsif gender.
- 2) Sarana dan prasarana belum memenuhi setiap kalangan. Dari 152 sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Dumai, baru 5 sekolah yang responsif gender.
- 3) Fasilitas umum belum menyediakan tempat-tempat privasi/khusus seperti ruang laktasi, toilet untuk penyandang disabilitas, dll.

- a. Dari 2 pelabuhan penumpang yang ada, baru 1 pelabuhan penumpang yang sudah responsif gender;
  - b. Dari 1 terminal penumpang yang ada, belum responsif gender;
  - c. Dari 1 bandara yang ada, belum responsif gender;
  - d. Dari 4 taman wisata milik pemerintah yang ada, belum responsif gender.
- 4) Belum semua SDM aparatur perencanaan paham tentang perencanaan dan penganggaran terkait program/kegiatan responsive gender.
- 5) Masih kurangnya ketersediaan SDM aparatur yang memahami, mampu mengadvokasikan dan melakukan sosialisasi serta pendampingan terkait penyusunan GAP dan GBS.

**6. Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja**

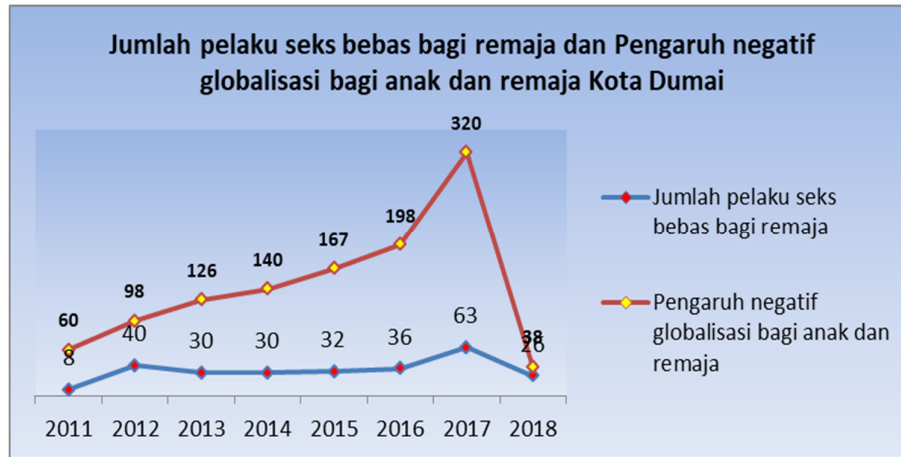
Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2011 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 8 pelaku hingga kurun waktu 2018 menurun menjadi 63 pelaku. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 60 pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 38 pada tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 2.89 dan Gambar 2.50 dibawah ini:

Tabel 2.89 Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	8	40	30	30	32	36	63	26
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	60	98	126	140	167	198	320	38

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2019)





Gambar 2.50 Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja  
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019)

### C. Pangan

#### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2010 sampai tahun 2017 tersaji pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2010-2017

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	42,44	46,15	36,84	26,50	41,36	35,54	38,08	15,18

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2019)

\*Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dgn produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2017 kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat Kota Dumai seperti yang tersaji pada Tabel 2.90. Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada 3

komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.

Tabel 2.91 Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2017

No.	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan
1	Beras	3,952.4	28,621.6	(24,669.2)
2	Jagung	267.5	580.9	(313.4)
3	Kedelai	-	1,736.9	(1,736.9)
4	Kacang Tanah	8.6	75.9	(67.3)
5	kacang Hijau	-	43.8	(43.8)
6	Ubi Jalar	45.0	986.6	(941.6)
7	Ubi Kayu	5,040.0	1,047.9	3,992.1
8	Sagu	-	137.2	(137.2)
9	Buah-Buahan	14,010.0	7,035.0	6,975.0
10	Sayuran	2,361.3	11,413.6	(9,052.3)
11	Daging Sapi	445.6	516.7	(71.1)
12	Daging Ayam	1,743.9	1,398.2	345.7
13	Telur	-	1,777.7	(1,777.7)
14	Ikan	876.2	11,676.3	(10,800.1)

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2018)

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (98,05 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun. Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya.

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Luas lahan pertanian di Kota Dumai semakin sedikit, sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan mayoritas lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian di Kota Dumai merupakan kawasan hutan. Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai :

Tabel 2.92 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018		Target Akhir	Capaian a/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)	
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %		2021
1.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	81,70	81,28	82,10	101,01	83,74	98,04
Rata-rata Capaian Kinerja								

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2019)

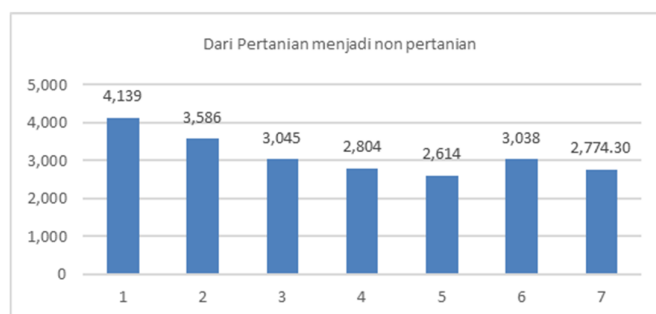
## 2. Jumlah Alih Fungsi Lahan

Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2011 berjumlah 4.139 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 2.774,30 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93 Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017

Indikator	11	12	13	14	15	16	2017
ertanian menjadi non pertanian	39	586	045	804	514	038	774,30

(Sumber : Dinas pertanian Kota Dumai Tahun 2019)



Gambar 2.51 Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017 RKP Kota Dumai Tahun 2020

(Sumber : Dinas pertanian Kota Dumai Tahun 2019)

#### **D. Pertanahan**

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena didalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik.

Di Kota Dumai terdapat beberapa status tanah antara lain :

- a. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Cevron Fasific Indonesia
- b. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Pertamina
- c. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah
- d. Tanah Warga Masyarakat adalah tanah milik perseorangan
- e. Tanah – tanah perusahaan yang berstatus hak guna usaha yang bergerak di bidang HPH/HPHTI yaitu :
  1. PT. SUNTARA GAJA PATI di Sungai Sembilan
  2. PT RUAS UTAMA JAYA di Sungai Sembilan
  3. PT. DIAMOND RAYA TIMBER di Sungai Sembilan
  4. PT. ARARA ABADI DI Bukit Kapur

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Daerah Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka konflik tersebut perlu di fasilitasi Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik tanah masyarakat dengan tanah perusahaan yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu :

1. PT. SUNTARA GAJA PATI Di Kecamatan Sungai Sembilan
2. PT RUAS UTAMA JAYA Di Kecamatan Sungai Sembilan

3. PT. DIAMOND JAYA TIMBERS Di Kecamatan Sungai Sembilan
4. PT. PERTAMINA PERSERO Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
5. PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
6. PT. ARARA ABADI di Kecamatan Bukit Kapur

Sedangkan konflik/permasalahan tanah lain yang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai adalah konflik/permasalahan tanah antara masyarakat dengan Tanah Aset Pemko Dumai. Adapun rekapitulasi permasalahan pertanahan yang sedang ditangani sampai dengan Tahun 2017 tersaji pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN
1.	Tanah Bekas Hak Pakai PT. CPI	<p>a. Satuan Tugas yang telah dibentuk telah melaksanakan tugas dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 3 bulan dengan hasil pendataan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jumlah persil = 4.361</b></li> <li>- <b>Luas penguasaan tanah seluas : 3.283.084,06 M</b></li> </ul> <p>b. Saat ini sedang disusun proposal hilir mengenai formulasi kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat. Studi komprehensif bagi penyelesaian tersebut sedang dilaksanakan dengan membandingkan pada daerah-daerah yang mempunyai masalah serupa. Proposal tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Februari 2013.</p> <p>c. Setelah proposal hilir tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan hasil pendataan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta untuk proses penyerahan tanah tersebut kepada negara</p> <p>d. Setelah tanah tersebut diserahkan kepada Negara, maka Pemerintah Kota Dumai akan mengajukan proposal permintaan/peruntukan tanah lengkap dengan master plan/strategi, termasuk pengaturan penyelesaian terhadap tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.</p> <p>e. Permohonan hibah terhadap 44 bidang tanah yang di atasnya berdiri fasilitas Pemko Dumai telah diajukan hibahnya sejak tahun 2015 dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Dan saat ini telah final dan menunggu penyerahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</p> <p>f. PSP diajukan oleh masing-masing Instansi Vertikal</p> <p>g. Perpres tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat sedang disusun dengan difasilitasi oleh KOMNAS HAM RI.</p> <p>h. Permohonan hibah atas 44 bidang tanah</p>	<p>Rincian 4.361 persil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah Tinggal 3.867 unit</li> <li>- Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit</li> <li>- Sekolah/Perguruan Tinggi (Swasta) 6 unit</li> <li>- Fasilitas Pemerintah 25 unit</li> <li>- Usaha Pribadi 184 unit</li> <li>- Perusahaan swasta 3 unit</li> <li>- Fasilitas Umum/Sosial 14 unit</li> <li>- Rumah Ibadah 33 unit</li> <li>- Lainnya 221</li> </ul> <p>si Bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan Permanen 2.356 unit</li> <li>- Bangunan Semi Permanen 1.728 unit</li> <li>- Bangunan Terbengkalai 93 unit</li> <li>- Lahan Kosong 3 persil</li> <li>- Lainnya 217</li> </ul> <p>Dengan dikabulkannya pinjam pakai atas tanah yang di atasnya</p>

		<p>sebagaimana huruf e dikabulkan tidak dengan hibah, tetapi dengan Pinjam Pakai selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dari 44 bidang yang diajukan hanya 39 bidang yang disetujui, sementara 5 bidang lagi merupakan tanah kosong belum dapat disetujui dan masih dalam proses.</p> <p>i. Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah yang berasal dari KKKS PT. CPI antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan pada hari Rabu 21 Nopember 2018 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan negara KEMENKEU kepada Walikota Dumai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor :PRJ 11/KN/2018 dan Nomor 24/P-PJMK/BKPAD/2018 tanggal 21 November 2018.</p>	<p>telah berdiri aset Pemko Dumai maka sebagian permasalahan tanah hak pakai PT. CPI dpt terselesaikan. Dan untuk perpanjangan pinjam pakai 5 tahun kedepan akan diajukan permohonan hibah atas obyek tanah tsb.</p> <p>Sedangkan untuk tanah fasilitas sosial dan perkantoran vertikal diajukan PSP nya oleh yang bersangkutan dan sdh berjalan sesuai ketentuan.</p> <p>Sementara untuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat akan disusun PERPRES tentang penyelesaian permasalahan Tanah Hak Pakai yang dikuasai Masyarakat dimohon kepada Kementerian Keuangan untuk memimpin penyusunannya.</p>																																								
2.	Tanah yang berada di Taman Wisata Alam Sungai Dumai	<p>Hasilnya : Hasil pendataan tahun 2013 :</p> <table border="1" data-bbox="669 1100 1198 1241"> <thead> <tr> <th></th> <th>Luas (M<sup>2</sup>)</th> <th>(M<sup>2</sup>) yang masuk TWA</th> <th>Jumlah Pemilik</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perpanjangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perumahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perdagangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perikanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Palas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Penggunaan Lahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar</li> <li>2. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar</li> <li>3. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar</li> <li>4. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun</li> <li>5. Sawit diatas umur 3 tahun, Kebun, Hutan, Belukar</li> <li>6. Sawit diatas umur 3 tahun, kebun, Hutan, Belukar</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasilnya sampai saat ini Tim Tersebut belum terbentuk</li> <li>2. BBKSDA Prov.Riau secara lisan meminta agar Pemko Dumai bersedia memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Kementrian LHK Jakarta untuk melakukan pertemuan di Kota Dumai dalam rangka membahas pembentukan tim tersebut sekaligus melakukan peninjauan dilapangan</li> </ol> <p>Hasil Pendataan : Luas areal yang di data : 69.112 M</p>		Luas (M <sup>2</sup> )	(M <sup>2</sup> ) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik		Perpanjangan					Tanah					Perumahan					Perdagangan					Perikanan					Palas					<b>Total</b>					<p>Kewenangan penyelesaian permasalahan ini berada di kementerian LHK tepatnya di Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Riau dan Balai Penegakan Hukum LHK. Pemko Dumai hanya melakukan upaya permohonan penyelesaian permasalahan ini dengan melampirkan data-data terkait kondisi TWA tersebut.</p>
	Luas (M <sup>2</sup> )	(M <sup>2</sup> ) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik																																								
Perpanjangan																																											
Tanah																																											
Perumahan																																											
Perdagangan																																											
Perikanan																																											
Palas																																											
<b>Total</b>																																											

		<p>Jumlah pemilik lahan : 83 KK</p> <p>Peruntukan lahan : Pemukiman masyarakat, kebun dan lain-lain.</p> <p>Hasil pendataan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Kementerian LHK sebagai laporan untuk tindak lanjut penanganan permasalahan tanah, terkhusus di depan bandara Pinang Kampai.</p>	
3.	Permasalahan tanah asrama haji dumai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disepakati untuk melakukan penelusuran kronologis perolehan tanah tersebut dengan menghubungi para sempadan dan pihak-pihak terkait</li> <li>2. Hasil penelusuran sementara menyatakan bahwa tanah tersebut tidak tercatat di aset Pemerintah Kota Dumai dan di BPN Kota Dumai juga tidak ditemui dokumen pertanahannya dan kemungkinan besar dicatat di Kementerian Agama Pusat</li> <li>3. Hasil Penelusuran terakhir Tanah dan bangunan tersebut tercatat di Kartu Identitas Barang (KIB) Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, namun dokumen-dokumen surat tanahnya tidak ditemukan</li> <li>4. Dipertemuan 4 Desember tsb direkomendasikan penyelesaian masalah ini dengan memproses penerbitan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) sesuai ketentuan PERWKO Dumai nomor 14 Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.</li> </ol>	Permasalahan ini selesai dan saat ini sedang dalam proses Penerbitan SKRPT pihak Kelurahan Laksamana dan Kecamatan Dumai Kota
4.	Permasalahan tanah untuk jalan Abdulrab Khan Kelurahan Bukit Timah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusannya masih menunggu hasil kajian teknis dari PT.CPI tentang kelayakan dan hal-hal lain Setelah Konsultasi internal akan dilakukan pertemuan dengan DJKN Kementerian Keuangan sesuai dengan waktu yang akan ditentukan</li> <li>2. PPLB yang telah disusun belum dapat disetujui karena terdapat beberapa hal yang belum dapat disepakati diantaranya Pemko Dumai diminta untuk membangun pagar pengaman pipa disepanjang jalan Abdulrab Khan yang akan ditingkatkan. Sedangkan Pemko Dumai meminta pagar tersebut dibangun oleh PT.CPI karena tidak mungkin pemko Dumai membangun pagar untuk melindungi asset PT. CPI.</li> <li>3. Perkembangan terakhir di internal PT. CPI, disampaikan melalui pertemuan dengan Walikota Dumai pada Desember 2018 di Kediaman Walikota bahwa PT. CPI telah menyetujui untuk langsung membangun Jalan tersebut.</li> <li>4. Rencana pengerjaan jalan tersebut akan dilaksanakan pada minggu kedua Januari 2019.</li> </ol>	1. Permasalahan dapat diselesaikan.
5.	Permasalahan tanah rencana pengembangan RSUD Kota Dumai kelurahan Buluh Kasab Kecamatan Dumai Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelusuran DIBPKAD Prov Riau tidak ditemukan Daftar Tanah Aset tersebut.</li> <li>2. Hasil penelusuran ke PT. CPI menyatakan bahwa tanah tersebut juga tidak termasuk dalam tanah Hak Pakai PT&gt; CPI</li> </ol>	1. Masih melakukan telaah dan penelusuran tentang status tanah tersebut.
6.	Permasalahan Ganti rugi tanah yang terkena jalur kereta api trans sumatera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dari pertemuan tersebut didapati bahwa untuk proyek kereta api Trans Sumatera wilayah Kota Dumai tidak lagi termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tidak tersedia anggaran Ganti rugi dalam tahun ini.</li> <li>2. Mengusahakan Proyek tersebut dapat dimasukkan kembali kedalam PSN atau dianggarkan dalam APBN murni 2019</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikhawatirkan terjadi gejolak Masyarakat atas tidak jelasnya status ganti rugi ini</li> <li>2. Sampai saat ini belum Jelas kelanjutannya.</li> </ol>

7.	Permasalahan tanah masyarakat atas SUJONO dikelurahan lubuk gaung kecamatan Sei Sembilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat pertama merekomendasikan untuk melakukan kunjungan lapangan di Lokasi yang disengketakan</li> <li>2. Kunjungan ke lokasi perusahaan tidak dapat dilakukan karena perusahaan keberatan dengan berbagai pertimbangan</li> <li>3. Pertemuan terakhir, tidak terdapat kesepakatan antara para pihak, karena masing-masing pihak memiliki data dan argument bertahan, sehingga rapat memutuskan dan merekomendasikan agar permasalahan ini diselesaikan melalui jakur hokum (ke Pengadilan)</li> <li>4. Informasi terakhir pihak Sujono mengajukan permohonan kepada ketua DPRD kota Dumai untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini</li> </ol>	1. Upaya fasilitasi penyelesaian permasalahan ini di tingkat Pemerintah Kota Dumai telah selesai
8	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Hasil kunjungan klarifikasi dan pengukuran didapati bahwa tanah yang diklaim oleh KSU Bona Mandiri tersebut tidak berada di lokasi tanah kantor Lurah Bukit Batrem, tapi berada di posisi lain (salah patok)	Permasalahan telah selesai
9.	Permasalahan, Tanah antara Masyarakat RT 08. Kel Bukit Nenas dengan PT. ARARA ABADI Distrik Bukit Kapur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil kunjungan lapangan mendapati bahwa seluruh tanah yang diklaim oleh masyarakat berada di Areal Konsesi PT.Arara Abadi dengan kondisi Tanaman Hutan Akasia</li> <li>2. Akan dibentuk Tim bersama Masyarakat dan PT Arara Abadi dengan difasilitasi oleh Pemko Dumai untuk menyusun Formulasi penyelesaian Masalah</li> <li>3. Pada pertemuan terakhir disepakati pola penyelesaian dengan Pola Kemitraan yaitu: lahan yang disengketakan dikelola masyarakat dengan tanaman kehidupan produk perusahaan dan perusahaan membantu perlengkapan tanaman dan hasilnya akan ditampung oleh perusahaan.</li> <li>4. Perusahaan juga menawarkan program dana CSR perusahaan untuk bantuan dana pembinaan berbagai usaha masyarakat tempatan.</li> <li>5. Masyarakat dan perusahaan akan melakukan pertemuan-pertemuan formal dan informal untuk menyusun pola kerja sama tersebut</li> </ol>	1. Permasalahan dapat diselesaikan. Bagian pertengahan akan memantau perkembangannya.

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2019)

Sedangkan permasalahan yang telah diselesaikan pada Tahun 2018 berikut adalah Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan

NO	OBJEK PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2.	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2019)

Penyelesaian kasus tanah negara Pemerintah Kota Dumai tahun 2018 dari sembilan kasus telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan



persentase 22,22 % dan ini merupakan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah kota Dumai saat ini.

## E. Lingkungan Hidup

### 1. Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai.

Tabel 2.96 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase penanganan sampah (%)	68	68	69	69	69	70	70	70

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2018, yakni dari 68% di tahun 2011 meningkat menjadi 70% di tahun 2018.

### 2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan

Pertamanan Kota Dumai. Berikut adalah Tabel 2.97 data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.97 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	14 (TPS)	15 (TPS)	16 (TPS)

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

Selama periode 2010-2018 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 12 TPS persatuan penduduk di tahun 2010 meningkat menjadi 16 TPS di tahun 2018.

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

### 3. Peningkatan Suhu Udara dan Kualitas Udara di Kota Dumai

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 22,7 °C – 34,1°C seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.98 (tanpa data tahun 2011). Rata-rata suhu udara tahun 2012-2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2017 menjadi 28,09 °C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2017 masih berada dalam kondisi normal. Pada tahun 2016, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Maret yaitu sebesar 36,8°C. Sedangkan di tahun 2017, suhu udara tertinggi terjadi di bulan April yaitu sebesar 34,1°C.

Tabel 2.98 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai  
Tahun 2010-2017

Indikator	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Suhu rata-rata (°C)	27,64	28,32	28,32	28,32	28,32	28,20	28,09

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel 2.99 berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu kebisingan (ambang batas baku mutu kebisingan 70 dBA) dan TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 [g/Nm<sup>3</sup>]). Dampak kebisingan bagi kesehatan dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, hingga ketulian. Sedangkan tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia, menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari, serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

Tabel 2.99 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2018

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji									
	SO <sub>2</sub>	CO	NO <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	Pb	HC	NH <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> S	TSP	Kebisingan
	(g/Nm <sup>3</sup> )	(g/Nm <sup>3</sup> )	(g/Nm <sup>3</sup> )	(g/Nm <sup>3</sup> )	(g/Nm <sup>3</sup> )	(g/Nm <sup>3</sup> )	ppm	ppm	(g/Nm <sup>3</sup> )	dBA
Simpang Polres Dumai	35,31	956,87	17,81	20,30	0,11	24,63	0,05	<0,0014	151,88	68,00
KLK Dumai	29,47	1.025,7	15,18	22,80	0,05	73,64	0,07	<0,0014	133,07	68,00
Bukit Batrem	25,26	1.124,6	13,17	31,70	0,05	46,24	0,56	<0,0014	102,90	55,00
TPA Mekarsari	23,82	863,74	10,42	37,50	0,02	54,88	0,05	<0,0014	60,26	40,00
Kawasan Industri Dumai (KID)	39,29	1.136,5	7,02	25,70	<0,00069	71,25	0,06	<0,0014	78,00	57,00
Depan Gedung BKD	24,98	865,50	16,24	22,70	0,11	36,36	0,06	<0,0014	105,58	52,00
PT. IBP Industri Lubuk Gaung	27,93	869,40	17,30	27,50	0,15	52,55	0,04	<0,0014	118,32	57,00
Jl. Dermaga ke Purnama	23,82	893,40	10,90	31,30	0,04	34,55	0,05	<0,0014	76,46	65,00

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

#### 4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah yang diproksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.100. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.100 Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2017-2018

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter							
	pH		Kekeruhan (NTU)		Warna (PCo)		Besi (mg/L)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	6,05		31,8		1.752			
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	3,27	3,84	98,0	7,70	1.726	25		0,13
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	6,37		<0,1		0,1			
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	4,18	6,80	<0,1	0,87	6	10		0,0228
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,68	4,99	24,2	10,9	21	121		0,744
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	5,10		48,0		405			
Air Sumur Kec. Dumai Kota	5,63	3,04	38,0	2,85	79	12		0,863
Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter							
	Besi (mg/L)		Kadmium (mg/L)		Nitrat (mg/L)		KMnO <sub>4</sub> (mg/L)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Air Sumur Kel. Tanjung	3,707		0,011		4,9		679,40	

Palas								
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	8,126	0,1300	0,012	<0,003	1,9	12,7	101,10	16,12
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	0,093		0,016		2,0		0,47	
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,084	0,0228	0,011	<0,003	5,8	12	1,26	2,212
Air Sumur Kel. Dumai Barat	0,172	0,7444	0,017	<0,003	0,4	0,7	5,85	12,51
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	3,547		0,010		0,8		68,89	
Air Sumur Kec. Dumai Kota	9,715	0,8630	<0,003	<0,003	0,5	0,5	19,28	8,287

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101 Batas Ambang Baku Mutu Air Sumur

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
Ph		6,5 – 9
Kekeruhan	NTU	25
Warna	PtCo	50
Besi	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10
KMNO <sub>4</sub>	mg/L	10

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2017-2018 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam, hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.

## 5. Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota

Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017 PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai, Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

#### **6. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai**

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2017-2018

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter			
	pH		TSS (mg/L)	
	2017	2018	2017	2018
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,13	7,80	60	144
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	7,15	7,85	124	112
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	7,51	7,81	134	108
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,67	7,85	98	116
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,26	7,85	68	116
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	7,14	7,85	120	108
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,49	7,87	114	104
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung	7,58		20	
Air Dermaga PT. CPI	7,68	7,88	26	108
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,72	7,85	30	122

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di 5 (lima) titik pengujian sampel.

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.103 disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.103 Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
BOD	mg/L	12	Mangan	mg/L	0,1
COD	mg/L	100	Klorida	mg/L	600
P	mg/L	5	Flourida	mg/L	1,5
pH		6 - 9	Sulfat	mg/L	400
DO	mg/L	3	Belerang	mg/L	0,002
NO <sub>3</sub>	mg/L	20	NH <sub>3</sub>	mg/L	0,5
Nitrit	mg/L	0,06	Besi	mg/L	0,3

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)

Tabel 2.104 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2017-2018

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter													
	BOD (mg/L)		COD (mg/L)		Posfat (mg/L)		pH		DO (mg/L)		NO <sub>3</sub> (mg/L)		Nitrit (mg/L)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Sungai Bulu Hala	17,11		65,17		0,083		6,18		2,89		3,20		0,052	
Sungai Teras	14,09	5,936	58,53	67,49	0,186	0,054	3,88	3,49	3,53	3,88	3,50	3,9	0,044	0,030
Sungai Mampu	19,13	5,589	72,83	64,69	0,136	0,096	4,07	3,38	4,00	4,34	3,50	3,3	0,042	0,023
Sungai Nerbit Kecil	13,84	6,927	75,98	73,11	0,099	0,055	3,80	3,12	3,80	4,54	3,20	3,2	0,037	0,034
Sungai Nerbit Besar	17,87	6,333	75,48	66,08	0,141	0,022	3,70	3,29	3,87	4,10	3,30	3,2	0,029	0,027
Sungai Rimbun Jaya	19,38	6,779	73,33	71,70	0,087	0,018	3,01	3,43	3,60	3,93	3,50	3,4	0,035	0,039
Sungai Parit Kitang	11,82	5,341	68,60	63,27	0,074	<0,010	3,14	3,39	3,75	4,43	3,90	3,3	0,035	0,031
Sungai Masjid	14,85		72,23		0,070		4,49		3,10		3,30		0,034	
Sungai Dumai	12,33	4,796	70,60	60,46	0,058	0,033	6,00	5,64	2,79	3,49	2,60	2,8	0,034	0,024
Sungai Selinsing	13,34	5,936	67,57	63,27	0,026	<0,010	7,05	3,45	4,20	3,48	0,50	4,8	<0,017	0,042
Sungai Kepala Beruang	34,72	4,548	70,40	60,46	0,066	0,025	3,38	3,52	3,96	4,81	3,90	4,8	0,039	0,047
Sungai Pelintung	1,32	5,391	69,13	63,27	0,028	<0,010	6,31	3,36	3,31	3,86	0,80	2,3	<0,017	0,022
Sungai Guntung	10,82	5,292	73,20	60,45	0,024	<0,010	3,93	3,29	2,95	4,12	2,80	3,8	0,036	0,039
Sungai Kemeli (Muara)	5,79	5,887	78,45	66,08	0,094	<0,010	5,46	3,02	3,29	4,08	2,40	2,8	0,024	0,017
Sungai Puak	3,80	6,333	77,42	70,29	0,043	0,013	3,66	3,33	3,21	5,10	3,00	2,9	0,029	0,050
Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter													
	NH <sub>3</sub> (mg/L)		Besi (mg/L)		Mangan (mg/L)		Klorida (mg/L)		Flourida (mg/L)		Sulfat (mg/L)		Belerang (mg/L)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Sungai Bulu Hala	0,924		2,417		0,245		922,6		<0,181		116,2		0,013	
Sungai Teras	0,509	0,885	2,103	0,8776	0,207	0,0559	10,9	6,055	0,276	0,915	21,9	41,65	<0,01	0,011
Sungai Mampu	0,816	1,884	0,997	0,0606	0,019	0,0441	129,5	4,070	0,241	<0,181	24,7	35,45	0,033	0,012
Sungai Nerbit Kecil	0,580	1,024	1,423	12742	0,027	0,0952	600,1	164,5	<0,181	<0,181	84,9	96,95	<0,01	0,012
Sungai Nerbit Besar	0,961	0,0687	0,567	0,7379	0,010	0,0294	219,6	15,24	<0,181	<0,181	70,8	39,02	0,024	0,012
Sungai Rimbun Jaya	0,497	0,964	0,773	0,9930	0,013	0,1524	184,4	512,2	<0,181	<0,181	106,9	63,50	0,024	0,014
Sungai Parit Kitang	0,470	0,351	0,666	0,6525	0,010	0,0608	119,1	74,79	0,569	<0,181	87,6	24,81	0,031	0,016
Sungai Masjid	0,633		0,772		0,010		503,7		<0,181		133,0		0,021	
Sungai Dumai	0,958	3,809	0,887	0,7330	0,011	0,0486	227,0	38,07	<0,181	<0,181	64,8	3,602	0,029	<0,010
Sungai Selinsing	4,632	0,539	0,122	0,4242	0,010	0,0314	16.030,5	499,3	0,558	<0,181	83,2	37,57	0,020	0,039
Sungai Kepala Beruang	0,765	1,542	0,882	0,6420	0,010	0,324	1.108,7	264,64	<0,181	<0,181	240,7	36,17	0,023	0,032
Sungai Pelintung	6,046	1,587	0,204	0,9036	0,045	0,1800	11.743,6	902,2	0,465	<0,181	430,7	29,06	<0,01	<0,010
Sungai Guntung	0,583	1,565	1,413	1,0337	0,051	0,0633	3.151,0	5,807	0,437	<0,181	39,7	53,48	<0,01	0,015
Sungai Kemeli (Muara)	0,365	0,0531	0,916	0,8565	0,037	0,2080	6.441,9	8,820	<0,181	<0,181	430,7	168,9	<0,01	<0,010
Sungai Puak	0,445	0,576	1,218	1,0044	0,037	0,1417	1.469,0	46,26	0,360	<0,181	239,5	41,78	0,014	<0,010

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019)



## F. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

### 1. Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari tahun 2011 hingga tahun 2018 (tanpa data tahun 2016) persentase penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2011 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 56,41%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 94,82%.

Tabel 2.105 Kepemilikan KTP Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015*	2017	2018
Kepemilikan KTP	56,41%	61,52%	59,66%	47,95%	94,27%	94,27%	94,82%

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2019)

## 2. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.106 secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.106 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ketersediaan database kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2019)

## 3. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai sejak tahun 2005.

Tabel 2.107 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2019)

## G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Selama kurun waktu 2011-2018 terdapat 41 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 99%. Jumlah posyandu selama kurun waktu 2011-2018

adalah sebanyak 241 posyandu dengan persentase posyandu aktif mulai tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100%. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2011-2018 adalah 90%. Sedangkan persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2012 sampai saat ini adalah sebesar 97%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Satuan	Tahun							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	99	99	99
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	41	41	41	41
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	241	241	241	241	241	241
Persentase Posyandu Aktif	%	97	98	98	99	100	100	100	100
Persentase LPM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	90	90	90
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	96	97	97	97	97	97	97	97

(Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2019)

## H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1. Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai, dari tahun 2012 sampai tahun 2015 jumlah peserta KB aktif terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 jumlah pesertanya turun drastis

menjadi 29.287 peserta dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan kembali jumlah peseta KB aktif yaitu sebesar 33.059 peserta.

Tabel 2.109 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2012-2017

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan peserta KB aktif	8.863	35.597	45.344	55.628	29.287	33.059

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Kota Dumai Tahun 2019)

## 2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.107.

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.110 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Keluarga	55.051	55.051	55.051	55.051	63.527	78.809	82.478	82.478
Keluarga Pra Sejahtera	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118	2.871	2.871	2.871
Keluarga Sejahtera I	11.138	11.138	11.138	11.138	11.138	4.503	4.503	4.503

(Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019)

## I. Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

### 1. Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel 2.111 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.111 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2012-2017

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TERMINAL	BERANGKAT	174.680	116.080	120.225	106.390	105.890	102.670
	DATANG	176.902	116.025	120.401	108.116	108.008	105.532
PELABUHAN	BERANGKAT	270.503	269.925	233.365	123.971	130.789	129.135
	DATANG	273.990	253.645	211.070	103.876	100.342	102.586
BANDARA	BERANGKAT	22.163	22.116	10.625		12.465	11.856
	DATANG	21.320	20.852	10.876		11.782	10.354
	TRANSIT	8.952	8.580	1.385			

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Dari Tabel 2.111 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (palabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun data (2012–2017) jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan (kapal) lebih besar apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

## 2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini.

Tabel 2.112 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	9.898	4.898	4.898	4.762	5.103	4.078	4.075	3395

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019)

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.109 Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau ada terdapat alasan yang lainnya.

## 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu "pintu masuk" bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Tabel 2.113 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019)

Dari tabel 2.110 diatas diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal

penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

#### 4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.114 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.114 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.797	9.797	9.523	10.206	9.920	10.020	8.473

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019)

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2018.

#### 5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 tersaji pada Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	30 Menit	30 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019)

## 6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2011 hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp 29.000,-. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 40.000,- dan biaya tersebut masih dipergunakan hingga saat ini (tahun 2018), berikut apabila ditunjukkan dengan Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rupiah) Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019)

## 7. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak menyebutkan sub indikator yang dipergunakan untuk perhitungan pada formula pemasangan rambu-rambu. Data yang didapatkan hanyalah data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n, dimana pada tahun 2015 terpasang rambu lalu lintas tiang tunggal sebanyak 952 unit, dan rambu cantilever type F sebanyak 389 unit, RPPJ sebanyak 87 unit, serta RPPJ portal bentang sebanyak 4 unit.



## J. Komunikasi dan Informatika

### 1. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan public kepada masyarakat. Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2018

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik		
1	Sistem Informasi Pendidikan	- Dapodik (Data Pokok Tenaga Kependidikan) - SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan) - BeeSMART (ujian try out online)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	- SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) - ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Perlatan Kesehatan) - SIPERMON (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi)	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal dan Informasi Daerah Binaan	- SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima) - SIDARBIN (Sistem Informasi Daerah Binaan)	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	- SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation)	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	- Sistem Informasi Perizinan (SIPERI) - SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secar Elektronik) - OSS ( Online Single Submission)	DPMPPTSP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	- E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai) - E-Billing ( Elektronik Pajak Online untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan - SIMPATDA (Sistem Informasi Majemen Pendapatan Daerah)	BAPENDA Kota Dumai

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
9	CCTV Online	- cctv.dumaikota.go.id	Dinas Perhubungan Kota Dumai
<b>II Administrasi dan Manajemen Umum</b>			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	- Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	- www.lpse.dumaikota.go.id	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	- www.dprd.dumaikota.go.id - www.jdih.dumaikota.go.id	- Setwan Kota Dumai - Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	- Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) (Pasif)	DISPERSIP Kota Dumai
7	Sistem Informasi Perpustakaan	- Integrated Libery Sistem (INLIS lite)	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat
9	Sistem Aplikasi Perkantoran surat-menyerurat	- E-Office	Bagian Umum Setdako Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	- siak.depdagri.go.id	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
<b>II Administrasi Legislasi</b>			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
<b>IV Manajemen Keuangan</b>			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
<b>VI Manajemen Kepegawaian</b>			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	- Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian(simpeg.dumaikota.go.id)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

(Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2019)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

## 2. Website Milik Pemerintah Daerah

*Website* milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.118 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2019)

## K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

### 1. Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2010-2018 tiap tahunnya berfluktuatif sesuai Tabel 2.119 dibawah ini.

Tabel 2.119 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010-2018

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Persentase Koperasi Aktif	64	71	55	83	83	54	81	82,71

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2018.

## 2. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan.

Tabel 2.120 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2012-2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Usaha Mikro dan Kecil	10.700	11.232	11.797	11.797	12.497	12.672	14.874

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai sampai dengan Tahun 2018 hanya berjumlah 8 delapan orang, dengan 1 kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1 : 1.859. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel 2.121 berikut:

Tabel 2.121 Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015-2018

Indikator	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pendamping UKM	7	7	7	8

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2019)

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2018 perkecamatan tersaji pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2016 - 2018

No	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Dumai Barat	2.377	2.402	2.657
2	Dumai Timur	2.713	2.738	3.051
3	Bukit Kapur	1.683	1.708	2.002
4	Medang Kampai	1.118	1.143	1.476
5	Dumai Selatan	964	989	1.317
6	Dumai Kota	2.153	2.178	2.521
7	Sungai Sembilan	1.489	1.514	1.850

No	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	JUMLAH	12.497	12.672	14.874

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2019)

Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2016 - 2018 mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2016 terdapat 12.497 UMKM, tahun 2017 mengalami kenaikan 175 UMKM dan pada tahun 2018 jumlah UMKM di kota dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 2.202 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya.

## L. Penanaman Modal

### 1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2011-2018, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perusahaan PMDN	42	47	53	57	60	63	64	24

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perusahaan PMA	52	56	62	66	69	76	84	4

(Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2019)

## 2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai investasi PMA dan PMDN terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai PMA sebesar 323,45 juta USD dan nilai PMDN sebesar 1,15 triliun Rupiah. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.124. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dumai Dalam Angka Tahun 2017, nilai investasi PMDN di Kota Dumai tahun 2016 adalah sebesar 2,32 triliun Rupiah dan PMA sebesar USD 1.016,34. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2018 sebesar 2,007 triliun.

Tabel 2.124 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2012-2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PMDN (Milyar Rp)	11.678,35	208.541,82	1.151,99	7.883,71	2.318,98	2.007,20	
PMA (juta \$)	9.300.899,17	5.960,87	323,45	977,36	236,92	132,12	
Nilai Investasi PMA dan PMDN							2007,31

(Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2019)

## 3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun

2018, jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN tahun 2016 dan tahun 2017 berturut-turut sebanyak 2.833/54 orang dan 2.101/48 orang. Sedangkan untuk jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMA tahun 2016-2017 berturut-turut sebanyak 476/8 orang dan 224/8 orang. Berdasarkan data tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah 24,25 dan 16,09.

#### 4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.125. Pertumbuhan realisasi investasi PMDN dan PMA tertinggi terjadi pada tahun 2010 meningkat hingga mencapai 1457,5 %. Pada tahun 2007-2008, Kota Dumai mengalami penurunan nilai investasi PMA dan PMDN hingga -95,3%, tetapi pada tahun 2010-2012 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.125 Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Nilai Realisasi PMDN	9,99%	1,95%	24,10%	0,11%	0,74%	102,21%	103,81	31,42
Persentase Nilai Realisasi PMA	0,02%	21,46 %	9,60%	0,45%	1,27%			

(Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2019)

## M. Kepemudaan dan Olahraga

### 1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang

dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.126 Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	52	55	55	47

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2019)

## 2. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2018 berjumlah 29 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat, Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlet belum memadai.

Tabel 2.127 Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah organisasi olahraga	25	25	25	29	29	29	29	29

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2019)

## 3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2011 adalah 3 kegiatan dan pada tahun 2018 berjumlah 2 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.



Tabel 2.128 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kegiatan kepemudaan	3	2	2	3	2	1	2	2

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2019)

Rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebanyak 984 orang.

#### 4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2011 adalah 5 kegiatan dan pada tahun 2018 berjumlah 6 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

Tabel 2.129 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kegiatan olahraga	5	8	4	4	4	5	3	6

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2019)

#### 5. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga sampai tahun 2015 berjumlah 1 lapangan olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

#### N. Statistik

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku "Kota Dalam Angka" dan buku "PDRB Kota" telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010 hingga 2016 tersedia keduanya.

Tabel 2.130 Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2010-2017

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## O. Kebudayaan

### 1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2010 hingga tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 2 kegiatan, sempat naik pada tahun 2012 menjadi 4 kegiatan, namun terus turun hingga pada tahun 2016 hanya tinggal 2 kegiatan saja. Tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2018 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antusiasme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.131 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4	1	2	2	2	5	5

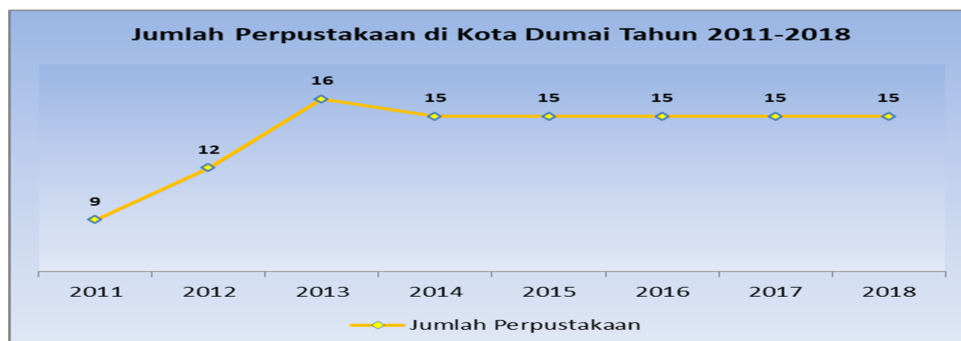
(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2019 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2019)

## P. Perpustakaan

### 1. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2011 hingga tahun 2015 relatif mengalami pertambahan. Pada tahun 2011 jumlah perpustakaan adalah 9 unit, dan pada tahun 2018 jumlah

perpustakaan naik menjadi 15. Berikut Gambar 2.52 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2011-2018



Gambar 2.52 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2011-2018  
(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2019)

## 2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2011 hingga tahun 2018 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2011 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,35 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,49, namun terus terjadi penurunan karena penambahan jumlah penduduk. Berikut Tabel 2.132 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2.132 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perpustakaan	9	12	16	15	15	15	15	15
Jumlah Penduduk per 10.000	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,35	0,45	0,58	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

## 3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2010 hingga 2017 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Tabel 2.130. Pada tahun 2010 rasio jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun sebesar 162,03, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2017 naik menjadi 948,99.

Tabel 2.133 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2010-2018

Indikator	Tahun								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	4.121	5.964	9.555	12.846	15.704	23.985	24.902	28.242	29.370
Jumlah Penduduk per 10.000	25,43	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	162,03	229,46	356,50	468,68	560,64	838,64	853,10	948,99	968,37

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, diolah)

#### 4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 memiliki tren perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 jumlah koleksi buku adalah sebanyak 11.789 eksemplar, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 57.206 eksemplar seperti yang tersaji Pada Gambar 2.50. Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2017 tetap karena dari tahun 2014 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan buku, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku ke perpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain ke perpustakaan kelurahan maupun ke perpustakaan rutan.



Gambar 2.53 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2010-2018 Kota Dumai Tahun 2020

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2019)

## Q. Kearsipan

Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134 Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Dokumen Arsip
2012	83
2013	102
2014	1.006
2015	748
2016	1.590
2017	1.791
2018	1.824

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2019)

### 2.1.3.3. FOKUS URUSAN LAYANAN PILIHAN

#### A. Pariwisata

##### 1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah. Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.135. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di kota Dumai yaitu sebesar 122.627 orang.

Tabel 2.135 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kunjungan Wisata (orang)	71.133	67.060	90.723	71.274	122.627	52.020	45.340	46.590

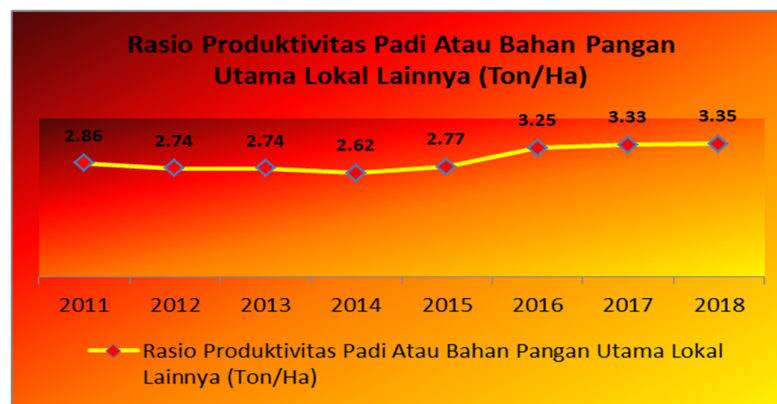
(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2019)

## B. Pertanian

### 1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang berhasil dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik-turun pada. Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2010 sampai tahun 2017 dengan kecenderungan meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.54. Pada tahun 2017 produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami peningkatan sebanyak 28,6% (2,59 ton/ha) dari tahun 2010 menjadi 3,33 ton/ha, Tahun 2018 produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai sebesar Rp.3,35 ton/ha.



Gambar 2.54 Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2011-2018

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2019)

Adapun jumlah kelompok tani perkecamatan pada saat ini adalah sebagai berikut Tabel 2.136 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Tabel 2.136 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok

No	Kecamatan	Jumlah kelompok tani (poktan)	Jumlah kelas kelompok			
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Bukit Kapur	95	80	14	1	0
2	Dumai Barat	32	32	0	0	0
3	Dumai Kota	8	8	0	0	0
4	Dumai Selatan	33	30	3	0	0
5	Dumai Timur	35	34	1	0	0
6	Medang Kampai	50	47	3	0	0
7	Sungai Sembilan	118	91	27	0	0
Total		371	322	48	1	0

(Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai Tahun 2019)

Produktivitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh sumber daya petani yang handal, tabel berikut menyajikan jumlah petani yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pertanian. Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2017 tersaji pada table 2.137. Dari Tabel 2.137 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2017 jumlah kelompok tani yang telah bina sejumlah 52,8% dari seluruh kelompok tani yang ada.

Jumlah kelompok tani yang telah diberi bantuan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada table 2.137. Pada Tahun 2018 jumlah kelompok tani yang diberi bantuan sebanyak 88 kelompok tani. Bantuan yang diberikan berupa sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Tabel 2.137 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	130	33	33	88

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2019)

## 2. Luas Areal Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di

setiap kecamatan di Kota Dumai tersaji pada Tabel 2.138. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Tabel 2.138 Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Tanaman				
	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Pinang	Kakao
Bukit Kapur	12.745,0	1.254,0	84,0	7,5	1,0
Dumai Barat	118,0	-	220,0	14,0	2,0
Dumai Kota	-	-	-	-	-
Dumai Selatan	355,0	6,0		9,5	3,5
Dumai Timur	67,0	-	26,5	6,0	-
Medang Kampai	3.806,0	720,0	145,0	11,0	4,0
Sungai Sembilan	20.988,0	463,0	1.016,0	65,0	16,0
Jumlah	38.079,0	2.443,0	1.539,5	113,0	26,5

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2019)

Selain kelapa sawit, areal perkebunan di Kota Dumai ditanami karet, kelapa, pinang, dan kakao. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

### 3. Populasi Ternak Unggulan

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, jumlah ternak unggulan sampai tahun 2015 adalah sebanyak 5.235 satuan ternak. Jumlah ternak unggulan ini terus bertambah sampai tahun 2018 dengan jumlah berturut-turut 5.463 satuan ternak di tahun 2016 dan 5775 satuan ternak di tahun 2017 serta sejumlah 6.253 satuan ternak pada tahun 2018, Sedangkan untuk jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis, kondisi di tahun 2015 terdapat 35 kasus. Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus.



#### 4. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2010-2017 (%)

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,35	6,50	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

#### C. Energi dan Sumber Daya Mineral

##### 1. Pertumbuhan Sektor Pengalihan Dalam PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan pengalihan di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor pengalihan. Sektor pengalihan relatif mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2017 berdasarkan data dari BPS tahun 2018 dikarenakan RTRW Kota Dumai yang belum disahkan sehingga terkendala perizinan.

#### D. Kelautan dan Perikanan

##### 1. Produksi Perikanan Laut

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.140 berikut ini.

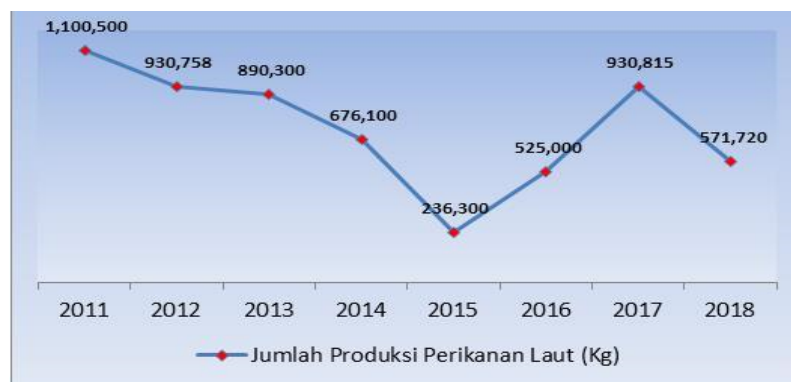
Tabel 2.140 Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Jenis Ikan	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tenggiri			22,200					
Parang-parang			24.800					

Jenis Ikan	Tahun							
	2011	012	013	014	015	016	017	018
Senangin			17.100					
Kakap Hitam/ Putih			17.000					
Gulama			21.800					
Lomek			23.500				0	
Biang			21.600					
Pari			0					
Bawal			0					
Mayung			0					
Ikan lainnya	0	4	164.200	0		0	1	
Udang lainnya	0	2	578.100	0		0	9	4
Jumlah	500	8	0	0	0	0	5	0

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya. Dari tahun ke tahun, perkembangan produksi perikanan laut fluktuatif. Pada tahun 2011 produksi perikanan laut mencapai 1.100.500 Kg. Produksinya terus mengalami penurunan setiap tahunnya sampai tahun 2015 menjadi 236.300 Kg. Kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 menjadi 930.815 Kg kemudian menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 571.720 Kg. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2011-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.55.



.Gambar 2.55 Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai Tahun 2011-2018

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## 2. Produksi Perikanan Budidaya

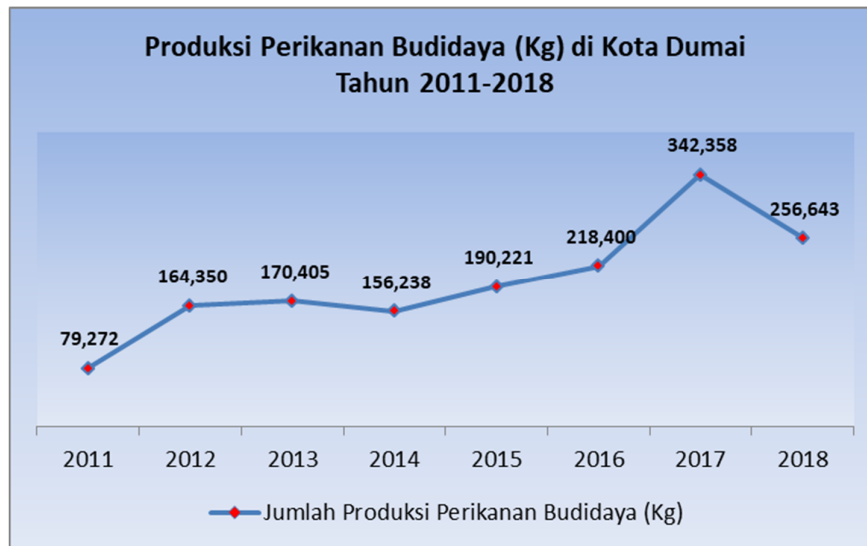
Kota Dumai memiliki potensi perikanan lain seperti perikanan darat dalam bentuk perikanan kolam dan tambak tetapi perikanan darat Kota Dumai lebih didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai. Berikut disajikan Tabel 2.141 Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.141 Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Jenis Ikan	Tahun							
	011	012	013	014	015	016		
Ikan Mas			0					
Ikan Nila			850					
Gurami			1.350					
Lele		0	138.297	2	1	0	6	3
Patin			18.848					
Bawal			3.700					
Bandeng								
Udang								
Jumlah		0	5	8	1	0	8	3

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Perikanan darat yang ada di Kota Dumai adalah berupa budidaya dalam kolam. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam dengan perkembangan produksi perikanan budidaya dari tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami naik-turun, seperti yang tersaji pada Gambar 2.56. Pada Tahun 2011 produksi perikanan budidaya mencapai 79.272 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2017 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 342.358 Kg.



Gambar 2.56 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## E. Perdagangan

### 1. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Berikut tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2017.

Tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2017

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	19,39	20,00	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	17,33

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

### 2. Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai ekspor ini mencapai USD 12.928.272.127,19 pada tahun 2017. Nilai ekspor

membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel 2.143 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.143 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2010-2017

Uraian (USD 000)	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017
	11,770,875,896	16,485,319,670	16,485,319,670	14,195,672,775	17,746,297,425	10. 889.408.942	12.928.272.127,19
	504,700,272	1,175,177,629	1,175,177,629	1,064,462,336	778,071,820	597.294.415	498.456.718,00
Ekspor Bersih Perdagangan	11.266.175.624	15.310.142.041	15.310.142.041	13.131.210.439	16.968.225.605	10.292.114.527	12.429.815.409,19

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

## F. Perindustrian

### 1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusinya pada PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam table 2.144 berikut ini.

Tabel 2.144 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2017

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sektor Industri Pengolahan (%)	52,74	51,44	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	54,75

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

### 2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut.

Tabel 2.145 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2017

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	5,90	2,70	3,78	6,19	2,92	5,71	5,34

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel 2.146 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.146 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
	<b>I. INDUSTRI KERAJINAN</b>			
1	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air mineral	KEL. PURNAMA
			Tempat Tisu	KEL. BAGAN KELADI
			Tempat Telur	KEL. STDI
			Kain Songket	KEL. LAKSAMANA
			Tepak Sirih	Ke. RIMBA SEKAMPUNG
			Tempat Buah	KEL. BUKIT TIMAH
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air mineral	KEL. PURNAMA
			Gehal	KEL. BAGAN KELADI
			Tempat Telur	KEL. BINTAN
			Bunga Kristal	KEL. RIMBA SEKAMPUNG
			Tepak Sirih	KEL. BUKIT DATUK
			Tempat Buah	
			Tempat Tisu	
3	Kerajinan Manik Manik	3	Tempat Tisu	KEL. BUKIT DATUK
			Tempat Bunga	KEL. BAGAN BESAR
			Tempat air mineral	KEL. RATU SIMA
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas kaki	KEL. MUNDAM
			Hiasan Dinding	KEL. PURNAMA
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	KEL. RIMBA SEKAMPUNG
			hiasan Jilbab	KEL. RATU SIMA
6	Kerajinan Anyaman Pandan	10	Tikar	KEL. MUNDAM
7	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	KEL. RIMBA SEKAMPUNG
			Tas	KEL. SUKAJADI
8	Kerajinan plastik tali rafia	5	Bunga	KEL. MUNDAM
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	KEL. JAYA MukTI
			Pakaian	KEL. BULUH KASAP
			Lambang	KEL. TELUK BINJAI
			Mukena	KEL. BINTAN
			Jilbab	KEL. RATU SIMA
				KEL. PURNAMA
				KEL. BUKIT DATUK
				KEL. SUKAJADI
10	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	KEL. SUKAJADI
			Pakaian Olah Raga	KEL. BULUH KASAP
			Celana	KEL. BINTAN
			Jas	KEL. PURNAMA
			Baju Kaos	KEL. DUMAI KOTA
				KEL. RIMBA SEKAMPUNG
				KEL. JAYA MukTI
				KEL. BUKIT NENAS
				KEL. PELINTUNG
				KEL. LUBUK GAUNG
				KEL. BASILAM BARU
				KEL. RATU SIMA
				KEL. KAYU KAPUR
				KEL. BAGAN BESAR

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
				KEL. BUKIT TIMAH
				KEL. MEKAR SARI
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	3	KAPAL	KEL. RATU SIMA
			SOVENIR	KEL. MUNDAM
			MEJA	KEL. KAYU KAPUR
			BUNGA	
12	Kerajinan Batik	8	KAIN PANJANG	KEL. PURNAMA
			BAHAN BAJU	KEL. BAGAN KELADI
			HIASAN DINDING	
13.	Kerajinan Rotan	2	KURSI, MEJA, FERTISI	KEL. BINTAN
			KERANJANG PARSEL	KEL. DUMAI KOTA
			DLL	
II.	<b>INDUSTRI PERCETAKAN DAN ADVERTISING</b>			
14.	Ind. Percetakan	18	BARANG CETAKAN	Kel. Teluk Binjai
				Kl. Rimbaseskampng
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	BALEHO	KEL. BINTAN
			NEON BOK	KEL. SUKAJADI
			SPANDUK	KEL. LAKSAMANA
			STEMPEL	KEL. JAYAMUKTI
			PLAKAT	
			CENDRAMATA/PAMPHLET	
			BANNER	
<b>JUMLAH PENGRAJIN</b>		<b>192</b>		

(Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pembedayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2019)

#### 2.1.3.4. FOKUS URUSAN PENUNJANG

##### B. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan Perubahan RPJMD periode 2016-2021 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan perda nomor 02 Tahun 2018

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86

tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

### **C. Administrasi Pemerintahan**

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupun garis batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menegaskan bahwa "Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis".

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan, yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan Walikota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan Walikota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2011-2017 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai



pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242,098 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri, bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan, sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas, namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

#### D. Urusan Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2015-2018 tersaji pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015-2018

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
	SAKIP 2015	SAKIP 2016	SAKIP 2017	SAKIP 2018
Nilai	50,20	51,76	54,02	58,46
Predikat	CC	CC	CC	CC

(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hasil penilaian

LPPD Kota Dumai tingkat Provinsi tahun 2016 adalah peringkat 8, naik 1 peringkat dari tahun 2015.

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2016 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 67,32%, naik menjadi 69,15% pada tahun 2017. Sedangkan untuk indikator jumlah dokumen yang direview, capaiannya pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah sebanyak 2 dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan LKPD) dan 3 dokumen (Rencana Kerja Anggaran, LKPD dan Laporan Kinerja).

#### E. Urusan Keuangan

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2012 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PAD (Milyar Rp.)	115,40	157,47	153,22	162,54	182,35	265,47	279,65
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	18,06	65,84	59,24	64,44	71,85	94,99	127,96
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	(31,03)	264,48	(10,02)	8,78	11,50	22,95	25,77
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	45,27	35,67	25,67	15,22	29,44	35,86	30,68
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	39,00	(21,02)	(28,04)	(40,71)	93,46	41,93	(16,88)
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	N/A	26,53	29,34	29,23	33,67	50,42	74,44
Persentase Peningkatan PBB (%)	N/A	N/A	10,59	(0,39)	18,61	45,44	32,27
Belanja Daerah Kota Dumai (Milyar Rp.)	952,16	1.212,89	1.291,02	1.044,12	1.259,20	1.203,26	1142,38
Belanja Pendidikan (Milyar Rp.)	269,15	318,88	338,19	382,06	381,54	370,73	228,48
Persentase Belanja Pendidikan (%)	28,27	26,29	26,20	36,59	30,30	32,46	25,86
Belanja Kesehatan (Milyar Rp.)	136,94	173,27	192,67	216,83	260,62	270,31	243,77
Persentase Belanja Kesehatan (%)	14,38	14,29	14,92	20,77	20,70	21,78	21,34

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2019 dan BPKAD Kota Dumai Tahun 2019)

Dari Tabel 2.148 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2018 meningkat sebanyak 130,04% dari PAD tahun 2012, dimana persentase PAD kota Dumai tahun 2018 terhadap pendapatan daerah kota Dumai Tahun 2018 yaitu sebesar 22,56 %. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2018 berturut-turut adalah sebesar 127,96 Milyar dan 30,68 Milyar seperti yang tersaji pada Tabel 2.148. Pendapatan yang berasal dari pajak daerah selama periode 2012-2018 fluktuatif, pada tahun 2018 pajak daerah meningkat sebesar 34,71% dari tahun sebelumnya. Kondisi retribusi daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami penurunan dengan total penurunan di tahun 2015 cukup tajam yaitu sebesar 40,71%. Sedangkan retribusi daerah tahun 2016 meningkat sebesar 93,46% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,68%. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2015 penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 115 juta Rupiah, namun pada tahun 2016 kinerjanya kian membaik karena terjadi peningkatan penerimaan PBB sebesar 18,61% dari tahun sebelumnya dan terus meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 47,64% dari tahun sebelumnya.

Disisi lain, dari Tabel 2.148 diatas juga terlihat bahwa selama periode 2012-2018 lebih dari 29,42% belanja daerah Kota Dumai disalurkan untuk pemenuhan belanja pendidikan, tetapi perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2018 persentase belanja pendidikan ini mengalami penurunan sebesar 6,60% dari tahun sebelumnya menjadi 25,86%. Penurunan ini juga terjadi pada belanja kesehatan, tetapi penurunannya tidak signifikan, hanya sebesar 0,44% yaitu dari 21,78% pada tahun 2017 turun menjadi 21,34% di tahun 2018.

#### **F. Urusan Kepegawaian**

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar; (2) Persentase menurunnya ASN

dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi; (3) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja; dan (4) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Untuk mengakses data/informasi kepegawaian secara cepat, lengkap dan benar maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai telah memiliki database Pegawai Negeri Sipil se-Kota Dumai yang akurat dan *up to date* dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Pasca disyahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi direvisi menjadi persentase pelanggaran disiplin; dan (2) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja direvisi menjadi persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2011-2018 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2011-2018 tersaji pada Tabel 2.149 dan Tabel 2.150.

Tabel 2.149 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	3	6	18	12	6	6	12	2

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2019)

Tabel 2.150 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural								
- PIM II	8	5	-	-	2	-	-	2
- PIM III	-	40	11	2	5	2	-	15
- PIM IV	-	160	80	30	40	-	-	-

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2019)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2018 tingkat disiplin ASN kian membaik yang tercermin dari kasus pelanggaran disiplin yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun di tahun 2017 jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin terjadi peningkatan yaitu sebanyak 12 orang. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan signifikan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sebanyak 2 orang.

Selama periode 2011-2018 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, baik itu dalam bentuk Diklat PIM II, PIM III, dan PIM IV seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.150. Namun pada tahun 2017 diklat-diklat tersebut tidak bisa terselenggara karena terdapatnya beberapa kendala ataupun keterbatasan. Kondisi sampai tahun 2017, masih terdapat ASN yang belum mengikuti Diklat PIM dengan rincian yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 12 orang, PIM III sebanyak 32 orang, dan PIM IV sebanyak 115 orang. Kemudian pada tahun 2018 telah dilaksanakan kembali pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN dengan rincian untuk Diklat PIM II sebanyak 2 orang, Diklat PIM III sebanyak 15 orang. Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai maka dirasa perlu untuk melaksanakan program-program terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Selama periode 2011-2018 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.151 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2010-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pejabat Eselon II	28	25	24	29	24	24	21	31

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2019)

## 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.1.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

#### A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

##### 1. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Berdasarkan data tahun 2017, terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat Kota Dumai adalah sebesar Rp 1.189.815. Besaran pengeluaran untuk makanan dan non makanan terlihat seimbang. Pengeluaran untuk makanan mencapai Rp. 602.559, sedangkan pengeluaran untuk non makanan mencapai Rp. 587.256. Berikut Tabel 2.152 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.152 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai

No	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per Bulan	
		Rupiah	%
1	Makanan	602.559	50,64
2	Bukan Makanan	587.256	49,36
	Jumlah	1.189.815	100,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

### 2.1.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR

#### A. Perhubungan

##### 1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang

jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel 2.153 yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

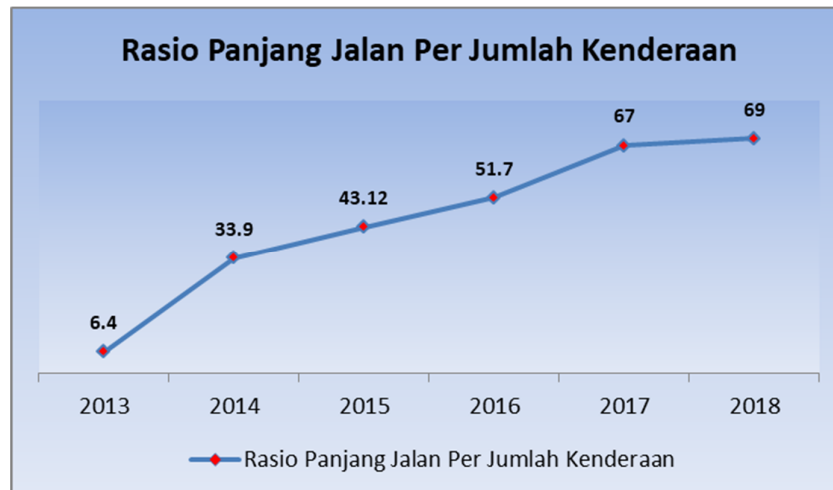
Tabel 2.153 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang jalan (km)	1.561,2	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2
Jumlah kendaraan	9.999	61.135	64.111	61.900	80.242	82.649
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1 : 6,4	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 67	1 : 69

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 1:6,4 di tahun 2013 menjadi 1:69 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk. Adapun jumlah kendaraan per panjang jalan selama tahun 2013-2018 tersaji pada Gambar 2.57.





Gambar 2.57 Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai Tahun 2013-2018  
(Sumber: Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

## 2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum memiliki kesamaan dengan indikator jumlah arus penumpang angkutan umum pada urusan perhubungan dalam aspek pelayanan umum. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum dirinci berdasarkan jumlah barang dan status barang.

Tabel 2.154 Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2013-2018

Prasarana Angkutan	ORANG/ BARANG	JENIS PENUMPANG	2013	2014	2016	2017	2018
	PELABU HAN	ORANG	BERANGKAT	269.925	233.365	235.200	102.670
DATANG			253.645	211.070	196.451	105.532	9.549
BARANG		MUAT	32.582.663	22.193.164	18.316.097	129.135	189.043
		BONGKAR	3.685.665	9.134.493	3.687.960	102.586	176.261
BANDARA	ORANG	BERANGKAT	22.116	10.625	30.635	11.856	NA
		DATANG	20.852	10.876	30.858	10.354	NA
		TRANSIT	8.580	1.385	12	NA	NA
	BARANG	BONGKAR	65.486	9.764	64.663	NA	NA
		MUAT	9.192	1.259	71.713	NA	NA
	BAGASI	BONGKAR	257.022	348.342	161.956	NA	NA
		MUAT	249.696	103.900	171.458	NA	NA
	POS PAKET	BONGKAR	0	0	0	NA	NA
		MUAT	0	0	0	NA	NA
	TERMINAL	ORANG	BERANGKAT	116	NA	NA	NA

Prasarana Angkutan	ORANG/	JENIS	2013	2014	2016	2017	2018
	BARANG	PENUMPANG					
		DATANG	116	NA	NA	NA	NA

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas (tanpa data tahun 2015), terlihat bahwa jumlah barang yang dimuat/dibongkar melalui pelabuhan laut dalam rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2018 mendominasi kegiatan pengangkutan di pelabuhan Kota Dumai, hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor-impor dilakukan melalui pelabuhan.

## **B. Penataan Ruang**

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Luasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016. 7.716,98 Ha atau 15,2 % dari luas seluruh wilayah budidaya (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016). Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 195.386,2 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

## **C. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

### **1. Jumlah Penginapan/ Hotel**

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2011, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 21 unit. Jumlah hotel

terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota dengan 12 unit hotel. Berikut tabel 2.155 Banyaknya Hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.155 Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2011-2018

Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bukit Kapur	1	1	1	1	1	24	28	30
Medang Kampai	0	0	0	0	0			
Sungai Sembilan	0	0	0	1	0			
Dumai Barat	2	3	3	4	4			
Dumai Timur	7	7	7	8	8			
Dumai Kota	10	11	11	12	12			
Dumai Selatan	1	1	1	2	2			
Jumlah	21	23	23	28	27			

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

### 2.1.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

#### A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

##### 1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 459. Kondisi tersebut semakin meningkat hingga tahun 2014 menjadi 861. Peningkatan Jumlah kasus kriminalitas kota Dumai salah satunya diakibatkan karena kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas kota Dumai cenderung meningkat, namun tingkat penyelesaiannya rata-rata diatas 50%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156 Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2010-2017

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka kriminalitas	459	446	454	642	861	97*	474	665
% Diselesaikan	49,89	73,54	67,40	70,72	69,34	NA	NA	74,58

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

##### 2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 5 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157 Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Pendaftaran Penanaman Modal	5 hari
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	5 hari
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	5 hari
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 hari
5	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	5 hari
6	Izin Lokasi	5 hari
7	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	5 hari
8	Izin Klinik	5 hari
9	Izin Klinik Gigi	5 hari
10	Izin Penyelenggaraan Optical	5 hari
11	Izin Apotik	5 hari
12	Izin Toko Obat	5 hari
13	Izin Laboratorium	5 hari
14	Izin Rumah Bersalin	5 hari
15	Izin Praktek Terapi Wicara	5 hari
16	Izin Praktek Fisioterapis	5 hari
17	Izin Praktek Bidan	5 hari
18	Izin Dokter Spesialis	5 hari
19	Izin Dokter Umum	5 hari
20	Izin Dokter Gigi	5 hari
21	Izin Praktek Perawat Gigi	5 hari
22	Izin Refraksionis Opician	5 hari
23	Izin Pengobatan Tradisional	5 hari
24	Izin Depot Air Isi Ulang	5 hari
25	Izin Operasional Rumah Sakit	5 hari
26	Izin Praktek Perawat Mandiri	5 hari
27	Izin Praktek Tukang Gigi	5 hari
28	Izin Praktek Apoteker	5 hari
29	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5 hari
30	Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum	5 hari
31	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
32	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
33	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
34	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
35	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
37	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
38	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
39	Izin Masuk Kota	5 hari
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 hari
41	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari

42	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
43	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
44	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari
45	Izin Usaha Toko Modern	5 hari
46	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5 hari
47	Izin Usaha Perkebunan	5 hari
48	Izin Pengelolaan Sarang Burung Waleet	5 hari
49	Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	5 hari
50	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	5 hari
51	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5 hari
52	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	5 hari
53	Izin Penggunaan Tower Crane	5 hari
54	Izin Penggunaan Bejana Tekan	5 hari
55	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	5 hari
56	Izin Penggunaan Motor Diesel	5 hari
57	Izin Penggunaan Penyalur Petir	5 hari
58	Izin Lingkungan (AMDAL)	5 hari
59	Izin Lingkungan (UKP-UPL)	5 hari
60	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	5 hari
61	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	5 hari
62	Izin Pembuangan Air Limbah	5 hari
63	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	5 hari
64	Izin Turap	5 hari
65	Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	5 hari
66	Izin Usaha Peternakan	5 hari
67	Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	5 hari
68	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	5 hari
69	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 hari
70	Izin Penggunaan Racun Api	5 hari
71	Izin Reklame/Spanduk	5 hari
72	Izin Warnet	5 hari
73	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5 hari
74	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	5 hari

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2019)

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2011 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada table 2.158 berikut ini :

Tabel 2.158 Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai

No	Jenis Izin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	983	934	698	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	952	1191	1010	1087	1029	1275	591	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	765	744	839	1038	878	1055	795	11
4	TDP PO	239	212	248	413	313	-	-	-
5	TDP CV	343	416	375	347	338	-	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	37	50	60	98	60	-	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	83	63	206	145	230	-	-	-
8	TDP PT. Perubahan	53	51	37	64	23	-	-	-
9	TDP Koperasi	38	72	21	15	29	-	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	1	-	-	-	-	-	-	-

11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	2	-	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	353	313	267	58	32	-	-	35
15	Izin Praktek Dokter	-	87	-	-	-	-	-	74
16	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Izin Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	74	-	-	-	-
18	Izin Penyelenggaraan Optical	-	2	2	6	5	-	1	1
19	Izin Apotik	-	8	-	9	5	-	13	6
20	Izin Toko Obat	-	13	13	9	10	1	11	9
21	Izin Praktek Laboratorium	-	-	-	-	-	-	1	-
22	Izin Klinik/Balai Pengobatan	-	5	6	6	9	-	-	8
23	Izin Rumah Bersalin	-	1	-	-	-	-	-	-
24	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Izin Praktek Fisioterapi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Izin Praktek Bidan	-	22	5	20	25	-	57	36
27	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Izin Racun Api	-	115	289	496	515	477	262	54
32	Izin Minuman Beralkohol	-	-	11	1	17	-	-	-
33	Izin Reklame	-	4	18	74	56	-	26	50
34	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	-	-	35	-	121	-	143	2
35	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	12	-	-	-
36	Izin Pantli Pijat	-	-	-	-	3	-	-	-
37	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	410	226	80	364	296	166	11
38	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	-	1	-	-	-	-	-
39	Izin Pendidikan Non Formal	-	9	-	-	4	-	-	-
40	Izin Pengambilan Air	-	-	3	-	-	-	-	-
41	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	-	1	-	-	-	-	-
43	Sertifikat Laik Operasi	-	-	3	-	-	-	-	-
44	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	-	-	2	8	22	30	27	20
	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	-	1	-	-
45	Surat Penangkapan Ikan	-	20	5	-	-	-	-	-
46	Surat Izin Usaha Perikanan	-	6	5	-	-	-	-	-
47	SIUP Cabang	13	53	-	-	-	-	-	-
48	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	-	-	21	-	-
49	Izin Karoke	-	-	-	-	-	35	-	-
50	Izin Salon	-	-	-	-	-	1	-	-

51	Izin Permainan	-	-	-	-	-	1	-	-
52	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	-	-	37	17	28
53	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	-	1144	890	64
54	Izin Pendirian Sekolah Swasta	-	-	-	-	-	4	1	2
55	Izin Klinik Rawat Jalan	-	-	-	-	-	-	4	-
56	Izin Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	13	8
57	Izin Perawat	-	-	-	-	-	-	2	-
58	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	-	-	-	-	-	1	-
59	Izin Pengobatan Tradisional	-	-	-	-	-	-	1	-
60	Izin Depot Air Isi Ulang	-	-	-	-	-	-	3	4
61	izin Praktek Tukang Gigi	-	-	-	-	-	-	10	-
62	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	-	-	-	-	-	-	5	-
63	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	-	-	-	-	-	12	25
64	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	-	-	-	-	-	-	6	9
65	Izin Pembuangan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	4	-
66	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	211	83
	Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	-	-	-	-	35
	aran Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	24
JUMLAH		3862	4801	4386	4048	4100	4378	3273	2754

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2019)

### 3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut

oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

#### **2.1.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA**

##### **A. Ketenagakerjaan**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

##### **1. Persentase Lulusan S1/S2/S3**

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat



pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlahnya mencapai 607 orang, pada tahun 2017 menurun menjadi 496. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.159.

Tabel 2.159 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2011-2017

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Lulusan S1/S2/S3	607	702	817	678	725	705	496
Jumlah Penduduk	262.976	271.523	280.027	280.109	285.967	291.908	297.638
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	0,23%	0,26%	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	0,17%

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018, Diolah)

## 2. Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 0,50, yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 0,50 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda penduduk tua. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2017 rasio ketergantungan sebesar 0,50. Dengan kata lain penduduk usia kerja di Kota Dumai masih

dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Rasio ketergantungan di Kota Dumai sebesar 0,50 pada tahun 2017, rasio ketergantungan kota Dumai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cenderung menurun.

### 3. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Berikut tabel 2.160 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai.

Tabel 2.160 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2012-2018

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Jumlah Penduduk yang bekerja	108.809	108.704	114.066	117.280	123.550	127.897
Jumlah angkatan kerja	117.663	120.520	125.545	132.113	135.684	136.112
Rasio penduduk yang bekerja	0,925	0,904	0,909	0,888	0,911	0,940

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2019)

Berdasarkan tabel di atas, pada rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai berfluktuatif diatas 0,88. pada tahun 2012 rasio penduduk yang bekerja adalah 0,925, tahun 2012-2018 (tanpa data tahun 2016) berturut adalah 0,925 ; 0,904 ; 0,909 ; 0,888 ; 0,911 dan 0,940. Berikut tabel 2.161 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai.

Tabel 2.161 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi um tercapai (<) sesuai (=) elampai (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64	3,33	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi tercapai (<) sesuai (=) elampai (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.1.2	Laju inflasi	3,45%	6,99%	8,53	2,63	3,98	4,78	>
1.1.1.3	PDRB per kapita	70,55 juta	71,53 juta	71,87 juta	71,74 juta	73,55 juta	101,82 juta	>
1.1.1.4	Persentase Penduduk Miskin	,24	4,98	4,83	5,26	4,74	4,57	<
1.2.	<b>Kesejahteraan Sosial</b>							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	99,4	99,43	99,43	99,43	99,43	99,46	=
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	9,48	9,54	9,56	9,57	9,58	9,67	>
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	>100	>100	107,27	107,20	107,79	111,92	>
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	>100	>100	89,67	91,58	100,18	95,60	<
1.2.1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	75,37	85,68	73,45	78,36	87,97	86,19	>
1.2.1.6	APM SD	98,65	97,70	98,45	96,37	96,54	99,46	>
1.2.1.7	APM SMP	84,89	83,75	83,60	76,99	88,53	87,66	<
1.2.1.8	APM SMA	63,58	84,84	70,41	57,67	69,15	70,35	>
1.3.	<b>Kesehatan</b>							
1.3.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	11,09	14,70	13,08	14,10	13,73	7,1	>
1.3.2	Angka Kematian Balita	13,9	16,9	15,87	16,64	16,88	9,00	>
1.3.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	84,26	64,69	114,29	145,75	109,32	38,04	<
1.3.4	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Dumai	70,02	70,04	70,05	70,25	70,31	70,37	=
1.3.5	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Dumai	0	0	0	0,01	0,01	0,01	=
1.3.6	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida						1,13 %	
2.	<b>PELAYANAN UMUM</b>							
2.1	<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	106	101	107	106	108	107	<
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	51	51	54	53	55	55	<
2.1.1.1.3	Rasio Guru/Murid SD	16,29	16,14	16,49	16,84	17,47	17,77	>
2.1.1.1.4	Rasio Guru/Murid SMP	12,45	13,54	9,43	12,74	14,54	14,16	
2.1.1.1.5	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	91,9	94,10	94,22	95,40	95,30		<
2.1.1.1.6	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	86,6	89,23	89,35	90,05	89,80		<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi tercapai (<) sesuai (=) elampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2.1.1.1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,17	0,05	0,26	0,00	0,003	0,013	>
2.1.1.1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04	0,00	0,40	0,00	0,049	0,025	=
2.1.1.1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	99,92	100,00	100,00	100,00	<
2.1.1.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,21	99,85	99,94	100,00	99,96	99,98	>
2.1.1.1.11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,98	97,33	88,24	84,76	83,80	97,38	<
2.1.1.1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	100,89	106,87	109,81	108,20	110,58		<
2.1.1.1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	60,17	79,45	79,40	85,58	86,22	90,20	>
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,009	<
2.1.2.2	Rasio dokter per satuan penduduk	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	0,544	>
2.1.2.3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2.858	2.948	2.877	3.763	3.707	3.726	>
2.1.2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	14,37	85,95	90,2	90,57	86,23	87,23	<
2.1.2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,96	96,13	95,58	91,83	93,2	97,28	<
2.1.2.6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	78,79	100	100	100	96,67	100	<
2.1.2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	64,84	53,88	72,11	56,02	23,97	15,48	>
2.1.2.8	Cakupan kunjungan bayi	93,96	86,13	95,58	91,83	85,3	99,86	<
2.1.2.9	Rasio puskesmas	180	128,57	128,57	142,86	142,86	142,86	=
2.1.2.10	Rasio puskesmas pembantu	40,62	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	=
2.1.3	Pekerjaan Umum							
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	52,97%	55,60%	52,97%	55,57%	53,33%	52,35	>
2.1.3.2	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,95	1,87	1,83	1,86	1,84	1,79	=
2.1.3.3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	14 TPS	15 TPS	>
2.1.3.4	Panjang jalan dilalui roda 4	3,57	3,17	3,41	2,89	2,19	4,03	<
2.1.4	Perumahan							
2.1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	1396	1396	1384	1386	1387		>
2.1.4.2	Jumlah pelanggan	1386	1384	1386	1387	1389	1385	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi m tercapai (<) sesuai (=) elampai (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	PDAM (Non Niaga)							
2.1.4.3.	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	72,40	80,08	85,35	89,75	93,77	88,50	>
2.1.5	Penataan Ruang							
2.1.5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,104%	=
2.1.6	Perhubungan							
2.1.6.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal							
	BERANGKAT	174.680	116.080	120.225	106.390	105.890	102.670	<
	DATANG	176.902	116.025	120.401	108.116	108.008	105.532	<
2.1.6.2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Pelabuhan							
	BERANGKAT	269.925	233.365	123.971	130.789	129.135	129.135	<
	DATANG	253.645	211.070	103.876	100.342	102.586	102.586	>
	Rasio izin trayek						1:37,238	
	Persentase Layanan angkutan Darat						0,67 %	
2.1.6.3.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Bandara							
	BERANGKAT	22.116	10.625	NA	12.465	11.856	11.856	<
	DATANG	20.852	10.876	NA	11.782	10.354	10.354	<
	TRANSIT	8.580	1.385	NA	NA	NA	NA	>
2.1.6.4.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.898	4.898	4.762	5.103	4.078	3.395	>
2.1.6.5.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.797	9.523	10.206	9.920	8.473	>
2.1.6.6.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	30 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	=
2.1.6.7.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	=
2.1.7	Lingkungan Hidup							
2.1.7.1.	Persentase penanganan sampah	68	69	69	69	70	70	>
2.1.7.2.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	14 (TPS)	15 (TPS)	=
2.1.8	Kependudukan dan catatan Sipil							
2.1.8.1.	Kepemilikan KTP	61,52%	59,66%	47,95%	94,27%	94,27%	94,27%	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi m tercapai (<) sesuai (=) elampai (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2.1.8.2.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.8.3.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.9.1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	2.986	2.986	3.046	3.974	5.202	>
2.1.9.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	2.359	2.359	1.378	3.857	10.442	10.442	>
2.1.10	Keluarga Berencana							
2.1.10.1.	Cakupan peserta KB aktif	8.863	35.597	45.344	55.628	29.287	33.059	<
2.1.10.2.	Jumlah Keluarga	55.051	55.051	55.051	55.051	63.527	82.478	>
2.1.10.3.	Keluarga Pra Sejahtera	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118	2.871	=
2.1.10.4.	Keluarga Sejahtera I	11.138	11.138	11.138	11.138	11.138	4.503	=
2.1.11	Ketenagakerjaan							
2.1.11.1.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Dumai	111.639	117.157	122.951	129.027	135.405	135.684	>
2.1.11.2.	Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	NA	472	1098	1308	315	2112	<
2.1.11.3.	Jumlah Pengangguran Terbuka	4,603	4,861	4,552	5,218	5,167	12,134	<
2.1.11.4.	Keselamatan dan Perlindungan	97	86	195	151	165	-	<
2.1.11.5.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	-	30	19	39	12	14	>
2.1.12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.1.12.1.	Persentase Koperasi Aktif	55	83	83	54	81	81	=
2.1.12.2.	Usaha Mikro dan Kecil	10.700	11.232	11.797	11.797	12.497	12.672	<
2.1.13	Penanaman Modal							
2.1.13.1.	Jumlah Perusahaan PMDN	47	53	57	60	63	64	>
2.1.13.2.	Jumlah Perusahaan PMA	56	62	66	69	76	84	>
2.1.13.3.	Nilai Investasi PMDN (Rp)	11.678,35	208.541,82	1.151,99	7.883,71	2.318,98	2.007,20	>
2.1.13.4.	Nilai Investasi PMA (\$)	9.300.899,17	5.960,87	323,45	977,36	236,92	132,12	>
2.1.13.5.	Persentase Nilai Realisasi PMDN	1,95%	24,10%	0,11%	0,74%	102,21%		
2.1.13.6.	Persentase Nilai Realisasi PMA	21,46%	9,60%	0,45%	1,27%			>
2.1.14	Kebudayaan							
2.1.14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4	1	2	2	5	=
2.1.15	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.15.1.	Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	52	52	55	=
2.1.15.2.	Jumlah organisasi olahraga	25	25	25	29	29	29	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi tercapai (<) sesuai (=) elampai (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2.1.15.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	2	2	3	2	2	<
2.1.15.4.	Jumlah kegiatan olahraga	5	8	4	4	4	3	=
2.1.16	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.1.16.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	123	60	25	23	29	19	>
2.1.16.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	-	-	1 Keg.	-	1 Keg.	1 Keg.	=
2.1.16.3.	Rasio jumlah pamong praja	5,17	3,65	3,25	3,07	3,21		>
2.1.16.4.	Rasio linmas	60,23	58,34	56,78	56,87	57,08	56,74	>
2.1.16.5.	Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	=
2.1.16.6.	Persentase Cakupan patroli petugas Satpol pp	49%	92%	90%	95%	96%	81 %	>
2.1.16.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentrangan, keindahan)	132	231	236	235	238	155	<
2.1.16.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1584	1584	1590	1593	1599	1.590	>
2.1.17	Ketahanan Pangan							
2.1.17.1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama*	46,15 %	36,84 %	26,50 %	41,36 %	35,54 %	15,18 %	<
2.1.18	Statistik							
2.1.18.1.	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.18.2.	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.19	Perpustakaan							
2.1.19.1.	Jumlah perpustakaan	7	9	12	16	15	15	=
	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,42	0,48	0,46	0,46	0,46	0,50	=
	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	356,50	468,68	560,64	838,64	853,10	948,99	>
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	15808	25847	57206	57206	57206	49247	>
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Rasio produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton/Ha)*	2,74	2,74	2,62	2,77	3,25	3,33	>
2.2.1.2	i Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96	>
2.2.2	Kelautan dan Perikanan							
2.2.2.1	Produksi Perikanan Laut (Kg)	0.758	90.300	76.100	86.300	25.000	80.815	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi tercapai (<) sesuai (=) elampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2.2.2.2	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	4.350	70.405	56.238	90.221	18.400	42.358	>
2.2.3	Pariwisata							
2.2.4.1.	n Wisata (orang)	71.133	67.060	90.723	71.274	122.627	45.340	>
2.2.4	Perdagangan							
2.2.6.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	17,33	>
2.2.6.2.	Ekspor (\$)	16,485,319,670	14,195,672,775	17,746,297,425	10,889,408,942	16,485,319,670	12,928,272,127,19	>
2.2.6.3.		1,175,177,629	1,064,462,336	778,071,820	597,294,415	1,175,177,629	498,456,718,00	<
2.2.6.4.	ersih Perdagangan (\$)	15,310,142,041	13,131,210,439	16,968,225,605	10,292,114,527	15,310,142,041	12,429,815,409,19	>
2.2.5	Perindustrian							
2.2.7.1.	i sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	54,75	>
2.2.7.2.	e Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	2,70	3,78	6,19	2,69	6,28	5,34	>
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan Per Jmlh Kendaraan	NA	1 : 6,4	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 67	<
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk	NA	0,006	0,006	0,005	0,004	0,004	
3.2	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.3.1	Jumlah Penginapan/ Hotel	21	23	23	28	27	28	<
3.3.2	Angka kriminalitas	454	642	861	97*	474	665	<
3.3.3	Persentase Lulusan S1/S2/S3	0,26%	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	0,17%	<
3.3.4	Rasio penduduk yang bekerja	0,925	0,904	0,909	0,888	0,911	0,911	=

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2019 dan Realisasi RPJMD Tahun ke-4

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai tahun 2019 dilaksanakan dengan menelaah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di kaitkan dengan target pencapaian yang telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian



target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

### **2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2019**

Evaluasi capaian kinerja tahun 2019 merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2018. Tujuan evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2019 adalah untuk menilai/mengidentifikasi pencapaian kinerja serta pencapaian indikator sasaran perubahan RPJMD tahun 2016-2021 terhadap capaian perencanaan pada akhir dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Dengan total 331 program berikut penjelasan terkait hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran pada tahun 2019 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2019 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2019 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
  - a. Dalam pelaksanaan Capaian Target Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Melalui Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 terjadi perubahan beberapa indikator dan target sasaran tahunan Program dan juga ikut merubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD pada pencapaian Target Evaluasi RKPD,

sehingga perlu dipandang untuk merevisi guna penyesuaian kembali Indikator dan Target sasaran sesuai dengan pelaksanaan tahun perencanaan kedepan dan target akhir yang dicapai pada RPJMD Tahun 2016-2021;

- b. Untuk capaian tahun perencanaan 2019, Sasaran fokus yang sifatnya prioritas pembangunan (Program) yang belum tercapai namun memerlukan kerja keras yang perlu disertai penajaman, pengintensifan, dan percepatan pelaksanaan pada tahun perencanaan kedepannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

Untuk mengetahui implikasi dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Sasaran dibawah ini

Tabel 2.162 Pencapaian Kinerja Sasaran dan Penyerapan Anggaran

No.	Tujuan/Sasaran		% Pencapaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		7=6/5	11=10/9	12=7/11
<b>Visi Terwujudnya masyarakat dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021</b>					
<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar</b>				
Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih		111,00	90,49	9,51
Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan		237,42	84,49	15,51
Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan		100,00	99,37	0,63
<b>Misi 2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing</b>				
Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan		100,42	86,46	13,54
Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar		99,99	93,43	6,57
Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar		198,57	94,02	5,98

	Sasaran 3.1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	99,68	89,41	10,59
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	76,78	93,76	6,24
	Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	0,00	88,74	11,26
<b>Misi 3</b>	<b>Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan</b>				
	Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	108,45	76,95	23,05
	Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	100,22	83,83	16,17
	Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	147,93	76,41	23,59
	Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	93,57	89,73	10,27
<b>Misi 4</b>	<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan</b>				
	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	85,71	88,60	11,40
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	126,32	77,93	22,07
<b>Misi 5</b>	<b>Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan</b>				
	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	130,63	86,72	13,28
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	101,01	88,92	11,08
<b>Misi 6</b>	<b>Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah</b>				
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	96,71	88,46	11,54
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	34,66	51,85	48,15
<b>Misi 7</b>	<b>Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu</b>				
	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	118,19	96,36	3,64
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	92,38	81,55	18,45

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai)

- a. Jika capaian target sesuai dengan capaian maka proses dalam Perencanaan Smart serta memudahkan kepala daerah dalam

menentukan arah kebijakan terkait visi dan misi yang akan dicapai di akhir masa jabatan kepala daerah. Dari tabel diatas , capaian sasaran kinerja 90%-100% sebanyak 17 sasaran. Dari 21 sasaran

- b. Jika Tidak maka target kinerja program akan berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang akan dicapai sehingga pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan (Inkonsistensi).

Dari tabel diatas sasaran yang belum mencapai target sasaran dan masih dibawah 40% sebanyak 2 sasaran, yaitu sasaran Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan capaian 0%, dan sasaran Meningkatnya investasi di Kota Dumai dengan capaian sebesar 34,66%.

Dimana indikator sasaran dari "Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga" adalah 1). Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA) dengan Target Rangking 5 dan realisasi rangking 10 atau capaian sebesar 0%. Yang didukung oleh 1). Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan pagu Rp. 734.308.300 dan realisasi Rp. 685.623.800 atau capaian sebesar 93,37%, dan 2). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan pagu Rp. 928487650 dan realisasi sebesar Rp. 789.899.850 atau capaian sebesar 85,07%. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran program tersebut sehingga tidak semua cabang olahraga yang dipertandingkan yang tidak bisa diikuti.

Indikator Sasaran dari "Meningkatnya investasi di Kota Dumai" adalah 1). Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target Rp. 5.788.267.749.296 dan realisasi sebesar Rp. 2.006.313.400.000 atau capaian sebesar 34,66%. Yang didukung oleh 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan pagu anggaran Rp. 941.314.800 dan realisasi sebesar Rp. 488.092.788 atau capaian sebesar 51,85%, dan terdapat 2 kegiatan yang menyebabkan realisasi anggaran

rendah dan berakibat tidak tercapainya indikator sasaran Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yaitu :

- a) *Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.* Indikator kinerja kegiatannya yaitu terlaksananya koordinasi terkait dengan kegiatan penanaman modal di kota Dumai. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 308.901.900,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Kegiatan ini kurang efektif dan maksimal untuk dilaksanakan ada beberapa nomenklatur pada rekening belanja barang dan jasa ( Narasumber/tenaga ahli ).
- b) *Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.* Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya Laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) yang akuntabel selama 12 bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 167.437.900,- terealisasi sebesar Rp. 89.905.000,- atau sebesar 53.69% Kegiatan ini merupakan suatu bentuk pengawasan dan pembinaan kepada investor/perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan investasi di Kota Dumai. sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara online (Online Single Submission) terdapat beberapa pemangkasan jenis perizinan maka para pengusaha diharuskan untuk mendaftarkan kembali perizinannya secara Online untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga objek pengawasan jadi berkurang dari target yang telah direncanakan.

1. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
  - a. Bagi sasaran yang sulit dicapai dalam rentang waktu yang tersisa, tetap perlu diupayakan melalui penajaman, terobosan dan langkah strategis, review efektifitas, identifikasi kelemahan, dan kemungkinan

penambahan alokasi anggaran, serta meningkatkan koordinasi di tiap OPD kemudian beberapa indikator program perlu menyeleksi dan menyempurnakan indikator kinerja sebagai pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kedepannya;

- b. Meningkatkan komitmen OPD untuk melaksanakan sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran untuk menjaga konsistensi tersebut.

Untuk tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019, dan realisasi terhadap Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 akan disajikan pada **lampiran 1 dokumen RKPD Tahun 2020**.

## 2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Membandingkan Capaian kinerja antara kinerja Pemerintah Kota Dumai dengan Provinsi Riau dan Nasional.

Tabel 2.163 Sandingan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  
(Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional)

No.	Indikator	Target Kota	Capaian Kota	Capaian Provinsi Riau	Capaian Nasional
1	Pertumbuhan ekonomi	4,42	4,45%	2,34%	5,1
2	PDRB perkapita	105.152	75100,1	105990	51890
3	Tingkat Pengangguran terbuka	8,40%	8,94%	6,22	5,5
4	Indeks Gini	0,426	0,39	0,33	0,389
5	Tingkat kemiskinan	4,58%	4,57%	7,39	9,82

6	IPM	73,54	73,46	71,79	70,81
---	-----	-------	-------	-------	-------

(Sumber: Dumai Dalam Angka 2018)

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa indikator Pertumbuhan ekonomi pada kota Dumai melebihi capaian provinsi Riau dan dibawah capaian Nasional. PDRB Perkapia kota dumai dibawah capaian provinsi Riau dan diatas Nasional. Indikator indkes gini kota dumai dan provinsi Riau serta nasional masih termasuk katergori sedang (dimana range kategori sedang antara 0,35 -0,5). Indikator tingkat kemiskinan kota dumai masih lebih baik dari provinsi Riau dan Nasional. untuk indikator IPM kota dumai lebih tinggi dari provinsi Riau dan Nasional. indikator Tingkat pengangguran terbuka kota dumai lebih jelek dari provinsi Riau dan Nasional.

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Pemerintah Kota Dumai terus berusaha melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seiring perjalanan waktu dan perkembangan kota, tentu saja kota Dumai selalu dihadapkan oleh problematika pembangunan yang juga semakin kompleks baik yang dipicu oleh isu pembangunan yang berasal dari internal kota Dumai maupun isu yang berasal dari eksternal kota Dumai bahkan global. Isu-isu strategis tersebut terwujud dalam permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus disikapi denga bijak serta menjadi salah satu rujukan dalam menyusun rencana kerja pembangunan kota Dumai kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Dumai meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, sumberdaya manusia, ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, serta pemerintahan. Sebagaimana yag telah

diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional Tahun 2016-2019, Kota Dumai diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional dengan fokus sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai *outlet* pemasaran wilayah Riau bagian timur serta berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan dan perikanan.

Sebagai kawasan perbatasan, kota Dumai diarahkan pada pengembangan sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) wilayah Sumatera, dimana pengembangannya diarahkan pada:

- 1) Pengembangan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
- 2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah-rencana detail tata ruang kawasan perbatasan.

Ditetapkannya kota Dumai sebagai pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan strategis nasional tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan peluang pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu untuk memperkecil hilangnya peluang pembangunan dan untuk memaksimalkan agar hasil penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ini mampu secara komprehensif mengakomodir kebutuhan pembangunan ditahun 2019, maka beberapa isu pembangunan yang telah diidentifikasi berdasarkan problematika yang telah diuraikan diatas maka disimpulkan sebagai berikut:

**a. Aspek Geografi dan Demografi**

- 1) Kota Dumai Masih Dihadapkan dengan kondisi wilayah rawan bencana terutama asap yang menjadi agenda rutin walaupun sanksi tegas telah ditetapkan namun kondisi ini masih saja terjadi.
- 2) Genangan Air baik yang bersifat curah hujan maupun kondisi pasang laut yang masih terdapat di beberapa titik di kota Dumai.
- 3) Ketimpangan kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di tiga kecamatan Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai



Barat, disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

- 4) Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik.

#### **b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Infrastruktur Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan wilayah perkotaan karena memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi fungsi dan pelayanan kota kepada masyarakat baik dari segi fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kota Dumai sehubungan dengan kualitas dan jumlah pelayanan infrastruktur yang tersedia dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air minum yang merata dan berkeadilan;
- 2) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pemukiman penduduk (sanitasi, persampahan dan drainase);
- 4) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;

- 5) Masih terdapatnya Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal;
- 6) Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang;
- 7) Belum Efektifnya Terminal Penumpang yang merupakan Simpul dari Transportasi Daerah;
- 8) Penataan Angkutan Sewa yang masih menggunakan sistem antar jemput sehingga secara perlahan mengurangi penggunaan moda angkutan umum masal (Bus);
- 9) Sistem transportasi wilayah yang kurang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum optimal;
- 10) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara belum optimal;
- 11) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha sektor transportasi di Kota Dumai akan arti pentingnya kesehatan udara;
- 12) Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan polusi dan memicu kerusakan jalan;
- 13) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketata ruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*;
- 14) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang terutama wilayah di pinggiran;
- 15) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak;
- 16) Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem partisipatif untuk prinsip 3R;
- 17) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;

- 18) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- 19) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air limbah, dan persampahan.
- 20) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai melalui Peraturan Daerah Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif dikarenakan penggunaan lahan oleh masyarakat Kota Dumai untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya.

### **c. Aspek Pelayanan Umum**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan isu yang berkembang secara internasional pada dasawarsa terakhir ini. Demikian pula di Indonesia dengan proses demokratisasi yang berjalan pesat, tuntutan untuk mewujudkan good governance menjadi komoditas penilaian masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan .

Untuk menuju pemerintahan Kota Dumai yang memenuhi sistim nilai yang berkembang tersebut sudah dilakukan berbagai upaya yang relevan, misalnya pembentukan LPSE, penyusunan berbagai dokumen akuntabilitas (LPPD, ILPPD, LAKIP, dsb), serta peningkatan SDM dan penyelenggaraan berbagai forum demokratisasi. Namun hal tersebut perlu ditingkatkan lagi dalam artian belum mencukupi untuk mencapai tataran pemerintahan yang diharapkan masyarakat terutama yang secara paripurna berlandaskan ciri pemerintahan yang baik. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintahan di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab

masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat.

2. Ego sektoral yang masih muncul pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menghambat sinergitas dan efektivitas pembangunan daerah.
3. Belum terwujudnya manajemen dalam penerapan aplikasi yang berbasis kinerja.
4. Belum optimalnya pengembangan *smart city* (kota cerdas), dimana target pemerintah untuk fokus pembangunan tahun 2018 yang lalu menargetkan tercapainya 100 kota cerdas/smart city di tahun 2020. Untuk Riau berdasarkan kab/kota baru kab. Pelalawan dan kab. Siak.
5. Struktur organisasi pada Pemerintah Daerah yang belum proporsional, sistem manajemen pekerjaan, tanggungjawab dan beban kerja.
6. Belum terwujudnya E-Government yang transparansi dalam segala lini terkait informasi dan data ke publik serta Pelaksanaan pelayanan publik yang belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat hal ini ditandai dengan proporsi IKM dari 71,04% tahun 2015 dan 72 % pada tahun 2016.

#### **d. Aspek daya Saing Daerah**

##### **1. Bidang Tenaga Kerja**

Salah satu pengaruh perkembangan sebuah kota adalah peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Menurut perkiraan BPS, Indonesia akan mencapai bonus demografi pada tahun 2030. Bonus Demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk usia non produktif. Kondisi ini akan menjadi masalah dan berujung pada meningkatkan pengangguran terbuka jika tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah ataupun swasta.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, kota Dumai pada tahun 2017 memiliki angkatan kerja usia produktif yaitu 135.684 jiwa dan tingkat

pengangguran 12.134 jiwa dengan tingkat pengangguran 8,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa kota Dumai sedang menuju proses bonus demografi dan jika tidak diantisipasi dengan arah dan kebijakan pembangunan yang tepat, maka jumlah pengangguran kota Dumai kemungkinan akan sulit untuk dikurangi.

Hal lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan adalah kondisi pasar kerja yang dibutuhkan sudah mengarah pada jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu. Hal ini mengakibatkan pasar kerja yang terserap hanyalah dari angkatan kerja yang sudah memenuhi kriteria dari segi jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu yaitu angkatan kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan dari pasar kerja yang tersedia tersebut.

Bertambahnya lapangan pekerjaan baru yang ada di Kota Dumai, nyatanya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap terserapnya angkatan kerja lokal dari peluang ketersediaan lapangan kerja baru tersebut. Kemampuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan dari peluang lapangan kerja tersebut nyatanya belum mampu dipenuhi dari angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai. Hal ini menyebabkan peluang pengisian lapangan kerja baru tersebut dipenuhi oleh angkatan kerja yang berasal dari luar Kota Dumai yang memenuhi kualifikasi kerja serta memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang memenuhi kriteria pasar kerja tersebut, sehingga peluang pemenuhan pasar kerja yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh angkatan kerja yang tersedia di Kota Dumai.

Namun, perlu dicatat bahwa untuk mendukung perkembangan Kota Dumai yang cukup pesat sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan diperlukan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di sekitarnya. Penduduk kota ini diharapkan dapat menjadi tenaga kerja berkualitas. Kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pelatihan ketrampilan dan penguasaan teknologi. Melalui penguasaan teknologi serta ketrampilan yang memadai diharapkan

penduduk kota ini dapat mengambil peluang dan manfaat dari Kota Dumai yang akan semakin berkembang pesat terkait dengan fungsi kota sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Selain itu dalam *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Kota Dumai diarahkan sebagai pelabuhan barang bagi daratan daerah belakangnya (*hinterland*) yang terhubung dengan jalur utama Koridor Sumatera yang menghubungkan berbagai Pusat Ekonomi Nasional bahkan dapat terhubung hingga ke Pulau Jawa. Kota Dumai memiliki fungsi dan peran sebagai pintu gerbang dari laut (pelabuhan utama) bagi salah satu kluster industri dan simpul perkebunan karet serta perkebunan sawit berikut *hinterland* lainnya, termasuk Pekanbaru. Tantangan yang datang dari pesatnya perkembangan lapangan kerja dikota Dumai adalah datangnya pekerja migran yang secara langsung menjadi saingan tenaga kerja asal dumai untuk berkompetisi dalam merebut lapangan pekerjaan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja di Kota Dumai adalah Kemampuan dan Keterampilan Angkatan Kerja belum kompetitif untuk memenuhi kebutuhan Pasar Kerja. Sehingga untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Dumai harus mampu mempersiapkan angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai agar memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada maupun yang akan tersedia.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia dengan meningkatkan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja melalui pelatihan padat karya.
2. Belum meratanya komposisi tenaga kerja lokal yang bekerja diperusahaan.
3. Kurangnya rekrutmen tenaga kerja melalui bursa-bursa pekerjaan.

4. Perlunya pengawasan terhadap perusahaan dalam hal ini terkait dengan penyesuaian UMK tenaga kerja.

Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota Dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

## **2. Bidang Ekonomi dan Iklim Berinvestasi**

Pembangunan dibidang ekonomi kota Dumai secara umum dapat dilihat dari pencapaian kontribusi setiap sektor usaha pada PDRB, pergerakan inflasi, tingkat kemiskinan dan investasi modal dalam bentuk penyediaan lapangan kerja. Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kota Dumai di Bidang Ekonomi :

1. Masih Rendahnya kontribusi Sektor pertanian (5 sub sektor) dalam perekonomian sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang bekerja di bidang tersebut.
2. Inflasi kota Dumai masih bersifat "*fully driven by issues*" sehingga harga masih mudah berfluktuasi akibatnya sangat mudah terjadi inflasi meskipun masih dalam tingkat yang wajar.
3. Perlunya optimalisasi strategi pengurangan tingkat kemiskinan di kota Dumai.
4. Adanya kecenderungan berkurangnya investasi baik dalam maupun luar negeri sehingga berpengaruh terhadap peluang kerja yang ada di Kota Dumai.
5. Memudahkan proses perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan.
6. Perlunya optimalisasi peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan dalam rangka mempermudah akses permodalan UMKM dan penyerapan tenaga kerja local.

## **3. Bidang Sosial Budaya**

Sumberdaya manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Khususnya saat ini, ketika setiap wilayah dihadapkan pada persaingan global, SDM memiliki peran kunci dalam

pengembangan sebuah wilayah. Dalam era persaingan global diperlukan SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan serta berdaya saing tinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu potensi untuk pengembangan wilayah kota ini. Angka melek huruf pada tahun 2017 berkisar pada angka 99,46%, bahkan selama empat tahun terakhir angka melek huruf mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh penduduk Kota Dumai sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Jika seluruh penduduk sudah melek huruf akan lebih mudah untuk menerima pengetahuan, inovasi maupun teknologi baru yang berkembang cepat di era globalisasi ini. Pengetahuan merupakan kunci keberhasilan atau kemajuan manusia. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan baru akan memudahkan dan mempercepat perkembangan bagi sebuah wilayah, oleh karena penguasaan pengetahuan dan ketrampilan baru akan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk mengolah potensi dan sumber daya lokal yang tersedia. Sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dibutuhkan pendidikan, ketrampilan dan kreativitas penduduk yang cukup memadai untuk mampu menangkap peluang dan kesempatan yang tersedia.

Dari aspek Pendidikan, Dilihat dari angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Dumai seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa pelayanan pembangunan daerah Kota Dumai di bidang pendidikan dapat di katakan cukup baik, namun terdapat beberapa isu yang menjadi penting yakni

1. Rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah dilihat per kecamatan, disitu terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah kecamatan yang berada di wilayah pusat kota, jauh lebih baik dari rasio kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah fasilitas dan akses pelayanan pendidikan yang ada di Kota Dumai belum tersebar secara



merata dan banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. Masih kurangnya jumlah fasilitas dan pelayanan pendidikan di wilayah kecamatan terluar Kota Dumai terlihat dari perbedaan nilai angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai dengan kecamatan yang berada di wilayah perkotaan yang mana kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai yang jauh lebih baik dengan perbedaan yang cukup signifikan daripada kecamatan yang berada di luar wilayah pusat Kota Dumai.

1. Belum tersedianya Gedung kesenian, yang mana selama ini untuk Gedung Lam Dumai dan bukit gelanggang menjadi tempat berkesenian.
2. Sanggar seni dan budaya yang dibina pada tahun 2017 realisasinya adalah sebanyak 40 sanggar yang dibina. Pada tahun 2018, jumlah sanggar yang dapat dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih pada jumlah yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 40 sanggar. Capaian ini masih konstan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh terdapat beberapa sanggar yang belum memiliki izin operasional dan terdapat beberapa sanggar yang sedang dalam proses pengurusan izin sehingga hanya sanggar yang sudah memiliki izin saja yang dapat dibina.

Fokus kesehatan, berikut beberapa indikator menjadi dasar pelayanan dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 54 kasus. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 dimana angka kematian bayi sebesar 11,63 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2018 mengalami jauh mengalami penurunan.

2. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 71 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2018 di Kota Dumai sebesar 9,00 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 dimana angka kematian bayi sebesar 13,44 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita.
3. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 5 kasus. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2018 di Kota Dumai sebesar 63,40 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, di mana angka kematian ibu sebesar 142,16 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada penurunan angka kematian ibu pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 dari total 310 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 339 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 85,39%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 86,87%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +.
5. Pada tahun 2017 ditemukan 3 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 0,01%.
6. Jumlah dan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan juga menunjukkan nilai yang lebih baik untuk kecamatan yang berada di wilayah perkotaan dibanding kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Fokus pariwisata, sebagai salah satu pintu masuk dari luar negeri, kota dumai sangat rentan untuk dipengaruhi oleh dari segala asepek kehidupan. Pengaruh tersebut bisa saja mengancam nilai, sikap, dan mental pemuda khususnya dan masyarakat Kota Dumai umumnya yang sangat erat dengan budaya daerah, sehingga jati diri masyarakat yang

berbudaya daerah secara cepat akan hilang. Keadaan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses oleh siapapun dan kapan pun. Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pemberdayaan kepemudaan, pelestarian dan pengembangan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, sejarah, kepurbakalaan termasuk memelihara bahasa, aksara dan sastra daerah dan melestarikan seni serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya daerah secara global dan menjadi .

Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah target wisatawan mancanegara pada tahun 2017 sebanyak 52.020 wisatawan, namun realisasi pada tahun 2017 terjadi penurunan kunjungan wisatawan menjadi 45.340 wisatawan.dengan rincian kunjungan domestic sebanyak 32.825 orang, kunjungan mancanegara sebanyak 12.515 orang. Penurunan perkembangan sektor pariwisata dalam jangka panjang dapat menghilangkan peluang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk Kota Dumai. Hal ini disebabkan sektor pariwisata mempunyai efek pengganda terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi lain melalui pembelanjaan yang akan dilakukan oleh wisatawan. Selain itu berkembangnya sektor pariwisata juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan asli daerah.

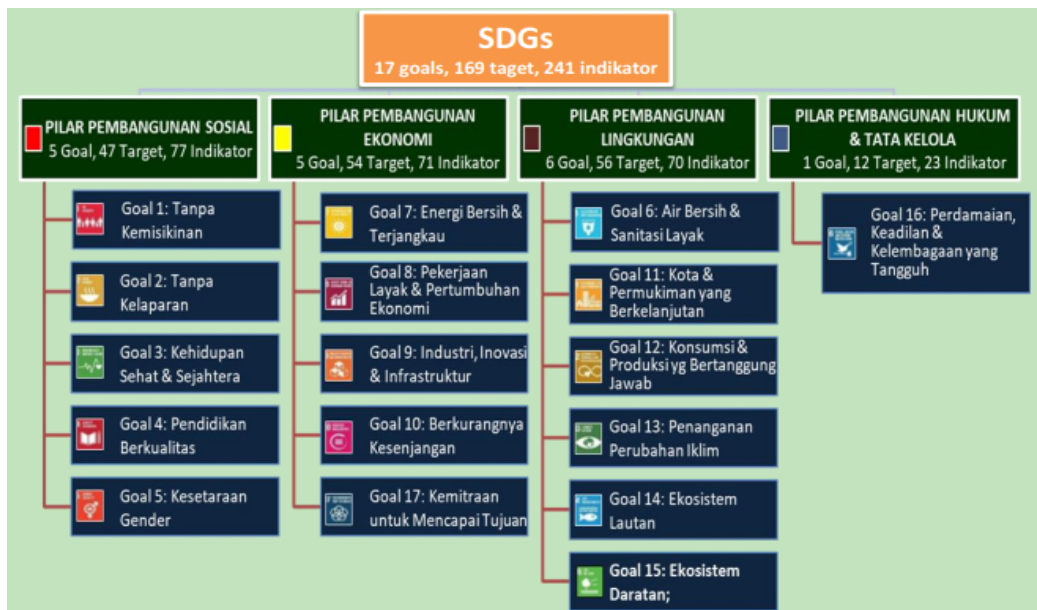
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan Sosial budaya yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat
2. Perlunya meningkatkan kualitas/kompetensi tenaga kesehatan
3. Belum meratanya rasio ketersediaan sekolah diluar dilihat per kecamatan.
4. Belum tersedianya Gedung kesenian dan kurangnya pembinaan terhadap grup kesenian.

5. Perlunya pengawasan terhadap kosmetik, obat dan makan/minuman yang beredar di masyarakat.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

**e. Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Suistanable Development Goals* (SDG's) Tahun 2019**

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 Isu strategis dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat ini antara lain meliputi bagaimana melibatkan (*Involving*) mereka dalam berbagai forum perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan pembangunan. Komitmen Pemerintah Kota Dumai terhadap isu *good governance* dalam agenda pencapaian SDG's sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi hal yan mutlak untuk diwujudkan yakni empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum dapat tercapai. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.58 Fokus Suistanable Development Goals (SDGs).



Gambar 2.58 Fokus *Suistanable Development Goals* (SDGs)

Untuk itu pemerintah kota Dumai berdasarkan Rancangan RAD SDGs telah menetapkan empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial,

ekonomi, lingkungan dan hukum yang dibagi kedalam 17 tujuan sebagai berikut :

#### 1. Pilar Pembangunan Sosial

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Sosial terdiri dari 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun; 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia serta 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.164 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun , tabel 2.165 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, tabel 2.166 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, tabel 2.167 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia, tabel 2.185 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan,

Tabel 2.164 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	<4,5	<4,5	<4,5
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, penganggungi, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan	1.3.1. Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	51.87%	55.40%	66.00%	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
rentan.	1.3.1 (a) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	25%	15%	15%	25%
	1.3.1(c) Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50%	40%	40%	100%
	1.3.1(d) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	15%	15%	15%	15%
	1.3.1 (e) Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	112 orang	58 orang	80 orang	85 orang
	1.3.1 (f) Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	1200 orang	1000 orang	1500 orang	2000 orang
	Rasio lulusan S1				
		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	1.3.1 Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	-	50 orang	50 orang	200 orang
1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.	1.41 Persentase penduduk berakses air minum	20,67 %	34,80%	35,00%	53,76%
	1.4.1(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	87.10	95	95	
	1.4.1(b). Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima	94.20%	95.00%	95.00%	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
	imunisasi dasar lengkap.				
	1.4.1 (d) Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	5 Ha	5.5Ha	6 Ha	6,5 Ha
	1.4.1 (e) Panjang Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	2,00%	3,44%	3,48%	3,50%
	1.4.1 (f) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	6%	6%	7%
	1.4.1 (g) Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	2,00%	2,80%	2,83%	2,85%
	1.4.1 (h) Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	3,628 Ha	3,648 Ha	3,658 Ha	3,668 Ha
	1.4.1 (i)Angka Partisipasi Murni (APM ) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%
	1.4.1 (j)Angka Partisipasi Murni (APM ) SMP/MTS/Paket B	85,26%	92,26%	95,76%	99,26
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana	1.5.1 (a) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	90%	90%	90%	90%
	1.5.1 (c)Persentase PMKS yang tertangani	25%	25%	25%	50%

(Sumber : Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019)

Tabel 2.165 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0.41	6	5	5
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level I Yang harus diberikan sarana kesehatan		7,89 %		
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	0.00	25	20	
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta		25	20	
	2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	0.00	5	5	
	Persentase Anak Usia 1 tahun yang diimunisasi campak		95,90 %		
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	74.00	80	85	
	2.3 Pada tahun 2020, Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2.3.1 Angka Kecukupan Protein	50 (gram/kapita/tahun)	50 (gram/kapita/tahun)	52 (gram/kapita/tahun)
2.4 Pada tahun 2020, Meningkatnya Produksi Pertanian	2.4.1 Produksi komoditi pertanian	20.154 TON	20.596 TON	20.818 TON	21.041 TON
	2.4.2 Produksi komoditi perkebunan	82.080 TON	84.256 TON	84.756 TON	85.256 TON
	2.4.3 Populasi Ternak	5.253 Satuan Ternak	5.883 Satuan Ternak	6.093 Satuan Ternak	6.303 Satuan Ternak
2.5 Pada tahun 2020, Berkurangnya angka penyakit hewan menular dan zoonosis serta menurunnya kasus cemaran Pangan Asal Hewan (PAH)	2.5.1 Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	35 Kasus	23 Kasus	17 Kasus	11 Kasus
	2.5.2 Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis	35 Kasus	25 Kasus	20 Kasus	15 Kasus
	2.5.3. Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	17 Kasus	12 Kasus	17 Kasus	11 Kasus



Tabel 2.166 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) yang terdata (terlaporkan).	109.32	115	110	102
	3.1.2* Persentase kunjungan kehamilan (ANC) yang memenuhi standar minimal 4 kali (K4)	91.72	85	90	
	3.1.2(a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	81.00	75	80	
	Cakupan pelayanan nifas		97,30 %		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		99,80 %		
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	16.88	30	28	26
	3.2.1* Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.	13.73	22	21	19
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	9.84	6	5	6,1
	3.2.3* Rasio posyandu per Satuan Balita		7.90		
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		4,00		
	3.2.4* Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.83		
	3.2.5 Cakupan Pnemumonia		85,50 %		
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	36	62	68	
	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.71	0,81	1	< 1
	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000	58.58	70	70	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
	penduduk.				
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.06	1	1	1
	3.3.4 Tingkat kematian karena malaria		1		
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	17	<30	<30	
	Tingkat kematian karena tuberkolosis per 100.000 penduduk			5,27	
	Tingkat kematian karena tuberkolosis per 100.000 penduduk		2,004 %		
	3.3.5.(a) eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	sudah melaksanakan TAS I,II ,III dan mendapat sertifikat eliminasi			
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	18.75	19.05		
	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		5.8	5.6	
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	49.02	25	23	
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	7.13	16	14	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.4.1.(b) Unmeet need pelayanan kesehatan				
	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	44.68	75.00	100.00	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3 Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1 Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	2.57	3.00	3.20	

Tabel 2.167 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLPT/MTs/ sederajat.	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
	Cakupan penjangkaran kesehatan SD dan Setingkat		117 Orang		

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	83,23 %	88,23 %	90,73 %	93,23%
	4.2.3 (a) Indikator (PAUD) Usia 0-4 Tahun yang berpartisipasi pendidikan PAUD.		29,994.67 Jiwa		
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung	4.6.1 Persentase masyarakat melek huruf	99,43 %	99,45 %	99,46 %	99,47%
4.c Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS	4.c.1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV, mendapatkan Sertifikasi, memenuhi Sertifikasi, Sekolah yang mengimplementasikan MBS, dan Pendidik tentang pemahaman Kurikulum		91,58%	94,58%	97,58%

Tabel 2.168 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi	5.2.2 (a) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	75%	80%	85%	90%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).	13,33%	0%	16,67%	%
	5.5.2 Rasio PNS Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai	51,8%	52,8%	53,0%	,0%

## 2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Ekonomi terdiri dari 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi; 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.169 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi , tabel 2.170 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi, tabel 2.171 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara.

Tabel 2.169 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	4,57	<4,5	<4,5
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara berkembang.	8.1.1* Pertumbuhan ekonomi	4.64	4.22	4.32	4,37
	8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB)	93,003 juta rupiah	102,683 juta rupiah	107,894 juta rupiah	113,370 juta rupiah
	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita	74.705.000	48.242.000	48.242.000	
	8.1.1.(a) PDB per kapita	5%	5%	5%	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25	27	30	30
	8.9.1. (a) Kunjungan wisata	42,42	40	43	45

Tabel 2.170 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a) Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (%)	55,57 %	56,92 %	57,59 %	56,85%

Tabel 2.171 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	4,57	<4,5	<4,5
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1 (A)Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	221 perusahaan	225 Perusahaan	420 Perusahaan

### 3. Pilar Lingkungan Hidup

Untuk pencapaian target pilar Lingkungan Hidup terdiri dari 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.172.

Tabel 2.172 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Target (1B9:G21)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan..	11.1.1.(a) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	5,92%	6%	7%

Target (1B9:G21)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	4 wilayah	4 wilayah	5 wilayah	5 wilayah

#### 4. Pilar Pembangunan Hukum

Untuk pencapaian target pilar Pembangunan Hukum terdiri dari 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.173

Tabel 2.173 Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1. RAD Anti Korupsi	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD	WDP(2016)	WDP	WTP	WTP
	Persentase SILPA		3,54 %	1,99 %	
	Bagi hasil Kota		22,07 %	25,54 %	
	16.6.1.(b) Tersusunnya LAKIP Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	13,33% (2014-2019)	0%	16,67%	16,67%
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	0%	0,03%	0,09%	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1.(b) Kepemilikan Akta Kelahiran	80,2 %	87%	90%	93%
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(d) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12 kasus	36 kasus	48 kasus	60 Kasus
	16.10.2.(e) Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	221 perusahaan	225 Perusahaan	420 Perusahaan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2018	2019	2020

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

#### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP;
- b) Belum meratanya sebaran guru yang masih terpusat di daerah kota sehingga daerah-daerah terpencil masih kekurangan guru untuk Perluasan Akses Pendidikan;
- c) Masih adanya tenaga pendidik/tenaga kependidikan/Kepala sekolah yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditentukan;
- d) Terbatasnya dan masih belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan pada level dasar dan menengah yang berkompeten untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan;
- e) Manajemen pengelolaan pendidikan belum efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana yang diharapkan;
- f) Belum meratanya penyediaan dan/atau pengembangan system pembelajaran, data dan informasi pendidikan berbasis riset dan standar mutu pendidikan dasar dan menengah;



- g) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- h) Kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dan pihak swasta dalam membantu pengembangan sector pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan murah/terjangkau;
- i) Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai;

## **2. Urusan Kesehatan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai;
- b) Pada umumnya bangunan puskesmas pembantu serta poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak;
- c) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas;
- d) Masih kurangnya akses, mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, serta masih terbatasnya pelaksanaan fungsi pengawasan berbasis teknologi;
- e) Belum tibanya system administrasi kependudukan, system pelaporan dan pencatatan sipil serta lemahnya pengawasan oleh dinas terkait;

- f) Penyakit Demam Berdarah (DBD) dan Malaria masih merupakan penyakit endemis di Kota Dumai. Kasus malaria dan DBD mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014;
- g) Ketersediaan peralatan kesehatan termasuk yang ada masih kurang dan tidak layak termasuk alat transportasi darat penunjang pelayanan kesehatan;
- h) Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi dan tekanan masalah lingkungan, sebagai akibat dari [1] sanitasi dan udara yang kotor [2] varians penyakit baru yang menyebar [3] penyakit akibat penyalahgunaan obat. Selain itu penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup juga akan cenderung membesar;
- i) Sistem layanan kesehatan pada beberapa lokasi masih menanggung beban lebih besar dibandingkan dengan kapasitasnya, termasuk mekanisme pengelolaannya;
- j) Kapasitas pelayanan puskesmas dan RSUD yang belum optimal (sarana dan prasarana);
- k) Masih rendahnya kompetensi tenaga kesehatan/paramedic terutama bagi Puskesmas di daerah terpencil dan/atau jauh dari perkotaan;
- l) Kurangnya sarana dan prasarana informasi yang berbasis teknologi tentang arti pentingnya kesehatan ibu dan anak setelah persalinan (proses melahirkan ditolong oleh tenaga medis);
- m) Penyebaran penyakit-penyakit endemi yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang dapat mempengaruhi secara tiba-tiba terhadap tingkat kesehatan penduduk. Dampak dinamika nasional diantaranya adalah [1] persoalan penyakit endemi yang perlu penanganan bersifat nasional, sehingga kebijakan

strategis nasional dapat mempengaruhi kualitas kesehatan [2] dukungan logistik obat dan peralatan kesehatan nasional dan kinerja layanan kesehatan;

- n) Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;

### **3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya pelayanan sambungan rumah air bersih yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer;
- b) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan;
- c) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);
- d) Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum;
- e) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*;
- f) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;
- g) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak; Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya;

h) Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah;

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih terdapatnya Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal;
- b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar sanitasi permukiman penduduk (limbah, persampahan dan drainase);
- c) Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin;

#### **5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana;
- b) Belum optimalnya skill Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Dumai;
- c) Rawan kebakaran lahan dan ancaman meledaknya fasilitas perminyakan yang tersebar di kota Dumai;
- d) Peningkatan resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman;
- e) Pengurangan resiko bencana masih belum menjadi bagian terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas;

- g) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
- h) Penegakan hukum (*law enforcement*) belum dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- i) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berkenaan dengan karakteristik perkotaan dan masyarakat yang heterogen.

## **6. Urusan sosial**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka;
- b) Keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK;
- c) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
- d) Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas;
- e) Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat;
- f) Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
  - a. Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi ketimpangan angka kemiskinan.
  - b. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
  - c. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

## **B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Tenaga Kerja**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat pengangguran terbuka masih diatas 9%;
- b) Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja atau belum adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang ditandai oleh masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
- c) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- d) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- e) Terbatasnya system informasi pasar kerja dan pengawasan terhadap penduduk pendatang (pencari kerja);
- f) Belum sinkronnya penyediaan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan dengan dunia usaha;

### **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Masih belum optimal dan belum terpadunya pendidikan tentang bahaya seks bebas bagi remaja;
- b) Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja;
- c) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;

- d) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- e) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang;
- f) Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan.

### 3. **Urusan Pangan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b) Tingginya ketergantungan impor pangan;
- c) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas;
- d) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;
- e) Kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Kota Dumai, serta belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;
- f) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- g) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;

### 4. **Urusan lingkungan Hidup**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara ambien;
- b) Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
- c) Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk mandi dan cuci;
- d) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
- e) Pencemaran sungai yang mengalir kota Dumai. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi tempat pembuangan sampah;
- f) Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem paritispatif untuk prinsip 3R;
- g) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- h) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- i) Bencana kebakaran hutan dan lahan (gambut) masih menjadi bencana tahunan;
- j) Perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut, serta okupasi kawasan konservasi;
- k) Degradasi dan deforestasi hutan dan lahan gambut;
- l) Daerah aliran sungai (DAS) dikuasai masyarakat untuk bertempat tinggal;



m) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai;

#### 5. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya kesadaran penduduk terhadap administrasi kependudukan;
- b) Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka di masa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat. Hal dapat menjadi beban pembangunan, bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat, sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan;
- c) Tingginya laju rata-rata pertumbuhan penduduk akibat adanya migrasi dan kelahiran penduduk;
- d) Administrasi penduduk yang belum terdokumentasikan secara baik melalui e-KTP dan susahny akses data kependudukan; sehingga sulit melakukan estimasi yang akurat terhadap kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan rumah tangga lainnya;
- e) Belum terigrasinya data kependudukan dengan data kemiskinan;

#### 6. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP;

- b) Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c) Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah;
- e) Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f) Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan;

**7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman terhadap pendidikan alat reproduksi bagi remaja masih dianggap tabu bagi orang tua;
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana;
- c) Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk;
- d) Kualitas pelayanan KB belum maksimal;
- e) Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk;
- f) Belum optimalnya ketahanan keluarga;

**8. Urusan Perhubungan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang;
- b) Belum Efektifnya Terminal Penumpang yang merupakan Simpul Transportasi Daerah;
- c) Penataan Angkutan Sewa yang masih menggunakan sistem antar jemput sehingga secara perlahan mengurangi penggunaan moda angkutan umum masal (Bus);
- d) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum optimal;
- e) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha sector transportasi di Kota Dumai akan arti pentingnya kesehatan udara;
- f) Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan polusi dan memicu kerusakan jalan;
- g) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan;
- h) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
- i) Masih tingginya *overloading* angkutan barang berakibat pada tingginya kerusakan jalan;
- j) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara belum optimal serta rendahnya pemanfaatan pelabuhan udara Pinang Kampai;

#### 9. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pengelolaan koperasi;
- b) Kurangnya tenaga teknis pembina koperasi;

- c) Terbatasnya akses pasar yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa;
- d) Kurangnya promosi hasil produksi UMKM;
- e) Sentra-sentra kegiatan ekonomi yang sudah terbentuk umumnya belum mendapat dukungan optimal dari pemerintah;
- f) Permasalahan kemiskinan didaerah Hinterland dan Provinsi tetangga dapat berimbas meningkatnya urbanisasi di Kota Dumai;
- g) Program pengentasan kemiskinan belum terpadu antar OPD;
- h) Belum optimalnya Pengembangan instrumen pembiayaan non-konvensional untuk UMKM;
- i) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
- j) Rendahnya kemampuan managerial pengelola;
- k) Rendahnya kapasitas SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan;
- l) Daya saing produk koperasi, usaha kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk daerah lain;
- m) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk;
- n) Belum efektifnya pembinaan dan pemberdayaan koperasi oleh *stakeholders* terkait.

#### 10. **Urusan Penanaman Modal**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum terbitnya peraturan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga hal ini berdampak pada penerbitan izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin di Bidang Penanaman Modal;

- b) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
- c) Belum optimalnya Pengembangan sistem insentif terhadap investasi;
- d) Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait;

#### **11. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Prasarana Kepemudaan (gedung) yang ada di Kota Dumai belum memadai;
- b) Belum adanya pembinaan secara berkelanjutan bagi para pemuda yang telah mengikuti pelatihan;
- c) Masih tingginya penggunaan Narkoba dikalangan pemuda;
- d) Rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda;
- e) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang mengakibatkan rendahnya kualitas atlit;
- f) Pembinaan olah raga belum optimal;
- g) Masih rendahnya kesadaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendaftarkan organisasi dan kegiatannya
- h) Rendah pembinaan manajemen OKP.

#### **12. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika :

- a) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan;
- b) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik;

- c) Belum semua OPD memiliki website resmi dan sebagian besar website yang terdapat pada OPD belum memuat data perkembangan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi OPD tersebut sehingga data terkait perkembangan kinerja pembangunan daerah sulit didapatkan dan berakibat pada lambatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d) Belum dimanfaatkan sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya;
- e) Belum ada data terkait dengan OPD yang sudah melakukan pelayanan administrasi secara online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi bagi masyarakat;

### 13. **Urusan Kebudayaan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah;
- b) Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untk promosi pariwisata kota Dumai;
- c) Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya;
- d) Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah;
- e) Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah;
- f) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring

masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;

g) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;

h) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;

#### 14. **Urusan Perpustakaan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a) Keterbatasan sarana dan prasarana;

b) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;

c) Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas;

d) Kerjasama perpustakaan daerah dengan perpustakaan yang memiliki refensi buku yang lengkap baik nasional dan internasional serta perguruan tinggi yang belum terjalin dengan baik (terkoneksi);

e) Kurangnya minat baca masyarakat;

#### 15. **Urusan Kearsipan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a) Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD masih belum optimal sebagaimana ketentuan yang berlaku;

b) Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis;

## C. Urusan Pilihan

### 1. Urusan pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Lapangan usaha pertanian belum mampu menjadi sektor basis dan tidak memiliki keunggulan kompetitif sehingga belum mampu menjadi sektor yang mampu memicu penambahan pendapatan penduduk;
- b) Terbatasnya kemampuan petani dalam teknologi pasca panen;
- c) Harga sarana dan prasarana pertanian yang tinggi;
- d) Harga produk pertanian yang cukup fluktuatif;
- e) Rendahnya produksi komoditas pertanian;
- f) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian masih rendah;
- g) Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- h) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;
- i) Tingginya ketergantungan komoditas pangan dan palawija pada daerah lain;
- j) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;
- k) Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen;

### 2. Urusan Kelautan dan perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih



dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut;

- b. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan;
- c. Ketrampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan;
- d. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha peternakan dan perikanan;
- e. Rendahnya produktivitas perikanan;
- f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum;
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- h. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan;
- i. Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah;
- j. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur;

### **3. Urusan Perindustrian dan Perdagangan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Sektor industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran merupakan 2 sektor dari beberapa sektor yang menjadi sektor basis dan prospektif namun tidak memiliki keunggulan kompetitif;

- b) Belum terciptanya sistim pembinaan yang efektif dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil menengah (UDKM) sehingga pembinaan yang dilaksanakan terkesan tidak efisien;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana promosi dari produk-produk Industri Kecil dan Menengah sehingga pemasaran produk IKM Kota Dumai masih bersifat lokal dan sulit berkembang;
- d) Sering terjadi gangguan terhadap kelancaran arus barang khususnya bahan pokok masyarakat termasuk BBM dan gas elpiji sehingga mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga dipasaran;
- e) Belum optimalnya akses permodalan bagi IKM;
- f) Sarana dan Prasarana Penujang kebersihan pasar belum lengkap;
- g) Belum maksimalnya penataan pedagang kaki lima dan keterbatasan lahan untuk merelokasi PKL;
- l) Sektor informal (PKL) di Kota Dumai yang berkembang sangat cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif (efek samping akibat suatu kegiatan ekonomi) bagi kegiatan lainnya;
- m) Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern, karena semakin banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun, supermarket dan toserba pada skala retail yang mengakibatkan turunnya daya saing pasar tradisional secara langsung;
- n) Belum optimalnya Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional untuk membiayai PKL;
- o) kelompok penduduk yang tergolong MBR sangat rawan terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok;

#### 4. Urusan Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- b) Rendahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Dumai;
- c) Kurang dan rendah kualitas infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata;
- d) Kurang sarana dan prasarana pendukung di areal objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan;
- e) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing;
- f) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan sederhana;
- g) Terbatasnya *event* budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan;
- h) Kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata Kota Dumai;

#### D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

##### 1. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal;
- b) Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;

- c) Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan;
- d) Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- e) Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah;
- f) Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah;
- g) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- h) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
- i) Kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi tentang regulasi jasa konstruksi;

## 2. **Urusan Pengawasan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b) Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input terhadap manajemen pemerintahan daerah;
- c) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- d) Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;

e) Penegakan supremasi hukum masih lemah;

### 3. **Urusan Perencanaan Pembangunan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;
- c) Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d) Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
- e) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan;
- f) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
- g) Belum terpetakaan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;
- h) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
- i) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
- j) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;

### 4. **Urusan Keuangan**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Sumber pendanaan pembangunan yang masih tergantung pada dana perimbangan dan Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
- b) Sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah belum tergarap secara optimal akibat data potensi usaha yang menjadi objek pajak dan retribusi belum terdata dengan baik;
- c) Rendahnya kemampuan daerah dalam mensinkronkan rencana pembangunan yang dapat menjadi potensi penerimaan daerah.
- d) Kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya belum sebagaimana yang kita harapkan.
- j) Transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah belum optimal;
- k) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- l) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Serta Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas;

#### 5. **Urusan Kepegawaian**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- b) Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;
- c) Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal;



# **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH KEBIJAKAN DAN KEUANGAN DAERAH**

## **BAB III**

# **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2020 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2020. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2020).

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPJMD Kota Dumai, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2020. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2020 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Dumai dan harus



mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 seperti yang telah dijelaskan diatas.

### **3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2020**

#### **a. Laju pertumbuhan Ekonomi**

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Mulai Tahun 2015 perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar ini dikarenakan Selama sepuluh tahun terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB. Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB adalah :

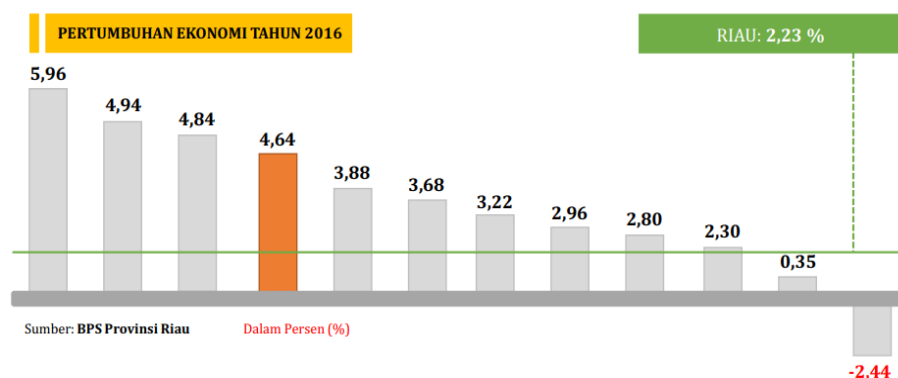
- 1) Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan kualitas data PDRB;
- 3) Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Sedangkan pengaruh akibat adanya perubahan tahun dasar terhadap perhitungan PDRB adalah:

- 1) Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok
- 2) pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- 3) Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan
- 4) Saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 5) Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena di dalamnya masih ada pengaruh perubahan harga barang dan jasa pada tahun tersebut. Untuk itu gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Tingkat perekonomian Kota Dumai dalam kurun waktu 2010-2016 dilihat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami penurunan. Perekonomian Dumai pada tahun 2016

mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Riau tahun 2016 sebesar 2,23, meningkat 2,01 poin dari 2015 sedangkan Laju pertumbuhan PDRB Dumai tahun 2016 mencapai 4,64 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 1,19 persen dan menempati posisi ke-4 se-Riau. Hal ini dikarenakan Tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan pengalihan upaya lain pada **sektor pariwisata** dan **non-migas**. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan Pengadaan listrik dan gas (18,12%), Industri Pengolahan (6,28%), Transportasi dan Pergudangan (4,88%) serta Jasa lainnya (4,39%). Seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dan Kota Dumai (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

PDRB Perkapita kota Dumai pada tahun 2017 sebesar 101,81 juta atau naik 5,97 juta dibandingkan tahun 2016 sebesar 95.83. selanjutnya untuk Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2017 sebesar 4,45 persen jika Dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 4,64 persen.

Tabel. 3.1 Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	77,463.01	84,354.52	89,008.77	95,836.36	101,816.17

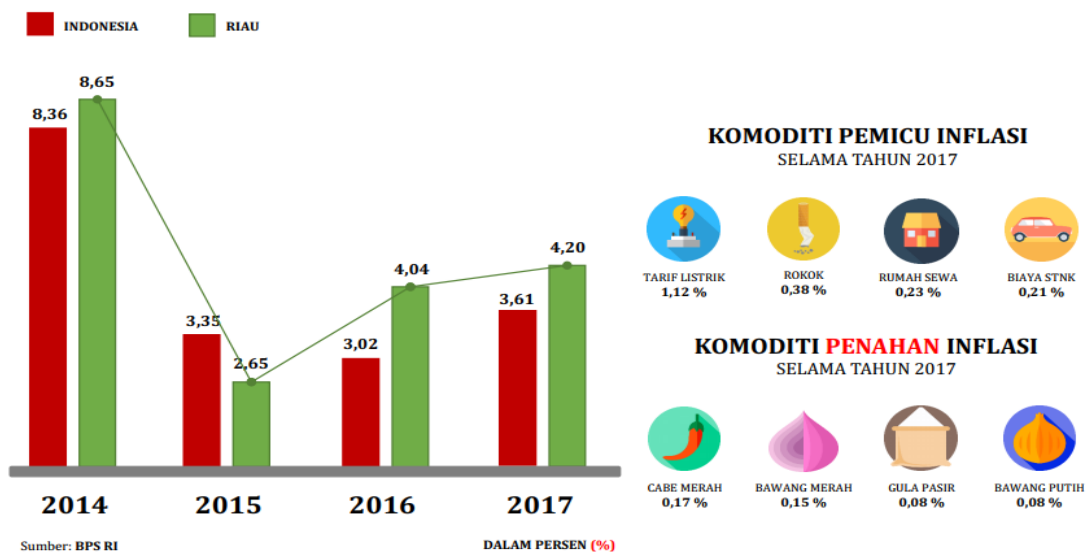
PDRB ADHB perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	100.6914412	109.7846371	102.8878105	104.952091	105.9909922
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	3,68	2,69	1,91	4,64	4,45
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,48	2,71	0,22	2,23	2,71
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat

Secara umum ada tiga lapangan usaha yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai tahun 2016 yaitu industri pengolahan (C), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (G) serta Bangunan (F). Sedangkan sektor-sektor yang lain memberikan kontribusi dibawah 10 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,18 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 0,57 persen, kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 0,01 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 1,05 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 0,54 persen, kategori Real Estat 0,48 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 persen kategori Jasa Lainnya sebesar 0,57 persen, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,93 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,07 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,14 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,89 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 53,88 persen, kategori Pertambangan dan Pengalihan sebesar 0,44 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,04 persen.

Adapun perkiraan (proyeksi) pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2020 adalah 4,37 persen.

## b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya. Inflasi tahun kalender selama 2016 sebesar 3,98 persen. Perbandingan Inflasi terhadap nasional dan propinsi masih didominasi oleh sektor Tarif Listrik, rokok, rumah sewa dan biaya STNK menjadi komoditi pemicu inflasi. Sedangkan deflasi terjadi di kelompok komoditi seperti Cabe Merah Bawang merah gula pasir dan bawang putih. Seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini :

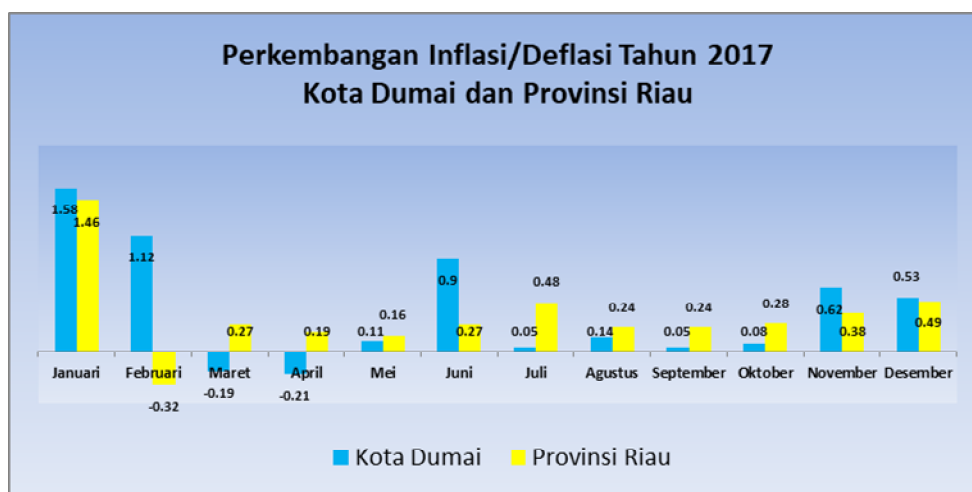


Gambar 3.2 Inflasi Tahun Kalender Kota Dumai Menurut Kelompok Pengeluaran

(Sumber : BPS Kota Dumai)

Pada tahun 2014 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 inflasi Kota Dumai mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6% (dari 8,53% pada tahun 2014 menjadi

2,63% di tahun 2015). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Provinsi Riau yang menunjukkan penurunan dari 8,65% menjadi 2,65%. Kinerja perekonomian yang sudah membaik ini kemudian mulai memburuk lagi di tahun 2016 dengan angka inflasi tahunan sebesar 3,98% (meningkat 1,35%). Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2016 seperti yang tersaji pada Gambar 2.15 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama-sama terjadi di bulan November. Sedangkan inflasi bulanan terendah terjadi di bulan April, dimana Kota Dumai dan Provinsi Riau sama-sama mengalami deflasi. Secara umum tingkat inflasi/deflasi bulanan yang terjadi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama, hanya saja pada bulan Februari kondisi perekonomian Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian Kota Dumai, dimana Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,34% sementara Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0.32%.



Gambar 3.3 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2017

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga

vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
  - a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan
  - b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif
  - c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer
- 2) Aspek Program
  - a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
  - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
- 3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
  - a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID
  - b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

**c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Selama periode 2010-2017 IPM Kota Dumai terus meningkat seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2017 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96 ; 73,36.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi.

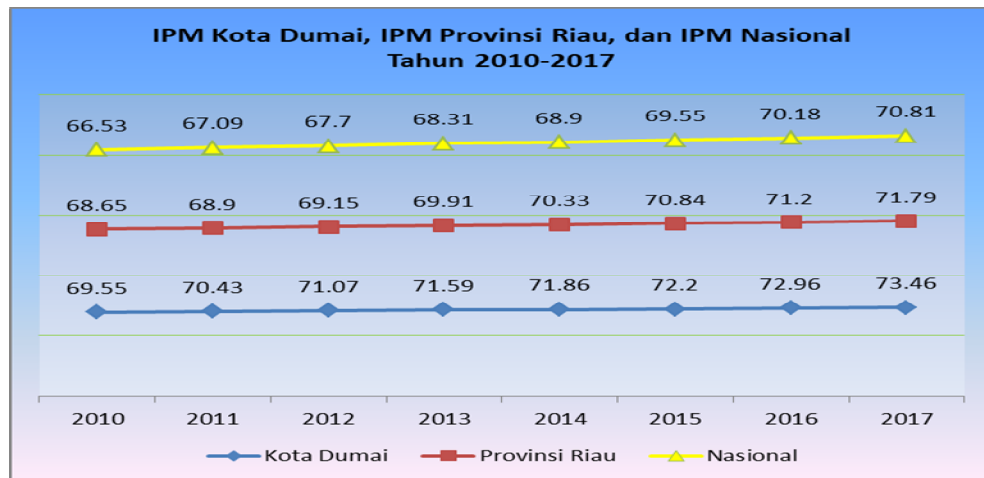
Tabel 3.2 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017

Cakupan Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46
Provinsi Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

(Sumber: BPS, 2018)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2010-2017, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 3.2. Pada tahun 2017, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 3.2 di atas. Pada tahun 2017 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 73,46 ; 71,79 ; 70,81. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.4 dan tabel 3.3 dibawah ini :





Gambar 3.4 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional Tahun 2010-2017

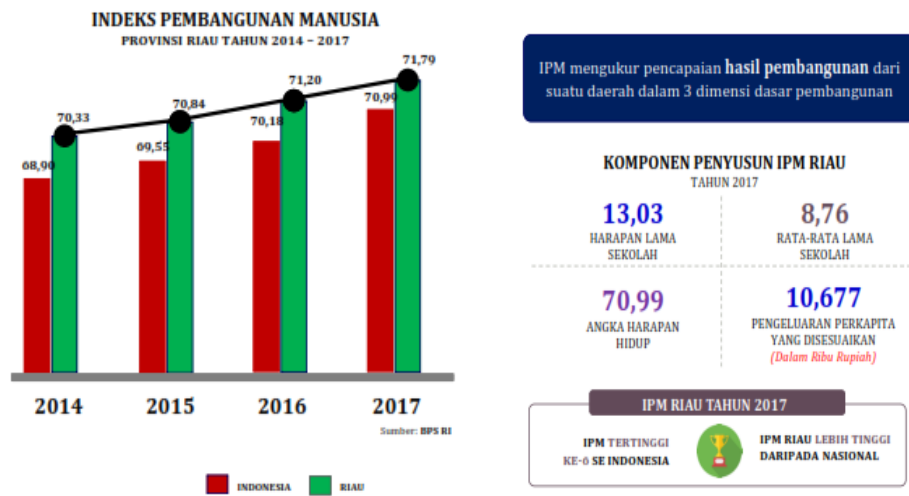
(Sumber: BPS, 2018)

Tabel 3.3 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17
Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70
Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97
Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46

(Sumber: BPS, 2018)

Sedangkan untuk melihat kondisi IPM secara keseluruhan berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



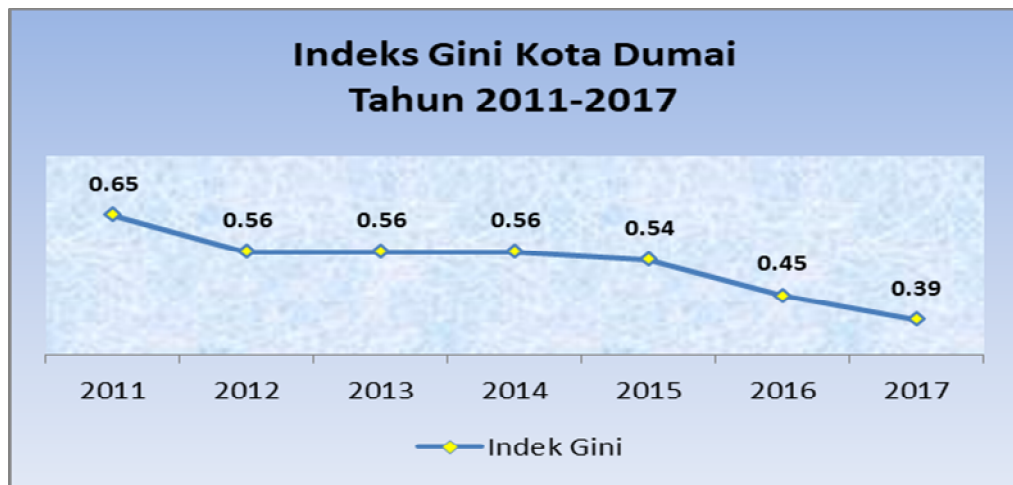
Gambar 3.5 perkembangan IPM kota Dumai berdasarkan AHH, HLS dan Pengeluaran Perkapita

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Adapun perkiraan (proyeksi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2020 adalah 74,381.

#### d. Indeks Gini

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2011-2017, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi.



Gambar 3.6 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2011-2017

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

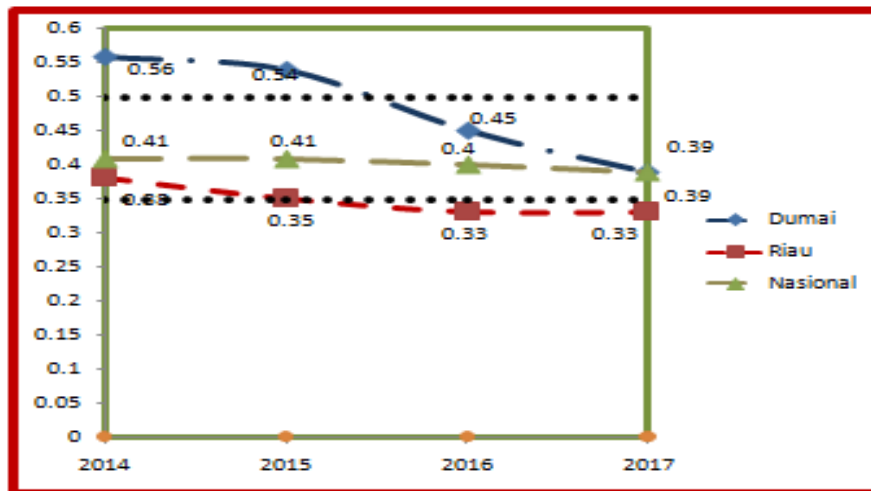
Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dimana penduduk dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- a) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.
- b) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan sedang.
- c) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan rendah

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Dumai berdasarkan pendapatan kriteria bank dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di kota Dumai masih termasuk kategori sedang, karena kelompok 40% termiskin pengeluarannya adalah 15,51% dari keseluruhan pengeluaran.

<b>Indeks gini</b>	<b>2017</b>
<b>Target</b>	<b>0,438</b>

Realisasi	2014	2015	2016	2017
Dumai	0.56	0.54	0.45	0.39
Riau	0.38	0.35	0.33	0.33
Nasional	0.41	0.41	0.40	0.39



Gambar 3.7. Perbandingan indeks Gini Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2014-2017.

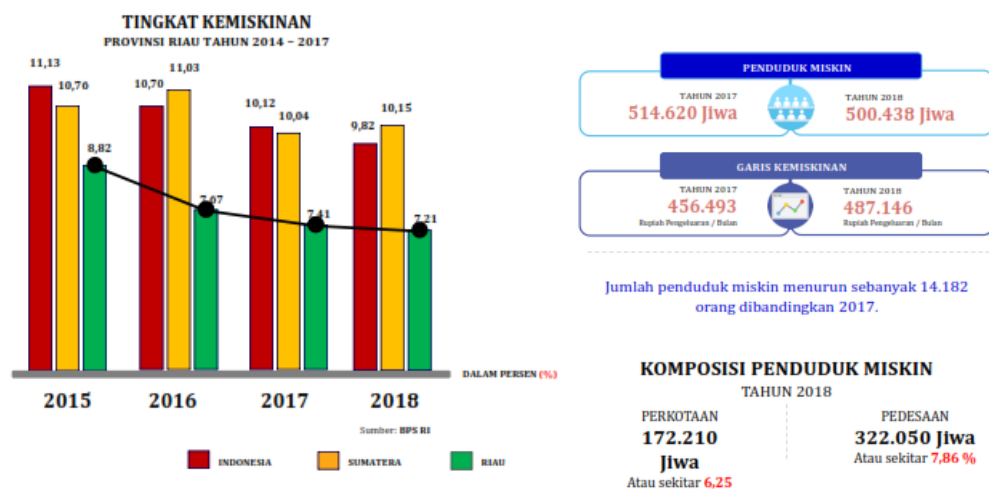
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Adapun perkiraan (proyeksi) Indeks Gini Rasio (IGR) kota Dumai Tahun 2020 adalah 0,408.

#### e. Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur

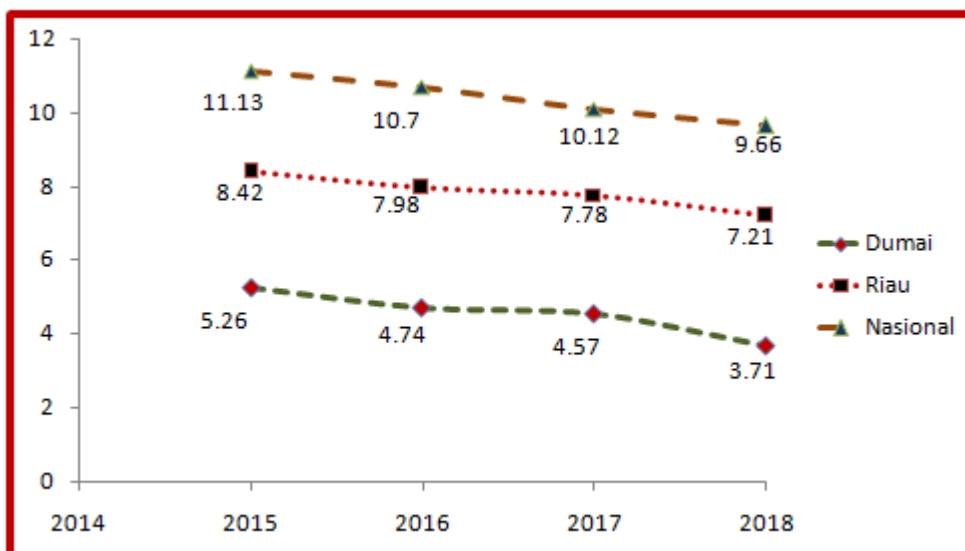
kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Untuk penjelasan secara detail sudah dijelaskan pada bab II. Secara umum perbandingan kondisi tingkat kemiskinan nasional dan propinsi dapat dilihat pada tabel Gambar dibawah ini :



Gambar 3.8 Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2015-2018 (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Sedangkan untuk kondisi kota Dumai pada tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Persentase penduduk miskin (%)	2015	2016	2017	2018
Dumai	5.26	4.74	4.57	3.71
Riau	8.42	7.98	7.78	7.21
Nasional	11.13	10.7	10.12	9.66

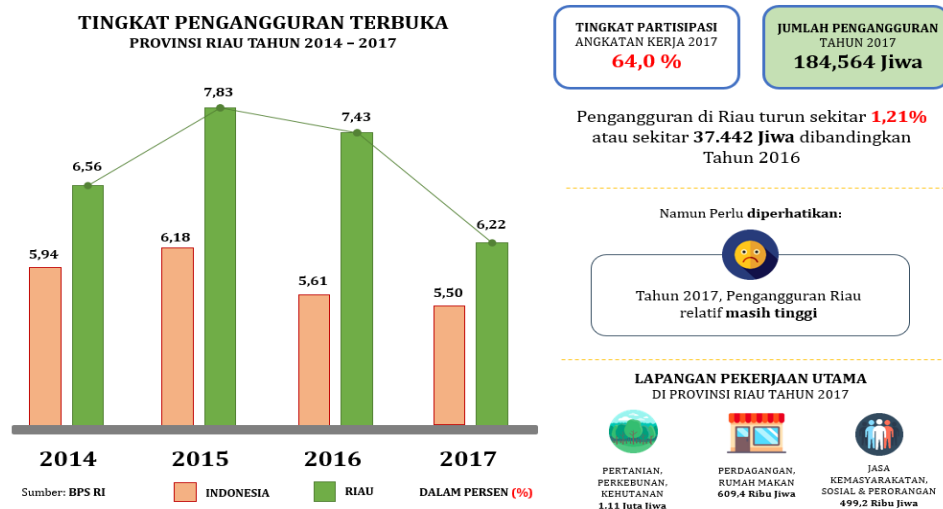


Gambar 3.9 Kondisi perbandingan Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2015-2018  
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Kemiskinan kota Dumai Tahun 2020 adalah 4,42%.

#### f. Pengangguran

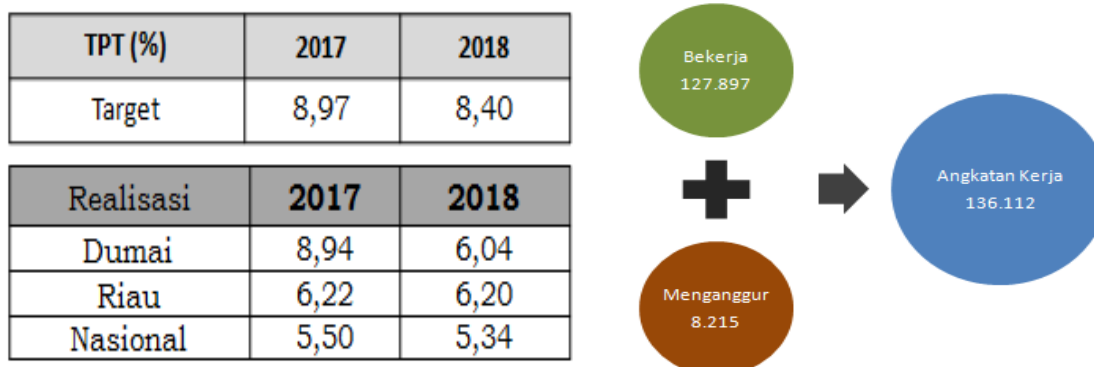
Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kondisi tingkat pengangguran nasional dan propinsi riau dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 3.10 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional dan Propinsi Riau Tahun 2014-2017 (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Sedangkan kondisi kota Dumai untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.11 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2018



(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kota Dumai Tahun 2020 adalah 7,42%.

### **3.1.2. Telaahan Kebijakan nasional yang terkait dengan Kota Dumai**

Kerangka ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2020 dirumuskan dengan memperhatikan dan menelaah arah kebijakan makro nasional untuk tahun 2020 untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain :

1. Meningkatkan Pertumbuhan potensial Indonesia yang meliputi :
  - a. Transformasi structural untuk peningkatan kesejahteraan seperti revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan dan transformasi sektor jasa.
  - b. Penguatan permintaan domestic dan peningkatan kinerja perdagangan internasional, Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal, dan menjaga keberlanjutan fiscal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.
2. Menjaga stabilitas makro ekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang meliputi :
  - a. Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkatan pendapatan
  - b. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan
  - c. Memperluas akses dan kesempatan
  - d. Mempertahankan keseimbangan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa Dumai telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) pada sistem perkotaan nasional. Sebagai PKN, Kota Dumai akan dilakukan percepatan pengembangan sebagai kota-kota utama kawasan perbatasan dalam bentuk pengembangan/peningkat fungsi kota. Sedangkan sebagai PKSN, Kota



Dumai akan dilakukan revitalisasi dan percepatan pengembangan sebagai kota-kota pusat pertumbuhan nasional dalam bentuk pengembangan/peningkatan fungsi. Sedangkan berdasarkan struktur ruang nasional, kota Dumai akan dilalui oleh 2 (dua) jaringan jalan bebas hambatan antar kota yang masih dalam tahap pengembangan yaitu :

1. rute Pekanbaru-Kandis-Dumai
2. rute Dumai-Simpang sigambal-rantau prapat.

Adapun dari sisi kepelabuhanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pelabuhan Kota Dumai ditetapkan sebagai pelabuhan utama dimana direncanakan Pelabuhan Kota Dumai akan dikembangkan untuk pemantapan pelabuhan utama dan untuk pemantapan pelabuhan angkutan penyeberangan. Sedangkan dari sisi energy, Pemerintah pusat telah menetapkan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik kota Dumai masuk dalam tahapan pengembangan untuk peningkatan kapasitas pembangkitan tenaga listrik. Terkait sektor unggulan, Kota Dumai telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan andalan Duri-Dumai dan sekitarnya. Adapun Kawasan Andalan Duri-Dumai dan sekitarnya masuk dalam tahapan pengembangan:

1. Pengembangan kawasan andalan untuk industri pengolahan
2. Pengembangan kawasan andalan untuk perkebunan
3. Pengembangan kawasan andalan untuk perikanan
4. Pengembangan kawasan andalan untuk pertanian
5. Pengembangan kawasan andalan untuk minyak dan gas bumi.

### **3.1.2. Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai**

Selain menelaah Kebijakan Nasional baik makro ataupun spasial yang terkait dengan Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah kebijakan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan rancangan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam visi dan misi dalam menyusun RKPD Kota Dumai tahun 2020. Adapun rancangan misi pemerintah provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi.

Disamping menelaah rancangan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dimana kota Dumai ditetapkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Jaringan jalan ruas Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, ruas jalan purnama, ruas Dumai-sepahat ditetapkan sebagai jaringan jalan arteri primer
3. Jaringan jalan ruas Dumai-sepahat, ruas Dumai-lubuk Gaung-sinaboi ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 2

4. Jaringan jalan ruas jalan lingkaran kota Dumai ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 3
5. Pengembangan jaringan jalan strategis nasional direncanakan pada jalan Simpang kulim-Pelabuhan Dumai (*Rigid Pavement*), Jalan Dumai-Pelintung, peningkatan jalan simpang batang-batas Dumai (*Rigid Pavement*).
6. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Pekanbaru-kandis-Dumai, Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
7. Pengembangan Terminal penumpang kota Dumai sebagai terminal penumpang Tipe A
8. Pengembangan terminal barang kota Dumai sebagai terminal utama
9. Rencana Pengembangan rel Kereta Api jalur Rantau Prapat-Duri-Dumai sebagai jalur utama dan jalur rokan IV koto-ujung baru-Kandis-Duri-Dumai sebagai jalur lokal
10. Memantapkan lintas penyeberangan antara Negara melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Dumai-Melaka dan Dumai-Tanjung Beruas
11. Mengembangkan pelabuhan angkutan penyeberangan ASDP Kota Dumai
12. Pengembangan Bandar udara Pinang Kampai sebagai pengumpul skala tersier.
13. Rencana pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kota Dumai dan Pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi jalur Dumai-KID, Jalur Dumai-Bangkinang, Jalur Bagan Siapiapi-Dumai
14. Pengembangan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Durolis Kota Dumai-Kabupaten Rokan Hilir-Kabupaten Bengkalis

15. Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kecamatan Dumai Selatan
16. Perlindungan kawasan bergambut di Kota Dumai dan taman wisata alam Kota Dumai
17. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai
18. Pengembangan kawasan pariwisata pantai puak dan sekitarnya
19. Pengembangan kawasan industri Dumai sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi
20. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus Dumai dan pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai
21. Pengembangan jaringan kabel serat optic di Kota Dumai

### **3.1.3. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum**

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Dumai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing kota dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
3. Masih kurangnya kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia masyarakat Kota Dumai dalam menghadapi tantangan pembangunan global setelah diberlakukannya kebijakan pasar bebas Asean seperti Masyarakat Ekonomi Asean dan persaingan tenaga kerja lokal dari daerah lain di Indonesia.

4. Melambatnya perekonomian Kota Dumai serta masih tingginya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang bisa meningkatkan jumlah masyarakat miskin.
5. Belum optimal kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan transparan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan.
6. Belum Optimalnya pembangunan dibidang pertanian, industri, perdagangan dan Jasa serta investasi yang memiliki banyak peluang setelah penetapan kota Dumai menjadi beberapa pusat kegiatan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi.
7. Perlunya peningkatan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu dalam rangka menghadapi tantangan budaya global

#### **3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam kota Dumai dan faktor yang berasal dari luar kota Dumai. Faktor yang berasal dari dalam kota Dumai adalah kondisi belum jelasnya **status rencana tata ruang kota Dumai** yang mempengaruhi rencana pemanfaatan ruang dalam rangka ketersediaan infrastruktur kota dan dasar masyarakat dan perizinan di kota Dumai. Produktivitas usaha industri atau perdagangan masyarakat dalam skala kecil dan Menengah (*small and medium enterprises*) juga turut mempengaruhi kontribusi barang/jasa dan jumlah tenaga kerja yang membentuk PDRB kota Dumai sehingga ketika usaha kecil dan menengah ini mengalami stagnasi, maka akan mempengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat termasuk jumlah tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prospek perekonomian kota Dumai Tahun 2019 dan tahun 2020 antara lain adalah adanya kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak yang mengikuti trend harga pasar dunia sehingga harga bahan bakar bisa berubah setiap saat. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Dumai dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar yang menjadi acuan perdagangan internasional diperkirakan juga mempengaruhi nilai perdagangan kota Dumai yang berakibat pada inflasi. Situasi dan stabilitas keamanan pusat dan daerah juga turut memberi andil terhadap prospek pembangunan kota Dumai.

Di tahun mendatang, kemungkinan kondisi pembangunan ekonomi Kota Dumai masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat

dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan akan difokuskan pada penguatan struktur perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.

2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas yang selama ini masih berorientasi pada wilayah pemukiman. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
4. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
6. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun Pemerintah Kota Dumai tetap optimis dalam cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja diklasifikasi menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan



kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau "*civil society*".

### **3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2017 sampai proyeksi tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan  
serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Pendapatan Tahun 2019	Proyeksi/Target Pendapatan 2020	Proyeksi Pendapatan 2021
	Realisasi	Realisasi			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.185.013.276.651,81</b>	<b>1.187.808.492.264,08</b>	<b>1.309.014.468.420,13</b>	<b>1.395.941.366.540,50</b>	<b>1.260.214.768.758,29</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>265.472.760.817,81</b>	<b>278.226.720.607,85</b>	<b>271.211.075.220,13</b>	<b>286.670.444.340,50</b>	<b>284.287.688.163,29</b>
Pendapatan Pajak Daerah	94.993.765.288,91	128.067.850.613,00	128.428.146.044,50	136.415.023.699,50	132.863.266.079,29
Pendapatan Retribusi Daerah	35.859.444.250,00	30.708.924.601,00	38.572.774.000,00	39.460.213.000,00	38.572.774.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.626.568.826,00	2.189.648.098,00	2.397.426.187,00	2.597.426.187,00	2.397.426.187,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.992.982.452,90	117.260.297.295,85	101.812.728.988,63	108.197.781.454,00	110.454.221.897,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>755.592.886.590,00</b>	<b>810.190.491.050,00</b>	<b>916.266.393.200,00</b>	<b>987.733.922.200,00</b>	<b>854.390.080.595,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	42.924.641.373,00	58.145.053.156,00	57.274.757.100,00	82.274.757.100,00	58.145.053.156,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	141.483.331.564,00	158.526.075.439,00	221.272.684.100,00	246.272.684.100,00	158.526.075.439,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	408.643.780.000,00	427.188.089.000,00	451.407.124.000,00	451.407.124.000,00	451.407.124.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	162.541.133.653,00	166.331.273.455,00	186.311.828.000,00	186.311.828.000,00	186.311.828.000,00
Dana Insentif Daerah	-	-	-	21.467.529.000,00	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>163.947.629.244,00</b>	<b>99.391.280.606,23</b>	<b>121.537.000.000,00</b>	<b>121.537.000.000,00</b>	<b>121.537.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah	-	-	36.037.000.000,00	36.037.000.000,00	36.037.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	84.630.386.181,00	86.741.473.606,23	85.500.000.000,00	85.500.000.000,00	85.500.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	79.317.243.063,00	12.649.807.000,00	-	-	-

Penjelasan Tabel 3.4 untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.395.941.366.540,50,50 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

**1) Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Penyumbang PAD di Kota Dumai diantaranya berasal dari objek :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Reklame, PPJ (Pajak Penerangan Jalan),
4. Pajak Air Tanah,
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan,
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
8. Pajak Parkir,
9. Pajak sarang Burung Walet,
10. Retribusi Pelayanan Pasar,
11. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat),
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
16. Retribusi Jasa Usaha Terminal,
17. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir,

18. Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan,
19. Retribusi Pelayanan Bandar Udara,
20. Retribusi Izin Trayek,
21. Retribusi Rumah Potong Hewan,
22. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,
23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
24. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air,
25. Retribusi Puskesmas, dan
26. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 direncanakan Rp. 286.670.444.430,50 dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari pajak Daerah sebesar Rp. 136.415.023.699,50, Retribusi Daerah sebesar Rp. 39.460.213.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 2.597.426.187,00 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 108.197.781.454,00.

## **2) Dana Perimbangan**

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2020, prediksi pendapatan daerah dari sumber Dana Perimbangan sebesar Rp. 987.733.922.200,00 Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2020 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2020 masing-masing terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 82.274.757.100,00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 246.272.684.100,00
c. Dana Alokasi Umum	Rp. 451.407.124.000,00
d. Dana Alokasi Khusus	Rp. 186.311.828.000,00
e. Dana Insentif Daerah	Rp. 21.467.529.000,00

### **3) Lain-lain Pendapatan yang sah**

Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.121.537.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 36.037.000.000,00,- dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Riau sebesar Rp. 85.500.000.000,00,-

#### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Secara teknis kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut :

##### **3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2020 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2019 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2018.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2020 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2020 terdiri dari :

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).
- e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana

sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

## **2. Dana Perimbangan**

- a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.
- b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Informasi Resmi Situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2020 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2020, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2018.

- c. Perhitungan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan yang yang tercantum dalam Informasi Resmi Situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- a. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- b. Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2018, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- c. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima



bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2020 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
5. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
6. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
7. Koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;

8. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
9. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
10. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
11. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
12. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
13. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;
16. Updating Basis Data Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;
18. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

#### **3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2020. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel 3.5 berikut menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2017-2018, Tahun 2019 dan Proyeksi/target tahun 2020 dan proyeksi Tahun 2021.

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah  
Kota Dumai Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Belanja Daerah Tahun 2019	Proyeksi/Target 2020	Proyeksi 2021
	Realisasi	Realisasi			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	475.370.758.398,00	478.490.986.107,00	570.348.484.999,95	627.383.333.499,95	690.121.666.850
Belanja Pegawai	462.005.443.318,00	465.147.119.027,00	560.940.715.719,95	617.034.787.291,95	678.738.266.021
Belanja Bunga	-	-	-		
Belanja Subsidi	2.442.348.000,00				
Belanja Hibah	7.645.200.000,00	11.098.600.000,00	6.255.000.000,00	6.880.500.000,00	7.568.550.000
Belanja Bantuan Sosial	1.032.500.000,00				
Belanja Bagi Hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa					
Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	2.245.267.080,00	2.245.267.080,00	2.652.769.280,00	2.918.046.208,00	3.209.850.829
Belanja Tidak Terduga			500.000.000,00	550.000.000,00	605.000.000
BELANJA LANGSUNG	727.884.628.675,93	633.960.709.483,74	698.535.748.483,63	768.389.323.331,99	845.228.255.665
Belanja Pegawai	150.930.292.060,00	81.765.530.048,00	80.220.026.438,00	88.242.029.081,80	97.066.231.990
Belanja Barang dan Jasa	304.333.455.458,10	377.938.084.053,74	392.762.055.240,63	432.038.260.764,69	475.242.086.841
Belanja Modal	272.620.881.157,83	174.257.095.382,00	225.553.666.805,00	248.109.033.485,50	272.919.936.834

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan E-planning Kota Dumai berdasarkan program/kegiatan serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table dibawah ini :

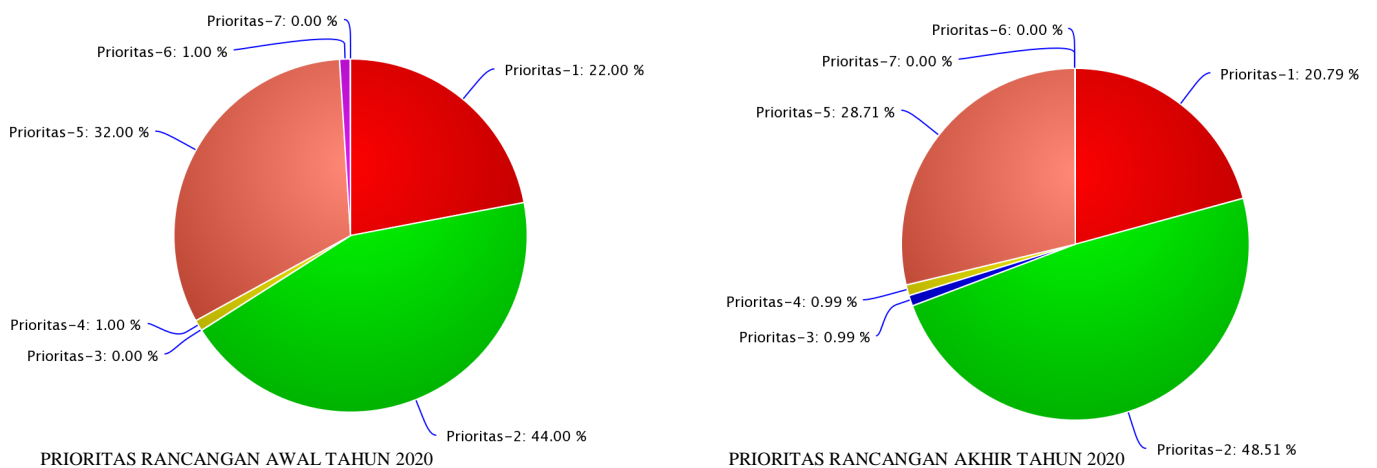
Tabel 3.6 Rekap Perbandingan Belanja Langsung Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2020

No	OPD Pelaksana	Pagu	Rancangan Awal				Rancangan Akhir			
			Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%	Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%
1	Dinas Kesehatan	125.301.605.924	18	73	78.448.405.949	62,61%	18	72	125.301.605.924	100%
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.905.310.760	19	67	10.082.935.138	84,69%	18	63	11.905.310.760	100%
3	Dinas Perhubungan	35.525.742.495	12	44	18.921.579.895	53,26%	12	44	35.525.742.495	100%
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.905.962.633	9	37	4.905.962.633	100%	9	37	4.905.962.633	100%
5	Dinas Sosial	6.164.749.037	14	41	5.464.749.037	88,65%	14	41	6.164.749.037	100%
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.933.553.200	10	28	2.460.349.056	83,87%	10	28	2.933.553.200	100%
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.112.064.500	11	36	3.810.326.290	74,54%	10	34	5.112.064.500	100%
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.745.356.510	11	35	12.127.641.000	95,15%	11	35	12.745.356.510	100%
9	Inspektorat	7.068.177.898	8	43	5.607.570.772	79,34%	8	43	7.068.177.898	100%
10	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	293.247.717.540	13	36	169.247.717.540	57,71%	13	36	293.247.717.540	100%
11	Sekretariat DPRD	31.089.678.039	8	39	31.089.678.039	100%	8	39	31.089.678.039	100%
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.254.115.200	8	54	6.054.508.370	73,35%	8	46	8.254.115.200	100%
13	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	206.691.321.000	17	146	114.221.125.150	55,26%	17	137	206.691.321.000	100%
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	225.968.060.000	19	60	139.901.502.757	61,91%	19	60	225.968.060.000	100%
15	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	47.910.513.972	12	39	40.185.513.972	83,88%	12	39	47.910.513.972	100%
16	Dinas Lingkungan Hidup	23.662.880.712	16	48	18.641.863.212	78,78%	16	48	23.662.880.712	100%

No	OPD Pelaksana	Pagu	Rancangan Awal				Rancangan Akhir			
			Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%	Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.616.335.847	11	47	3.692.896.267	80%	11	47	4.616.335.847	100%
18	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	17.046.025.226	12	35	4.696.763.665	27,55%	12	35	17.046.025.226	100%
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.449.523.630	10	41	3.718.944.105	49,92%	9	38	7.449.523.630	100%
20	Dinas Perdagangan	7.984.289.635	11	31	3.552.516.650	44,49%	11	31	7.984.288.635	100%
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	17.658.776.860	17	51	9.876.891.860	55,93%	17	51	17.658.776.860	100%
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.006.172.344	11	31	13.256.172.344	94,65%	11	31	14.006.172.344	100%
23	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	36.726.404.615	14	45	35.649.240.153	97,07%	14	45	36.726.404.615	100%
24	Dinas Perikanan	3.838.026.926	13	39	3.626.306.000	94,48%	12	34	3.838.026.926	100%
25	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.846.120.668	14	37	2.836.015.697	73,74%	12	33	3.846.120.668	100%
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	14.290.340.526	6	63	13.715.809.011	95,98%	6	63	14.290.340.526	100%
27	Badan Pendapatan Daerah	12.868.000.000	6	56	11.363.350.130	88,31%	6	54	12.868.000.000	100%
28	Satuan Polisi Pamong Praja	7.178.780.000	11	40	3.849.665.960	53,63%	11	40	7.178.780.000	100%
29	Sekretariat Daerah Kota Dumai	45.286.845.722	36	115	50.656.589.707	111,86%	34	95	45.286.845.722	100%
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.880.649.578	12	48	8.940.649.578	82,17%	12	47	10.880.649.578	100%
31	Kec. Dumai Barat	8.733.281.500	27	90	3.482.416.565	39,88%	27	90	8.733.281.500	100%
32	Kec. Dumai Timur	9.327.024.018	31	144	4.043.997.120	43,36%	31	144	9.327.024.018	100%
33	Kec. Bukit Kapur	14.313.642.214	31	239	3.443.422.300	24,06%	31	239	14.313.642.213	100%
34	Kec. Sungai Sembilan	14.209.096.743	31	140	3.500.152.500	24,63%	31	140	14.209.096.743	100%
35	Kec. Medang Kampai	8.147.584.759	31	117	7.557.877.509	92,76%	28	106	8.147.584.759	100%
36	Kec. Dumai Kota	10.790.968.210	30	151	4.012.726.947	37,19%	30	150	10.790.968.210	100%
37	Kec. Dumai Selatan	10.045.556.623	30	124	4.712.940.968	46,92%	30	123	10.045.556.623	100%
-	<b>Total</b>	<b>1.327.730.255.064</b>	<b>600</b>	<b>2.51</b>	<b>861.356.773.846</b>	<b>64,87%</b>	<b>589</b>	<b>2.438</b>	<b>1.327.730.254.063</b>	<b>100%</b>

Table 3.7 Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2020 berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020

No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Penguatan Sistem Pelayanan Jaringan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat	88	320	275,725,439,876.00	21%
2	Penguatan dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan	72	353	648,875,372,232.00	49%
3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Sistem Dan Peluang Investasi	25	63	9,936,628,027.00	1%
4	Penguatan Ekonomi Kerakyatan , Sistem, Potensi Dan sumber Daya Sektor Pertanian, Perkebunan Serta Perikanan	15	32	8,088,304,693.00	1%
5	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Good Governance	374	1.635	378,888,897,027.00	29%
6	Penguatan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi Dan UMKM	15	35	6,215,612,208.00	0.47%
7	Penguatan Nilai-nilai Budaya Dan Keagamaan	4	60	5,064,742,633.00	0.38%
	TOTAL	589	2.438	1,327,730,254,063.00	100%



Gambar 3.12 Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2020 berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020

#### **a. Belanja Daerah**

Belanja daerah tahun anggaran 2020 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah Tahun 2019 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

#### **b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah**

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan



anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja Perubahan RPJMD 2016-2021 yang belum tercapai;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2020;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Propinsi Riau;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
10. Program/kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;

11. Kebijakan pada belanja barang dan jasa yang diterapkan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi sisa persediaan tahun anggaran 2020. Kebutuhan riil dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan setiap OPD;
- b) Alat Tulis Kantor (ATK) disetiap OPD ditempatkan pada Sekretariat OPD tersebut;
- c) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga atau masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
- d) Pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan OPD dan dilakukan evaluasi terhadap inventaris barang yang masih baik kondisinya maupun umur ekonomisnya;
- e) Melakukan pembatasan rapat-rapat diluar kantor, workshop, seminar dan lokakarya;
- f) Penganggaran untuk mengikuti pelatihan hanya diperkenankan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga resmi yang Akreditasi dan Kompetensinya sudah diakui.

12. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan berimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan.

13. Sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2007, penganggaran belanja modal harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan/dimanfaatkan;
14. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2020 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi Riau.

Adapun total usulan DAK tahun 2020 yang diajukan pemerintah Kota Dumai ke pemerintah pusat adalah sebesar Rp 186.311,83 (Juta),- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rekap Perbandingan usulan belanja pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus T.A 2020

NO	USULAN PEMBANGUNAN (DAK)	PAGU DAK		PERBANDINGAN	KET
		2019	2020		
1	2	3	4	5	6
1	DAK REGULER	363,330.72	58.650,03	304.680,69	(Juta)
2	DAK PENUGASAN	150,189.96	59.874,36	90.315,60	(Juta)
3	DAK AFIRMASI	72,026,52	5.826,21	66.200,31	(Juta)
TOTAL DAK		585,547.21	124,350.60	461,196.60	(Juta)

Sumber : <http://e-musrenbang.bappenas.go.id>

Dengan rincian usulan belanja pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Table 3.9 Lampiran Rekapitulasi Usulan DAK Kota Dumai  
Tahun 2020

NAMA BIDANG/ SUB-BIDANG/ MENU KEGIATAN	NILAI USULAN
1	2
<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>	<b>186.311.828.000,00</b>
<b>DAK FISIK</b>	<b>124.350.597.000,00</b>
<b>DAK FISIK REGULER</b>	<b>58.650.030.000,00</b>
<b>PENDIDIKAN</b>	<b>16.896.572.000,00</b>
- SD	10.438.944.000,00
- SMP	5.447.050.000,00
- SKB	785.578.000,00
- Perpustakaan Daerah	225.000.000,00
<b>KESEHATAN &amp; KB</b>	<b>17.374.490.000,00</b>
- Pelayanan Kesehatan Dasar	13.000.000.000,00
- Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	4.374.490.000,00
<b>JALAN</b>	<b>24.378.968.000,00</b>
- Jalan	24.378.968.000,00
<b>DAK FISIK PENUGASAN</b>	<b>59.874.355.000,00</b>
<b>KESEHATAN &amp; KB</b>	<b>40.652.585.000,00</b>
Kesehatan (RS Rujukan)	40.009.500.000,00
Penurunan Stunting	475.245.000,00
Pengendalian Penyakit	167.840.000,00
<b>JALAN</b>	<b>19.221.770.000,00</b>
Jalan	19.221.770.000,00
<b>DAK AFFIRMASI</b>	<b>5.826.212.000,00</b>
- Perumahan dan Pemukiman	-
- Transportasi	4.736.092.000,00
<b>PENDIDIKAN</b>	<b>1.090.120.000,00</b>
- SD	300.000.000,00
- SMP	790.120.000,00
<b>DAK NON FISIK</b>	<b>61.961.231.000,00</b>
<b>Tunjangan Profesi Guru</b>	<b>52.410.671.000,00</b>
Tunjangan Profesi Guru	52.410.671.000,00
<b>Tambahan Penghasilan Guru</b>	<b>426.950.000,00</b>
Tambahan Penghasilan Guru	426.950.000,00
<b>Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB</b>	<b>8.111.478.000,00</b>

<b>NAMA BIDANG/ SUB-BIDANG/ MENU KEGIATAN</b>	<b>NILAI USULAN</b>
Bantuan Operasional Kesehatan	6.179.743.000,00
Akreditasi Puskesmas	1.086.500.000,00
Akreditasi Labkesda	393.235.000,00
Jaminan Persalinan	452.000.000,00
<b>Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan</b>	<b>1.012.132.000,00</b>
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.012.132.000,00

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2019)

### **c. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2018.**

1. Kebijakan terkait Belanja Pegawai meliputi sebagai berikut :
  - a) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun 2020 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketigabelas;
  - b) Menganggarkan belanja pegawai dalam APBD 2020 untuk mengantisipasi pengangkatan CPNS Kota Dumai sesuai dengan kebutuhan dan formasi pegawai;
  - c) Memperhitungkan *acress* sebesar maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk mengantisipasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.
  - d) Penganggaran asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 tentang kecelakaan kerja dan kematian bagi .
  - e) Penganggaran tambahan penghasilan untuk PNS/CPNS baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan dengan peraturan

kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai serta belanja penunjang kegiatan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial;
5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik.
6. Kebijakan terkait Belanja Hibah pada tahun anggaran 2020:
  - a) Pemberian Hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan pemerintah atau semi pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2016

tentang tatacara pemberian Hibah dan Bansos serta Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 240/97/Adm-Kesra tanggal 30 Januari 2017.

- b) Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
  - c) Penentuan penerima Hibah dilakukan secara selektif dan rasional serta tidak wajib, tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - d) Belanja Hibah kepada instansi vertikal menggunakan mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada pengelolaan keuangan daerah, bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan PMK no. 168/PMK.07/2008 tentang hibah daerah.
7. Kebijakan terkait Bantuan Sosial pada tahun 2020:
- a) Pemberian bantuan sosial diberikan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2016 tentang tatacara pemberian Hibah dan Bansos serta Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 240/97/Adm-Kesra tanggal 30 Januari 2017.
  - b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diperuntukkan membantu korban kebakaran, banjir dan

kejadian bencana tak terduga lainnya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- c) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar Dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

8. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2020:

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam program dan kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.



### **3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.8. sebagai berikut:

Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah  
Kota Dumai Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Proyeksi / Target pada Tahun 2020	Proyeksi Pada tahun 2021
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-			-	
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	41.896.118.427,21	23.704.008.005,09	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			-	-	-
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah					
<b>Jumlah penerimaan pembiayaan</b>		<b>41.896.118.427,21</b>	<b>23.704.008.005,09</b>	-	-	-
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00				
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya	0,00				

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Proyeksi / Target pada Tahun 2020	Proyeksi Pada tahun 2021
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah					
<b>Jumlah pengeluaran pembiayaan</b>						
<b>Jumlah pembiayaan NETTO</b>		41.896.118.427,21	23.704.008.005,09		-	

**a. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

**c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *dividen* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.



# **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 Kota Dumai merupakan penjabaran Perubahan RPJMD kota Dumai 2016-2021. Oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 mengacu pada pencapaian visi dan misi Perubahan RPJMD 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 8 AThun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Dumai AThun 2016-2021.

Selain pertimbangan dokumen tersebut diatas, pemerintah kota Dumai juga mempedomani rancangan prioritas dan pembangunan daerah provinsi Riau pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 dan RKP tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2015-2020.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, Pokok-pokok Pikiran Dewan, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai.

##### **4.1.1. Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021**

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka perubahan RPJMD kota Dumai Tahun 2016-2021 mempunyai visi sebagai berikut:

***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada  
Tahun 2021”***

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1) Masyarakat Dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin

Arti kata :

a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat

b) Lahir : keduniaan; jasmani

c) Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)

2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban

Arti kata:

a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya

b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;

c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah

d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;

3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

#### **4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021**

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

#### **Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar**

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan dan mendorong tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Dumai secara merata dan terjangkau sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan hajat hidup (biologis) utama masyarakat. Penyediaan air bersih bagi masyarakat kota Dumai merupakan harapan masyarakat Dumai sampai saat ini, dimana diharapkan cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat kota Dumai dapat menjangkau seluruh bagian wilayah kota yang akan dilakukan secara bertahap. Penyediaan air bersih juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Dumai. Penyediaan air bersih dilakukan dengan peningkatan infrastruktur air bersih yang dikelola oleh



Perangkat Daerah, Badan Usaha maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Dumai. Peningkatan infrastruktur air bersih tersebut meliputi peningkatan infrastruktur pengolahan air baku, pemeliharaan sumber-sumber air baku dan jaringan perpipaan maupun non perpipaan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat kota Dumai.

Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastutktur dasar permukiman dan perkotaaan ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan (*Amenity*) dan membuka akses yang dapat menghubungkan antar daerah maupun antar wilayah sehingga menjamin kelancaran arus mobilitas orang maupun barang dan jasa khususnya pada sektor perdagangan, Usaha Kecil Menengah, perkebunan, pertanian khususnya bagi investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri. Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase; serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan diseluruh kelurahan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Hal yang sangat penting lainnya adalah adanya kesesuaian fungsi ruang dengan peruntukannya sehingga diharapkan prinsip *sustainable development* akan menjadi bagian dari

pembangunan infrastruktur kota Dumai kedepannya. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas *public space* yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional. Mulai berlakunya kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara mitra terkait kawasan perdagangan bebas, Masyarakat ekonomi Asean dan kesepakatan lainnya mengharuskan kita mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing secara global mengharuskan masyarakat Dumai mampu menjadi pelaku utama didaerah sendiri.

Oleh sebab itu misi ini ditempuh melalui meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan pelatihan yang merata dan terjangkau serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Dumai, sehingga dan dapat bersaing dalam menghadapi dinamika kompetisi global sebagai akibat kemajuan IPTEK dan perekonomian

dunia. Misi ini mengupayakan kualitas pembangunan kesehatan manusia dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini juga ditempuh untuk mempersiapkan masyarakat Dumai memiliki kemampuan ketrampilan khusus guna mengisi kesempatan dan peluang kerja yang tersedia sebagai basis dan pintu gerbang arus berkembang sektor industri, perdagangan dan kemaritiman.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh dalam pada kinerja pegawai. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas kinerja sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

### **Misi 3: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan**

Misi ini akan ditempuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Misi ini akan memaksimalkan Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat.

Disamping hal tersebut, Koperasi, UMKM dan Industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat angka kemiskinan.

Selanjutnya, dalam pengentasan kemiskinan kebijakan pengentasan kemiskinan berpedoman pada sebuah kebijakan yang mampu memberikan ruang gerak, fasilitas publik serta didasarkan pada kemandirian yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang serius strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( SPKD ) Kota Dumai

**Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.**

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang melakukan sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

Misi ini untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ditandai dengan tercapainya beberapa kondisi berikut:

1. Terwujudnya organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan
2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas. Meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, cara berpikir, moral dan akhlak.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Disinilah parameter objektif dari sejauh mana aparatur mampu melayani masyarakatnya dengan baik.
4. Mencegah dan memberantas KKN melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dan yang terpenting adalah adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan.
5. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik.

**Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan**

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produktifitas serta keunggulan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan agar mampu memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi sektor basis kota Dumai sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat khususnya petani, pembudidaya ikan, nelayan dan peternak.

Terkait dengan hal tersebut, misi ini juga untuk meningkatkan swasembaya dan ketahanan pangan yaitu kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi masyarakat kota Dumai, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kemampuan dalam memproduksi bahan Pangan utama diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sehingga aman untuk dikonsumsi.

**Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa, Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah.**

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip *cooperative* (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan citra kota dari *investability* (kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), *visitability* (kota yang selalu dikunjungi karena kesan akan situasi dan pelayanannya) dan aspek *liveability* (menjadi tempat tinggal yang nyaman), sehingga menjadikan kota Dumai sebagai kota tujuan bagi masyarakat lokal maupun regional. Misi ini akan dicapai melalui peningkatan citra kota secara keseluruhan baik dari segi fisik kota, pelayanan publik dan *amenity*

**Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis Serta Berbasis Budaya Melayu**

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan sebuah kota tidak lepas dari adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur (fisik) dan pembangunan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Misi ini ditempuh sebagai upaya untuk sumberdaya manusia masyarakat dumai agarmemiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sehat dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik guna mengisi peluang kerja.

Budaya Melayu akan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021**

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
  - b) Meningkatnya infrastruktur perkotaan;
  - c) Meningkatnya kualitas lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :
  - a. meningkatnya partisipasi pendidikan;
  - b. meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar;
  - c. meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran:
  - a. Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
  - b. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
  - a) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
  - b) Menurunnya persentase penduduk miskin;
  - c) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;



- d) Meningkatnya lapangan kerja.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :
- a) Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik;
  - b) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan sasaran :
- a) Meningkatnya pendapatan petani;
  - b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :
- a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industry sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;
  - b) Meningkatnya investasi di Kota Dumai;
9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini, dengan sasaran :
- a) Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar;
  - a) Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Dumai Yang Makmur Dan Madani Pada Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1 Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih
			2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan
			3 Meningkatnya kualitas

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
			lingkungan
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	1 Meningkatnya partisipasi pendidikan
			2 Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar
			Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar
		2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat
			2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		3 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	1 Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga
3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan	1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat
			2 Menurunnya persentase penduduk miskin
			3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
			4 Meningkatnya lapangan kerja
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik
			2 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan	1 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	1 Meningkatnya pendapatan petani
			2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah
			2 Meningkatnya investasi di Kota Dumai

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu	1 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	1 Meningkatkan implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar
			2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar

(Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai)

#### 4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2020 sesuai dengan Musrenbang RKPD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya;
- 2) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan;
- 3) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing ;
- 4) Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

#### 4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2020

Adapun arah kebijakan provinsi riau pada tahun 2020 akan dijabarkan pada table dibawah ini :

Tabel. 4.2. Arah Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
Misi 1 : Mewujudkan Sumber daya yang beriman, Berkualitas dan berdaya saing melalui Pembangunan Manusia seutuhnya				
1.	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya akseibilitas dan mutu pendidikan</li> <li>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya akseibilitas dan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan menyiapkan PERDA wajib belajar 12 tahun, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin dan tidak mampu, meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, serta meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Diharapkan tidak ada lagi pungutan yang tidak perlu yang memberatkan wali murid.</li> <li>Meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelenggaraan Pendidikan SMA</li> <li>Program Penyelenggaraan Pendidikan SMK</li> <li>Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</li> <li>Program Bantuan Operasional Sekolah</li> <li>Program Peningkatan Mutu Kependidikan dan Tenaga Pendidik</li> <li>Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat</li> <li>Program Pembiayaan Kesehatan</li> <li>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan</li> <li>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</li> <li>Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes</li> <li>Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia</li> <li>Program Peningkatan Sarana dan</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 3. Meningkatnya daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM dengan meningkatkan jumlah SDM berkualitas, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, meningkatkan akses dan perluasan pembiayaan koperasi dan UMKM, meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk dan jangkauan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM 4. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, dengan upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa dan Peran BUMDES dalam pengelolaan Usaha desa	Prasarana Pelayanan Kesehatan 13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 16. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi 17. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM 18. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 19. Program Rehabilitasi Sosial 20. Program Pemberdayaan Sosial 21. Program Penanganan Fakir Miskin 22. Program Penyelenggaraan Ketransmigrasian 23. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
2.	Mewujudkan sumber daya yang beriman	1. Meningkatnya kerukunan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama Sosial dalam kehidupan	24. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
		untuk membayar zakat	masyarakat, membangun sarana dan prasarana keagamaan seperti Al-quran Center Madrasah dan Pondok Pesantren 2. Meningkatkan kehidupan berdemokrasi dengan meningkatkan fungsi kelembagaan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat serta meningkatkan kebebasan masyarakat berdemokrasi	25. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 26. Program Keluarga Berencana 27. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 28. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 29. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 30. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 31. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 32. Pendidikan Politik
<b>Misi 2 : Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan</b>				
2.	Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi berbagai aktivitas masyarakat secara merata	1. Meningkatnya pelayanan transportasi 2. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum rumah tangga 3. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga 4. Meningkatnya infrastruktur sanitasi rumah tangga	1. Membangun konektivitas, memantapkan jalan dan jembatan serta pelabuhan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi 2. Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan dengan meningkatkan ketersediaan air baku yang berkualitas, meningkatkan	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Preservasi Jalan dan Jembatan 3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumer Daya Air Lainnya 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			<p>ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum perpipaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum</p> <p>3. Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan cara meningkatkan energi keseluruhan wilayah dan mempercepat penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan</p> <p>4. Meningkatkan dan memenuhi akses sanitasi masyarakat dengan membangun sarana prasarana sanitasi</p> <p>5. Melakukan koordinasi dalam meningkatkan ketersediaan jaringan telekomunikasi, internet dalam menunjang pembangunan sosial dan ekonomi</p> <p>6. Membangun konektivitas antar pulau (merangkai pulau)</p>	<p>5. Program Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan</p> <p>6. Program Penataan Ruang</p> <p>7. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</p> <p>8. Program Pengembangan Perumahan</p> <p>9. Program Penyelenggaraan Pertanian</p> <p>10. Program Perhubungan Darat</p> <p>11. Program Perhubungan Laut</p> <p>12. Program Bina Sistem Transportasi</p> <p>13. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika</p> <p>14. Program Penyelenggaraan Persandian</p> <p>15. Program Penyelenggaraan Statistik</p> <p>16. Program Pengelolaan Pertambangan</p> <p>17. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>
2.	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	<p>1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan</p> <p>2. Menurunnya</p>	<p>1. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dengan upaya</p>	<p>18. Program Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan</p> <p>19. Program</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
		emisi gas rumah kaca	<p>memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kelembagaan catchment area, menurunkan sedimentasi pada DAS utama dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan menurunkan tingkat pencemaran lingkungan hidup</p> <p>3. Meningkatkan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau</p> <p>4. Meningkatkan penanggulangan abrasi terutama di wilayah pesisir</p>	<p>Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Program</p> <p>20. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Program</p> <p>21. Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program</p> <p>22. Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut</p>
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing</b>				
1.	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	<p>1. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan</p> <p>2. Meningkatnya investasi daerah</p> <p>3. Meningkatnya</p>	<p>1. Meningkatkan produksi hasil industri dengan mengoptimalkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), Kawasan Industri</p>	<p>1. Program Peningkatan Investasi</p> <p>2. Program Penyelenggaraan Perizinan</p> <p>3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan</p>



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
		ketahanan pangan daerah 4. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	(KI) dan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) 2. Meningkatkan dan mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya lokal dengan membangun kawasan industri, Meningkatkan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan menuju kawasan industri, membangun fasilitas air bersih, energi listrik dan pengolahan limbah pada kawasan industri 3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing industri dengan meningkatkan produksi industri dan nilai tambah yang berbasis sumber daya alam lokal yang efisien dan meningkatkan keunggulan kompetitif (daya saing produk industri) menghadapi pasar regional dan global 4. Meningkatkan daya tarik investasi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya, memperbaiki iklim dan promosi Investasi 5. Meningkatkan ketahanan pangan	4. Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 5. Program Pembangunan Sumber Daya Industri 6. Program Pengembangan Industri Unggulan Kecil dan Menengah 7. Program Pengembangan Budidaya 8. Program Perikanan Pengembangan Perikanan 9. Tangkap Program Peningkatan Produksi 10. Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluhan 11. Pertanian Program Peningkatan Produksi 12. Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluhan 13. Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			<p>menuju kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pangan pokok beras (dari rasio 33% menjadi 50% lima tahun kedepan). Dengan upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian (pengairan, penangkar benih dan memperbaiki kelembagaan petani). Demikian halnya kelembagaan peternak dan nelayan), menstabilkan harga bahan pangan dan komoditas perkebunan, menjamin keamanan dan kualitas bahan pangan</p> <p>6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan memberdayakan usaha dan ekonomi masyarakat miskin, bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu</p> <p>7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga</p>	<p>16. Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas</p> <p>17. Tenaga Kerja Program Perlindungan tenaga Kerja dan Pengawasan</p> <p>18. Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			<p>kerja</p> <p>8. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan, dengan meningkatkan nilai patriotisme, budaya prestasi, semangat profesionalisme, partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara</p> <p>9. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga</p>	
Misi 4 : Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing				
1.	Meningkatkan potensi Budaya Melayu	<p>1. Meningkatnya pusat referensi kebudayaan melayu</p> <p>2. Meningkatnya kelestarian Budaya Melayu</p>	<p>1. Meningkatkan penerapan Budaya Melayu dari potensi budaya melayu yang ada</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana untuk mengoptimalkan dan pengembangan potensi budaya melayu serta pusat kebudayaan Melayu</p> <p>Melestarikan budaya Melayu, dengan melindungi, mengembangkan dan aktualisasi nilai, tradisi budaya melayu dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya lokal</p>	<p>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan</p> <p>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, media desain dan IPTEK</p>
2.	Meningkatkan Pariwisata	1. Meningkatnya kunjungan	1. Membangun dan memelihara jalan	1. Program Pemasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
	yang berdaya saing	2. Meningkatnya potensi pariwisata	<p>dan jembatan ke lokasi destinasi</p> <p>2. Menyediakan sarana prasarana di lokasi destinasi dengan membangun sarana dan prasarana di lokasi destinasi pariwisata</p> <p>3. Meningkatkan pengelolaan potensi pariwisata, mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan ekonomi kreatif yang terpadu dengan peningkatan promosi pariwisata</p>	<p>Pariwisata</p> <p>2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</p> <p>3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata</p>
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi				
1.	Meningkatkan kinerja ASN dan Pelayanan ASN	<p>1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih transparan dan akuntabel</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>1. Melakukan penataan dan reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen kearsipan, meningkatkan kualitas aparatur sehingga mampu bekerja secara profesional dan respontif</p> <p>2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah</p> <p>3. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan keuangan (pendapatan dan belanja) daerah</p>	<p>1. Program Pelayanan Aparatur Sipil Negara</p> <p>2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>3. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Program Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip</p> <p>5. Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah</p> <p>6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>7. Program Penelitian, Pengembangan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
			<p>yang transparan akuntabel, efektif dan efisien, membenahi pengelolaan barang daerah yang tertib dan lebih baik serta meningkatkan efektivitas kerjasama pembangunan antar daerah</p> <p>4. Meningkatkan peran dan kontribusi BUMD dalam menopang keuangan daerah</p> <p>5. Mewujudkan keuangan inklusif terutama ekonomi dan keuangan syariah. Konversi Bank Riau Kepri Konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah</p> <p>6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana teknologi informasi</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik dan respon terhadap pengaduan masyarakat</p>	<p>dan Kerjasama Pembangunan</p> <p>8. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>9. Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>10. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset</p> <p>11. Program Pembinaan Pengelolaan BUMD</p> <p>12. Program Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung</p> <p>13. Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</p> <p>14. Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>15. Program Penataan Peraturan - undangan</p> <p>16. Program Reformasi Birokrasi</p> <p>17. Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>18. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Kehumasan</p> <p>19. Program Penataan Pemerintahan dan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
				Otonomi Daerah 20. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial 21. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 22. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 23. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 25. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 26. Program Penegakan Peraturan Daerah 27. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 28. Program Penataan Administrasi Kependudukan

(Sumber : SE Gubernur Riau nomor 55/SE/2019 tanggal 26 Maret 2019)

#### 4.1.6. Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2020 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2020 berdasarkan penyampaian pada saat Musrenbang RKPD Kota Dumai oleh Bappeda Provinsi riau diarahkan pada :



Gambar. 4.1. Prioritas Pemerintah Pusat tahun 2020

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan terdiri dari :
  - a. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
  - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
  - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
  - d. Pengetasan kemiskinan
  - e. Pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah terdiri dari:
  - a. Perluasan infrastruktur dasar

- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana
  - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi
  - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan
  - e. Perluasan teknologi dan informasi.
3. Nilai tambah sektor riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja terdiri dari:
- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM
  - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil
  - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
  - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
4. Ketahanan Pangan, Air, energy dan Lingkungan terdiri dari :
- a. Peningkatan ketersediaan. Akses dan kualitas konsumsi pangan
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
  - c. Pemenuhan kebutuhan energy melalui peningkatan energy baru dan terbarukan (EBT)
  - d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung lingkungan
  - e. Penguatan ketahanan bencana
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
- a. Penguatan kemampuan pertahanan
  - b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional
  - c. Penguatan peradilan dan upaya anti korupsi
  - d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut
  - e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas



## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2020

Tabel 4.3 Perbandingan Prioritas Tahun 2019 dan 2020

Tahun 2019	Tahun 2020
1. Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	1. Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.
2. Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan	2. Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.
4. Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat	4. Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.
5. Penegembangan Koperasi Dan UMKM Serta Industri Kreatif Dan Pengentasan Kemiskinan.	5. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.
6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan	6. Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.
7. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial	7. Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.
8. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai	

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2020, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2020 adalah :

**"PENGUATAN TERHADAP SISTEM, SARANA, POTENSI DAN SUMBER  
DAYA PENDUKUNG UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA  
DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI"**

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
1	2	3	4	5
Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,50
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,26
		Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
		Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	80
		Persentase kualitas air	%	80
	Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			%	99,92
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B			%	99,26
Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.2770833 33
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.3701388 89
Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat		Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
		Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
		Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
1	2	3	4	5
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,403
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,070
	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42
Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5
	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,30
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46
		Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.65
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA )	Rupiah	6.022.113.766.368
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2020 dapat

dilihat pada tabel 4.5 dan 4.7 dibawah yang menggambarkan sinkronisasi priortas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Tabel 4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2020 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS NASIONAL
Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan terdiri dari : a. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas d. Pengetasan kemiskinan e. Pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa
Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	
Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	Infrastruktur dan pemerataan wilayah terdiri dari: a. Perluasan infrastruktur dasar b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi d. Peningkatan infrastruktur perkotaan e. Perluasan teknologi dan informasi.
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	Nilai tambah sektor riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja terdiri dari: a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	
Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	Ketahanan Pangan, Air, energy dan Lingkungan terdiri dari : a. Peningkatan ketersediaan. Akses dan kualitas konsumsi pangan

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS NASIONAL
<p>Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air</li> <li>c. Pemenuhan kebutuhan energy melalui peningkatan energy baru dan terbarukan (EBT)</li> <li>d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung lingkungan</li> <li>e. Penguatan ketahanan bencana</li> </ul>
<p>Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.</p>	<p>Stabilitas Pertahanan dan Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kemampuan pertahanan</li> <li>b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional</li> <li>c. Penguatan peradilan dan upaya anti korupsi</li> <li>d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut</li> <li>e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas</li> </ul>

Tabel 4.6 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2020 dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2020

NASIONAL					KOTA DUMAI											
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian							
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,51	Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,47							
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,92							
		Tingkat kemiskinan	Persen	8,5-9,0			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,26							
		Gini Rasio	Nilai	0,375-0,380		Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100							
	Meningkatnya dan meratanya kesejahteraan masyarakat								Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100					
									Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333				
										Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889				
							Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat							Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
														Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100

NASIONAL					KOTA DUMAI				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
							Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
						Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
							Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887
						Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
					Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,403
						Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
						Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,070
					Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95

NASIONAL					KOTA DUMAI				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
						Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Menurunnya waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	Jam/100 km	2,3	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,50
		Porsi rute pelayaran yang membentuk loop	Persen	25			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,26
	Meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Information and Communication Technologies (ICT) Development Index	Nilai	5,0 - 5,3			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
	Meningkatnya ketahanan bencana di Pantai Utara Jawa	Indeks bencana banjir di kabupaten/kota pesisir utara Pulau Jawa (IRBI)	Nilai	Turun 2%			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7



NASIONAL					KOTA DUMAI				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
	Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga	Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persen	42,60			Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60
							Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437
Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	Meningkatnya nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital	Pertumbuhan PDB Pertanian	Persen	3,80 - 3,85	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46
		Kontribusi PDB Kemaritiman	Persen	6,50			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.65
		Pertumbuhan PDB Industri	Persen	5,00 - 5,50			Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Rupiah	6.022.113.766.368
		Nilai Devisa Pariwisata	Miliar USD	19,0 - 21,0	Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat,	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Triliun rupiah	1.305 - 1.307					

NASIONAL					KOTA DUMAI				
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
		Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	Persen	5,3 - 6,6	koperasi dan UMKM.				
		Pertumbuhan Investasi (PMTB)	Persen	7,0 - 7,4					
		Penyediaan Lapangan Kerja	Juta orang	2,7 - 3,0					
		Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Persen	4,5 - 5,5					
		Rasio Kewirausahaan Nasional	Persen	3,64					
		Produk Industri yang Mendapatkan Sertifikat TKDN	Produk/Tahun	1,000					
		Kontribusi Ekonomi Digital	Persen	3,1					
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat	Pola pangan harapan	Nilai	93,3	Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,30
		Angka kecukupan energi	Kkal/kapita/hari	2100		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
		Angka kecukupan protein	Gram/kapita/hari	57		Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015

NASIONAL					KOTA DUMAI						
Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian		
	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian	Luas tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	Juta hektare	62	Dasar Masyarakat.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	80		
		Kapasitas tampungan air	Miliar m3	>20			Persentase kualitas air	%	80		
		Koefisien limpasan	Nilai	0.4							
	Terpenuhinya kebutuhan energi nasional	Penyediaan energi nasional	MTOE	192							
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	69,25 – 71,25							
		Luas kawasan konservasi perairan	Juta ha	22,27							
	Menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia	Penurunan Indeks Resiko Bencana Indonesia	Nilai	146,3							
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat	Indeks Kekuatan Militer	Nilai	0.25	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5		
	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Indeks pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	Nilai	84.23			Opini BPK	Opini BPK	WTP		
	Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap	Indeks Pembangunan Hukum	Nilai	TBD			Nilai Akuntabilitas	Nilai	B		

Jika dilihat dari Program Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Nasional pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 pada table berikut :

Tabel 4.7 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2020

PRIORITAS NASIONAL	RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2020		
	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	68	348	647,039,420,003.00
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	88	320	275,725,439,876.00
Nilai tambah sektor riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja	29	68	10,987,178,027.00
Ketahanan Pangan, Air, energy dan Lingkungan	15	32	8,088,304,693.00
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	7	79	9,940,010,395.00

Tabel 4.8. Sinkronisasi Prioritas Provinsi Riau Tahun 2020 kedalam prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020

PRIORITAS PROVINSI RIAU	PRIORITAS KOTA DUMAI
Mewujudkan Sumber Daya yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya	Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.
	Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.
	Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.
Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing	Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.

Tabel 4.9 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2020 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	
Mewujudkan Sumber Daya yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,97	Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,47	
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Tahun	8,97		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,92		
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,57		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,26		
		Angka harapan hidup	Tahun	71,56		Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	
		Indeks pembangunan gender	Nilai	89,11		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100		
		Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73,34		Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333	
							Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889	
							Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
						Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
							Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
						Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
							Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887
						Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan		Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar	%	53,76	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,50
		Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/b andara pertahun	%	0,61			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,26

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (SPM)	%	71,84			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	78,21			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7
		Rasio elektifikasi	%	92,82			Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60
		Rasio Desa Berlistrik	%	96,73			Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437
		Persentase lahan pertanian yang beririgasi	%	71,84		Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	71,84		Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	80
		Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	343.988,00			Persentase kualitas air	%	80



Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing		Laju pertumbuhan ekonomi	%	2,81	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan dan Investasi. dan sistem peluang	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46
		Nilai PDRB ADHK	Milyar rupiah	500.882,71			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.65
		Koefisien gini	Indeks	0,296			Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Rupiah	6.022.113.766.368
		Pembentukan modal tetap bruto	juta rupiah	158.703,07	Penguatan terhadap pengangguran kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42
		Indeka ketahanan pangan	Indeks	52,00					
		Persentase penduduk miskin	%	6,75					
		Tingkat pengangguran terbuka	%	6,02					

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
						Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,403
						Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
						Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,070
					Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,30
						Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing		Persentase potensi budaya melayu yang dikelola	%	9,09	Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan	%	72,00			Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan	%	5,00					
		Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan	%	5,00					
		Persentase SDM yang Mendapatkan Pembinaan	%	5,00					
		Persentase Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan	%	5,00					
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	129.939,00					

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi		Indeks reformasi birokrasi	Indeks	63,87	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5
		Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		3,17		Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
						Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	

#### 4.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2020 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2020

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai untuk **terhadap pelaksanaan SPM tahun 2020** yang mana telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 bab II jenis SPM bagian kesatu sampai bagian ketujuh kedalam prioritas pembangunan daerah kota dumai tahun 2020

Tabel 4.10. Sinkronisasi SPM Tahun 2020 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan	

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
1	2	3
	jiwa berat 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.
4.	Bidang Perumahan Rakyat : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.

#### 4.4. Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Target 2020 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2020 pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 terkait dengan

prioritas pembangunan daerah tahun 2020 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.11. Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2020

No	<i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
1	2	3
1	Pilar Pembangunan Sosial : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	1. Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 2. Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM. 3. Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.
2	Pilar Pembangunan Ekonomi : 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi. 2. Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat. 3. Penguatan terhadap penganggulangan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.
3	Pilar Lingkungan Hidup : 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.
4	Pilar Pembangunan Hukum : 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.



# **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2020**



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2020

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2020 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2020. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2020 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2020, maka Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2020

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
Penguatan sistem pelayanan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	10.015 SR	Dinas PUPR
	2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumber air baku yang dipelihara	25%	
	1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	4%	Dinas Perkim
			Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Perumahan dan kawasan permukiman		
	2	Program lingkungan sehat perumahan	persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar	4%	
	3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase infrastruktur/ PSU (prasana, sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman	3%	
	4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	58,26%	Dinas PU PR

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	5 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	84,73%	
	6 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum dikecamatan	16%	
	7 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota Dumai	17%	Dinas Perkim
	8 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	10 dokumen	
	9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai	49 Unit	
	10 Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal	0,68%	
	11 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2 Lokasi	Dinas Perhubungan
	12 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai	20 Unit	
	13 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai	2 Unit	
	14 Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	Bappeda
	15 Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman	15%	Dinas Perkim
	16 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Taman kota yang terpelihara	21 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
	17 Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%	
	18 Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	2:07	Dinas PUPR
	19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%	
	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	5 Wilayah	Dinas Lingkungan hidup
	2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal	80%	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kerjasama dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam	85%	
	4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	85%	
	5 Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase status mutu udara di Kota Dumai	80%	
	6 Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	30%	Dinas PUPR
Penguatan dan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan.	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan	90%	
	3 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik	90%	
	4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah, kelurahan dan perpustakaan masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	22.000 orang	
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	16.936 Judul Buku	
	1 Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelatihan Pendidikan Non Formal	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	90%	
	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	
		Umur Harapan Hidup	71.04	
	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%		
	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%		
2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19		
	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26		

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	3 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Umur Harapan Hidup	71.04	
	4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	100%	
	5 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	75%	
	6 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Umur Harapan Hidup	71.04	
	7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	
	8 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
		Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
		Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
		Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
	9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	50%	
		Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	58%	
		Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	100%	
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	33 Kelurahan	
		Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS	33 Kelurahan	
	10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	1	
		Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	88%	
		Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	< 1	
		Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	55	
	1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita per	26	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
		1.000 Kelahiran Hidup		RSUD	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102		
		Umur Harapan Hidup	71.04		
		Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%		
		Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%		
	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	100%	RSUD
	3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	100%	
	4	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit	100%	
	5	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit	100%	
	6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	persentase Peningkatan Pelayanan RSUD	100%	
	7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan BLUD	100%	
	1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Peningkatan inovatif kreatif para pemuda	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang berprestasi	100%	
3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	100%		
4	Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga	Persentase Ketersediaan Data Organisasi olahraga	100%		
5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase Peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga	100%		
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%		
Pengembangan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kualitas kelembagaan	90%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	14.650 UMKM	
	1	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang tertangani	28%	Dinas Sosial
	2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang tertangani	28%	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	
	3 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
	4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
	5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200 Orang	
	6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	52%	
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	
	7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	52%	
		Persentase PMKS yang tertangani	28%	
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	85%	
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	
	8 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina	1.400 UMKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1 Program Keluarga Berencana	Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai	85%	
	2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak		
	3 Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif	87%	
	4 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	87%	
	5 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	87%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	6 Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	90%	
	1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	2.000 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1 Dokumen	
	2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60 kasus	
	3 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	250 Perusahaan	
	4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan	85 orang	
Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Daerah.	1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan	80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan	4.230 izin	
	3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	Sekretariat Daerah
	4 Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 kasus	
	5 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan Administrasi Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6 Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	
	7 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan pengendalian dan pencegahan kebakaran dan bencana alam lainnya	80%	
	9 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik	90%	
	10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat	90%	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	11 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban kota Dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	12 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	13 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	
	14 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
	15 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di kota Dumai	100%	
	16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	100%	Sekretariat Daerah
	17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	90%	
	18 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif	18%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat	83%	
	20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	85%	
	21 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai	70%	
	22 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	
	23 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	Kec. Dumai Barat
	24 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
	25 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Dumai Timur
	26 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan	Persentase Peningkatan	85%	



Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	RT	kualitas Kinerja LPMK dan RT		
	27 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
	28 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	
	29 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	Kec. Bukit Kapur
	30 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
	31 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	
	32 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	Kec. Medang Kampai
	33 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan	80%	
	34 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik	80%	
	35 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	Kec. Sungai Sembilan
	36 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Jumlah peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	1 Laporan	
	37 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	80%	
	38 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	Kec. Dumai Kota
	39 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
	40 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	
	41 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	100%	Kec. Dumai Selatan
	42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	100%	
	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55%	OPD yang melaksanakan Urusan Kepegawaian/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pelanggaran disiplin	0.20%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	67%	
		Persentase pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	79%	
	3 Program peningkatan sistem pengawasan	Persentase Rekomendasi	70%	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	yang selesai di tindaklanjuti		
		Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya	10 Dok	
		Level Maturitas SPIP	Level 3	
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	
4	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi	50 Orang	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat 4	
		Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%	Sekretariat Daerah
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		- Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	
		- Penetapan APBD	Tepat Waktu	
		- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	
7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	81%	
8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang terkumpulkan		
		Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara baku	81%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase terpeliharanya dokumen/ arsip yang tersimpan	90%	
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		
		Jumlah SDM pengelola kearsipan	70 Orang	
11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	100%	
12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase meningkatnya kualitas SDM	100%	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
	14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	Sekretariat Daerah
	15	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi melalui media massa	100%	
	16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual	90%	
	17	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai	100%	Sekretariat DPRD
	18	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 dokumen	Bappeda
	19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 dokumen	
	20	Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen	
	21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai	25%	Badan Pendapatan Daerah
	22	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	23	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar kota dumai	100%	
	24	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
25	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik	100%		
Penguatan sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan.	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan bina kelompok tani	72,60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Indeks Nilai tukar nelayan	122	Dinas Perikanan
	3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pertanian	10 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Luas peremajaan tanaman perkebunan	100 Ha	
	5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat	1 unit	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
		Kapasitasnya			
		Jumlah tenaga penyuluhan yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya	8 Penyuluh		
	1	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi ternak		6303 Ternak
	2	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan teknologi peternakan		18 Kelompok
	3	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	273.06 Ton	Dinas Perikanan
		Jumlah pembudidaya terlatih	20 Kelompok		
		Jumlah kelompok aktif budidaya terbina	37 Kelompok		
	4	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	318.83 Ton	
		Jumlah nelayan terlatih	20 Kelompok		
		Jumlah kelompok nelayan terbina	34 Kelompok		
	5	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	34 Kelompok	
		cakupan bina kelompok pembudidaya	37 Kelompok		
		Jumlah kelompok nelayan terbina	34 Kelompok		
		Jumlah pembudidaya terbina	37 Kelompok		
		Jumlah kelompok pengolahan terbina	10 Kelompok		
	6	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	273.06 Ton	
	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Luas Penanaman komoditi tanaman pangan dan hortikultura	95 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Skor PPH konsumsi	82.91	
	2	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Peningkatan produksi hasil olahan	33 Ton	Dinas Perikanan
			Nilai konsumsi ikan	31 kg/kapita/th	
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	11 Kasus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	10 Kasus		
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	15 Kasus		
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan sistem, sarana dan peluang Investasi.	1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	573 Unit	Dinas Perdagangan
	2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume /nilai ekspor	5%	
	3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah bantuan subsidi Bahan Pokok Masyarakat	15.000	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
		Jumlah pengawasan distribusi Bahan Pokok Masyarakat	12		
		Jumlah pasar tradisional memenuhi standar	1 Pasar		
		Jumlah Usaha yang ikut pasar lelang	5		
	4	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penertiban PKL dan asongan		10 Bulan
	5	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu	200 IKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	6	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Pembinaan Peningkatan teknologi Produksi IKM	40 IKM	
	7	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Peningkatan perusahaan Industri	250 IKM	
			Jumlah pengrajin Industri Kreatif yang terlatih	250 Orang	
			Jumlah Pengembangan pemasaran produk kerajinan daerah	15 Produk	
	8	Program penataan struktur industri	Jumlah fasilitasi Kawasan Industri/Ekonomi	1 Kawasan	
9	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sarana Informasi Industri	12 Sarana		
10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional	168 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase pelestarian cagar budaya melayu	100%	
	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	100%	
	4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase daerah yang mengikuti kerjasam budaya	100%	
	5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat dan wisatawan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	6	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan	100%	
	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah bantuan kepada tenaga pendidik keagamaan		Sekretariat Daerah
			Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama,	100%	

Prioritas Daerah Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
		TPQ,DTA dan madrasah			
		Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ,DTA dan madrasah	12 Bulan		
	2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Meningkatnya Nilai Ketakwaan dan Pengetahuan Agama Pada Masyarakat dan Pemuka Agama		
		Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat	95%		

Tabel 5.2 Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Misi 1												
1	Penguatan sistem pelayanan Jaringan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015	1.1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	10.015 SR	Dinas PUPR	
							1.1.2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumber air baku yang dipelihara	25%		
		1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3.5	1.2.1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		4%	Dinas Perkim
				Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58.26			Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Perumahan dan kawasan permukiman			
				Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.85	1.2.2	Program lingkungan sehat perumahan	persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar	4%		
				Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7	1.2.3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase infrastruktur/ PSU (prasana, sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan permukiman	3%		
				Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60	1.2.4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	58.26%	Dinas PU PR	
				Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437	1.2.5	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	84.73%		
							1.2.6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum dikecamatan	16%	Dinas Perkim	
							1.2.7	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota Dumai	17%		
							1.2.8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	10 dokumen	Dinas Perhubungan	
							1.2.9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai	49 Unit		
							1.2.10	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal	0.68%		
							1.2.11	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2 Lokasi		
							1.2.12	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai	20 Unit		
							1.2.13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai	2 Unit		
							1.2.14	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	Bappeda	
							1.2.15	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman	15%	Dinas Perkim	
							1.2.16	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Taman kota yang terpelihara	21 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	
							1.2.17	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%	Dinas PUPR	
			1.2.18	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	2:07						
			1.2.19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%						
1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	80	1.3.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	5 Wilayah	Dinas Lingkungan hidup			
		Persentase kualitas air	%	80	1.3.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal	80%				
					1.3.3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kerjasama dalam pengelolaan konservasi sumber daya	85%				

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						alam					
					1.3.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	85%			
					1.3.5	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase status mutu udara di Kota Dumai	80%			
					1.3.6	Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	30%	Dinas PUPR		
Misi 2											
2	Penguatan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99.47	2.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM	95%	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99.92	2.1.2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99.26	2.1.3	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik	90%	
							2.1.4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah, kelurahan dan perpustakaan masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip
									Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	22.000 orang	
									Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	16.936 Judul Buku	
		2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	2.2.1	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelatihan Pendidikan Non Formal	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	2.2.2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	90%	
		2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333	2.3.1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889					
		2.4	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	2.4.1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	Dinas Kesehatan
				Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	
				Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	
									Umur Harapan Hidup	71.04	
									Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%	
									Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%	
							2.4.2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	
									Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	
							2.4.3	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Umur Harapan Hidup	71.04	
							2.4.4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	100%	
							2.4.5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	75%	
							2.4.6	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Umur Harapan Hidup	71.04	



Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					2.4.7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%		
					2.4.8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%		
				Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan			100%			
				Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan			100%			
				Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan			100%			
				2.4.9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	50%			
						Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	58%			
						Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	100%			
						Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	33 Kelurahan			
						Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS	33 Kelurahan			
				2.4.10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	1			
						Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	88%			
						Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	< 1			
						Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	55			
	2.5	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	2.5.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	Dinas Kesehatan
			Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169,887			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	26	
				Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102					
				Umur Harapan Hidup	71.04					
				Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%					
				Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%					
				2.5.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	100%	RSUD		
				2.5.3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	100%			
				2.5.4	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit	100%			
				2.5.5	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit	100%			
				2.5.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	persentase Peningkatan Pelayanan RSUD	100%			

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					2.5.7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan BLUD	100%			
	2.6	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3	2.6.1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Peningkatan inovatif kreatif para pemuda	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	
						2.6.2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang berprestasi	100%		
						2.6.3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	100%		
						2.6.4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Ketersediaan Data Organisasi olahraga	100%		
						2.6.5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase Peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga	100%		
						2.6.6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%		
	Misi 3										
3	Penguatan terhadap penganggulan kemiskinan, Peningkatan potensi Pemberdayaan Masyarakat, koperasi dan UMKM.	3.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0.403	3.1.1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kualitas kelembagaan	90%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							3.1.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	14.650 UMKM	
		3.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4.42	3.2.1	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang tertangani	28%	Dinas Sosial
							3.2.2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
								Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%		
							3.2.3	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
							3.2.4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS yang tertangani	28%	
							3.2.5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200 Orang	
							3.2.6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	52%	
								Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%		
								Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	52%		
								Persentase PMKS yang tertangani	28%		
							3.2.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	85%	
								Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%		
							3.2.8	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina	1.400 UMKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	3.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2.07	3.3.1	Program Keluarga Berencana	Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai	85%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
						3.3.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak			
						3.3.3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif	87%		
						3.3.4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	87%		
						3.3.5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	87%		
						3.3.6	Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	90%		
	3.4	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.42	3.4.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	2.000 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
								Jumlah Dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1 Dokumen		
						3.4.2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60 kasus		
						3.4.3	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	250 Perusahaan		
		3.4.4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan	85 orang						
Misi 4											
4	Peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan good governance.	4.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5	4.1.1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan	80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							4.1.2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan	4.230 izin	
							4.1.3	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	Sekretariat Daerah
							4.1.4	Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 kasus	
							4.1.5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan Administrasi Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							4.1.6	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	
							4.1.7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							4.1.8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan pengendalian dan pencegahan kebakaran dan bencana alam lainnya	80%	
							4.1.9	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik	90%	
							4.1.10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat	90%	

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					4.1.11	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban kota Dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					4.1.12	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
					4.1.13	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	
					4.1.14	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
					4.1.15	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di kota Dumai	100%	
					4.1.16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	100%	Sekretariat Daerah
					4.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	90%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					4.1.18	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif	18%	
					4.1.19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat	83%	
					4.1.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	85%	
					4.1.21	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai	70%	
					4.1.22	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	
					4.1.23	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
					4.1.24	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
					4.1.25	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85%	Kec. Dumai Timur
					4.1.26	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	85%	
					4.1.27	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	85%	
					4.1.28	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	Kec. Bukit Kapur
					4.1.29	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
					4.1.30	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
					4.1.31	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	Kec. Medang Kampai

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					4.1.32	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	Kec. Sungai Sembilan		
					4.1.33	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan	80%			
					4.1.34	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik	80%			
					4.1.35	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%			
					4.1.36	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Jumlah peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	1 Laporan			
					4.1.37	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	80%			
					4.1.38	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%		Kec. Dumai Kota	
					4.1.39	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%			
					4.1.40	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%		Kec. Dumai Selatan	
					4.1.41	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	100%			
					4.1.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	100%			
					4.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK		WTP	4.2.1
Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	4.2.2	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur			Persentase pelanggaran disiplin	0.20%			
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	67%			
							Persentase pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	79%			
							4.2.3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	70%	
									Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya	10 Dok	
									Level Maturitas SPIP	Level 3	
							4.2.4	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	
									Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi	50 Orang	
							4.2.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat 4	
					Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%					
					4.2.6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Persentase belanja pendidikan (20%)	20%			
							- Persentase belanja kesehatan (10%)	10%			
							- Penetapan APBD	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
							- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP			
					4.2.7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	81%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
							Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku				
					4.2.8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang terkumpulkan	81%			
							Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara				

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						baku					
					4.2.9	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan	90%			
					4.2.10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/ Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku Jumlah SDM pengelola kearsipan	70 Orang			
					4.2.11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
					4.2.12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%			
					4.2.13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase meningkatnya kualitas SDM	100%			
					4.2.14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%	Sekretariat Daerah		
					4.2.15	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi melalui media massa	100%			
					4.2.16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual	90%			
					4.2.17	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai	100%	Sekretariat DPRD		
					4.2.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 dokumen			
					4.2.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 dokumen	Bappeda		
					4.2.20	Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen			
					4.2.21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai	25%	Badan Pendapatan Daerah		
					4.2.22	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	100%			
					4.2.23	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar kota dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
					4.2.24	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%			
					4.2.25	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik	100%			
Misi 5											
5	Penguatan ekonomi kerakyatan, sistem, potensi dan sumber daya Sektor Pertanian, Perkebunan serta Perikanan.	5.1	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210.3	5.1.1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan bina kelompok tani	72.60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							5.1.2	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Indeks Nilai tukar nelayan	122	Dinas Perikanan
							5.1.3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pertanian	10 Unit	
							5.1.4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Luas peremajaan tanaman perkebunan	100 Ha	
							5.1.5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat Kapasitasnya Jumlah tenaga penyuluhan yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya	1 unit 8 Penyuluh	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							5.1.6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi ternak	6303 Ternak	
							5.1.7	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan teknologi peternakan	18 Kelompok	
							5.1.8	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	273.06 Ton	Dinas Perikanan

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
						Jumlah pembudidaya terlatih	20 Kelompok									
						Jumlah kelompok aktif budidaya terbina	37 Kelompok									
						Produksi perikanan tangkap	318.83 Ton									
						5.1.9	Program pengembangan perikanan tangkap		Jumlah nelayan terlatih	20 Kelompok						
						Jumlah kelompok nelayan terbina	34 Kelompok									
						5.1.10	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan		Cakupan bina kelompok nelayan	34 Kelompok						
									cakupan bina kelompok pembudidaya	37 Kelompok						
									Jumlah kelompok nelayan terbina	34 Kelompok						
									Jumlah pembudidaya terbina	37 Kelompok						
						5.1.11	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar		Jumlah kelompok pengolahan terbina	10 Kelompok						
									Produksi perikanan budidaya	273.06 Ton						
						5.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82.91	5.2.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Luas Penanaman komoditi tanaman pangan dan hortikultura	95 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
														Skor PPH konsumsi	82.91	
5.2.2	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Peningkatan produksi hasil olahan	33 Ton	Dinas Perikanan												
		Nilai konsumsi ikan	31 kg/kapita/th													
5.2.3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	11 Kasus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian												
		Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	10 Kasus													
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	15 Kasus													
Misi 6																
6	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan sistem dan peluang Investasi.	6.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46	6.1.1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	573 Unit	Dinas Perdagangan					
							6.1.2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume /nilai ekspor	5%						
							6.1.3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah bantuan subsidi Bahan Pokok Masyarakat	15.000						
									Jumlah pengawasan distribusi Bahan Pokok Masyarakat	12						
									Jumlah pasar tradisional memenuhi standar	1 Pasar						
									Jumlah Usaha yang ikut pasar lelang	5						
							6.1.4	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penertiban PKL dan asongan	10 Bulan						
							6.1.5	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu	200 IKM		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
							6.1.6	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Pembinaan Peningkatan teknologi Produksi IKM	40 IKM						
							6.1.7	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Peningkatan perusahaan Industri	250 IKM						
Jumlah pengrajin Industri Kreatif yang terlatih	250 Orang															
Jumlah Pengembangan pemasaran produk kerajinan daerah	15 Produk															
6.1.8	Program penataan struktur industri	Jumlah fasilitasi Kawasan Industri/Ekonomi	1 Kawasan													
6.1.9	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sarana Informasi Industri	12 Sarana													

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	6.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.022.113.766.368	6.2.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional	168 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Misi 7										
7	Penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan.	7.1	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95	7.1.1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							7.1.2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase pelestarian cagar budaya melayu	100%	
							7.1.3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	100%	
							7.1.4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase daerah yang mengikuti kerjasam budaya	100%	
							7.1.5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat dan wisatawan	100%	
							7.1.6	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
		7.2	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97	7.2.1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah bantuan kepada tenaga pendidik keagamaan		Sekretariat Daerah
									Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ, DTA dan madrasah	100%	
									Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ, DTA dan madrasah	12 Bulan	
							7.2.2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Meningkatnya Nilai Ketakwaan dan Pengetahuan Agama Pada Masyarakat dan Pemuka Agama		
									Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat	95%	



Tabel 5.3 Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai, Prioritas Provinsi Riau Tahun 2020

PRIORITAS PROVINSI RIAU		RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2020	
Sumber Daya Manusia	68	293	643,810,629,599
Infrastruktur	88	320	275,725,439,876
Industri	25	63	9,936,628,027
Pertanian	15	32	8,088,304,693
Pariwisata	4	60	5,064,742,633
Total			942,625,744,828

Tabel 5.4 Sandingan Anggaran Prioritas pembangunan Kota Dumai dan Prioritas Nasional Tahun 2020

PRIORITAS NASIONAL		RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2020	
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	68	348	647,039,420,003
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	88	320	275,725,439,876
Nilai tambah sektor riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja	29	68	10,987,178,027
Ketahanan Pangan, Air, energy dan Lingkungan	15	32	8,088,304,693
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	7	79	9,940,010,395
Total			951,780,352,994

Adapun RPKD ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Dumai, Rencana Kerja ini juga memuat program dan kegiatan yang akan didanai bersama-sama (sharing program) dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2020 dan Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN Tahun 2020.

Program/kegiatan pada RPKD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada **lampiran II Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020**.



# **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020**

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan lampiran I permendagri nomor 86 tahun 2017. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
1	Tujuan 1	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	57,1
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,50
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,26
			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60	
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437	
	Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	80
			Persentase kualitas air	%	80
2	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,73
			Harapan lama sekolah	Tahun	13,45
	Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,47
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,92
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,26
	Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889
3	Tujuan 3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04
	Sasaran 3.1	Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
			Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
			Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
			Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887
4	Tujuan 4	Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
	Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
5	Tujuan 5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	12.777
			PDRB per kapita	Rp. 000	115.496,86
	Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,403
	Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
	Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,070
	Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020
1	2		3	4	5
6	Tujuan 6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
			Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
7	Tujuan 7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.143,19
	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,30
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
8	Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,37
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46
			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.65
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.022.113.766.368
9	Tujuan 9	Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	96
	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib

Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja daerah tahun 2020 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 merujuk kepada penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat pada dokumen perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai  
Tahun 2020

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>			
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>		
1.1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,37
1.2	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	115.496,86
1.3	Indeks Gini	Indek	0,403
1.4	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
1.5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	74,381
1.6	Angka melek huruf	%	99,47
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42
<b>FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>			
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		
1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,73
1.2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,45
1.3	Angka Partisipasi Kasar		
	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	99,89
1.4	Angka Partisipasi Murni		
	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,92
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,26
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>		
2.1.	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD ( BOR )	%	80
2.2.	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3
2.3.	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5
2.4.	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	65
2.5.	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
2.6.	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	20
<b>3</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>		
	Jumlah lembaga pelatihan keterampilan dalam pengembangan kewirausahaan	Lembaga	10
<b>FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA</b>			
<b>1</b>	<b>Kebudayaan</b>		
1.1.	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah grup kesenian	40

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
		per 10.000 penduduk	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		
1.1.	Angka partisipasi kasar PAUD	%	93,23
1.2.	Pendidikan Dasar		
1.2.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		
	1. SD/MI	per 1.000 siswa	1 : 339
	2. SMP/MTs	per 1.000 siswa	1 : 473
1.2.2.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
	1. SD/MI	per siswa	1 : 29
	2. SLTP	per siswa	1 : 30
1.2.3.	Angka Kelulusan		
	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	97,58
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>		
2.1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04
2.2.	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
2.3.	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
2.4.	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
2.5.	Persentase balita dengan gizi buruk	%	2
2.6.	Persentase balita dengan gizi kurang	%	5
2.7.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	19
2.8.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	26
2.9.	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	102
2.10.	Umur Harapan Hidup	tahun	71,04
2.11.	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	1
2.12.	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	%	88
2.13.	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	%	< 1
2.14.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55
2.15.	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>		
3.1.1.	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015
3.1.2.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	56,85
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	66,40
3.1.4.	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	60
<b>3.2.</b>	<b>Penataan Ruang</b>		
3.2.1.	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	85
3.2.2.	Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	85
3.2.3.	Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	6,5
<b>4</b>	<b>Perumahan dan Pemukiman</b>		
4.1.	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,50
4.2.	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7



NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
4.3.	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
4.4.	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	Ruas jalan	437
<b>5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
5.1.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Patroli/Kecamatan	2,75
5.2.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang sigap dan tanggap	%	50
5.3.	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%	55
5.4.	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	65
5.5.	Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai	%	90
5.6.	Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	%	100
5.7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	%	
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	12
5.8.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebencanaan	waktu	-
			-
			-
	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
	Perumahan (waktu maks. 15 menit)	%	35
	Lahan (waktu maks. 30 menit)	%	25
	Hutan (waktu maks. 60 menit)	%	30
5.9.	Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan	%	57,14
<b>6 Sosial</b>			
6.1.	Jumlah Sarana sosial	Unit	19
6.2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	52
6.3.	Persentase PMKS yang tertangani	%	28
6.4.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	85
6.5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100
6.6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	10
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>		
1.1.	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	80
	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	45
1.2.	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	%	45
1.3.	Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1
1.4.	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	%	45
<b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
2.1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	90
2.2.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	54,85
2.3.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89
2.4.	Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Nindya
2.5.	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,090

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
<b>3</b>	<b>Pangan</b>		
3.1.	Angka Kecukupan Protein	Gram/kapita/hari	52
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>		
4.1.	Jumlah konflik/permasalahan tanah di daerah Kota Dumai yang terselesaikan	Kasus	5
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>		
5.1.	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	Wilayah	5
5.2.	Persentase Kualitas udara	%	80
5.3.	Persentase Kualitas air	%	80
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		
6.1.	Kepemilikan KTP Elektronik	%	87,2
6.2.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	93
6.3.	Kepemilikan Akta Perkawinan	%	80
6.4.	Kepemilikan KIA	%	40
6.5.	Kepemilikan KK	%	96
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	281
7.2.	PKK aktif	%	100
7.3.	Posyandu aktif	%	100
7.4.	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	80
7.5.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	80
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
8.1.	Rasio akseptor KB	Rasio	-
8.2.	Cakupan peserta KB aktif	%	-
8.3.	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,070
8.4.	Persentase pemakaian kontrasepsi ( <i>contraceptive prevalence rate/CPR</i> )	%	63,2
8.5.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )(%)	%	18,6
8.6.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Institusi	25
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>		
9.1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	10.38
9.2.	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	46
9.3.	Persentase layanan angkutan darat	%	0,68
9.4.	Jumlah terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	7
9.5.	Rasio ijin trayek	Rasio	01:39,5
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		
10.1.	Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks	2,50
10.2.	Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	32
		SKPD/kantor/sarana publik	-
10.3.	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7
10.4.	Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan ke media massa	%	95

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>		
11.1.	Persentase koperasi yang aktif	%	88,20
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	78,39
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>		
12.1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA )	Rupiah	6.022.113.766.368
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
13.1.	Prestasi olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
13.2.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	58
13.3.	Jumlah klub olahraga	Klub	82
13.4.	Lapangan olahraga	Lapangan	2
13.5.	Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabor	28
<b>14</b>	<b>Kebudayaan</b>		
14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Penyelenggaraan	3
14.2.	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	%	100
14.3.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30
14.4.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	96
14.5.	Persentase sekolah Pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
14.6.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97
<b>15</b>	<b>Perpustakaan</b>		
15.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	22
15.2.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	16.936
<b>16</b>	<b>Kearsipan</b>		
16.1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	81
16.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	70
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>			
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>		
1.1.	Kunjungan Wisata		
	1. Mancanegara	Pengunjung	
	2. Domestik	Pengunjung	
1.2.	Kunjungan wisata	%	45
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>		
2.1.	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.143,19
2.2.	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,30
2.3.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
2.4.	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	159
2.5.	Produksi komoditi pertanian	Ton	21.041
2.6.	Produksi komoditi perkebunan	Ton	85.256
2.7.	Populasi ternak	Satuan ternak	6.303
2.8.	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	9
2.9.	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	11

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
2.10.	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	15
<b>3 Kehutanan</b>			
3.1.	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	-
<b>4 Perdagangan</b>			
4.1.	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21,46
4.2.	Persentase pasar tradisional yang sesuai standard	%	23
4.3.	Ekspor bersih perdagangan	Rp. Milyar	1.996,00
<b>5 Perindustrian</b>			
5.1.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	65
5.2.	Persentase Pengembangan Kawasan Industri	%	72
5.3.	Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih	%	95
<b>6 Transmigrasi</b>			
6.1.	Persentase Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	%	40
<b>7 Perikanan dan Kelautan</b>			
7.1.	Produksi perikanan kelompok nelayan/ produksi perikanan tangkap	ton	-
	Produksi perikanan tangkap	ton	318,83
7.2.	Kelompok pembudidaya ikan yang dibina	kelompok	-
	Cakupan Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	37
7.3.	Kelompok nelayan yang dibina	Kelompok	-
	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	34
7.4.	Nilai konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31
7.5.	Produksi perikanan budidaya	ton	273,06
<b>PENUNJANG URUSAN</b>			
<b>1 Perencanaan</b>			
1.1.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	25
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	2
1.3.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100
<b>2 Keuangan</b>			
2.1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	20
2.2.	Persentase peningkatan penerimaan Pajak daerah terhadap PAD	%	46
2.3.	Persentase peningkatan pajak daerah pada Bapenda	%	90
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	20
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	10
2.6.	Penetapan APBD	Tepat waktu/Tidak tidak tepat waktu	Tepat waktu
2.7.	Opini BPK	Opini	WTP
<b>3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>			
3.1.	Persentase pelanggaran disiplin	%	0,20
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	67
3.3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	32

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Pengawasan</b>		
4.1.	Nilai SAKIP Kota Dumai	Nilai	B
4.2.	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5
4.3.	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	%	70
4.4.	Jumlah Dokumen yang di Review setiap Tahunnya	Dokumen	10
<b>5</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		
5.1.	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95
5.2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	ada/tidak	ada
5.3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	ada/tidak	ada
5.4.	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
<b>FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR</b>			
<b>1</b>	<b>Perhubungan</b>		
1.1.	Jumlah terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	7
<b>FOKUS IKLIM BERINVESTASI</b>			
<b>1</b>	<b>Penanaman Modal</b>		
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
2.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	80

Dari seluruh indikator kinerja pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2020 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 diatas, maka indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian visi Walikota Dumai ***“Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021”*** adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	2020		
1	2	3	4	5		
<b>Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmurd pada Tahun 2021</b>						
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	72,618	74,381		
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,37		
3	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	93,003	113,370		
4	Indeks Gini	Indek	0,450	0,403		
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,74	4,42		
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,51	7,42		
7	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	2,04	7		
<b>Terwujudnya masyarakat Dumai yang madani pada Tahun 2021</b>						
1	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,120	0,110	0,090	0,085
2	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indek	85	86	89	90
3	Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan	Masjid	0	0	57	100
4	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%	35	40	55	60
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan	2	1	3	3
6	Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	%	100	100	100	100
7	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25	27	30	30

Dari tabel 6.3 diatas telah diuraikan bahwa untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada tahun 2021 dapat diukur melalui 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Adapun pengertian dari masing-masing indikator utama diatas adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pembangunan suatu daerah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dipublikasikan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik;
2. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat aktivitas ekonomi yang dihasilkan

oleh seluruh faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dari seri data PDRB atas dasar harga konstan yang setiap tahun dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik;

3. PDRB perkapita (ADHB): nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penilaian dilakukan pada harga tahun berjalan. PDRB perkapitan didapat dari perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk;
4. Indeks Gini: ukuran yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk yang nilainya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks ini dihitung dengan rumus koefisien gini atau dengan menggunakan kurva lorenz;
5. Tingkat kemiskinan: ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat miskin dalam suatu populasi. Tingkat kemiskinan didapat dengan menghitung persentase penduduk miskin;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka: ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat Kota Dumai yang tidak mempunyai pekerjaan dalam usia angkatan kerja;
7. Persentase pembangunan rumah layak huni: ukuran yang digunakan untuk mengetahui persentase rumah layak huni yang dibangun;
8. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO: adalah persentase penurunan perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang;
9. Indek pembangunan gender: ukuran yang digunakan untuk menghitung kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan;

10. Jumlah masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan: ukuran untuk melihat sejauhmana masyarakat Dumai memiliki keseimbangan hidup lahir dan bathin;
11. Persentase perda yang ditegakan: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat Kota Dumai menjunjung tinggi peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah;
12. Penyelenggaraan festival seni dan budaya: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sejarah dan seni daerah;
13. Konflik sosial: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masalah sosial dapat menimbulkan pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
14. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sejarah dan seni daerah.



## BAB VII

### P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ketiga dari tahap ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018, Dokumen RKPD 2020 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun Keempat Walikota Dumai periode tahun 2016-2021 yang merupakan tahun ***Tahap Penguatan*** yang mendukung kondusif bagi kemajuan pembangunan kota untuk mewujudkan masyarakat kota dumai yang makmur dan madani. Kebijakan program lebih diarahkan pada pengembangan berbagai sistem, sarana, potensi dan sumber daya lokal, instrumen pendukung serta situasi kota yang kondusif untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar perkotaan serta perekonomian dengan fokus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Dumai.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2020, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2020. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Kota Dumai tahun 2020 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2020, RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2020.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.

6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2020, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Dumai sebagai leading sektor.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2020 dan penyelenggaraan Forum PD serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2018, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari

rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.

9. RKPD Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**WALIKOTA DUMAI**

**H. ZULKIFLI, AS**

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan lampiran I permendagri nomor 86 tahun 2017. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
1	Tujuan 1	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	57,1
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,50
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,26
			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020	
1	2	3	4	5	
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60	
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	437	
	Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	80
			Persentase kualitas air	%	80
2	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,73
			Harapan lama sekolah	Tahun	13,45
	Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,47
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,92
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,26
	Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889
3	Tujuan 3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04
	Sasaran 3.1	Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
			Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
			Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
			Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887
4	Tujuan 4	Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
	Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
5	Tujuan 5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	12.777
			PDRB per kapita	Rp. 000	115.496,86
	Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,403
	Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
	Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,070
	Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020
1	2		3	4	5
6	Tujuan 6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
			Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
7	Tujuan 7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.143,19
	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,30
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
8	Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,37
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46
			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.65
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.022.113.766.368
9	Tujuan 9	Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	96
	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib

Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja daerah tahun 2020 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 merujuk kepada penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat pada dokumen perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai  
Tahun 2020

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>			
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>		
1.1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,37
1.2	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	115.496,86
1.3	Indeks Gini	Indek	0,403
1.4	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
1.5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	74,381
1.6	Angka melek huruf	%	99,47
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42
<b>FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>			
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		
1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,73
1.2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,45
1.3	Angka Partisipasi Kasar		
	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	99,89
1.4	Angka Partisipasi Murni		
	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,92
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,26
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>		
2.1.	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD ( BOR )	%	80
2.2.	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3
2.3.	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5
2.4.	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	65
2.5.	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
2.6.	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	20
<b>3</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>		
	Jumlah lembaga pelatihan keterampilan dalam pengembangan kewirausahaan	Lembaga	10
<b>FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA</b>			
<b>1</b>	<b>Kebudayaan</b>		
1.1.	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah grup kesenian	40



NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
		per 10.000 penduduk	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		
1.1.	Angka partisipasi kasar PAUD	%	93,23
1.2.	Pendidikan Dasar		
1.2.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		
	1. SD/MI	per 1.000 siswa	1 : 339
	2. SMP/MTs	per 1.000 siswa	1 : 473
1.2.2.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
	1. SD/MI	per siswa	1 : 29
	2. SLTP	per siswa	1 : 30
1.2.3.	Angka Kelulusan		
	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	97,58
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>		
2.1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04
2.2.	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
2.3.	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
2.4.	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
2.5.	Persentase balita dengan gizi buruk	%	2
2.6.	Persentase balita dengan gizi kurang	%	5
2.7.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	19
2.8.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	26
2.9.	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	102
2.10.	Umur Harapan Hidup	tahun	71,04
2.11.	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	1
2.12.	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	%	88
2.13.	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	%	< 1
2.14.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55
2.15.	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>		
3.1.1.	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10015
3.1.2.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	56,85
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	66,40
3.1.4.	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	60
<b>3.2.</b>	<b>Penataan Ruang</b>		
3.2.1.	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	85
3.2.2.	Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	85
3.2.3.	Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	6,5
<b>4</b>	<b>Perumahan dan Pemukiman</b>		
4.1.	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,50
4.2.	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
4.3.	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
4.4.	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	Ruas jalan	437
<b>5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
5.1.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Patroli/Kecamatan	2,75
5.2.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang sigap dan tanggap	%	50
5.3.	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%	55
5.4.	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	65
5.5.	Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai	%	90
5.6.	Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	%	100
5.7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	%	
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	12
5.8.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebencanaan	waktu	-
			-
			-
	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
	Permukiman (waktu maks. 15 menit)	%	35
	Lahan (waktu maks. 30 menit)	%	25
	Hutan (waktu maks. 60 menit)	%	30
5.9.	Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan	%	57,14
<b>6 Sosial</b>			
6.1.	Jumlah Sarana sosial	Unit	19
6.2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	52
6.3.	Persentase PMKS yang tertangani	%	28
6.4.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	85
6.5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100
6.6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	10
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>		
1.1.	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	80
	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	45
1.2.	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	%	45
1.3.	Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1
1.4.	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	%	45
<b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
2.1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	90
2.2.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	54,85
2.3.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89
2.4.	Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Nindya
2.5.	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,090

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
<b>3</b>	<b>Pangan</b>		
3.1.	Angka Kecukupan Protein	Gram/kapita/hari	52
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>		
4.1.	Jumlah konflik/permasalahan tanah di daerah Kota Dumai yang terselesaikan	Kasus	5
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>		
5.1.	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	Wilayah	5
5.2.	Persentase Kualitas udara	%	80
5.3.	Persentase Kualitas air	%	80
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		
6.1.	Kepemilikan KTP Elektronik	%	87,2
6.2.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	93
6.3.	Kepemilikan Akta Perkawinan	%	80
6.4.	Kepemilikan KIA	%	40
6.5.	Kepemilikan KK	%	96
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	281
7.2.	PKK aktif	%	100
7.3.	Posyandu aktif	%	100
7.4.	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	80
7.5.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	80
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
8.1.	Rasio akseptor KB	Rasio	-
8.2.	Cakupan peserta KB aktif	%	-
8.3.	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,070
8.4.	Persentase pemakaian kontrasepsi ( <i>contraceptive prevalence rate/CPR</i> )	%	63,2
8.5.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )(%)	%	18,6
8.6.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Institusi	25
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>		
9.1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	10.38
9.2.	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	46
9.3.	Persentase layanan angkutan darat	%	0,68
9.4.	Jumlah terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	7
9.5.	Rasio ijin trayek	Rasio	01:39,5
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		
10.1.	Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks	2,50
10.2.	Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	32
		SKPD/kantor/sarana publik	-
10.3.	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7
10.4.	Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan ke media massa	%	95

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>		
11.1.	Persentase koperasi yang aktif	%	88,20
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	78,39
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>		
12.1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA )	Rupiah	6.022.113.766.368
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
13.1.	Prestasi olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
13.2.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	58
13.3.	Jumlah klub olahraga	Klub	82
13.4.	Lapangan olahraga	Lapangan	2
13.5.	Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabor	28
<b>14</b>	<b>Kebudayaan</b>		
14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Penyelenggaraan	3
14.2.	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	%	100
14.3.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30
14.4.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	96
14.5.	Persentase sekolah Pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
14.6.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97
<b>15</b>	<b>Perpustakaan</b>		
15.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	22
15.2.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	16.936
<b>16</b>	<b>Kearsipan</b>		
16.1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	81
16.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	70
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>			
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>		
1.1.	Kunjungan Wisata		
	1. Mancanegara	Pengunjung	
	2. Domestik	Pengunjung	
1.2.	Kunjungan wisata	%	45
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>		
2.1.	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.143,19
2.2.	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,30
2.3.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
2.4.	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	159
2.5.	Produksi komoditi pertanian	Ton	21.041
2.6.	Produksi komoditi perkebunan	Ton	85.256
2.7.	Populasi ternak	Satuan ternak	6.303
2.8.	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	9
2.9.	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	11

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
2.10.	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	15
<b>3 Kehutanan</b>			
3.1.	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	-
<b>4 Perdagangan</b>			
4.1.	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21,46
4.2.	Persentase pasar tradisional yang sesuai standard	%	23
4.3.	Ekspor bersih perdagangan	Rp. Milyar	1.996,00
<b>5 Perindustrian</b>			
5.1.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	65
5.2.	Persentase Pengembangan Kawasan Industri	%	72
5.3.	Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih	%	95
<b>6 Transmigrasi</b>			
6.1.	Persentase Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	%	40
<b>7 Perikanan dan Kelautan</b>			
7.1.	Produksi perikanan kelompok nelayan/ produksi perikanan tangkap	ton	-
	Produksi perikanan tangkap	ton	318,83
7.2.	Kelompok pembudidaya ikan yang dibina	kelompok	-
	Cakupan Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	37
7.3.	Kelompok nelayan yang dibina	Kelompok	-
	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	34
7.4.	Nilai konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31
7.5.	Produksi perikanan budidaya	ton	273,06
<b>PENUNJANG URUSAN</b>			
<b>1 Perencanaan</b>			
1.1.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	25
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	2
1.3.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100
<b>2 Keuangan</b>			
2.1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	20
2.2.	Persentase peningkatan penerimaan Pajak daerah terhadap PAD	%	46
2.3.	Persentase peningkatan pajak daerah pada Bapenda	%	90
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	20
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	10
2.6.	Penetapan APBD	Tepat waktu/Tidak tidak tepat waktu	Tepat waktu
2.7.	Opini BPK	Opini	WTP
<b>3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>			
3.1.	Persentase pelanggaran disiplin	%	0,20
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	67
3.3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	32

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Pengawasan</b>		
4.1.	Nilai SAKIP Kota Dumai	Nilai	B
4.2.	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5
4.3.	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	%	70
4.4.	Jumlah Dokumen yang di Review setiap Tahunnya	Dokumen	10
<b>5</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		
5.1.	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95
5.2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	ada/tidak	ada
5.3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	ada/tidak	ada
5.4.	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
<b>FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR</b>			
<b>1</b>	<b>Perhubungan</b>		
1.1.	Jumlah terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	7
<b>FOKUS IKLIM BERINVESTASI</b>			
<b>1</b>	<b>Penanaman Modal</b>		
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
2.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	80

Dari seluruh indikator kinerja pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2020 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 diatas, maka indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian visi Walikota Dumai ***“Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021”*** adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	2020		
1	2	3	4	5		
<b>Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur pada Tahun 2021</b>						
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	72,618	74,381		
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,37		
3	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	93,003	113,370		
4	Indeks Gini	Indek	0,450	0,403		
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,74	4,42		
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,51	7,42		
7	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	2,04	7		
<b>Terwujudnya masyarakat Dumai yang madani pada Tahun 2021</b>						
1	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,120	0,110	0,090	0,085
2	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indek	85	86	89	90
3	Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan	Masjid	0	0	57	100
4	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%	35	40	55	60
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan	2	1	3	3
6	Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	%	100	100	100	100
7	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25	27	30	30

Dari tabel 6.3 diatas telah diuraikan bahwa untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada tahun 2021 dapat diukur melalui 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Adapun pengertian dari masing-masing indikator utama diatas adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pembangunan suatu daerah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dipublikasikan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik;
2. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat aktivitas ekonomi yang dihasilkan

oleh seluruh faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dari seri data PDRB atas dasar harga konstan yang setiap tahun dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik;

3. PDRB perkapita (ADHB): nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penilaian dilakukan pada harga tahun berjalan. PDRB perkapitan didapat dari perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk;
4. Indeks Gini: ukuran yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk yang nilainya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks ini dihitung dengan rumus koefisien gini atau dengan menggunakan kurva lorenz;
5. Tingkat kemiskinan: ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat miskin dalam suatu populasi. Tingkat kemiskinan didapat dengan menghitung persentase penduduk miskin;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka: ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat Kota Dumai yang tidak mempunyai pekerjaan dalam usia angkatan kerja;
7. Persentase pembangunan rumah layak huni: ukuran yang digunakan untuk mengetahui persentase rumah layak huni yang dibangun;
8. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO: adalah persentase penurunan perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang;
9. Indek pembangunan gender: ukuran yang digunakan untuk menghitung kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan;



10. Jumlah masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan: ukuran untuk melihat sejauhmana masyarakat Dumai memiliki keseimbangan hidup lahir dan bathin;
11. Persentase perda yang ditegakan: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat Kota Dumai menjunjung tinggi peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah;
12. Penyelenggaraan festival seni dan budaya: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sejarah dan seni daerah;
13. Konflik sosial: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masalah sosial dapat menimbulkan pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
14. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sejarah dan seni daerah.



# BAB VII PENUTUP

## BAB VII

### P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ketiga dari tahap ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018, Dokumen RKPD 2020 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun Keempat Walikota Dumai periode tahun 2016-2021 yang merupakan tahun ***Tahap Penguatan*** yang mendukung kondusif bagi kemajuan pembangunan kota untuk mewujudkan masyarakat kota dumai yang makmur dan madani. Kebijakan program lebih diarahkan pada pengembangan berbagai sistem, sarana, potensi dan sumber daya lokal, instrumen pendukung serta situasi kota yang kondusif untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar perkotaan serta perekonomian dengan fokus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Dumai.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2020, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2020. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Kota Dumai tahun 2020 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2020, RKPD Kota Dumai Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2020.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.

6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2020, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Dumai sebagai leading sektor.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2020 dan penyelenggaraan Forum PD serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2018, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari

rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.

9. RKPD Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**WALIKOTA DUMAI**

**H. ZULKIFLI, AS**



# **LAMPIRAN I**

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai  
tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

Tabel T-C.19.  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan  
Kota Dumai

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>Pendidikan</b>																
		<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>		<b>95.00</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>85.00</b>	<b>3,863,320,366</b>	<b>60</b>	<b>2,248,316,980</b>	<b>25</b>	<b>94,877,900</b>	<b>2.63%</b>	<b>4.22%</b>	110.00	3,958,198,266	115.79%	98.95%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.1.01.01.15.01	Pembangunan gedung sekolah		90.00	550,000,000			0	33,278,900			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.15.03	Penambahan ruang kelas sekolah		100.00	200,000,000	160.00	595,302,000		336,299,100					160.00	595,302,000	160.00%	297.65%	
	1.01.1.01.01.15.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir		90.00	150,000,000	180.00	518,856,000		200,000,000					180.00	518,856,000	200.00%	345.90%	
	1.01.1.01.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		90.00	100,000,000	1.00	185,493,000		260,000,000					1.00	185,493,000	1.11%	185.49%	
	1.01.1.01.01.15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah		90.00	90,000,000	<b>80.00</b>	<b>158,617,000</b>		156,000,000					80.00	158,617,000	88.89%	176.24%	
	1.01.1.01.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik		85.00	100,000,000	250.00	215,951,500	0	96,400,500			0.00%	0.00%	250.00	215,951,500	294.12%	215.95%	
	1.01.1.01.01.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		85.00	95,000,000	250.00	106,418,000	100	143,030,780	6	50,282,900	6.25%	35.16%	256.25	156,700,900	301.47%	164.95%	
	1.01.1.01.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		90.00	100,000,000	190.00	105,488,500		196,642,400					190.00	105,488,500	211.11%	105.49%	
	1.01.1.01.01.15.64	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini		90.00	75,000,000	70.00	123,458,000	100	62,726,000	13	31,363,000	12.50%	50.00%	82.50	154,821,000	91.67%	206.43%	
	1.01.1.01.01.15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini		90.00	150,000,000	45.00	317,742,000		84,974,500					45.00	317,742,000	50.00%	211.83%	
	1.01.1.01.01.15.69	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan TK Negeri				5.00	571,016,047	100	678,964,800	6	13,232,000	6.25%	1.95%	11.25	584,248,047	#DIV/0!	#DIV/0!	
									2,248,316,980			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	2.63%	4.22%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.01.1.01.01.16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>90.00</b>	<b>84,889,185,420</b>	<b>85.00</b>	<b>122,839,151,292</b>	<b>100</b>	<b>47,911,319,703</b>	<b>94</b>	<b>909,727,068</b>	<b>0.48%</b>	<b>1.90%</b>	178.50	123,748,878,360	198.33%	145.78%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.1.01.01.16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD		0.00		96.00	16,750,000		19,345,000					96.00	16,750,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP		0.00		98.00	124,376,000		67,895,000					98.00	124,376,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar		90.00	350,000,000	88.00	193,188,400		58,471,400					88.00	193,188,400	97.78%	55.20%	
	1.01.1.01.01.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar		90.00	200,000,000	82.00	847,281,099		353,729,900					82.00	847,281,099	91.11%	423.64%	
	1.01.1.01.01.16.79	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1		12.00	440,400,000	24.00	699,205,337	100	315,998,000	4	45,036,640	3.75%	14.25%	27.75	744,241,977	231.25%	168.99%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Dasar dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.1.01.01.16.80	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2	-	12.00	417,000,000	24.00	1,752,131,996	100	371,985,000	4	54,669,792	3.75%	14.70%	27.75	1,806,801,788	231.25%	433.29%	
	1.01.1.01.01.16.81	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3	-	12.00	386,550,000	24.00	472,573,000	100	158,695,000	4	26,448,000	4.25%	16.67%	28.25	499,021,000	235.42%	129.10%	
	1.01.1.01.01.16.82	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	-	12.00	474,350,000	24.00	706,536,483	100	296,189,350	4	46,616,295	4.00%	15.74%	28.00	753,152,778	233.33%	158.78%	
	1.01.1.01.01.16.83	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	-	12.00	414,100,000	24.00	512,384,590	100	232,729,100	4	38,099,205	4.00%	16.37%	28.00	550,483,795	233.33%	132.93%	
	1.01.1.01.01.16.84	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	-	12.00	344,050,000	24.00	389,116,000	100	161,937,900	4	26,295,250	4.00%	16.24%	28.00	415,411,250	233.33%	120.74%	
	1.01.1.01.01.16.85	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	-	12.00	431,150,000	24.00	477,446,081	100	197,760,000	4	32,960,000	4.25%	16.67%	28.25	510,406,081	235.42%	118.38%	
	1.01.1.01.01.16.86	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	-	12.00	226,100,000	24.00	218,887,600	100	120,000,000	4	20,000,000	4.25%	16.67%	28.25	238,887,600	235.42%	105.66%	
	1.01.1.01.01.16.87	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	-	12.00	347,350,000	24.00	499,115,000	100	203,985,000	4	33,998,000	4.25%	16.67%	28.25	533,113,000	235.42%	153.48%	
	1.01.1.01.01.16.89	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	-	12.00	370,300,000	24.00	487,579,200	100	217,036,000	4	36,172,000	4.25%	16.67%	28.25	523,751,200	235.42%	141.44%	
	1.01.1.01.01.16.90	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	-	12.00	333,050,000	24.00	479,475,200	100	210,000,000	4	35,000,000	4.25%	16.67%	28.25	514,475,200	235.42%	154.47%	
	1.01.1.01.01.16.91	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	-	12.00	457,250,000	24.00	734,721,000	100	250,000,000	6	58,715,000	5.75%	23.49%	29.75	793,436,000	247.92%	173.52%	
	1.01.1.01.01.16.92	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	-	12.00	753,100,000	0.00	-	100	385,000,000	5	70,000,000	4.50%	18.18%	4.50	70,000,000	37.50%	9.29%	
	1.01.1.01.01.16.93	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	-	12.00	267,250,000	24.00	239,160,800	100	150,000,000	4	25,000,000	4.25%	16.67%	28.25	264,160,800	235.42%	98.84%	
	1.01.1.01.01.16.94	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus	-	12.00	299,050,000	12.00	722,542,075	100	352,524,300	4	53,402,950	3.75%	15.15%	15.75	775,945,025	131.25%	259.47%	
	1.01.1.01.01.16.95	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	-	12.00	283,200,000	24.00	459,014,308	100	188,950,000	4	31,200,000	4.25%	16.51%	28.25	490,214,308	235.42%	173.10%	
	1.01.1.01.01.16.96	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	-	12.00	321,600,000	24.00	459,177,500	100	218,400,000	4	36,400,000	4.25%	16.67%	28.25	495,577,500	235.42%	154.10%	
	1.01.1.01.01.16.97	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	-	12.00	232,000,000	24.00	374,317,000	100	154,835,000	4	25,000,000	4.00%	16.15%	28.00	399,317,000	233.33%	172.12%	
	1.01.1.01.01.16.98	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19	-	12.00	362,000,000	24.00	420,317,200	100	240,000,000	4	40,000,000	4.25%	16.67%	28.25	460,317,200	235.42%	127.16%	
	1.01.1.01.01.16.100	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20	-	12.00	339,750,000	23.00	492,043,200	100	225,000,000	4	37,500,000	4.25%	16.67%	27.25	529,543,200	227.08%	155.86%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.1.01.01.16.101	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21		12.00	387,900,000	24.00	457,264,600	100	210,000,000	4	35,000,000	4.25%	16.67%	28.25	492,264,600	235.42%	126.91%	
	1.01.1.01.01.16.102	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22 Dumai		12.00	375,200,000			100	259,250,000	4	42,500,000	4.00%	16.39%	4.00	42,500,000	33.33%	11.33%	
	1.01.1.01.01.16.103	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD		100.00	1,200,000,000				497,041,870					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.104	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP		100.00	500,000,000				788,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.105	Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD		100.00	600,000,000				400,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.107	Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Tingkat SD		90.00	500,000,000				200,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.109	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD		100	8,000,000,000				2,334,531,153					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.110	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP		100.00	2,500,000,000				244,061,500					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.112	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP		100.00	2,400,000,000				980,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.113	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD		100.00	1,800,000,000				2,176,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.114	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP		100.00	1,200,000,000				400,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.117	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD		100.00	850,000,000				736,812,600					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.118	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP		100.00	550,000,000				472,836,300					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.119	Pengadaan mebeluer sekolah Tingkat SD		100.00	3,000,000,000				1,652,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.120	Pengadaan mebeluer sekolah Tingkat SMP		100.00	2,000,000,000				400,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.121	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD		100.00	2,540,000,000				1,223,808,130					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.122	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP		100.00	4,626,485,420				1,933,358,500					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.123	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD		100.00	3,500,000,000				4,228,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.124	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP		100.00	1,365,000,000				222,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.126	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP		100.00	600,000,000				860,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.129	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD		100.00	3,000,000,000				8,895,000,000					0.00		0.00%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.1.01.01.16.130	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP		100.00	2,000,000,000				952,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.131	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD		100.00	350,000,000				278,186,700					0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.132	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP		100.00	250,000,000				219,740,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.133	Pengadaan perlengkapan sekolah Tingkat SD		100.00	750,000,000				1,030,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.134	Pengadaan perlengkapan sekolah Tingkat SMP		100.00	1,000,000,000				603,750,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.135	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD		100.00	1,000,000,000				333,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.136	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP		100.00	1,000,000,000				8,475,694,500					0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.16.137	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP		0.00	-			100	1,755,782,500	1	59,713,936	1.00%	3.40%	1.00	59,713,936	#DIV/0!	#DIV/0!	
								47,911,319,703	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			0.48%	1.90%					
									<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.01.1.01.01.18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>		<b>95.00</b>	<b>300,354,000</b>	<b>85.00</b>	<b>122,839,151,292</b>	<b>100</b>	<b>227,233,230</b>	<b>21</b>	<b>189,513,230</b>	<b>20.75%</b>	<b>83.40%</b>	105.75	123,028,664,522	111.32%	40961.22%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.1.01.01.18.08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal		95.00	300,354,000			100	227,233,230	21	189,513,230	20.75%	83.40%	20.75	189,513,230	21.84%	63.10%	
								227,233,230	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			20.75%	83.40%					
									<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Tinggi					
	1.01.1.01.01.20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		<b>95.00</b>	<b>19,877,884,820</b>	<b>85.00</b>	<b>25,308,210,230</b>	<b>100%</b>	<b>31,848,436,707</b>	<b>8</b>	<b>161,260,500</b>	<b>0.18%</b>	<b>0.73%</b>	92.75	25,469,470,730	97.63%	128.13%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.1.01.01.20.16	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD		90.00	700,000,000			100	231,566,000	5	46,140,500	5.00%	19.93%	5.00	46,140,500	5.56%	6.59%	
	1.01.1.01.01.20.19	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD		90.00	750,000,000	120.00	27,591,788	100	288,059,900	-	-	0.00%	0.00%	120.00	27,591,788	133.33%	3.68%	
	1.01.1.01.01.20.25	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD		90.00	10,000,000,000			100	6,273,600,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.20.26	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP		90.00	2,050,000,000			100	1,563,678,350	2	108,200,000	1.75%	6.92%	1.75	108,200,000	1.94%	5.28%	
	1.01.1.01.01.20.27	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD		90.00	300,000,000				174,722,900					0.00	-	0.00%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
1.01.1.01.01.20.28		Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP		90.00	200,000,000			152,640,500					0.00	-	0.00%	0.00%			
1.01.1.01.01.20.32		Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP		90.00	500,000,000			170,351,700	100	6,920,000	1	6,920,000	1.00%	4.06%	1.00	6,920,000	1.11%	1.38%	
		Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 2. Terlayannya perhitungan angka kredit 3. Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan 4. Menghasilkan Tenaga Pendidik yang berkompoten dtbl (%)			140.00	558,190,406						140.00	558,190,406	#DIV/0!	#VALUE!			
			1. Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 2. Terlayannya perhitungan angka kredit 3. Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan 4. Menghasilkan Tenaga Pendidik yang berkompoten dtbl (%)			140.00	-						140.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			1. Meningkatnya pengetahuan guru tentang jabatan fungsional 2. Meningkatnya kesejahteraan PTK (%)	85.00	15,273,884,000	60.00	8,604,890,000	150	22,039,005,238										
			Guru yang naik pangkat (%)	90.00	550,000,000	90.00	370,680,806	180	954,812,119										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.18%	0.73%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.01.4.01.03.20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100.00	2,400,000,000	0.00	3,405,040,000	0	2,050,000,000	0	12,000,000	0.00%	0.59%	0.00	3,417,040,000	0.00%	142.38%	Sekretariat Daerah Kota Dumal	
1.01.4.01.03.20.15		Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan		9.00	2,400,000,000	14.00	3,405,040,000	0	2,050,000,000	-	12,000,000	0.00%	0.59%	14.00	3,417,040,000	155.56%	142.38%		
								2,050,000,000				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.59%				
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.01.1.01.01.22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		95.00	3,851,121,000	170.00	4,366,686,840	100	2,541,310,531	28	334,443,644	5.55%	25.53%	197.75	4,701,130,484	208.16%	122.07%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.01.1.01.01.22.03		Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana		90.00	350,000,000	70.00	448,437,522	100	174,176,500	2	11,580,000	1.75%	6.65%	71.75	460,017,522	79.72%	131.43%		
				0.00	-			100		2		1.75%		1.75	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	1.01.1.01.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	-	90.00	700,000,000	180.00	2,060,600,081	100	625,762,500	7	183,403,208	7.25%	29.31%	187.25	2,244,003,289	208.06%	320.57%	
	1.01.1.01.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	-	90.00	750,000,000			100	467,774,400	6	100,931,436	5.50%	21.58%	5.50	100,931,436	6.11%	13.46%	
	1.01.1.01.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	90.00	252,321,000	50.00	428,485,506	100	86,425,400	12	38,529,000	11.50%	44.58%	61.50	467,014,506	68.33%	185.09%	
			- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha Keuangan Sekolah - Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kegiatan Sekolah - Terlaksananya Sosialisasi Lulu Li (%)			160.00	1,187,171,731	160	1,187,171,731					160.00	1,187,171,731	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan																
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.01.4.01.03.23	Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa		100.00	696,950,000	0.00	459,619,661	0	504,850,000			0.00%	0.00%	0.00	459,619,661	0.00%	65.95%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	1.01.4.01.03.23.01	Penyediaan Beasiswa		240.00	696,950,000	142.00	459,619,661	0	504,850,000			0.00%	0.00%	142.00	459,619,661	59.17%	65.95%	
									504,850,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.01.1.01.01.25	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		90.00	80,402,200,000	0.00	-	0	36,037,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.1.01.01.25.01	BOS SD	-	90.00	31,454,400,000	0.00	-	0	26,244,000,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.01.1.01.01.25.02	BOS SMP	-	90.00	13,126,000,000	0.00	-	0	9,793,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									36,037,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		90.00	615,004,200	0.00	-	16	291,580,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.01.2.01.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil dan memiliki Sertifikat dan Bersertifikat keahlian (Orang)	90.00	615,004,200	0.00	-	16	291,580,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									291,580,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	2.01.2.01.01.16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>		1.00	315,002,564	0.00	-	62	153,465,180	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.01.2.01.01.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal (Perusahaan)	50.00	80,002,564			50	54,490,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	2.01.2.01.01.16.02	Penyebarnyaan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar ditempatkan (Bulan)	12.00	125,000,000			12	98,975,180	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									153,465,180			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.01.2.01.01.17	<b>Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>		72.00	185,000,000	0.00	-	1	101,045,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.01.2.01.01.17.09	Verifikasi SPI/SB	Jumlah Dokumen Verifikasi SPI/SB (Dokumen)	1.00	103,000,000	0.00		1	101,045,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									101,045,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.01.2.01.01.18	<b>Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja</b>		271.00	181,000,000	0.00	-	5	179,846,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.01.2.01.01.18.02	Pembinaan Dewan Pengupahan	Jumlah Rapat Rutin Dewan Pengupahan (Kali)	5.00	181,000,000	0.00		5	179,846,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									179,846,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Administrasi Pemerintahan</b>																
	4.01.4.01.04.15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>		80.00	11,477,092,561	80.00	12,965,997,485	0	10,498,447,272	0	7,200,000	0.00%	0	80.00	12,973,197,485	100.00%	113.04%	Sekretariat DPRD
	4.01.4.01.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah		32.00	1,200,000,000	19.00	1,940,245,673		1,181,522,272					19.00	1,940,245,673	59.38%	161.69%	
	4.01.4.01.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		4.00	390,000,000	3.00	371,700,000		423,300,000					3.00	371,700,000	75.00%	95.31%	
	4.01.4.01.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan		7.00	389,500,000	8.00	280,065,000		1,018,560,000					8.00	280,065,000	114.29%	71.90%	
	4.01.4.01.04.15.04	Rapat-rapat paripurna		34.00	1,868,779,311	64.00	1,376,157,000		1,657,900,000					64.00	1,376,157,000	188.24%	73.64%	
	4.01.4.01.04.15.05	Kegiatan Reses		3.00	2,924,444,250	3.00	4,261,350,000		1,440,700,000					3.00	4,261,350,000	100.00%	145.71%	
	4.01.4.01.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		0.00	2,254,212,000	32.00	896,323,759		1,803,500,000					32.00	896,323,759	#DIV/0!	39.76%	
	4.01.4.01.04.15.11	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD		9.00	1,149,765,000	10.00	2,131,984,207		999,765,000					10.00	2,131,984,207	111.11%	185.43%	
	4.01.4.01.04.15.12	Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung		7.00	35,000,000	3.00	-		97,000,000					3.00	-	42.86%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.04.15.13		Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPASP, RAPBD-P, Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama Beserta Prognosis.		3.00	754,192,000	11.00	941,571,846		1,365,000,000					11.00	941,571,846	366.67%	124.85%	
4.01.4.01.04.15.14		Penyediaan alat kelengkapan DPRD		8.00	511,200,000	9.00	766,600,000	0	511,200,000	-	7,200,000	0.00%	1.41%	9.00	773,800,000	112.50%	151.37%	
									10,498,447,272	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.07%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.03.15		<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>		<b>16.00</b>	<b>115,000,000</b>	<b>24.00</b>	<b>155,472,700</b>	<b>16</b>	<b>99757000</b>					24.00	155,472,700	150.00%	135.19%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
4.01.4.01.03.15.09		Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol	Jumlah bantuan keuangan pada parpol (Parpol)	12.00	115,000,000	24.00	155,472,700	16	99,757,000	-	-	0.00%	0.00%	24.00	155,472,700	200.00%	135.19%	
									99,757,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.03.16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>		<b>86.50</b>	<b>6,345,995,731</b>	<b>1152.75</b>	<b>7,196,682,157</b>	<b>300</b>	<b>3,002,948,500.00</b>	<b>0.75</b>	<b>347,453,824.00</b>	<b>0</b>	<b>11.57%</b>	1153.50	7,544,135,981	1333.53%	118.88%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
4.01.4.01.03.16.01		Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan		24.00	714,563,467	24.00	530,625,000	0	177,000,000	1	27,240,000	0.00%	15.39%	24.75	557,865,000	103.13%	78.07%	
4.01.4.01.03.16.02		Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri		30.00	2,093,593,335	27.25	1,697,015,000		494,000,000					27.25	1,697,015,000	90.83%	81.06%	
4.01.4.01.03.16.06		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		300.00	1,547,868,128	198.50	3,248,280,157	300	1,407,151,000	-	233,299,824	0.00%	16.58%	198.50	3,481,579,981	66.17%	224.93%	
4.01.4.01.03.16.07		Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		12.00	712,986,750	6663.00	989,712,000	0	562,247,500	-	86,914,000	0.00%	15.46%	6663.00	1,076,626,000	55525.00%	151.00%	
4.01.4.01.03.16.08		Pisah Sambut Muspida Kota Dumai		5.00	714,281,198	2.75	364,500,000		107,700,000					2.75	364,500,000	55.00%	51.03%	
4.01.4.01.03.16.09		Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai		1.00	562,702,853	1.00	366,550,000		254,850,000					1.00	366,550,000	100.00%	65.14%	
									3,002,948,500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	11.57%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.07.4.01.03.17		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>		<b>100.00</b>	<b>1,297,552,800</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154,631,382</b>	<b>75</b>	<b>686,558,909</b>	<b>0</b>	<b>87,609,160</b>	<b>0.00%</b>	<b>12.76%</b>	0.00	1,242,240,542	0.00%	95.74%	Sekretariat Daerah Kota Dumai

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	2.07.4.01.03.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kegiatan monitoring pelaksanaan dana pembangunan infrastruktur Kelurahan (Persen)	80.00	85,000,000			75	79,780,250	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	2.07.4.01.03.17.05	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong	-	1.00	363,301,300	1.00	560,259,498	0	304,070,000	-	53,770,000	0.00%	17.68%	1.00	614,029,498	100.00%	169.01%	
	2.07.4.01.03.17.06	Getar Teknologi Tepat Guna	-	7.00	176,894,000	7.00	90,132,100	0	85,936,240	-	5,495,000	0.00%	6.39%	7.00	95,627,100	100.00%	54.06%	
	2.07.4.01.03.17.07	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	-	1.00	256,237,500	1.00	369,216,314	0	216,772,419	-	28,344,160	0.00%	13.08%	1.00	397,560,474	100.00%	155.15%	
									686,558,909			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	12.76%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		100.00	1,530,923,194	0.00		0	99,580,000.00	8	9,820,000.00	0.00%	9.86%	8.00	9,820,000	8.00%	0.64%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.01.4.01.03.23.03	Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang-Undangan	-	100.00	210,273,194			0	99,580,000	8	9,820,000	0.00%	9.86%	8.00	9,820,000	8.00%	4.67%	
									99,580,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	9.86%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.2.12.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		80.00	322,500,000	0.00	671,879,600	0	162,939,000	0.75	14,400,000	0.00%	8.84%	0.75	686,279,600	0.94%	212.80%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.01.2.12.01.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	-	12.00	322,500,000	24.00	671,879,600	0	162,939,000	1	14,400,000	0.00%	8.84%	24.75	686,279,600	206.25%	212.80%	
									162,939,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	8.84%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.10.24	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat		85.00	842,154,176	34.00	911,130,000	77	577,264,176	3	86,000,000	3.95%	14.90%	37.00	997,130,000	43.53%	118.40%	Dumai Kota
	4.01.4.01.10.24.03	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kecamatan (bulan)	12.00	51,440,000	24.00	860,280,000	12	25,250,000	1	-	4.17%	0.00%	24.50	860,280,000	204.17%	1672.40%	
	4.01.4.01.10.24.04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Kota (kelurahan)	5.00	35,514,176	10.00	50,850,000	5	30,014,176	-	-	0.00%	0.00%	10.00	50,850,000	200.00%	143.18%	
	4.01.4.01.10.24.19	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	186,600,000			12	134,160,000	1	22,000,000	4.17%	16.40%	0.50	22,000,000	4.17%	11.79%	
	4.01.4.01.10.24.20	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	170,800,000			12	109,960,000	1	18,000,000	4.17%	16.37%	0.50	18,000,000	4.17%	10.54%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01.10.24.21		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	186,600,000			12	130,560,000	1	22,000,000	4.17%	16.85%	0.50	22,000,000	4.17%	11.79%		
4.01.4.01.10.24.22		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintan	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	120,600,000			12	85,760,000	1	14,000,000	4.17%	16.32%	0.50	14,000,000	4.17%	11.61%		
4.01.4.01.10.24.23		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	90,600,000			12	61,560,000	1	10,000,000	4.17%	16.24%	0.50	10,000,000	4.17%	11.04%		
									577,264,176										
4.01.4.01.07.24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>85.00</b>	<b>743,525,000</b>	<b>0.00</b>	<b>693,465,000</b>								0.00	693,465,000	0.00%	93.27%	Bukit Kapur
4.01.4.01.07.24.04		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Bukit Kapur (Kelurahan)	7.00	25,525,000	105.00	40,065,000	5	25,525,000	1	25,525,000	25.00%	100.00%	106.25	65,590,000	1517.86%	256.96%		
4.01.4.01.07.24.07		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Besar	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	138,000,000	24.00	653,400,000	12	108,000,000	1	18,000,000	4.17%	16.67%	24.50	671,400,000	204.17%	486.52%		
4.01.4.01.07.24.08		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	126,000,000			12	96,000,000	1	16,000,000	4.17%	16.67%	0.50	16,000,000	4.17%	12.70%		
4.01.4.01.07.24.09		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kampung Baru	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	114,000,000			12	84,000,000	1	14,000,000	4.17%	16.67%	0.50	14,000,000	4.17%	12.28%		
4.01.4.01.07.24.10		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	102,000,000			12	72,000,000	1	12,000,000	4.17%	16.67%	0.50	12,000,000	4.17%	11.76%		
4.01.4.01.07.24.11		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	78,000,000			12	48,000,000	1	8,000,000	4.17%	16.67%	0.50	8,000,000	4.17%	10.26%		
									433,525,000										
4.01.4.01.05.24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>85.00</b>	<b>628,751,500</b>	<b>16.00</b>	<b>393,905,000</b>	<b>52</b>	<b>1,387,680,000</b>	<b>4</b>	<b>83,840,000</b>	<b>0.5</b>	<b>1</b>	<b>20.00</b>	<b>477,745,000</b>	<b>23.53%</b>	<b>75.98%</b>	Dumai Barat	
4.01.4.01.05.24.04		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan (Kelurahan)	4.00	35,000,000	4.00	21,905,000	4	693,840,000	1	21,840,000	25.00%	3.15%	5.00	43,745,000	125.00%	124.99%		
4.01.4.01.05.24.24		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan STDI	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di kelurahan STDI (Bulan)					12	96,000,000	1	16,000,000	6.25%	16.67%	0.75	16,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.05.24.25		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Pangkalan Sesai (Bulan)	12.00	119,200,000			12	84,000,000	1	14,000,000	6.25%	16.67%	0.75	14,000,000	6.25%	11.74%	
4.01.4.01.05.24.26		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Purnama (Bulan)	12.00	171,901,500			12	120,000,000	1	20,000,000	6.25%	16.67%	0.75	20,000,000	6.25%	11.63%	
4.01.4.01.05.24.27		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Bagan Keladi (Bulan)	12.00	93,600,000			12	72,000,000	1	12,000,000	6.25%	16.67%	0.75	12,000,000	6.25%	12.82%	
			Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan (Bulan)	12.00	84,250,000	12.00	372,000,000		321,840,000									
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu																
4.01.4.01.11.24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>100.00</b>	<b>700,564,000</b>	<b>17.00</b>	<b>531,300,500</b>	<b>77</b>	<b>529,830,000</b>	<b>5</b>	<b>121,820,350</b>	<b>6.09%</b>	<b>22.99%</b>	21.50	653,120,850	21.50%	93.23%	Dumai Selatan
4.01.4.01.11.24.03		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kecamatan (Bulan)	12.00	54,240,000	12.00	485,027,000	12	24,390,000	1	7,829,500	6.25%	32.10%	12.75	492,856,500	106.25%	908.66%	
4.01.4.01.11.24.04		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan (Kelurahan)	5.00	46,440,000	5.00	46,273,500	5	46,440,000	1	37,990,850	25.00%	81.81%	6.25	84,264,350	125.00%	181.45%	
4.01.4.01.11.24.29		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	12.00	150,600,000			12	120,600,000	1	20,000,000	4.17%	16.58%	0.50	20,000,000	4.17%	13.28%	
4.01.4.01.11.24.30		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	12.00	120,600,000			12	96,600,000	1	16,000,000	4.17%	16.56%	0.50	16,000,000	4.17%	13.27%	
4.01.4.01.11.24.31		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Bumi Ayu (Bulan)	12.00	105,600,000			12	84,600,000	1	14,000,000	4.17%	16.55%	0.50	14,000,000	4.17%	13.26%	
4.01.4.01.11.24.32		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Mekar Sari (Bulan)	12.00	105,600,000			12	84,600,000	1	14,000,000	4.17%	16.55%	0.50	14,000,000	4.17%	13.26%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.11.24.33	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Bukit Timah (Bulan)	12.00	90,600,000			12	72,600,000	1	12,000,000	4.17%	16.53%	0.50	12,000,000	4.17%	13.25%	
									529,830,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		6.09%	22.99%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.06.24	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>100.00</b>	<b>880,038,713</b>	<b>30.00</b>	<b>1,036,984,000</b>	<b>485</b>	<b>670,642,000.00</b>	<b>13</b>	<b>59,140,000.00</b>	<b>3.44%</b>	<b>8.82%</b>	43.00	1,096,124,000	43.00%	124.55%	Dumai Timur
	4.01.4.01.06.24.03	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kecamatan (%)	90.00	39,930,000	24.00	981,600,000	80	4,350,000	-	-	0.00%	0.00%	24.00	981,600,000	26.67%	2458.30%	
	4.01.4.01.06.24.04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan (kegiatan)	90.00	47,911,777	6.00	55,384,000	5	32,692,000	1	6,340,000	10.00%	19.39%	6.50	61,724,000	7.22%	128.83%	
	4.01.4.01.06.24.34	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah kader pelayanan kesehatan Balita dan usia di Kelurahan Teluk Binjai (%)	90.00	241,032,000			80	199,200,000	3	16,600,000	3.13%	8.33%	2.50	16,600,000	2.78%	6.89%	
	4.01.4.01.06.24.35	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah kader pelayanan kesehatan Balita dan usia di Kelurahan Bukit Batrem (%)	12.00	114,838,936			80	73,800,000	3	6,150,000	3.13%	8.33%	2.50	6,150,000	20.83%	5.36%	
	4.01.4.01.06.24.36	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah kader pelayanan kesehatan Balita dan usia di Kelurahan Jaya Mukti (%)	90.00	197,472,000			80	163,200,000	3	13,600,000	3.13%	8.33%	2.50	13,600,000	2.78%	6.89%	
	4.01.4.01.06.24.37	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah kader pelayanan kesehatan Balita dan usia di Kelurahan Tanjung Palas (%)	90.00	74,778,000			80	61,800,000	3	5,150,000	3.13%	8.33%	2.50	5,150,000	2.78%	6.89%	
	4.01.4.01.06.24.38	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah kader pelayanan kesehatan Balita dan usia di Kelurahan Buluh Kasap (%)	90.00	164,076,000			80	135,600,000	3	11,300,000	3.13%	8.33%	2.50	11,300,000	2.78%	6.89%	
									670,642,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		3.44%	8.82%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.08.24	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>80.00</b>	<b>478,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>361,422,000</b>	<b>4</b>	<b>87,972,000</b>	<b>7.29%</b>	<b>24.34%</b>	4.00	87,972,000	5.00%	18.40%	Medang Kampai
	4.01.4.01.08.24.01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan penyandu kesehatan balita dn usia di Kecamatan (bulan)	12.00	58,000,000			2	10,300,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.08.24.04		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Medang Kampai (Kelurahan)	4.00	68,000,000			4	23,522,000	1	9,972,000	25.00%	42.39%	1.00	9,972,000	25.00%	14.66%	
4.01.4.01.08.24.39		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Guntung	Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usia Kelurahan Guntung yang dibayar (bulan)	12.00	28,000,000			12	25,200,000	1	6,000,000	6.25%	23.81%	0.75	6,000,000	6.25%	21.43%	
4.01.4.01.08.24.40		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usia Kelurahan Teluk Makmur yang dibayar (bulan)	12.00	110,000,000			12	100,800,000	1	24,000,000	6.25%	23.81%	0.75	24,000,000	6.25%	21.82%	
4.01.4.01.08.24.41		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam	Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usia Kelurahan Mundam yang dibayar (bulan)	12.00	78,000,000			12	75,600,000	1	18,000,000	6.25%	23.81%	0.75	18,000,000	6.25%	23.08%	
4.01.4.01.08.24.42		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung	Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usia Kelurahan Pelintung yang dibayar (bulan)	12.00	110,000,000			12	126,000,000	1	30,000,000	6.25%	23.81%	0.75	30,000,000	6.25%	27.27%	
									361,422,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	7.29%	24.34%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.09.24		<b>Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>85.00</b>	<b>591,200,000</b>	<b>20.00</b>	<b>750,970,000</b>	<b>48</b>	<b>443,280,000.00</b>	<b>2</b>	<b>37,000,000.00</b>	<b>4.17%</b>	<b>14.58%</b>	22.00	787,970,000	25.88%	133.28%	Sungai Sembilan
4.01.4.01.09.24.04		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik		5.00	32,000,000	10.00	52,950,000		23,280,000					10.00	52,950,000	200.00%	165.47%	
4.01.4.01.09.24.45		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	60,600,000			12	60,000,000	1	10,000,000	4.17%	16.67%	0.50	10,000,000	4.17%	16.50%	
4.01.4.01.09.24.46		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	60,600,000			12	60,000,000	1	10,000,000	4.17%	16.67%	0.50	10,000,000	4.17%	16.50%	
4.01.4.01.09.24.47		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	92,400,000			12	84,000,000	1	7,000,000	4.17%	8.33%	0.50	7,000,000	4.17%	7.58%	
4.01.4.01.09.24.48		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Baslim Baru		12.00	195,000,000				156,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
4.01.4.01.09.24.49		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Tertip	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usia yang dibayar (Bulan)	12.00	60,600,000			12	60,000,000	1	10,000,000	4.17%	16.67%	0.50	10,000,000	4.17%	16.50%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan (Kelurahan)			10.00	52,950,000											
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik																
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.03.26	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>		53.75	635,560,585	0.00	-	0	320,565,700	19	82,373,276	5.92%	19.61%	18.77	82,373,276	34.92%	12.96%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.01.4.01.03.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan		8.00	303,887,379			0	160,752,500		11,730,000	0.00%	7.30%	0.00	11,730,000	0.00%	3.86%	
	4.01.4.01.03.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan		100.00	131,673,206			0	79,925,000		6,000,000	0.00%	7.51%	0.00	6,000,000	0.00%	4.56%	
	4.01.4.01.03.26.07	Penyusunan SOP Naskah Dinas	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) (2)	7.00	-			0	79,888,200	0	6,468,926	0.00%	8.10%	0.02	6,468,926	0.29%	#DIV/0!	
	4.01.4.01.03.26.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah (peserta)	100.00	200,000,000			75	99,510,000	19	58,174,350	25.00%	58.46%	18.75	58,174,350	18.75%	29.09%	
									420,075,700				5.92%	19.61%				
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.03.27	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		100.00	400,000,000	0.00	-	0	109,178,000	-	14,220,995	-	13.03%	0.00	14,220,995	0.00%	3.56%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.01.4.01.03.27.06	Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah	Penetapan Batas Antar Daerah dan batas Kec/Kel (Laporan)	1.00	400,000,000			0	109,178,000		14,220,995	0.00%	13.03%	0.00	14,220,995	0.00%	3.56%	
									109,178,000				0.00%	13.03%				
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.03.31	<b>Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar</b>		100.00	2,684,568,230	0.00	-	0	1,589,250,000	1	40,530,000	0.00%	2.55%	0.50	40,530,000	0.50%	1.51%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.01.4.01.03.31.02	Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas		9.00	2,435,113,178				1,487,725,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.01.4.01.03.31.03	Peringatan Hari Kesadaran Nasional		7.00	249,455,052			0	101,525,000	1	40,530,000	0.00%	39.92%	0.50	40,530,000	7.14%	16.25%	
									1,589,250,000				0.00%	2.55%				
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.07.32	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>		85.00	359,110,714	0.00	614,014,265	60	232,500,000	1.25	18,966,828	2.08%	0	1.25	632,981,093	1.47%	176.26%	Bukit Kapur
	4.01.4.01.07.32.03	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagasan Besar	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	46,500,000			12	46,500,000	0	3,910,248	2.08%	8.41%	0.25	3,910,248	0.28%	8.41%	
	4.01.4.01.07.32.04	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	46,500,000			12	46,500,000	0	5,071,700	2.08%	10.91%	0.25	5,071,700	0.28%	10.91%	
	4.01.4.01.07.32.05	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	57,700,000			12	46,500,000	0	4,668,000	2.08%	10.04%	0.25	4,668,000	0.28%	8.09%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.07.32.06	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	46,500,000			12	46,500,000	0	2,636,880	2.08%	5.67%	0.25	2,636,880	0.28%	5.67%	
	4.01.4.01.07.32.07	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	57,700,000			12	46,500,000	0	2,680,000	2.08%	5.76%	0.25	2,680,000	0.28%	4.64%	
			Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)			24.00	614,014,265							24.00	614,014,265	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan							232,500,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		2.08%	8.16%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.05.32	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>		<b>85.00</b>	<b>308,541,800</b>	<b>0.00</b>	<b>540,336,637</b>	<b>48</b>	<b>257,161,120.00</b>	<b>3</b>	<b>63,095,444.00</b>	<b>6.25%</b>	<b>24.54%</b>	3.00	603,432,081	3.53%	195.58%	Dumai Barat
	4.01.4.01.05.32.11	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan STDI	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	73,715,450			12	59,865,280	1	14,990,940	6.25%	25.04%	0.75	14,990,940	6.25%	20.34%	
	4.01.4.01.05.32.12	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	75,635,450			12	61,665,280	1	14,991,300	6.25%	24.31%	0.75	14,991,300	6.25%	19.82%	
	4.01.4.01.05.32.13	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Purnama	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	85,475,450			12	76,965,280	1	19,043,028	6.25%	24.74%	0.75	19,043,028	6.25%	22.28%	
	4.01.4.01.05.32.14	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	73,715,450			12	58,665,280	1	14,070,176	6.25%	23.98%	0.75	14,070,176	6.25%	19.09%	
			Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)			24.00	540,336,637							24.00	540,336,637	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan di 4 Kelurahan (Bulan)			0.00								0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan							257,161,120	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		6.25%	24.54%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.10.32	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>		<b>85.00</b>	<b>388,320,000</b>	<b>0.00</b>	<b>586,543,127</b>	<b>60</b>	<b>263,672,750</b>	<b>2.5</b>	<b>35,448,765</b>	<b>4.17%</b>	<b>13.44%</b>	2.50	621,991,892	2.94%	160.18%	Dumai Kota
	4.01.4.01.10.32.15	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	75,605,000			12	54,862,550	1	6,678,294	4.17%	12.17%	0.50	6,678,294	4.17%	8.83%	
	4.01.4.01.10.32.16	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	83,327,000			12	56,882,550	1	7,543,692	4.17%	13.26%	0.50	7,543,692	4.17%	9.05%	
	4.01.4.01.10.32.17	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukajadi	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	82,469,000			12	56,102,550	1	7,237,435	4.17%	12.90%	0.50	7,237,435	4.17%	8.78%	
	4.01.4.01.10.32.18	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintan	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	78,178,000			12	52,202,550	1	7,177,638	4.17%	13.75%	0.50	7,177,638	4.17%	9.18%	
	4.01.4.01.10.32.19	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	68,741,000			12	43,622,550	1	6,811,706	4.17%	15.62%	0.50	6,811,706	4.17%	9.91%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah operasional Kelurahan yang terpenuhi (bulan)	0.00	-	24.00	586,543,127							24.00	586,543,127	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan							263,672,750	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		4.17%	13.44%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.11.32		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>		<b>100.00</b>	<b>741,770,000</b>	<b>0.00</b>	<b>653,313,622</b>	<b>60</b>	<b>341,412,877</b>	<b>3.5</b>	<b>67,124,832</b>	<b>5.89%</b>	<b>19.66%</b>	3.50	720,438,454	3.50%	97.12%	Dumai Selatan
4.01.4.01.11.32.20		Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	150,000,000	24.00	653,313,622	12	72,031,375	1	15,642,080	6.25%	21.72%	24.75	668,955,702	206.25%	445.97%	
4.01.4.01.11.32.21		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	107,142,000			12	81,391,375	1	14,120,108	6.25%	17.35%	0.75	14,120,108	6.25%	13.18%	
4.01.4.01.11.32.22		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	360,650,000			12	63,823,375	1	14,490,000	6.25%	22.70%	0.75	14,490,000	6.25%	4.02%	
4.01.4.01.11.32.23		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	14,880,000			12	59,479,375	1	8,624,668	4.17%	14.50%	0.50	8,624,668	4.17%	57.96%	
4.01.4.01.11.32.24		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	109,098,000			12	64,687,377	1	14,247,976	6.25%	22.03%	0.75	14,247,976	6.25%	13.06%	
									341,412,877	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		5.89%	19.66%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.06.32		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>		<b>100.00</b>	<b>388,106,425</b>	<b>0.00</b>	<b>552,457,707</b>	<b>400</b>	<b>302,899,570.00</b>	<b>16.25</b>	<b>35,566,280.00</b>	<b>4.07%</b>	<b>11.74%</b>	16.25	588,023,987	16.25%	151.51%	Dumai Timur
4.01.4.01.06.32.25		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285			80	64,095,914	3	7,627,500	3.13%	11.90%	2.50	7,627,500	2.78%	9.83%	
4.01.4.01.06.32.26		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batem	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285			80	55,395,914	3	5,933,252	3.13%	10.71%	2.50	5,933,252	2.78%	7.64%	
4.01.4.01.06.32.27		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285			80	67,455,914	4	8,765,184	4.69%	12.99%	3.75	8,765,184	4.17%	11.29%	
4.01.4.01.06.32.28		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285			80	53,955,914	4	5,512,872	4.69%	10.22%	3.75	5,512,872	4.17%	7.10%	
4.01.4.01.06.32.29		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285			80	61,995,914	4	7,727,472	4.69%	12.46%	3.75	7,727,472	4.17%	9.96%	
			Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (bulan)	0.00	-	24.00	552,457,707	0	-	-	-	0.00%	0.00%	24.00	552,457,707	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan							302,899,570	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		4.07%	11.74%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.08.32		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>		<b>80.00</b>	<b>387,488,200</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>220,944,800</b>	<b>3</b>	<b>23,234,380</b>	<b>6.25%</b>	<b>10.52%</b>	3.00	23,234,380	3.75%	6.00%	Medang Kampai
4.01.4.01.08.32.31		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Guntung	Jumlah operasional Kelurahan Guntung yang terpenuhi (bulan)	12.00	76,452,200			12	53,256,200	1	5,388,276	6.25%	10.12%	0.75	5,388,276	6.25%	7.05%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.08.32.32		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah operasional Kelurahan Teluk Makmur yang terpenuhi (bulan)	12.00	78,194,600			12	54,840,200	1	5,682,064	6.25%	10.36%	0.75	5,682,064	6.25%	7.27%	
4.01.4.01.08.32.33		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mundam	Jumlah operasional Kelurahan Mundam yang terpenuhi (bulan)	12.00	77,323,400			12	54,048,200	1	5,060,480	6.25%	9.36%	0.75	5,060,480	6.25%	6.54%	
4.01.4.01.08.32.34		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pelintung	Jumlah operasional Kelurahan Pelintung yang terpenuhi (bulan)	12.00	79,937,000			12	58,800,200	1	7,103,560	6.25%	12.08%	0.75	7,103,560	6.25%	8.89%	
									220,944,800		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.25%	10.52%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.09.32		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>		<b>85.00</b>	<b>567,252,000</b>	<b>0.00</b>	<b>535,054,801</b>	<b>60</b>	<b>177,630,000</b>	<b>2.5</b>	<b>29,370,000</b>	<b>4.17%</b>	<b>16.53%</b>	2.50	564,424,801	2.94%	99.50%	Sungai Sembilan
4.01.4.01.09.32.37		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal	Tersedianya Dana Dukungan Kelurahan Operasional Tanjung Penyembal (Bulan)	12.00	81,036,000	24.00	535,054,801	12	34,806,000	1	5,754,000	4.17%	16.53%	24.50	540,808,801	204.17%	667.37%	
4.01.4.01.09.32.38		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangsal Aceh	Tersedianya Dana Dukungan Kelurahan Operasional Bangsal Aceh (Bulan)	12.00	81,036,000	0.00	-	12	34,806,000	1	5,754,000	4.17%	16.53%	0.50	5,754,000	4.17%	7.10%	
4.01.4.01.09.32.39		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Gaung	Tersedianya Dana Dukungan Kelurahan Operasional Lubuk Gaung (Bulan)	12.00	81,036,000	0.00	-	12	34,806,000	1	5,754,000	4.17%	16.53%	0.50	5,754,000	4.17%	7.10%	
4.01.4.01.09.32.40		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Baslam Baru	Tersedianya Dana Dukungan Kelurahan Operasional Baslam Baru (Bulan)	12.00	81,036,000	0.00	-	12	34,806,000	1	5,754,000	4.17%	16.53%	0.50	5,754,000	4.17%	7.10%	
4.01.4.01.09.32.41		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Batu Terlip	Tersedianya Dana Dukungan Kelurahan Operasional Batu Terlip (Bulan)	12.00	81,036,000	0.00	-	12	38,406,000	1	6,354,000	4.17%	16.54%	0.50	6,354,000	4.17%	7.84%	
									177,630,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.17%	16.53%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.10.33		<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>		<b>85.00</b>	<b>1,117,583,000</b>	<b>24.00</b>	<b>1,805,493,100</b>	<b>60</b>	<b>959,082,000.00</b>	<b>3.75</b>	<b>216,975,000.00</b>	<b>5.96%</b>	<b>22.62%</b>	27.75	2,022,468,100	32.65%	180.97%	Dumai Kota
4.01.4.01.10.33.01		Pembinaan LPMK dan RT				24.00	1,805,493,100	0	44,182,000			0.00%	0.00%	24.00	1,805,493,100	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.10.33.14		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina (bulan)	12.00	179,500,000			12	163,300,000	1	39,225,000	6.25%	24.02%	0.75	39,225,000	6.25%	21.85%	
4.01.4.01.10.33.15		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina (bulan)	12.00	258,700,000			12	237,100,000	1	56,025,000	6.25%	23.63%	0.75	56,025,000	6.25%	21.66%	
4.01.4.01.10.33.16		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina (bulan)	12.00	249,900,000			12	228,900,000	1	54,825,000	6.25%	23.95%	0.75	54,825,000	6.25%	21.94%	
4.01.4.01.10.33.17		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina (bulan)	12.00	205,900,000			12	187,900,000	1	44,175,000	6.25%	23.51%	0.75	44,175,000	6.25%	21.45%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.10.33.18	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina (bulan)	12	109,100,000			12	97,700,000	1	22,725,000	6.25%	23.26%	0.75	22,725,000	6.25%	20.83%	
									959,082,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		5.96%	22.62%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.07.33	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>		<b>85.00</b>	<b>1,328,600,000</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702,727,680</b>	<b>60</b>	<b>885,900,000.00</b>	<b>2.5</b>	<b>147,650,000.00</b>	<b>4.17%</b>	<b>16.67%</b>	2.50	1,850,377,680	2.94%	139.27%	Bukit Kapur
	4.01.4.01.07.33.02	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Besar	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	242,700,000			12	242,700,000	1	40,450,000	4.17%	16.67%	0.50	40,450,000	4.17%	16.67%	
	4.01.4.01.07.33.03	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	242,700,000			12	242,700,000	1	40,450,000	4.17%	16.67%	0.50	40,450,000	4.17%	16.67%	
	4.01.4.01.07.33.04	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Kampung Baru	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	141,300,000			12	141,300,000	1	23,550,000	4.17%	16.67%	0.50	23,550,000	4.17%	16.67%	
	4.01.4.01.07.33.05	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	141,300,000			12	141,300,000	1	23,550,000	4.17%	16.67%	0.50	23,550,000	4.17%	16.67%	
	4.01.4.01.07.33.06	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	117,900,000			12	117,900,000	1	19,650,000	4.17%	16.67%	0.50	19,650,000	4.17%	16.67%	
			Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina (Bulan)			24.00	1,702,727,680							24.00	1,702,727,680	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembinaan LPMK dan RT							885,900,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		4.17%	16.67%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.05.33	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>		<b>85.00</b>	<b>1,046,399,110</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,693,950</b>	<b>48</b>	<b>711,724,750</b>	<b>3</b>	<b>116,300,000</b>	<b>6.25%</b>	<b>16.34%</b>	3.00	1,524,993,950	3.53%	145.74%	Dumal Barat
	4.01.4.01.05.33.10	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan STDI	Jumlah pengurus LPMK dan ketua RT yang dibina di Kelurahan STDI (Bulan)	12.00	169,700,000			12	151,961,250	1	24,850,000	6.25%	16.35%	0.75	24,850,000	6.25%	14.64%	
	4.01.4.01.05.33.11	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Pangkalan Sesai (Bulan)	12.00	201,500,000			12	167,942,750	1	27,450,000	6.25%	16.34%	0.75	27,450,000	6.25%	13.62%	
	4.01.4.01.05.33.12	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Purnama (Bulan)	12.00	277,100,000			12	239,859,500	1	39,150,000	6.25%	16.32%	0.75	39,150,000	6.25%	14.13%	
	4.01.4.01.05.33.13	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Bagan Keladi (Bulan)	12.00	169,700,000			12	151,961,250	1	24,850,000	6.25%	16.35%	0.75	24,850,000	6.25%	14.64%	
			Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	58,699,110	24.00	1,408,693,950							24.00	1,408,693,950	200.00%	2399.86%	
		Pembinaan LPMK dan RT							711,724,750	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		6.25%	16.34%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.11.33	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>		<b>100.00</b>	<b>1,047,200,000</b>	<b>24.00</b>	<b>1,826,066,975</b>	<b>72</b>	<b>969,870,000.00</b>	<b>2.75</b>	<b>151,550,000.00</b>	<b>4.05%</b>	<b>15.63%</b>	26.75	1,977,616,975	26.75%	188.85%	Dumai Selatan
	4.01.4.01.11.33.01	Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah Pengurus Ketua LPMK dan RT Kecamatan yang dibina (Bulan)	12.00	35,000,000	24.00	1,826,066,975	12	55,770,000	0	-	2.08%	0.00%	24.25	1,826,066,975	202.08%	5217.33%	
	4.01.4.01.11.33.19	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	12.00	189,100,000			12	189,100,000	1	31,350,000	4.17%	16.58%	0.50	31,350,000	4.17%	16.58%	
	4.01.4.01.11.33.20	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	12.00	134,150,000			12	267,600,000	1	44,350,000	4.17%	16.57%	0.50	44,350,000	4.17%	33.06%	
	4.01.4.01.11.33.21	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	12.00	165,550,000			12	165,550,000	1	27,450,000	4.17%	16.58%	0.50	27,450,000	4.17%	16.58%	
	4.01.4.01.11.33.22	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari (Bulan)	12.00	134,150,000			12	134,150,000	1	22,250,000	4.17%	16.59%	0.50	22,250,000	4.17%	16.59%	
	4.01.4.01.11.33.23	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah (Bulan)	12.00	157,700,000			12	157,700,000	1	26,150,000	4.17%	16.58%	0.50	26,150,000	4.17%	16.58%	
									969,870,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.05%	15.63%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.06.33	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>		<b>100.00</b>	<b>1,178,524,700</b>	<b>24.00</b>	<b>1,594,200,000</b>	<b>72</b>	<b>895,500,000</b>	<b>4</b>	<b>130,725,000</b>	<b>5.72%</b>	<b>14.60%</b>	28.00	1,724,925,000	28.00%	146.36%	Dumai Timur
	4.01.4.01.06.33.01	Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina (bulan)	90.00	47,395,700	24.00	1,594,200,000	12	9,600,000	1	1,350,000	4.17%	14.06%	24.50	1,595,550,000	27.22%	3366.44%	
	4.01.4.01.06.33.24	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai (bulan)	Jumlah RT dan LPMK yang dibina di Kelurahan Teluk Binjai (bulan)	90.00	249,839,000			12	195,900,000	1	32,650,000	6.25%	16.67%	0.75	32,650,000	0.83%	13.07%	
	4.01.4.01.06.33.25	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah RT dan LPMK yang dibina di Kelurahan Bukit Batrem (bulan)	90.00	200,639,000			12	156,900,000	1	26,150,000	6.25%	16.67%	0.75	26,150,000	0.83%	13.03%	
	4.01.4.01.06.33.26	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah RT dan LPMK yang dibina di Kelurahan Jaya Mukti (bulan)	90.00	279,353,000			12	219,300,000	1	18,275,000	4.17%	8.33%	0.50	18,275,000	0.56%	6.54%	
	4.01.4.01.06.33.27	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah RT dan LPMK yang dibina di Kelurahan Tanjung Palas (bulan)	90.00	180,973,000			12	141,300,000	1	23,550,000	6.25%	16.67%	0.75	23,550,000	0.83%	13.01%	
	4.01.4.01.06.33.28	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah RT dan LPMK yang dibina di Kelurahan Buluh Kasap (bulan)	90.00	220,325,000			12	172,500,000	1	28,750,000	6.25%	16.67%	0.75	28,750,000	0.83%	13.05%	
									895,500,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.72%	14.60%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.07.42		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan		85.00	102,500,000	0.00	97,885,000	0	50,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	97,885,000	0.00%	95.50%	Bukti Kapur
4.01.4.01.07.42.01		Pembinaan PKK Kecamatan		12.00	50,000,000	6.00	97,885,000		50,000,000					6.00	97,885,000	50.00%	195.77%	
									50,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.05.42		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan		85.00	115,000,000	24.00	113,010,500	5	57,650,000.00	-	3,837,500	0.00%	6.66%	24.00	116,848,000	28.24%	101.61%	Dumai Barat
4.01.4.01.05.42.01		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah tim penggerak PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan (TP PKK)	5.00	65,000,000	24.00	113,010,500	5	57,650,000	-	3,837,500	0.00%	6.66%	24.00	116,848,000	480.00%	179.77%	
									57,650,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	6.66%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.11.42		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan		100.00	84,986,948	0.00	165,450,350	6	83,186,948.00	0	11,387,250.00	0.00%	13.69%	0.00	176,837,600	0.00%	208.08%	Dumai Selatan
4.01.4.01.11.42.01		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan dan Kecamatan (TP. PKK)	6.00	84,986,948	6.00	165,450,350	6	83,186,948	-	11,387,250	0.00%	13.69%	6.00	176,837,600	100.00%	208.08%	
									83,186,948			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	13.69%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.06.42		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan		100.00	66,550,000	24.00	97,781,000	100	50,000,000	4	5,400,000	3.75%	10.80%	27.75	103,181,000	27.75%	155.04%	Dumai Timur
4.01.4.01.06.42.01		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Penggerak PKK yang dibina (%)	90.00	66,550,000	24.00	97,781,000	100	50,000,000	4	5,400,000	3.75%	10.80%	27.75	103,181,000	30.83%	155.04%	
									50,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3.75%	10.80%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.08.42		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan		85.00	70,000,000	0.00	-	5	50,413,000	1	4,730,000	15.00%	9.38%	0.75	4,730,000	0.88%	6.76%	Medang Kampai
4.01.4.01.08.42.01		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK)	5.00	70,000,000			5	50,413,000	1	4,730,000	15.00%	9.38%	0.75	4,730,000	15.00%	6.76%	
									50,413,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	15.00%	9.38%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.09.42		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan		85.00	55,800,000	0.00	93,349,818	0	50,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	93,349,818	0.00%	167.29%	Sungai Sembilan
4.01.4.01.09.42.01		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah TP PKK yang dibina di kecamatan dan kelurahan (TP PKK)		55,800,000	6.00	45,399,400		50,000,000					6.00	45,399,400	#DIV/0!	81.36%	
			Laporan Kegiatan PKK Selama Satu Tahun (Laporan Kegiatan)	1.00		1.00	47,950,418							1.00	47,950,418	100.00%	#DIV/0!	
									50,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	4.01.4.01.10.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		85.00	60,000,000	0.00	-	0	42,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumail Kota
	4.01.4.01.10.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan		3.00	60,000,000			0	42,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									42,000,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.1.02.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	358,591,060	0.00	-	1	188,342,400	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
	4.01.1.02.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional (kali)	1.00	358,591,060			1	188,342,400	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									188,342,400			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.05.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	45,000,000	0.00	-	2	14,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4.01.4.05.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar		3.00	45,000,000			2	14,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									14,000,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.1.05.02.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		3.00	50,000,000	0.00	-	0	41,140,100	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4.01.1.05.02.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar		3.00	50,000,000				41,140,100					0.00	-	0.00%	0.00%	
									41,140,100			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.04.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	80,000,000	0.00	-	3	80,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	4.01.4.04.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah kegiatan penyebarluasan Informasi pemerintah daerah (kegiatan)	0.00	80,000,000			3	80,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	0.00%	
									80,000,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.03.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		90.00	100,000,000	0.00	-	90	79,300,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.01.4.03.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (%)	90.00	100,000,000			90	79,300,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.1.03.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	160,000,000			5	98,200,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	4.01.1.03.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari - hari Besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan (Kegiatan)	5.00	160,000,000			5	98,200,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									98,200,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.2.02.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		80.00	50,000,000			3	29,760,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	4.01.2.02.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai kelling Idul Fitri dan Idul Adha (kegiatan)	3.00	50,000,000			3	29,760,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									29,760,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.2.09.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	60,000,000				55,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Perhubungan
	4.01.2.09.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan		3.00	60,000,000				55,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									55,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.3.01.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		3.00	45,000,000			3	45,000,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Perikanan
	4.01.3.01.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Informasi pembangunan melalui event dan pawai (kall)	3.00	45,000,000			3	45,000,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									45,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.2.11.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	50,000,000			1	50,000,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	4.01.2.11.01.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terlaksananya pameran dumai expo dan hari - hari besar keagamaan (kall)	1.00	50,000,000			1	50,000,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									50,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.2.17.01.43	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	60,000,000			3	50,000,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.2.17.01.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah event yang dilaksanakan (event)	3.00	60,000,000			3	50,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									50,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.1.04.01.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100	75,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
4.01.1.04.01.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan		100	75,000,000			0	70,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									70,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.1.06.01.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	50,000,000			100	49,700,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	Dinas Sosial
4.01.1.06.01.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Penyebarluasan informasi OPD pada masyarakat (%)	100.00	50,000,000			100	49,700,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									49,700,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.2.01.01.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	35,000,000			3	30,000,000					0.00		0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01.2.01.01.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Event)	3.00	35,000,000			3	30,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									30,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.02.01.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		2.00	15,680,000			2	15,680,000					0.00		0.00%	0.00%	Inspektoral
4.01.4.02.01.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Pelaksanaan Pawai Takbir (Kali)	2.00	15,680,000			2	15,680,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									15,680,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.1.05.03.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	65,000,000			2	65,000,000					0.00		0.00%	0.00%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.1.05.03.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terseleenggaranya informasi dalam ajang Dumai Expo dan Pawai Ta'rif (bulan)	2.00	65,000,000			2	65,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									65,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.1.02.02.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	422,500,000				97,600,000					0.00		0.00%	0.00%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
4.01.1.02.02.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan		100.00	422,500,000				97,600,000					0.00		0.00%	0.00%	
									97,600,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.04.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		4.00	252,091,470				128,500,000					0.00		0.00%	0.00%	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan		4.00	252,091,470				128,500,000					0.00		0.00%	0.00%	
									128,500,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.07.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		85.00	65,000,000				45,200,000					0.00		0.00%	0.00%	Bukit Kapur
4.01.4.01.07.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan		90.00	65,000,000				45,200,000					0.00		0.00%	0.00%	
									45,200,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.05.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		85.00	60,000,000			3	43,000,000					0.00		0.00%	0.00%	Dumai Barat
4.01.4.01.05.43.03		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan (Kegiatan)	3.00	60,000,000			3	43,000,000	1,550,000		0.00%	3.60%	0.00	1,550,000	0.00%	2.58%	
									43,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	3.60%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.01.4.01.11.43		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>		100.00	44,100,000			3	44,100,000					0.00		0.00%	0.00%	Dumai Selatan

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	4.01.4.01.11.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah Hari-hari besar yang dilaksanakan (Kegiatan)	3.00	44,100,000			3	44,100,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									44,100,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.06.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		85.00	44,770,000			3	36,760,000					0.00		0.00%	0.00%	Dumai Timur
	4.01.4.01.06.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah informasi dan hari-hari besar yang dilaksanakan (kegiatan)	90.00	44,770,000			3	36,760,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									36,760,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.08.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		75.00	100,000,000			12	45,000,000					0.00		0.00%	0.00%	Medang Kampai
	4.01.4.01.08.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi publik yang diadakan (bulan)	12.00	100,000,000			12	45,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									45,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.09.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		85	50,000,000				39,000,000					0.00		0.00%	0.00%	Sungai Sembilan
	4.01.4.01.09.43.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan		8.00	50,000,000				39,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
									39,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.61	Program Reformasi Birokrasi			360,000,000				149,960,800					0.00		#DIV/0!	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.01.4.01.03.61.01	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Dumai	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kota Dumai (1)					0	149,960,800			0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
									149,960,800			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
														0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.01.3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		292.18	500,000,000	104.00	334,975,323	800241	1,396,179,637	8.75	19,800,000	1.16%	1.42%	112.75	354,775,323	38.59%	70.96%	Dinas Perikanan
	3.01.3.01.01.20.01	Pengembangan bibit ikan unggul	Produksi bibit ikan unggul (ekor)	10.00	159,731,400			800000	259,731,400		10,500,000	0.00%	4.04%	0.00	10,500,000	0.00%	6.57%	
		Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Operasional pembinaan pelaku usaha perikanan (kali)	38	137,323,600	44.00	230,010,000	80		5		6.25%		49.00	239,310,000	128.95%	174.27%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.01.3.01.01.20.02		Terpenuhinya operasional pendamping pelaku usaha perikanan (kpk)	7.00		0.00		60	137,323,600	4	9,300,000	6.25%		3.75		53.57%	#DIV/0!		
		Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terpenuhinya biaya operasional pembinaan (kall)	25.00	89,590,000	60.00	65,607,363	10				0.00%		60.00	65,607,363	240.00%	73.23%		
	3.01.3.01.01.20.03		Terlaksananya pengembangan prasarana budidaya (unit)	37.00				1	236,350,737				0.00%	0.00		0.00%	#DIV/0!		
	3.01.3.01.01.20.04	Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan	Terlaksananya pelatihan pembudidaya ikan (peserta)	40.00	43,355,000	0.00	38,955,000	20	43,355,000			0.00%	0.00%	0.00	38,955,000	0.00%	89.85%		
	3.01.3.01.01.20.05	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan dalam 1 tahun (kall)	31.00	70,000,000			70	63,040,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya pakan untuk budidaya (kg)		348,640,000		402,960,000		656,378,900					348640000.00	402,960	#DIV/0!	#REF!		
			Tersedianya peralatan pembenihan (item)				0.00							0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
									739,800,737			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	1.16%	1.42%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.01.3.01.01.21	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>		<b>334.77</b>	<b>400,000,000</b>	<b>129.00</b>	<b>630,867,000</b>	<b>434</b>	<b>1,017,787,000</b>	<b>18.75</b>	<b>7,800,000</b>	<b>4.14%</b>	<b>0.00%</b>	147.75	638,667,000	44.13%	159.67%	Dinas Perikanan	
		Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Terlaksananya peningkatan sarana kelompok (kelompok)	36.00	400,000,000			2				0.00%		0.00	7,800,000	0.00%	1.95%		
	3.01.3.01.01.21.01		honorarium tenaga pendamping (ob)	36.00				36	386,920,000		2	7,800,000	6.25%	2.02%	2.25		6.25%	#DIV/0!	
			Terlaksananya operasional pendampingan nelayan (kall)	20.00				267			17		6.18%		16.50		82.50%	#DIV/0!	
		Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Operasional pembinaan kelompok nelayan (kall)	0.00		125.00	272,780,000	125	272,780,000					125.00	272,780,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	Terlaksananya operasional pabrik es (unit)	0.00		4.00	358,087,000	4	358,087,000					4.00	358,087,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
									386,920,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.14%	0.00%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.01.3.01.01.23	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>		<b>103.27</b>	<b>75,400,000</b>	<b>8.00</b>	<b>49,491,200</b>	<b>4</b>	<b>67,700,000</b>					8.00	49,491,200	7.75%	65.64%	Dinas Perikanan	
		Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya surevei nilai konsumsi ikan (kall)	4.00	75,400,000	7.00	49,491,200	2				0.00%		7.00	49,491,200	175.00%	65.64%		
	3.01.3.01.01.23.02		Terlaksananya lomba masak menu serba ikan (kall)	1.00				2	67,700,000				0.00%		1.00		100.00%	#DIV/0!	
									67,700,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD sampai dengan RPKD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3.01.3.01.01.24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		292.18	329,629,923	218.40	376,536,184	1	223,378,609					218.40	376,536,184	74.75%	114.23%	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.24.02		Eksistensi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan	peningkatan prasarana pengembangan kawasan budidaya (unit)	36.00	329,629,923	4.00	376,536,184	1	223,378,609			0.00%	0.00%	4.00	376,536,184	11.11%	114.23%	
								223,378,609		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
														0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
4.04.4.04.02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		168.00	3,664,000,000	478.33	6,894,745,670	156	3,083,349,250.00	9	343,684,800.00	5.74%	11.15%	487.33	7,238,430,470	290.08%	197.56%	Badan Pendapatan Daerah
4.04.4.04.02.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12	9,000,000	24.00	13,500,000	12	5,000,000	1	4,998,000	6.25%	99.96%	24.75	18,498,000	206.25%	205.53%	
4.04.4.04.02.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik (Bulan)	12	445,000,000	24.00	672,448,144	12	440,500,000	1	60,874,513	6.25%	13.82%	24.75	733,322,657	206.25%	164.79%	
4.04.4.04.02.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik (Bulan)	12	200,000,000	88.40	915,030,210	12	59,600,000	-	-	0.00%	0.00%	88.40	915,030,210	736.67%	457.52%	
4.04.4.04.02.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan baik (Bulan)	12	350,000,000	101.93	606,843,479	12	250,970,000	1	19,482,609	6.25%	7.76%	102.68	626,326,088	855.67%	178.95%	
4.04.4.04.02.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor dengan baik (Bulan)	12	320,000,000	24.00	647,050,000	12	304,131,600	1	47,600,000	6.25%	15.65%	24.75	694,650,000	206.25%	217.08%	
4.04.4.04.02.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12	250,000,000	24.00	274,193,500	12	156,000,000	1	-	6.25%	0.00%	24.75	274,193,500	206.25%	109.68%	
4.04.4.04.02.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Terpakai Dalam 1 Tahun (Bulan)	12	400,000,000	24.00	746,181,000	12	388,202,400	1	-	6.25%	0.00%	24.75	746,181,000	206.25%	186.55%	
4.04.4.04.02.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	200,000,000	24.00	298,276,000		194,425,250					24.00	298,276,000	200.00%	149.14%	
4.04.4.04.02.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik (Bulan)	12	60,000,000	24.00	45,175,000	12	13,578,000	1	3,730,000	6.25%	27.47%	24.75	48,905,000	206.25%	81.51%	
4.04.4.04.02.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan baik (Bulan)	12	30,000,000	24.00	54,515,000	12	28,500,000	1	3,625,000	6.25%	12.72%	24.75	58,140,000	206.25%	193.80%	
4.04.4.04.02.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (Bulan)	12	100,000,000	24.00	98,850,000	12	68,650,000	1	5,930,000	6.25%	8.64%	24.75	104,780,000	206.25%	104.78%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.04.4.04.02.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Anggaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Bulan)	12	850,000,000	24.00	1,722,631,337	12	770,250,000	1	131,704,678	6.25%	17.10%	24.75	1,854,336,015	206.25%	218.16%	
4.04.4.04.02.01.25		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor (Bulan)	12	250,000,000	24.00	459,252,000	12	233,142,000	1	37,340,000	6.25%	16.02%	24.75	496,592,000	206.25%	198.64%	
4.04.4.04.02.01.26		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12	200,000,000	24.00	340,800,000	12	170,400,000	1	28,400,000	6.25%	16.67%	24.75	369,200,000	206.25%	184.60%	
									3,083,349,250	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		5.74%	11.15%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.10.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>85.00</b>	<b>995,340,000</b>	<b>0.00</b>	<b>1,733,761,609</b>	<b>144</b>	<b>830,952,532</b>	<b>7.5</b>	<b>202,680,350</b>	<b>5.92%</b>	<b>24.39%</b>	7.50	1,936,441,959	8.82%	194.55%	Dumai Kota
4.01.4.01.10.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya (bulan)	12.00	6,000,000	12.00	19,950,000	12	3,300,000	1	822,000	6.25%	24.91%	12.75	20,772,000	106.25%	346.20%	
4.01.4.01.10.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy (bulan)	12.00	13,500,000	12.00	79,612,050	12	92,700,000	1	23,804,950	6.25%	25.68%	12.75	103,417,000	106.25%	766.05%	
4.01.4.01.10.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12.00	70,360,000	12.00	68,050,000	12	53,816,000	1	2,800,000	4.17%	5.20%	12.50	70,850,000	104.17%	100.70%	
4.01.4.01.10.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas (bulan)	12.00	6,315,200			12	4,600,000	1	280,500	6.25%	6.10%	0.75	280,500	6.25%	4.44%	
4.01.4.01.10.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (bulan)	12.00	203,229,000	24.00	354,684,000	12	175,975,000	1	28,000,000	6.25%	15.91%	24.75	382,684,000	206.25%	188.30%	
4.01.4.01.10.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) kantor (bulan)	12.00	67,259,800	24.00	104,823,150	12	51,707,520	1	8,839,300	6.25%	17.09%	24.75	113,662,450	206.25%	168.99%	
4.01.4.01.10.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	32,669,000	24.00	55,950,900	12	19,440,362	1	4,389,600	6.25%	22.58%	24.75	60,340,500	206.25%	184.70%	
4.01.4.01.10.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan Alat Listrik Kantor (bulan)	12.00	6,500,000	24.00	6,847,300	12	5,078,150	-	855,000	0.00%	16.84%	24.00	7,702,300	200.00%	118.50%	
4.01.4.01.10.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (bulan)	12.00	25,707,000	24.00	40,815,000	12	19,780,000	1	1,850,000	4.17%	9.35%	24.50	42,665,000	204.17%	165.97%	
4.01.4.01.10.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan rapat, tamu dan kegiatan (bulan)	12.00	75,000,000	24.00	72,445,000	12	43,355,500	1	7,023,200	4.17%	16.20%	24.50	79,468,200	204.17%	105.96%	
4.01.4.01.10.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas (bulan)	12.00	280,000,000	66.00	432,754,231	12	198,000,000	1	83,215,800	6.25%	42.03%	66.75	515,970,031	556.25%	184.28%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD sampai dengan RPKD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	4.01.4.01.10.01.25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar (bulan)	12.00	172,800,000	24.00	325,722,400	12	163,200,000	1	40,800,000	6.25%	25.00%	24.75	366,522,400	206.25%	212.11%	
									830,952,532			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.92%	24.39%				
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>2,779,663,367</b>	<b>100.00</b>	<b>4,507,695,368</b>	<b>13576</b>	<b>2,495,343,685</b>	<b>851</b>	<b>541,798,147</b>	<b>5.17%</b>	<b>19.50%</b>	950.75	5,049,493,515	950.75%	181.66%	Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian listrik, telepon, WI-FI dan air dalam 1 tahun (bulan)	12.00	300,882,680	24.00	280,959,175	12		1		6.25%		24.75	327,785,729	206.25%	108.94%	
			Jumlah pemakaian listrik, telepon, WI-FI dan air dalam 1 tahun (bulan)			24.00		12	230,600,000	1	46,826,554	6.25%		24.75		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah pemakaian listrik, telepon, WI-FI dan air dalam 1 tahun (bulan)			24.00		12		1		6.25%		24.75		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah pemakaian listrik, telepon, WI-FI dan air dalam 1 tahun (bulan)			24.00		12		1		6.25%		24.75		#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (Item)	3.00	57,291,876	9.00	447,414,500	2	25,500,000	-	-	0.00%	0.00%	9.00	447,414,500	300.00%	780.94%	
	1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara periznannya dalam 1 tahun (unit)	10.00	23,607,150	18.00	26,943,845	10	23,142,000	1	2,309,000	5.00%	9.98%	18.50	29,252,845	185.00%	123.92%	
	1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan)	12.00	318,454,212	24.00	583,890,000	12	312,179,490	1	58,939,000	6.25%	18.88%	24.75	642,829,000	206.25%	201.86%	
	1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun (bulan)	12.00	405,137,058	24.00	428,207,000	12	377,581,000	-	-	0.00%	0.00%	24.00	428,207,000	200.00%	105.69%	
	1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun (bulan)	12.00	67,570,300	24.00	108,490,000	12	64,338,900	-	-	0.00%	0.00%	24.00	108,490,000	200.00%	160.56%	
	1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun (bulan)	12.00	8,529,650	24.00	23,424,000	12	12,329,570	3	11,440,000	25.00%	92.79%	27.00	34,864,000	225.00%	408.74%	
	1.02.1.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun (bulan)	12.00	5,244,223	24.00	18,374,000	12	5,140,975	3	4,731,000	25.00%	92.03%	27.00	23,105,000	225.00%	440.58%	
	1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun (exp)	6480.00	98,156,050	19440.00	103,670,000	12960	42,000,000	810	4,880,000	6.25%	11.62%	20250.00	108,550,000	312.50%	110.59%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.1.02.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun (galon)	752.00	55,652,818	1298.00	63,990,000	450		28		6.22%		1326.00	72,310,000	176.33%	129.93%	
			Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun (bulan)	11		22.00		11	54,556,250	1	8,320,000	4.55%	15.25%	22.50		204.55%	#DIV/0!	
			Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu selama 1 tahun (bulan)	11		22.00		11		1		4.55%		22.50		204.55%	#DIV/0!	
1.02.1.02.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun (bulan)	12.00	861,131,500	24.00	1,438,372,848	12	789,975,500	1	316,002,593	6.25%	40.00%	24.75	1,754,375,441	206.25%	203.73%	
1.02.1.02.01.01.19		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan)	12.00	578,005,850	23.00	983,960,000	12	558,000,000	1	88,350,000	6.25%	15.83%	23.75	1,072,310,000	197.92%	185.52%	
									2,495,343,685		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.17%	19.50%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.05.4.05.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>1,605,726,500</b>	<b>0.00</b>		<b>843.00</b>	<b>1,514,079,500</b>	<b>45.25</b>	<b>280,877,956</b>	<b>5.74%</b>	<b>18.55%</b>	45.25	280,877,956	45.25%	17.49%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01.01.01		Penyediaan jasa sural menyurat		500.00	6,500,000			700	5,300,000	37	1,341,000	5.32%	25.30%	37.25	1,341,000	7.45%	20.63%	
4.05.4.05.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12.00	33,400,000			12	31,760,000	1	8,034,384	6.25%	25.30%	0.75	8,034,384	6.25%	24.06%	
4.05.4.05.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor		8.00	167,000,000			12	258,088,000	1	39,672,000	6.25%	15.37%	0.75	39,672,000	9.38%	23.76%	
4.05.4.05.01.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		50.00	61,400,000			12	54,700,000	1	13,650,000	6.25%	24.95%	0.75	13,650,000	1.50%	22.23%	
4.05.4.05.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor		12.00	119,800,000			12	107,832,000	1	26,952,000	6.25%	24.99%	0.75	26,952,000	6.25%	22.50%	
4.05.4.05.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12.00	122,975,000			12	117,099,000	1	29,155,000	6.25%	24.90%	0.75	29,155,000	6.25%	23.71%	
4.05.4.05.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12.00	31,080,400			12	23,752,200	1	5,928,700	6.25%	24.96%	0.75	5,928,700	6.25%	19.08%	
4.05.4.05.01.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		24.00	198,040,000			24	194,023,000	1	11,596,350	2.08%	5.98%	0.50	11,596,350	2.08%	5.86%	
4.05.4.05.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10.00	36,840,000			12	29,675,200	1	3,600,000	6.25%	12.13%	0.75	3,600,000	7.50%	9.77%	
4.05.4.05.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman		11.00	69,894,000			11	61,534,000	1	11,982,300	6.82%	19.47%	0.75	11,982,300	6.82%	17.14%	
4.05.4.05.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		120.00	477,097,100			12	467,116,100	1	105,166,222	6.25%	22.51%	0.75	105,166,222	0.63%	22.04%	
4.05.4.05.01.01.25		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		7.00	167,200,000			12	163,200,000	1	23,800,000	6.25%	14.58%	0.75	23,800,000	10.71%	14.23%	
									1,514,079,500		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.74%	18.55%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>95.00</b>	<b>899,809,680</b>	<b>75.00</b>	<b>1,180,250,223</b>	<b>123</b>	<b>582,670,329</b>	<b>40.75</b>	<b>111,921,804</b>	<b>5.48%</b>	<b>19.21%</b>	115.75	1,292,172,027	121.84%	143.61%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.02.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000 dan 6000 (650)	800.00	4,639,635	1141.00	4,467,000	0	3,300,000	31	600,000	0.00%	18.18%	1172.25	5,067,000	146.53%	109.21%	
1.05.1.05.02.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sambungan saluran telepon, air, listrik dan tagihan internet kantor (Bulan)	12.00	113,118,720	22.00	104,793,758	12	93,600,000	1	9,011,425	6.25%	9.63%	22.75	113,805,183	189.58%	100.61%	
1.05.1.05.02.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pelugas Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	94,732,283	8.00	137,049,000	12	74,343,000	1	9,800,000	6.25%	13.18%	8.75	146,849,000	72.92%	155.01%	
1.05.1.05.02.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diservis (unit)	24.00	20,586,610	11.40	7,145,000	23	5,210,000	1	790,500	4.35%	15.17%	12.40	7,935,500	51.67%	38.55%	
1.05.1.05.02.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Kebutuhan ATK (12)	12.00	92,267,101	24.00	114,844,500	0	61,435,400	1	11,761,900	0.00%	19.15%	24.75	126,606,400	206.25%	137.22%	
1.05.1.05.02.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak (12)	12.00	32,286,367	22.00	12,647,000	0	5,837,015	1	853,000	0.00%	14.61%	22.75	13,500,000	189.58%	41.81%	
1.05.1.05.02.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12.00	4,833,378	24.00	6,695,000		1,781,200					24.00	6,695,000	200.00%	138.52%	
1.05.1.05.02.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan (media/surat kabar)	8.00	16,478,352	16.00	19,243,000	8	14,064,000	1	1,994,000	6.25%	14.18%	16.50	21,237,000	206.25%	128.88%	
1.05.1.05.02.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang dilaksanakan (8)	12.00	29,503,689	17.00	11,854,500	0	16,583,214	1	1,393,500	0.00%	8.40%	17.50	13,248,000	145.83%	44.90%	
1.05.1.05.02.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	58.00	382,427,545	107.00	551,896,465	44	204,142,500	3	59,117,479	6.82%	28.96%	110.00	611,013,944	189.66%	159.77%	
1.05.1.05.02.01.22		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor (bulan)	12.00	70,536,000	6.00	128,775,000	12	63,974,000	1	10,200,000	6.25%	15.94%	6.75	138,975,000	56.25%	197.03%	
1.05.1.05.02.01.23		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan perkantoran (bulan)	12.00	38,400,000			12	38,400,000	1	6,400,000	6.25%	16.67%	0.75	6,400,000	6.25%	16.67%	
									582,670,329			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.48%	19.21%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.04.4.04.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>2,955,962,364</b>	<b>258.00</b>	<b>4,076,131,057</b>	<b>155</b>	<b>2,713,179,239</b>	<b>9.75</b>	<b>285,581,988</b>	<b>6.26%</b>	<b>10.53%</b>	267.75	4,361,713,045	267.75%	147.56%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat (Bulan)	12.00	15,000,000	12.00	74,160,082	12	82,500,000	1	4,300,000	6.25%	5.21%	12.75	78,460,082	106.25%	523.07%	
4.04.4.04.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	50,000,000	12.00	32,598,802	12	50,000,000	1	4,610,000	6.25%	9.22%	12.75	37,208,802	106.25%	74.42%	
4.04.4.04.01.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan pembayaran jasa peralatan kantor (Bulan)	12.00	34,560,000	24.00	100,365,540	12	33,868,800	1	-	6.25%	0.00%	24.75	100,365,540	206.25%	290.41%	
4.04.4.04.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah nuangan yang bersih dan nyaman (Bulan)	12.00	200,000,000	12.00	118,089,600	12	190,818,500	1	16,455,000	6.25%	8.62%	12.75	134,544,600	106.25%	67.27%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.04.4.04.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12.00	94,850,000	24.00	120,820,500	12	94,850,000	1	11,100,000	6.25%	11.70%	24.75	131,920,500	206.25%	139.08%	
	4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan (Bulan)	12.00	125,000,000	24.00	284,314,730	12	121,250,000	1	18,447,600	6.25%	15.21%	24.75	302,762,330	206.25%	242.21%	
	4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan (Bulan)	12.00	122,450,000	24.00	183,684,400	12	118,776,500	1	18,980,000	6.25%	15.98%	24.75	202,664,400	206.25%	165.51%	
	4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan (Bulan )	12.00	82,008,000	24.00	114,872,400	12	60,287,760	1	4,516,000	6.25%	7.49%	24.75	119,388,400	206.25%	145.58%	
	4.04.4.04.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan (Bulan)	12.00	920,894,364	24.00	1,034,152,650	12	877,752,179	1	-	6.25%	0.00%	24.75	1,034,152,650	206.25%	112.30%	
	4.04.4.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Bulan)	12.00	19,400,000	20.00	24,840,200	12	15,450,000	1	890,000	6.25%	5.76%	20.75	25,730,200	172.92%	132.63%	
	4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diperlukan (Bulan)	11.00	40,000,000	22.00	56,567,000	11	39,157,500	1	2,833,000	6.82%	7.23%	22.75	59,400,000	206.82%	148.50%	
	4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan)	12.00	960,000,000	24.00	1,796,790,153	12	828,750,000	1	190,350,388	6.25%	22.97%	24.75	1,987,140,541	206.25%	206.99%	
	4.04.4.04.01.01.25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah keamanan kantor (Bulan)	12.00	200,000,000	12.00	134,875,000	12	199,718,000	1	13,100,000	6.25%	6.56%	12.75	147,975,000	106.25%	73.99%	
								2,713,179,239	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			6.26%	10.53%					
									<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.03.4.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>2,470,000,000</b>	<b>1663.00</b>	<b>3,707,591,145</b>	<b>238</b>	<b>2,021,683,880</b>	<b>14</b>	<b>404,314,046</b>	<b>6.18%</b>	<b>20.00%</b>	1677.00	4,111,905,191	1677.00%	166.47%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat (Bulan)	12.00	3,620,000	1200.00	3,600,000	12	1,800,000	1	-	6.25%	0.00%	1200.75	3,600,000	10006.25%	99.45%	
	4.03.4.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas (Unit)	27.00	55,230,000			25	44,000,000	1	2,842,760	3.00%	6.46%	0.75	2,842,760	2.78%	5.15%	
	4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12.00	125,550,000	12.00	214,625,900	12	117,097,000	1	33,097,000	6.25%	28.26%	12.75	247,722,900	106.25%	197.31%	
	4.03.4.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	104.00	84,710,000	10.00	75,069,000	93	64,200,000	6	3,750,000	6.18%	5.84%	15.75	78,819,000	15.14%	93.05%	
	4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	199,800,000	24.00	396,795,415	12	173,806,000	1	-	6.25%	0.00%	24.75	396,795,415	206.25%	198.60%	
	4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	63,000,000	24.00	97,765,200	12	41,837,600	1	25,100,320	6.25%	59.99%	24.75	122,865,520	206.25%	195.02%	
	4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	12.00	111,000,000	24.00	47,221,000	12	38,343,400	1	19,171,400	6.25%	50.00%	24.75	66,392,400	206.25%	59.81%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.2.13.01.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka penunjang operasional kantor (unit)	10	35,422,252	1.00	182,321,000	4	40,274,844	0	12,220,000	6.25%	30.34%	1.25	194,541,000	12.50%	549.21%	
2.13.2.13.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan (exemplar)	20	8,700,000	30.00	28,410,000	20	8,640,000	1	1,330,000	3.75%	15.39%	30.75	29,740,000	153.75%	341.84%	
2.13.2.13.01.01.16		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman (bulan)	12	21,850,000	24.00	43,745,000	12	21,420,000	1	3,925,000	6.25%	18.32%	24.75	47,670,000	206.25%	218.17%	
2.13.2.13.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makan dan minum rapat dan tamu (bulan)	12	32,458,200	24.00	60,402,000	12	31,260,000	1	9,501,000	6.25%	30.39%	24.75	69,903,000	206.25%	215.36%	
2.13.2.13.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas (bulan)	12	583,016,717	68.00	899,309,009	12	527,998,806	1	257,517,596	6.25%	48.77%	68.75	1,156,826,605	572.92%	198.42%	
2.13.2.13.01.01.19		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah bulan jasa keamanan kantor selama 1 tahun (bulan)	12	387,065,124	24.00	130,410,000	12	345,596,800	1	57,028,900	6.25%	16.50%	24.75	187,438,900	206.25%	48.43%	
2.13.2.13.01.01.20		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan tenaga honoror yang dibayarkan (bulan)	12	58,722,800	24.00	110,110,000	12	56,994,000	1	10,800,000	6.25%	18.95%	24.75	120,910,000	206.25%	205.90%	
									1,849,855,944	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		5.70%	27.70%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.06.2.06.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>2,310,477,750</b>	<b>0.00</b>	<b>3,134,414,523</b>	<b>1,507,994,230</b>	<b>371,003,429</b>	<b>0.00%</b>	<b>24.60%</b>	0.00	3,505,417,952	0.00%	151.72%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat		12.00	12,000,000	0.00	22,706,000	6,000,000				0.00	22,706,000	0.00%	189.22%			
2.06.2.06.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12.00	320,000,000	0.00	404,581,038	210,000,000	44,062,996	0.00%	20.98%	0.00	448,644,034	0.00%	140.20%			
2.06.2.06.01.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12.00	160,000,000	0.00	179,671,000	13,200,000				0.00	179,671,000	0.00%	112.29%			
2.06.2.06.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor		12.00	180,000,000	0.00	305,227,650	150,000,000	29,809,025	0.00%	19.87%	0.00	335,036,675	0.00%	186.13%			
2.06.2.06.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor		12.00	212,632,550	0.00	341,084,290	145,500,000	16,194,808	0.00%	11.13%	0.00	357,279,098	0.00%	168.03%			
2.06.2.06.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12.00	203,780,000	0.00	264,918,000	136,556,600	14,930,000	0.00%	10.93%	0.00	279,848,000	0.00%	137.33%			
2.06.2.06.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12.00	96,419,000	0.00	105,286,300	83,826,430	13,257,000	0.00%	15.81%	0.00	118,543,300	0.00%	122.95%			
2.06.2.06.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12.00	75,411,200	0.00	37,590,000	65,411,200	2,250,000	0.00%	3.44%	0.00	39,840,000	0.00%	52.83%			
2.06.2.06.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman		12.00	40,000,000	0.00	63,895,000	29,100,000	8,658,000	0.00%	29.75%	0.00	72,553,000	0.00%	181.38%			
2.06.2.06.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12.00	497,416,000	0.00	918,155,245	300,000,000	180,441,600	0.00%	60.15%	0.00	1,098,596,845	0.00%	220.86%			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi /Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	12.00	162,400,000	0.00	245,300,000	0	122,400,000	-	20,400,000	0.00%	16.67%	0.00	265,700,000	0.00%	163.61%	
	2.06.2.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	12.00	256,000,000	0.00	246,000,000	0	246,000,000	-	41,000,000	0.00%	16.67%	0.00	287,000,000	0.00%	112.11%	
									1,507,994,230	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	24.60%					
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	3.03.3.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100	2,031,044,550	<b>7313.00</b>	<b>3,705,030,240</b>	<b>168.00</b>	<b>1,687,602,000</b>	<b>10.50</b>	<b>461,694,981</b>	<b>6.04%</b>	<b>24.57%</b>	7323.50	4,166,725,221	7323.50%	205.15%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tertindakannya Administrasi Surat Menyurat (Bulan)	12	7,500,000	24.00	12,543,000	12	7,500,000	1	1,875,000	6.25%	25.00%	24.75	14,418,000	206.25%	192.24%	
	3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	303,204,550	22.00	445,908,605	12		1		6.25%		22.75	493,023,059	189.58%	162.60%	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	222,000,000	1	47,114,454	6.25%	21.22%	0.75	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12		1		6.25%		0.75	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.03.3.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12	63,000,000	23.00	137,700,000	12	45,000,000	1	17,000,000	6.25%	37.78%	23.75	154,700,000	197.92%	245.56%	
	3.03.3.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		62	40,000,000	77.00	67,158,720		40,000,000					77.00	67,158,720	124.19%	167.90%	
	3.03.3.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12	340,000,000	25.00	626,233,800	12	294,400,000	1	76,456,000	6.25%	25.97%	25.75	702,689,800	214.58%	206.67%	
	3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12	90,000,000	20.00	153,692,400	12	67,900,000	1	24,774,000	6.25%	36.49%	20.75	178,466,400	172.92%	198.30%	
	3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12	80,000,000	20.00	142,625,500	12	63,050,000	1	23,714,000	6.25%	37.61%	20.75	166,339,500	172.92%	207.92%	
	3.03.3.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	12	12,500,000	24.00	21,672,000	12	12,125,000	1	1,980,000	6.25%	16.33%	24.75	23,652,000	206.25%	189.22%	
	3.03.3.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	8	124,400,000	14.00	231,185,250	12	17,000,000	1	7,200,000	6.25%	42.35%	14.75	238,385,250	184.38%	191.63%	
	3.03.3.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3,696	21,840,000	6949.00	37,920,000	0	18,000,000	-	2,880,000	0.00%	16.00%	6949.00	40,800,000	188.01%	186.81%	
	3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)	36	21,000,000	47.00	29,840,000	12	14,847,000	1	3,840,000	6.25%	25.86%	47.75	33,680,000	132.64%	160.38%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.03.3.03.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah (Bulan)	12	710,000,000	22.00	1,409,537,365	12	687,180,000	1	205,461,527	6.25%	29.90%	22.75	1,614,998,892	189.58%	227.46%	
3.03.3.03.01.01.19		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor (Bulan)	12	190,000,000	23.00	333,600,000	12	170,800,000	1	42,300,000	6.25%	24.77%	23.75	375,900,000	197.92%	197.84%	
3.03.3.03.01.01.20		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12	27,600,000	23.00	55,413,600	12	27,800,000	1	7,100,000	6.25%	25.54%	23.75	62,513,600	197.92%	226.50%	
									1,687,602,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.04%	24.57%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.10.2.10.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>1,351,000,000</b>				<b>931,662,950</b>		<b>251,643,497</b>	<b>0.00%</b>	<b>27.01%</b>	0.00	251,643,497	0.00%	18.63%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.01		Penyediaan jasa sural menyurat		12.00	15,000,000			0	49,998,000		12,150,000	0.00%	24.30%	0.00	12,150,000	0.00%	81.00%	
2.10.2.10.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12.00	200,000,000			0	165,700,000		19,801,047	0.00%	11.95%	0.00	19,801,047	0.00%	9.90%	
2.10.2.10.01.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12.00	95,000,000				74,800,000					0.00		0.00%	0.00%	
2.10.2.10.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12.00	80,000,000			0	62,572,800		12,020,000	0.00%	19.21%	0.00	12,020,000	0.00%	15.03%	
2.10.2.10.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor		12.00	80,000,000			0	60,000,000		15,776,000	0.00%	26.29%	0.00	15,776,000	0.00%	19.72%	
2.10.2.10.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor		12.00	100,000,000			0	43,727,150		23,722,875	0.00%	54.25%	0.00	23,722,875	0.00%	23.72%	
2.10.2.10.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12.00	45,000,000			0	29,120,000		9,580,000	0.00%	32.90%	0.00	9,580,000	0.00%	21.29%	
2.10.2.10.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12.00	20,000,000			0	14,600,000		10,716,000	0.00%	73.40%	0.00	10,716,000	0.00%	53.58%	
2.10.2.10.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman		12.00	65,000,000			0	39,000,000		9,397,000	0.00%	24.09%	0.00	9,397,000	0.00%	14.46%	
2.10.2.10.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12.00	350,000,000			0	200,000,000		118,835,275	0.00%	59.42%	0.00	118,835,275	0.00%	33.95%	
2.10.2.10.01.01.19		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		2.00	75,000,000			0	40,800,000		10,200,000	0.00%	25.00%	0.00	10,200,000	0.00%	13.60%	
2.10.2.10.01.01.22		Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai		3.00	155,000,000			0	151,345,000		9,445,300	0.00%	6.24%	0.00	9,445,300	0.00%	6.09%	
									931,662,950		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	27.01%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.05.2.05.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		0	1,731,012,133	<b>12.00</b>	<b>2,000,434,578</b>	<b>224</b>	<b>1,562,862,978.00</b>	<b>12</b>	<b>251,235,110</b>	<b>5.21%</b>	<b>16.08%</b>	23.75	2,251,669,688	#DIV/0!	130.08%	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	241,253,000	24.00	253,962,767	12	193,740,000	1	31,384,897	6.25%	16.20%	24.75	285,347,664	206.25%	118.28%	
2.05.2.05.01.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (bulan)	12	241,253,000	24.00	305,813,000	12	7,080,000	1		6.25%	0.00%	24.75	305,813,000	206.25%	126.76%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas (bulan)	47	70,415,000	89.00	131,583,310	12	70,313,500	1	-	6.25%	0.00%	89.75	131,583,310	190.96%	186.87%	
	2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah transaksi keuangan yang terlaksana (bulan)	12	19,910,520	24.00	31,996,760	12	14,043,270	1	-	4.17%	0.00%	24.50	31,996,760	204.17%	160.70%	
	2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12	38,845,600	24.00	74,329,100	12	38,845,600	1	8,475,200	6.25%	21.82%	24.75	82,804,300	206.25%	213.16%	
	2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12	122,125,250	24.00	219,283,850	12	121,366,000	1	44,761,000	6.25%	36.88%	24.75	264,044,850	206.25%	216.21%	
	2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)	12	41,170,000	24.00	71,623,500	12	39,934,733	1	12,133,500	6.25%	30.38%	24.75	83,757,000	206.25%	203.44%	
	2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik kantor (bulan)	12	14,369,500	102.00	25,595,750	12	15,286,725	1	5,960,500	6.25%	38.99%	102.75	31,556,250	856.25%	219.61%	
	2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12	25,000,000	23.00	24,855,000	12	18,000,000	1	1,340,000	6.25%	7.44%	23.75	26,195,000	197.92%	104.78%	
	2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	12	71,551,266	23.00	129,814,000	12	69,325,000	1	13,393,000	6.25%	19.32%	23.75	143,207,000	197.92%	200.15%	
	2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (%)	12	721,000,077	92.00	1,080,368,122	80	636,967,500	3	79,149,613	3.75%	12.43%	95.00	1,159,517,735	791.67%	160.82%	
	2.05.2.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (bulan)	12	92,517,600	24.00	177,751,400	12	92,517,600	1	13,818,400	6.25%	14.94%	24.75	191,569,800	206.25%	207.06%	
	2.05.2.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (bulan)	12	245,443,050	23.00	422,897,030	12	245,443,050	1	40,819,000	6.25%	16.63%	23.75	463,716,030	197.92%	188.93%	
									1,562,862,978		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.21%	16.08%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.03.1.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>3,700,000,000</b>	<b>813.58</b>	<b>3,652,748,929</b>	<b>813.58</b>	<b>3,652,748,929</b>	<b>3</b>	<b>338,313,135</b>	<b>2.07%</b>	<b>9.26%</b>	816.92	3,991,062,064	816.92%	107.87%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	680,000,000	18.00	532,830,557	18	532,830,557	0	72,020,137	1.85%	13.52%	18.33	604,850,694	152.77%	88.95%	
	1.03.1.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	500,000,000	23.50	362,533,500	23.5	362,533,500	-	-	0.00%	0.00%	23.50	362,533,500	195.83%	72.51%	
	1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Ruang Kerja Yang Bersih dan Nyaman (Ruang)	35.00	320,000,000	31.93	438,551,100	31.93	438,551,100	1	32,134,000	3.88%	7.33%	33.17	470,685,100	94.76%	147.09%	
	1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	300,000,000	23.01	352,115,427	23.01	352,115,427	0	27,127,200	1.83%	7.70%	23.43	379,242,627	195.25%	126.41%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 1 Tahun (Bulan)	12.00	300,000,000	23.91	338,442,950	23.91	338,442,950	-	-	0.00%	0.00%	23.91	338,442,950	199.25%	112.81%	
	1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik(penerangan bangunan kantor	Kebutuhan Komponen Listrik Yang Dibutuhkan Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	150,000,000	24.00	79,967,000	24	79,967,000	-	-	0.00%	0.00%	24.00	79,967,000	200.00%	53.31%	
	1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Majalah dan Koran Selama 1 Tahun (EB)	324.00	150,000,000	604.62	45,261,000	604.62	45,261,000	-	-	0.00%	0.00%	604.62	45,261,000	186.61%	30.17%	
	1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan Makan dan Minum Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	85,000,000	20.70	71,766,909	20.7	71,766,909	0	1,456,000	0.30%	2.03%	20.76	73,222,909	173.02%	86.14%	
	1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bulan)	12.00	883,000,000	23.97	993,580,486	23.97	993,580,486	1	140,012,798	3.02%	14.09%	24.70	1,133,593,284	205.79%	128.38%	
	1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor (Orang)	9.00	300,000,000	18.00	382,500,000	18	382,500,000	1	60,963,000	2.88%	15.94%	18.52	443,463,000	205.75%	147.82%	
	1.03.1.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Orang)	1.00	32,000,000	1.94	55,200,000	1.94	55,200,000	0	4,600,000	2.06%	8.33%	1.98	59,800,000	198.00%	186.88%	
									3,652,748,929	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		2.07%	9.26%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.02.2.02.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>873,814,316</b>			<b>100</b>	<b>781,896,900</b>	<b>5.5</b>	<b>167,109,048</b>	<b>4.09%</b>	<b>21.37%</b>	5.50	167,109,048	5.50%	19.12%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (bulan)	1.00	5,438,973			12	50,850,000	1	8,625,000	4.17%	16.96%	0.50	8,625,000	50.00%	158.58%	
	2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik (bulan)	12.00	126,060,000			12	121,200,000	1	22,973,563	4.17%	18.96%	0.50	22,973,563	4.17%	18.22%	
	2.02.2.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12.00	19,240,000			12	14,380,000	-	350,000	0.00%	2.43%	0.00	350,000	0.00%	1.82%	
	2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (bulan)	12.00	26,760,000			12	19,400,000	1	1,000,000	4.17%	5.15%	0.50	1,000,000	4.17%	3.74%	
	2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	12.00	54,265,570			12	49,352,675	1	8,851,700	4.17%	17.94%	0.50	8,851,700	4.17%	16.31%	
	2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat kantor (Bulan)	12.00	85,619,903			12	79,931,455	1	27,962,535	4.17%	34.98%	0.50	27,962,535	4.17%	32.66%	
	2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan pengadaan (bulan)	12.00	73,007,670			12	67,147,670	1	18,560,150	4.17%	27.64%	0.50	18,560,150	4.17%	25.42%	





No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.08.2.08.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (Bulan)	0.00	800,000	24.00	116,340,000	12	67,470,000	1	11,470,000	6.25%	17.00%	24.75	127,810,000	#DIV/0!	15976.25%	
	2.08.2.08.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik (Bulan)	12.00	169,000,000	24.00	165,156,046	12	117,000,000	1	20,909,327	6.25%	17.87%	24.75	186,065,373	206.25%	110.10%	
	2.08.2.08.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas (1 orang) (Bulan)	12.00	175,000,000	24.00	213,507,755	12		1		6.25%		24.75	240,869,755	206.25%	137.64%	
			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)	12.00		24.00			12	127,056,000	1	27,362,000	6.25%	21.54%	24.75		206.25%	#DIV/0!
	2.08.2.08.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (12)	12.00	45,000,000	24.00	67,740,900	0	40,952,675	1	10,342,000	0.00%	25.25%	24.75	78,082,900	206.25%	173.52%	
	2.08.2.08.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	80,000,000	24.00	88,603,150	12	41,338,875	1	14,625,500	6.25%	35.38%	24.75	103,228,650	206.25%	129.04%	
	2.08.2.08.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	70,000,000	24.00	75,686,040	12	32,851,550	1	6,452,000	6.25%	19.64%	24.75	82,138,040	206.25%	117.34%	
	2.08.2.08.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor (Bulan)	12.00	9,000,000	24.00	10,580,100	12	5,333,450	1	966,000	6.25%	18.11%	24.75	11,546,100	206.25%	128.29%	
	2.08.2.08.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatu (Bulan)	12.00	9,000,000	24.00	17,340,000	12	6,840,000	1	1,140,000	6.25%	16.67%	24.75	18,480,000	206.25%	205.33%	
	2.08.2.08.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Dan Minum Rapat (Bulan)	12.00	42,000,000	24.00	63,991,000	12	16,800,000	1	4,200,000	6.25%	25.00%	24.75	68,191,000	206.25%	162.36%	
	2.08.2.08.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur (Bulan)	12.00	296,195,544	24.00	381,028,328	12	216,581,900	1	55,474,631	6.25%	25.61%	24.75	436,502,959	206.25%	147.37%	
	2.08.2.08.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur (Bulan)	12.00	78,000,000	24.00	116,160,000	12	74,400,000	1	12,400,000	6.25%	16.67%	24.75	128,560,000	206.25%	164.82%	
									746,624,450	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		5.91%	18.48%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.06.3.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>2,604,480,415</b>	<b>0.00</b>	<b>4,814,063,585</b>	<b>100</b>	<b>2,128,995,038</b>	<b>9</b>	<b>402,165,808</b>	<b>4.27%</b>	<b>18.89%</b>	9.00	5,216,229,393	9.00%	200.28%	Dinas Perdagangan
	3.06.3.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya proses administrasi surat-menyurat (Bulan)	12.00	1,200,000	24.00	2,280,000	12	744,000	1	382,000	6.25%	51.34%	24.75	2,662,000	206.25%	221.83%	
	3.06.3.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik (Bulan)	12.00	280,000,000	24.00	437,938,455	12	247,400,000	1	32,857,682	6.25%	13.28%	24.75	470,796,137	206.25%	168.14%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.06.3.06.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perawatan berkala kendaraan dinas kantor (Unit)	14.00	280,396,460	22.00	551,181,560	14	240,251,950	-	22,071,385	0.00%	9.19%	22.00	573,252,945	157.14%	204.44%	
3.06.3.06.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor (Bulan)	12.00	460,253,740	24.00	816,940,600	12	427,508,000	1	70,807,050	4.17%	16.56%	24.50	887,747,650	204.17%	192.88%	
3.06.3.06.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor (Bulan)	12.00	105,622,025	24.00	156,490,100	12	68,946,100	1	17,482,725	6.25%	25.36%	24.75	173,972,825	206.25%	164.71%	
3.06.3.06.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor (Bulan)	12.00	82,686,650	137.00	128,777,650	12	67,402,600	1	16,846,100	6.25%	24.99%	137.75	145,623,750	1147.92%	176.12%	
3.06.3.06.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor (Bulan)	12.00	39,603,125	24.00	48,729,300	12	28,792,400	1	14,396,200	6.25%	50.00%	24.75	63,125,500	206.25%	159.40%	
3.06.3.06.01.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (%)	100.00	31,320,000	174.00	196,404,000	100	31,320,000	3	3,600,000	3.00%	11.49%	177.00	200,004,000	177.00%	638.58%	
3.06.3.06.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Exemplar)	168.00	12,960,000	285.00	33,615,000	168	12,960,000	-	-	0.00%	0.00%	285.00	33,615,000	169.64%	259.38%	
3.06.3.06.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah (Bulan)	12.00	402,838,415	24.00	747,992,490	12	220,369,988	1	95,217,666	6.25%	43.21%	24.75	843,210,156	206.25%	209.32%	
3.06.3.06.01.01.19		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor (Bulan)	12.00	387,600,000	24.00	720,684,180	12	364,500,000	1	60,445,000	4.17%	16.58%	24.50	781,129,180	204.17%	201.53%	
3.06.3.06.01.01.20		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	520,000,000	24.00	973,030,250	12	418,800,000	1	68,060,000	4.17%	16.25%	24.50	1,041,090,250	204.17%	200.21%	
									2,128,995,038		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.27%	18.89%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.09.2.09.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>6,193,533,834</b>	<b>0.00</b>	<b>8,492,082,204</b>	<b>0</b>	<b>5,089,607,825</b>	<b>0</b>	<b>1,187,399,375</b>	<b>0.00%</b>	<b>23.33%</b>	0.00	9,679,481,579	0.00%	156.28%	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat		1500.00	16,600,000	12.00	5,090,000	0	5,600,000	-	1,800,000	0.00%	32.14%	12.00	6,890,000	0.80%	41.51%	
2.09.2.09.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12.00	1,361,294,202	12.00	1,761,549,513	0	935,300,000	-	226,431,059	0.00%	24.21%	12.00	1,987,980,572	100.00%	146.04%	
2.09.2.09.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor		12.00	739,455,000	12.00	1,366,915,050	0	829,338,250	-	134,987,700	0.00%	16.28%	12.00	1,501,902,750	100.00%	203.11%	
2.09.2.09.01.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		12.00	60,000,000	12.00	52,600,000	0	29,000,000	-	12,795,000	0.00%	44.12%	12.00	65,395,000	100.00%	108.99%	
2.09.2.09.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor		12.00	140,000,000	12.00	172,271,080	0	152,890,690	-	98,439,303	0.00%	64.39%	12.00	270,710,383	100.00%	193.36%	
2.09.2.09.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12.00	250,000,000	12.00	543,510,450	0	365,124,285	-	29,182,687	0.00%	7.99%	12.00	572,693,137	100.00%	229.08%	
2.09.2.09.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12.00	280,000,000	12.00	67,706,700	0	60,212,600	-	29,550,700	0.00%	49.08%	12.00	97,257,400	100.00%	34.73%	
2.09.2.09.01.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		5.00	432,281,700	2.00	746,139,000	0	436,692,000	-	39,600,000	0.00%	9.07%	2.00	785,739,000	40.00%	181.77%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD sampai dengan RPKD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12.00	70,000,000	12.00	105,262,050	0	16,500,000	-	4,749,900	0.00%	28.79%	12.00	110,011,950	100.00%	157.16%	
	2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		12.00	50,000,000	12.00	27,295,000	0	38,950,000	-	7,200,000	0.00%	18.49%	12.00	34,495,000	100.00%	68.99%	
	2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12.00	705,132,932	12.00	900,525,521	0	600,000,000	-	339,463,026	0.00%	56.58%	12.00	1,239,988,547	100.00%	175.85%	
	2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		12.00	1,431,570,000	12.00	2,246,952,000	0	1,251,600,000	-	201,800,000	0.00%	16.12%	12.00	2,448,752,000	100.00%	171.05%	
	2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran		12.00	657,200,000	12.00	496,265,840	0	368,400,000	-	61,400,000	0.00%	16.67%	12.00	557,665,840	100.00%	84.85%	
									5,089,607,825		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	23.33%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.01.3.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>1,966,881,215</b>	<b>100.00</b>	<b>3,332,353,879</b>	<b>100</b>	<b>1,078,134,393</b>					100.00	3,332,353,879	100.00%	169.42%	Dinas Perikanan
	3.01.3.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirim surat dalam 12 bulan (surat)	1000.00	2,640,000	1830.00	2,656,000	1000	2,670,000	-	-	1.65%	0.00%	1846.50	2,656,000	184.65%	100.61%	
	3.01.3.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian listrik (rekening)	204.00	228,348,014	240.00	1,641,341,864	108	234,628,792	7	24,384,151	6.25%	10.39%	246.75	1,665,726,015	120.96%	729.47%	
Jumlah pemakaian internet (rekening)			12.00	-	48.00	-	36	2		6.25%		50.25		-	418.75%	#DIV/0!		
Jumlah rekening telepon (rekening)			36.00	-	216.00	-	12	1		6.25%		216.75		-	602.08%	#DIV/0!		
	3.01.3.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (kali)	39.00	9,820,000	6.00	74,560,000	39	9,820,000	-	-	0.00%	0.00%	6.00	74,560,000	15.38%	759.27%	
	3.01.3.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjang surat (pajak/izin) kendaraan dinas (unit)	6.00	9,955,000	10.00	20,530,099	5	9,955,000	-	-	0.00%	0.00%	10.00	20,530,099	166.67%	206.23%	
			KIR kendaraan dinas (unit)	0.00	-	-	-	3		0.00%	0.00	-		#DIV/0!	#DIV/0!			
	3.01.3.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa pemotongan rumput (kali)	48.00	127,150,940	36.00	166,707,600	24	68,279,020	2	5,690,000	6.25%	8.33%	37.50	172,397,600	78.13%	135.58%	
			Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor (3 unit kerja) (bulan)	12.00	-	42.00	-	12		1		6.25%		42.75	-	356.25%	#DIV/0!	
			Terpenuhinya jasa kebersihan kantor (ob)	48.00	-	-	-	36		2		6.25%		2.25	-	4.69%	#DIV/0!	
	3.01.3.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor (3 unit kerja) selama 12 bulan (bulan)	12.00	224,334,683	24.00	160,879,000	12	71,482,870	1	-	6.25%	0.00%	24.75	160,879,000	206.25%	71.71%	
	3.01.3.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak (3 unit kerja) selama 12 bulan (bulan)	12.00	59,796,300	24.00	72,150,000	12	48,239,800	-	-	0.00%	0.00%	24.00	72,150,000	200.00%	120.66%	
	3.01.3.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik (bulan)	12.00	91,568,228	24.00	26,685,000	12	20,356,465	-	-	0.00%	0.00%	24.00	26,685,000	200.00%	29.14%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	3.01.3.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	7.00	68,500,000	1.00	20,263,598	7	33,659,846	-	-	0.00%	0.00%	1.00	20,263,598	14.29%	29.58%		
	3.01.3.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam 12 bulan (eks)	3465.00	8,640,000	5580.00	12,960,000	1460	7,200,000	73	600,000	5.00%	8.33%	5653.00	13,560,000	163.15%	156.94%		
	3.01.3.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (ok)	1082.00	27,045,000	3368.00	32,958,000	1281	20,985,000	26	1,552,500	2.01%	7.40%	3393.75	34,510,500	313.66%	127.60%		
	3.01.3.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota Kab/Kota lain (ohk)	900.00	883,183,050	136.00	662,662,718	78	345,057,600	7	50,374,337	8.33%	14.60%	142.50	713,037,055	15.83%	80.73%		
			Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara (ohk)	240.00		157.00		48		3		5.73%		159.75			66.56%	#DIV/0!	
			Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota Provinsi Riau (ohk)	1515.00		20.00		32		4		11.72%		23.75			1.57%	#DIV/0!	
	3.01.3.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya tenaga keamanan kantor (ob)	48.00	81,900,000	96.00	156,000,000	36	61,800,000	2	5,100,000	6.25%	8.25%	98.25	161,100,000	204.69%	196.70%		
	3.01.3.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya jasa petugas administrasi sistem informalka komputer (ob)	96.00	144,000,000	204.00	282,000,000	96	144,000,000	6	12,000,000	6.25%	8.33%	210.00	294,000,000	218.75%	204.17%		
									1,078,134,393			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.19%	1.79%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.11.2.11.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>1,443,126,954</b>	<b>0.00</b>	<b>2,884,315,504</b>							0.00	2,884,315,504	0.00%	199.87%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
	2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12.00	2,376,000	24.00	4,536,000	12	2,376,000	1	396,000	6.25%	16.67%	24.75	4,932,000	206.25%	207.58%		
	2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor (bulan)	12.00	214,090,000	24.00	301,490,149	12	219,090,000	1	36,968,540	6.25%	16.87%	24.75	338,458,689	206.25%	158.09%		
	2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan dan kebersihan kantor (bulan)	12.00	194,866,520	24.00	437,128,480	12	170,866,520	1	30,670,700	6.25%	17.95%	24.75	467,799,180	206.25%	240.06%		
	2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pengadaan alat tulis kantor (bulan)	12.00	86,232,283	24.00	190,265,713	12	106,635,000	1	25,854,500	6.25%	24.25%	24.75	216,120,213	206.25%	250.63%		
	2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	17,884,750	21.00	34,627,250	12	17,324,750	1	3,780,475	6.25%	21.82%	21.75	38,407,725	181.25%	214.75%		
	2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor (bulan)	12.00	12,351,000	24.00	23,672,000	12	11,971,000	1	2,787,000	6.25%	23.28%	24.75	26,459,000	206.25%	214.23%		
	2.11.2.11.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	1.00	82,085,498	2.00	316,311,000	1	109,904,000	0	36,400,000	6.25%	33.12%	2.06	352,711,000	206.25%	429.69%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.2.11.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12.00	14,880,000	24.00	20,175,000	12	14,880,000	-	-	0.00%	0.00%	24.00	20,175,000	200.00%	135.58%	
2.11.2.11.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (bulan)	11.00	11,055,000	22.00	19,269,500	11	10,725,000	1	1,695,000	6.82%	15.80%	22.75	20,964,500	206.82%	189.64%	
2.11.2.11.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja (bulan)	12.00	370,101,503	24.00	892,556,412	12	359,507,503	1	78,865,912	6.25%	21.94%	24.75	971,422,324	206.25%	262.47%	
2.11.2.11.01.01.19		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun (bulan)	12.00	224,400,000	24.00	458,500,000	12	224,400,000	1	37,400,000	6.25%	16.67%	24.75	495,900,000	206.25%	220.99%	
2.11.2.11.01.01.21		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12.00	212,804,400	12.00	185,784,000	12	236,204,400	1	39,923,200	6.25%	16.90%	12.75	225,707,200	106.25%	106.06%	
									1,483,884,173	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		6.19%	19.86%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.17.2.17.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>1,157,227,122</b>	<b>0.00</b>	<b>1,477,800,993</b>							0.00	1,477,800,993	0.00%	127.70%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12.00	285,227,122	24.00	236,339,867	12	180,301,772	1	19,715,907	6.25%	10.93%	24.75	256,055,774	206.25%	89.77%	
2.17.2.17.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode terpenuhinya jasa kebersihan kantor (bulan)	12.00	140,000,000	14.00	242,954,750	12	124,156,200	1	20,580,800	6.25%	16.58%	14.75	263,535,550	122.92%	188.24%	
2.17.2.17.01.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang dikelola/drawat (unit)	12.00	27,000,000	73.00	63,469,500	12	14,939,000	1	3,255,000	6.25%	21.79%	73.75	66,724,500	614.58%	247.13%	
2.17.2.17.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ketersediaan ATK (bulan)	12.00	100,000,000	25.00	149,250,550	12	78,013,026	1	13,002,000	6.25%	16.67%	25.75	162,252,550	214.58%	162.25%	
2.17.2.17.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan (bulan)	12.00	38,000,000	24.00	34,711,400	12	17,243,718	1	2,468,000	6.25%	14.31%	24.75	37,179,400	206.25%	97.84%	
2.17.2.17.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya ketersediaan komponen instalasi listrik (bulan)	12.00	22,000,000	24.00	8,474,200	12	9,700,000	1	1,574,000	6.25%	16.23%	24.75	10,048,200	206.25%	45.67%	
2.17.2.17.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya ketersediaan media massa dinas perpustakaan dan kearsipan (bulan)	12.00	15,000,000	20.00	18,735,000	12	12,000,000	1	1,215,000	6.25%	10.13%	20.75	19,950,000	172.92%	133.00%	
2.17.2.17.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (bulan)	12.00	110,000,000	24.00	78,466,000	12	79,756,840	1	10,284,000	6.25%	12.89%	24.75	88,750,000	206.25%	80.68%	
2.17.2.17.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rakor keluar daerah (kal)	48.00	300,000,000	102.00	448,094,726	45	209,625,000	6	128,999,996	12.78%	61.54%	107.75	577,094,722	224.48%	192.36%	
2.17.2.17.01.01.19		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhinya ketersediaan tenaga keamanan (bulan)	12.00	120,000,000	8.00	172,400,000	12	91,000,000	1	17,000,000	6.25%	18.68%	8.75	189,400,000	72.92%	157.83%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									816,735,556	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		7.93%	26.70%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.04.1.04.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100	916,584,325	<b>3275381040.00</b>	<b>1,568,860,202</b>							3275381040.00	1,568,860,202	#####	171.16%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		85	5,800,000	0.00	54,161,000	0	5,800,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	54,161,000	0.00%	933.81%	
	1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	101,960,000	0.00	166,325,201	0	101,960,000	-	14,461,326	0.00%	14.18%	0.00	180,786,527	0.00%	177.31%	
	1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12	32,944,375	0.00	12,891,940	0	22,944,375	-	-	0.00%	0.00%	0.00	12,891,940	0.00%	39.13%	
	1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		80	56,435,350	0.00	71,306,300	0	56,435,350	-	14,064,500	0.00%	24.92%	0.00	85,370,800	0.00%	151.27%	
	1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		100	110,132,845	0.00	210,106,900	0	106,794,845	-	25,603,700	0.00%	23.97%	0.00	235,710,600	0.00%	214.02%	
	1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		90	48,064,300	0.00	64,656,750	0	36,889,000	-	15,793,750	0.00%	42.81%	0.00	80,450,500	0.00%	167.38%	
	1.04.1.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	12,507,000	0.00	27,529,600	0	11,452,300	-	2,522,500	0.00%	22.03%	0.00	30,052,100	0.00%	240.28%	
	1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		21	8,000,000	0.00	11,700,000	0	8,000,000	-	1,725,000	0.00%	21.56%	0.00	13,425,000	0.00%	167.81%	
	1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		12	19,500,000	0.00	18,500,000	0	19,080,000	-	4,068,000	0.00%	21.32%	0.00	22,568,000	0.00%	115.73%	
	1.04.1.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	280,033,455	0.00	727,313,961	0	280,000,000	-	128,210,496	0.00%	45.79%	0.00	855,524,457	0.00%	305.51%	
	1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		12	91,207,000	0.00	114,568,550	0	87,920,000	-	16,500,000	0.00%	18.77%	0.00	131,068,550	0.00%	143.70%	
									737,275,870	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	30.24%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.06.1.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>1,577,250,830</b>	<b>0.00</b>	<b>2,626,190,182</b>							0.00	2,626,190,182	0.00%	166.50%	Dinas Sosial
	1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah petugas pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12.00	144,200,000	18.00	186,706,000	12	143,600,000	1	24,050,000	6.25%	16.75%	18.75	210,756,000	156.25%	146.16%	
	1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya alat komunikasi air dan penerangan kantor (bulan)	12.00	129,051,630	23.00	171,833,340	12	113,242,856	1	28,463,242	6.25%	25.13%	23.75	200,296,582	197.92%	155.21%	
	1.06.1.06.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12.00	10,332,000	15.00	39,220,000	12	3,967,000	1	1,450,000	6.25%	36.55%	15.75	40,670,000	131.25%	393.63%	
	1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas (bulan)	12.00	25,000,000			12	17,250,000	1	1,061,350	6.25%	6.15%	0.75	1,061,350	6.25%	4.25%	
	1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor (bulan)	12.00	130,175,810	21.00	306,846,300	12	125,687,700	1	19,600,000	6.25%	15.59%	21.75	326,446,300	181.25%	250.77%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik (bulan)	12.00	40,538,598	18.00	59,123,500	12	40,500,000	1	8,910,000	6.25%	22.00%	18.75	68,033,500	156.25%	167.82%	
	1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12.00	135,270,450	24.00	252,891,566	12	128,914,730	1	31,014,500	6.25%	24.06%	24.75	283,906,066	206.25%	209.88%	
	1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	75,246,942	24.00	162,584,950	12	72,922,660	1	16,487,500	6.25%	22.61%	24.75	179,072,450	206.25%	237.98%	
	1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik(penerangan bangunan kantor	Terlaksananya alat-alat listrik (bulan )	12.00	15,000,000	24.00	21,144,900	12	12,242,400	-	-	0.00%	0.00%	24.00	21,144,900	200.00%	140.97%	
	1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12.00	187,970,000	190.00	204,658,000	12	201,670,000	1	178,610,000	6.25%	88.57%	190.75	383,268,000	1589.58%	203.90%	
	1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup (bulan)	12.00	5,136,000	24.00	8,240,000	12	5,136,000	-	-	0.00%	0.00%	24.00	8,240,000	200.00%	160.44%	
	1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan (bulan)	12.00	22,000,000	24.00	29,090,000	12	12,000,000	-	-	0.00%	0.00%	24.00	29,090,000	200.00%	132.23%	
	1.06.1.06.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya minuman pegawai (bulan)	12.00	24,500,000	18.00	24,224,000	11	24,500,000	1	4,445,200	6.82%	18.14%	18.75	28,669,200	156.25%	117.02%	
	1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat serta tamu (bulan)	11.00	15,173,400	22.00	22,380,000	11	14,780,000	1	1,600,000	6.82%	10.83%	22.75	23,980,000	206.82%	158.04%	
	1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait tingkat pusat, provinsi dan kab/kota (bulan)	12.00	420,000,000	23.00	820,569,626	12	420,000,000	1	104,529,327	6.25%	24.89%	23.75	925,098,953	197.92%	220.26%	
	1.06.1.06.01.01.21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor selama satu tahun (bulan)	12.00	197,656,000	19.00	316,678,000	12	186,244,000	1	27,200,000	6.25%	14.60%	19.75	343,878,000	164.58%	173.98%	
									1,522,657,346			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.14%	29.38%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.01.2.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>1,380,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.01.2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Benda Pos (Bulan)	12.00	5,000,000			12	5,000,000	1	-	6.25%	0.00%	0.75	-	6.25%	0.00%	
	2.01.2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi (Bulan)	12.00	172,000,000			12	161,760,000	1	32,485,648	6.25%	20.08%	0.75	32,485,648	6.25%	18.89%	
	2.01.2.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pelaksanaan dan Perlengkapan Kantor (Kali)	8.00	20,000,000			8	16,100,000	1	450,000	9.38%	2.80%	0.75	450,000	9.38%	2.25%	
	2.01.2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (Unit)	6.00	10,000,000			6	9,960,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
			Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas ()					0		1		0.00%	0.00%	0.50	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.01.2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Anggaran Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan (Bulan)	12.00	100,000,000			12	78,087,300	1	13,011,500	6.25%	16.66%	0.75	13,011,500	6.25%	13.01%	
	2.01.2.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Jasa Kerja (Unit)	65.00	35,000,000			65	11,250,000	2	2,000,000	2.31%	17.78%	1.50	2,000,000	2.31%	5.71%	
	2.01.2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan ATK yang sesuai dengan Kebutuhan (Bulan)	12.00	115,000,000			12	117,889,400	1	18,600,000	6.25%	15.78%	0.75	18,600,000	6.25%	16.17%	
	2.01.2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak (Bulan)	12.00	119,085,000			12	81,246,000	1	13,498,000	6.25%	16.61%	0.75	13,498,000	6.25%	11.33%	
	2.01.2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	12.00	15,000,000			12	8,472,180	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	2.01.2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibaca selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	6,930,000			12	6,930,000	1	350,000	6.25%	5.05%	0.75	350,000	6.25%	5.05%	
	2.01.2.01.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor (Bulan)	12.00	11,000,000			12	9,720,000	1	1,620,000	6.25%	16.67%	0.75	1,620,000	6.25%	14.73%	
	2.01.2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terperuhnya Makanan dan Minuman (Bulan)	12.00	13,000,000			12	11,700,000	1	600,000	6.25%	5.13%	0.75	600,000	6.25%	4.62%	
	2.01.2.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Aparatur (Bulan)	12.00	447,185,000			12	288,779,100	1	52,914,000	6.25%	18.32%	0.75	52,914,000	6.25%	11.83%	
	2.01.2.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	270,000,000			12	309,937,000	1	51,600,000	6.25%	16.65%	0.75	51,600,000	6.25%	19.11%	
									1,116,830,980		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.15%	16.76%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.02.4.02.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>938,076,605</b>	<b>0.00</b>	<b>1,811,613,101</b>							0.00	1,811,613,101	0.00%	193.12%	Inspektoral
	4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim (Bulan)	12.00	12,850,000	24.00	86,465,450	12	12,850,000	1	1,380,500	6.25%	10.74%	24.75	87,845,950	206.25%	683.63%	
	4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi dan Sumber daya air (Bulan)	12.00	48,500,000	21.00	75,838,033	12	48,500,000	1	7,288,000	6.25%	15.03%	21.75	83,126,033	181.25%	171.39%	
	4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas (%)	100	20,000,000			100	18,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor (orang Bulan)	72.00	107,909,345	135.00	186,138,784	72	100,820,800	5	23,488,900	6.25%	23.30%	139.50	209,627,684	193.75%	194.26%	
	4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	99,000,000	24.00	195,184,465	12	99,970,632	1	11,136,000	6.25%	11.14%	24.75	206,320,465	206.25%	208.40%	
	4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan Penggandaan (Bulan)	12.00	70,000,000	24.00	132,570,819	12	68,303,659	1	7,112,700	6.25%	10.41%	24.75	139,683,519	206.25%	199.55%	
	4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Atas Listrik/Elektronik (Bulan)	12.00	15,000,000	24.00	25,726,750	12	14,605,600	-	1,197,500	0.00%	8.20%	24.00	26,924,250	200.00%	179.50%	
			Atas Listrik/Elektronik (Bulan)					12		1		4.17%	0.50	-	#DIV/0!	#DIV/0!		





No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	1.05.1.05.03.01.22	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (bulan)	12.00	116,544,000	24.00	216,770,000	12	113,480,000	1	-	6.25%	0.00%	24.75	216,770,000	206.25%	186.00%	
									1,342,703,758			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.77%	16.03%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.02.1.02.02.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>12.00</b>	<b>10,300,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>12,436,676,201</b>							0.00	12,436,676,201	0.00%	120.74%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
	1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon RSUD Dumai (Bulan)	12.00	3,100,000,000	17.00	2,954,024,001	12		1		6.25%		17.75	3,437,306,922	147.92%	110.88%	
			Tersedianya Air RSUD Dumai (Bulan)					12	680,000,000	1	483,282,921	6.25%	71.07%	0.75	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Tersedianya Listrik RSUD Dumai (Bulan)					2		1		25.00%		0.50	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya tenaga dan alat kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	2,800,000,000	24.00	4,519,779,000	12	2,683,840,000	1	411,600,000	4.17%	15.34%	24.50	4,931,379,000	204.17%	176.12%	
	1.02.1.02.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12.00	900,000,000	8.00	675,900,000		20,000,000					8.00	675,900,000	66.67%	75.10%	
	1.02.1.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12240.00	120,000,000	15693.20	97,562,000		83,520,000					15693.20	97,562,000	128.21%	81.30%	
	1.02.1.02.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya pegawai-pegawai mengikuti rakor ke luar kota (Tahun)	12.00	950,000,000	23.00	1,446,447,200	1	858,000,000	0	232,363,000	6.75%	27.08%	23.07	1,678,810,200	192.23%	176.72%	
	1.02.1.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhi jasa Pengamanan kantor (Bulan)	12.00	2,100,000,000	24.00	2,742,964,000	12	1,777,070,000	1	240,600,000	4.17%	13.54%	24.50	2,983,564,000	204.17%	142.07%	
									6,102,430,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.39%	14.50%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.05.1.05.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100.00</b>	<b>699,999,000</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,287,609</b>							0.00	1,312,287,609	0.00%	187.47%	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Materai dan Benda Pos Lainnya terpenuhi serta Honorarium Tenaga Honor dibayarkan (Bulan)	12.00	3,600,000	24.00	90,600,000	12	45,000,000	1	11,400,000	6.25%	25.33%	24.75	102,000,000	206.25%	2833.33%	
	1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan tagihan rekening telepon dan listrik serta jumlah bulan pembelian air (bulan)	12.00	126,960,000	23.00	108,332,335	12	104,550,000	1	10,800,335	6.25%	10.33%	23.75	119,132,670	197.92%	93.83%	
	1.05.1.05.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Admin RUP dibayarkan honorinya (Bulan)	12.00	19,100,000	12.00	124,255,000	6	3,788,000	0	2,038,000	4.17%	53.80%	12.25	126,293,000	102.08%	661.22%	
	1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya (Unit)	11.00	34,000,000			11	24,200,000	2	7,626,520	15.91%	31.51%	1.75	7,626,520	15.91%	22.43%	
	1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan tenaga kebersihan dibayarkan honorinya (bulan)	12.00	45,935,400	24.00	86,322,800	12	43,256,000	1	9,202,000	6.25%	21.27%	24.75	95,524,800	206.25%	207.95%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	4.01.4.01.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	12.00	8,760,019,837	22.00	12,855,708,654	0	7,533,037,200	-	815,879,744	0.00%	10.83%	22.00	13,671,588,398	183.33%	156.07%	
	4.01.4.01.04.01.21	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset		3.00	37,500,000	3.00	25,350,200		30,000,000					3.00	25,350,200	100.00%	67.60%	
	4.01.4.01.04.01.23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS							350,000,000					0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.01.4.01.04.01.25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor				47.00	1,200,596,000	0	633,948,000	-	37,400,000	0.00%	5.90%	47.00	1,237,996,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.01.4.01.04.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran		12.00	130,500,000	19.00	200,100,000	0	104,400,000	-	8,700,000	0.00%	8.33%	19.00	208,800,000	158.33%	160.00%	
		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga Yang Mendapat Jaminan pemeliharaan Kesehatan (orang )	120.00	500,000,000	30.00	238,839,673							30.00	238,839,673	25.00%	47.77%	
									11,257,239,900			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	8.25%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.07.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>85.00</b>	<b>1,761,839,206</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885,393,014</b>							0.00	1,885,393,014	0.00%	107.01%	Bukit Kapur
	4.01.4.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	74,100,000	24.00	85,800,000	12	42,900,000	0	3,200,000	2.08%	7.46%	24.25	89,000,000	202.08%	120.11%	
	4.01.4.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian telepon Listrik Dan Speddy (Bulan)	12.00	130,620,000	24.00	122,798,398	12	78,540,000	1	13,508,426	6.25%	17.20%	24.75	136,306,824	206.25%	104.35%	
	4.01.4.01.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12.00	72,878,000	24.00	125,676,000		25,250,000					24.00	125,676,000	200.00%	172.45%	
	4.01.4.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	252,447,443	24.00	313,500,000	12	156,750,000	0	13,063,000	2.08%	8.33%	24.25	326,563,000	202.08%	129.36%	
	4.01.4.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan kantor (Bulan)	12.00	55,579,700	24.00	98,527,000	12	53,876,000	0	4,490,000	2.08%	8.33%	24.25	103,017,000	202.08%	185.35%	
	4.01.4.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	54,325,700	24.00	95,663,000	12	52,674,000	0	3,840,000	2.08%	7.29%	24.25	99,503,000	202.08%	183.16%	
	4.01.4.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik(penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (Bulan)	12.00	14,888,500	24.00	24,041,000	12	14,882,000	0	1,240,000	2.08%	8.33%	24.25	25,281,000	202.08%	169.80%	
	4.01.4.01.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12.00	52,800,000	30.00	100,442,875		52,800,000					30.00	100,442,875	250.00%	190.23%	
	4.01.4.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12.00	138,800,000	24.00	54,500,000		138,240,000					24.00	54,500,000	200.00%	39.27%	
	4.01.4.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (Bulan)	12.00	131,700,000	24.00	259,220,000	12	124,220,000	1	19,417,240	4.17%	15.63%	24.50	278,637,240	204.17%	211.57%	
	4.01.4.01.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan)	12.00	341,299,863	32.00	319,624,741	12	168,600,000	1	81,075,883	6.25%	48.09%	32.75	400,700,624	272.92%	117.40%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	4.01.4.01.07.01.25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	290,000,000	24.00	285,600,000	12	142,800,000	0	11,900,000	2.08%	8.33%	24.25	297,500,000	202.08%	102.59%		
									1,051,532,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	2.88%	14.43%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.05.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>85.00</b>	<b>1,342,623,350</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970,803,129</b>							0.00	1,970,803,129	0.00%	146.79%	Dumai Barat	
	4.01.4.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	4,320,000	24.00	275,660,000	12	139,441,380	1	34,860,000	6.25%	25.00%	24.75	310,520,000	206.25%	7187.96%		
								0				0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
	4.01.4.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy/TV Kabel (Bulan)	12.00	78,800,000	24.00	116,267,231	12	72,600,000	1	14,526,239	6.25%	20.01%	24.75	130,793,470	206.25%	165.98%		
	4.01.4.01.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jmlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00	70,000,000	24.00	126,550,000	12	42,000,000	1	14,600,000	6.25%	34.76%	24.75	141,150,000	206.25%	201.64%		
	4.01.4.01.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas (Berkas)	10.00	10,000,000			10	7,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
	4.01.4.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	233,335,000	24.00	325,247,000	12	204,215,000	1	51,700,000	6.25%	25.32%	24.75	376,947,000	206.25%	161.55%		
	4.01.4.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan (Bulan)	12.00	80,000,000	24.00	116,331,000	12	58,370,700	1	15,000,000	6.25%	25.70%	24.75	131,331,000	206.25%	164.16%		
	4.01.4.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	80,000,000	24.00	103,098,000	12	46,657,500	1	12,000,000	6.25%	25.72%	24.75	115,098,000	206.25%	143.87%		
	4.01.4.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (Bulan)	12.00	44,978,350	24.00	32,340,080	12	15,270,200	1	4,000,000	6.25%	26.19%	24.75	36,340,080	206.25%	80.79%		
	4.01.4.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (Bulan)	12.00	7,680,000	24.00	19,130,000	12	7,200,000	1	1,050,000	6.25%	14.58%	24.75	20,180,000	206.25%	262.76%		
	4.01.4.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/minuman rapat, tamu dan kegiatan (Bulan)	12.00	100,000,000	24.00	138,900,000	12	67,050,000	1	15,050,000	6.25%	22.45%	24.75	153,950,000	206.25%	153.95%		
	4.01.4.01.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan)	12.00	250,000,000	21.00	431,679,818	12	195,000,000	1	92,617,400	6.25%	47.50%	21.75	524,297,218	181.25%	209.72%		
	4.01.4.01.05.01.25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor (Bulan)	12.00	183,200,000	24.00	285,600,000	12	163,200,000	1	40,800,000	6.25%	25.00%	24.75	326,400,000	206.25%	178.17%		
									1,018,004,780			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5.78%	25.67%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00	1,079,743,200	0.00	1,726,641,525							0.00	1,726,641,525	0.00%	159.91%	Dumal Selatan
	4.01.4.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya dan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	400.00	2,400,000	24.00	177,574,000	12	2,400,000	0	300,000	2.08%	12.50%	24.25	177,874,000	6.06%	7411.42%	
	4.01.4.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon, AIF Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan)	12.00	96,924,000	24.00	84,484,891	12	53,724,000	1	12,120,483	6.25%	22.56%	24.75	96,605,374	206.25%	99.67%	
	4.01.4.01.11.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12.00	24,200,000	12.00	57,900,000	12	108,400,000	0	7,200,000	2.08%	6.64%	12.25	65,100,000	102.08%	269.01%	
	4.01.4.01.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)	14.00	6,500,000	21.00	6,295,445	14	4,000,000	-	-	0.00%	0.00%	21.00	6,295,445	150.00%	96.85%	
	4.01.4.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	195,000,000	24.00	253,073,950	12	126,539,000	1	14,400,000	4.17%	11.38%	24.50	267,473,950	204.17%	137.17%	
	4.01.4.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kecamatan (Bulan)	12.00	67,880,000	24.00	123,687,366	12	59,834,530	1	17,972,000	6.25%	30.04%	24.75	141,659,366	206.25%	208.69%	
	4.01.4.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	12.00	40,020,618	24.00	59,095,000	12	31,123,400	1	7,780,000	4.17%	25.00%	24.50	66,875,000	204.17%	167.10%	
	4.01.4.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik (Bulan)	12.00	13,200,000	24.00	8,749,800	12	12,000,000	1	2,921,600	6.25%	24.35%	24.75	11,671,400	206.25%	88.42%	
	4.01.4.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan Kantor (Bulan)	12.00	7,624,000	24.00	14,488,000	12	7,546,400	1	624,000	4.17%	8.27%	24.50	15,112,000	204.17%	198.22%	
	4.01.4.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan)	12.00	71,270,857	24.00	120,443,400	12	66,928,000	1	16,557,750	6.25%	24.74%	24.75	137,001,150	206.25%	192.23%	
	4.01.4.01.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan Perjalanan Dinas (Orang/Bulan)	26.00	228,323,725	24.00	409,909,573	26	199,663,399	3	113,933,197	12.50%	57.06%	27.25	523,842,770	104.81%	229.43%	
	4.01.4.01.11.01.25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayarkan (Bulan)	12.00	240,000,000	24.00	326,390,400	12	163,200,000	1	32,300,000	6.25%	19.79%	24.75	358,690,400	206.25%	149.45%	
									835,358,729		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.75%	27.07%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00	1,649,801,523	0.00	2,201,149,263							0.00	2,201,149,263	0.00%	133.42%	Dumal Timur
	4.01.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (%)	90.00	77,198,000	24.00	134,972,000	100	58,000,000	3	9,317,000	2.50%	16.06%	26.50	144,289,000	29.44%	186.91%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.06.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	90.00	17,640,569	24.00	145,584,360	100	91,333,260	5	17,531,146	5.00%	19.19%	29.00	163,115,506	32.22%	924.66%	
4.01.4.01.06.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor (%)	90.00	58,071,530	23.00	80,345,000	100	6,785,908	7	1,800,000	6.75%	26.53%	29.75	82,145,000	33.06%	141.45%	
4.01.4.01.06.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas yang diurus (unit)					13	7,750,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.06.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayar (%)	90.00	503,118,000	24.00	739,147,312	100	378,000,000	4	62,292,100	3.75%	16.48%	27.75	801,439,412	30.83%	159.29%	
4.01.4.01.06.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor, untuk operasional kecamatan dalam 1 (satu) tahun (100)	90.00	84,700,000	24.00	89,589,000	0	43,268,925	6	10,800,000	0.00%	24.96%	30.25	100,389,000	33.61%	118.52%	
4.01.4.01.06.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (%)	90.00	60,500,000	24.00	62,809,000	100	30,491,902	6	7,650,000	6.25%	25.09%	30.25	70,459,000	33.61%	116.46%	
4.01.4.01.06.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (%)	90.00	9,307,490	24.00	13,891,468	100	6,590,000	6	1,370,000	5.50%	20.79%	29.50	15,261,468	32.78%	163.97%	
4.01.4.01.06.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (%)	90.00	111,143,340	21.00	11,980,000	100	7,500,000	3	275,000	2.50%	3.67%	23.50	12,255,000	26.11%	11.03%	
4.01.4.01.06.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (%)	90.00	102,952,850	24.00	133,096,500	100	100,747,500	4	14,160,000	3.75%	14.05%	27.75	147,256,500	30.83%	143.03%	
4.01.4.01.06.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan Dinas (%)	90.00	302,500,000	24.00	381,609,623	100	153,800,000	18	103,761,600	17.50%	67.47%	41.50	485,371,223	46.11%	160.45%	
4.01.4.01.06.01.25		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang dibayar (%)	90.00	271,289,744	24.00	396,874,000	100	203,824,000	3	33,000,000	2.50%	16.19%	26.50	429,874,000	29.44%	158.46%	
									1,088,091,495		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.41%	24.07%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.08.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>80.00</b>	<b>1,111,300,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Medang Kampal
4.01.4.01.08.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda lainnya (bulan)	12.00	49,400,000			12	4,800,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
4.01.4.01.08.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah listrik dan telepon dalam 1 tahun (bulan)	12.00	48,300,000			12	18,000,000	1	2,329,869	6.25%	12.94%	0.75	2,329,869	6.25%	4.82%	
4.01.4.01.08.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kwintasi jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12.00	86,000,000			12	60,590,000	1	6,400,000	6.25%	10.56%	0.75	6,400,000	6.25%	7.44%	
4.01.4.01.08.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar STNK kendaraan (bulan)	12.00	10,000,000			12	5,100,000	1	-	4.17%	0.00%	0.50	-	4.17%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (bulan)	12.00	230,000,000			12	197,980,000	1	32,541,000	6.25%	16.44%	0.75	32,541,000	6.25%	14.15%	
	4.01.4.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) selama 1 tahun (bulan)	12.00	78,000,000			12	59,613,890	1	7,156,800	6.25%	12.01%	0.75	7,156,800	6.25%	9.18%	
	4.01.4.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun (bulan)	12.00	50,000,000			12	39,112,250	1	1,991,800	6.25%	5.09%	0.75	1,991,800	6.25%	3.98%	
	4.01.4.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik selama 1 tahun (bulan)	12.00	50,000,000			12	7,650,000	1	7,650,000	6.25%	100.00%	0.75	7,650,000	6.25%	15.30%	
	4.01.4.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/ majalah selama 1 tahun (bulan)	12.00	15,000,000			12	8,468,000	1	738,000	6.25%	8.72%	0.75	738,000	6.25%	4.92%	
	4.01.4.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 1 tahun (bulan)	12.00	90,000,000			12	79,520,000	1	10,035,000	6.25%	12.62%	0.75	10,035,000	6.25%	11.15%	
	4.01.4.01.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun (bulan)	12.00	282,200,000			12	195,000,000	1	11,000,000	6.25%	5.64%	0.75	11,000,000	6.25%	3.90%	
	4.01.4.01.08.01.25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor selama 1 tahun (bulan)	12.00	122,400,000			12	122,400,000	1	20,400,000	6.25%	16.67%	0.75	20,400,000	6.25%	16.67%	
									798,234,140		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.20%	12.56%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.09.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>85.00</b>	<b>1,678,584,600</b>	<b>0.00</b>	<b>2,258,879,926</b>							0.00	2,258,879,926	0.00%	134.57%	Sungai Sembilan
	4.01.4.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dalam satu tahun (Buah)	540.00	74,760,000	551.00	132,860,000	540	3,780,000	10	240,000	1.85%	6.35%	561.00	133,100,000	103.89%	178.04%	
	4.01.4.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12.00	115,200,000	24.00	125,496,933	12	91,200,000	1	18,273,505	4.17%	20.04%	24.50	143,770,438	204.17%	124.80%	
	4.01.4.01.09.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12.00	48,000,000	24.00	162,000,000	12	106,800,000	1	16,800,000	4.17%	15.73%	24.50	178,800,000	204.17%	372.50%	
	4.01.4.01.09.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12.00	27,400,000	24.00	47,056,105	12	26,000,000	1	3,400,000	4.17%	13.08%	24.50	50,456,105	204.17%	184.15%	
	4.01.4.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		12.00	294,167,500	24.00	515,645,000	12	291,430,000	1	41,570,000	4.17%	14.26%	24.50	557,215,000	204.17%	189.42%	
	4.01.4.01.09.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan AC, Komputer, dan Mesin Polong Rumpot (Kali)	60.00	21,100,000	84.00	25,200,000	60	13,550,000	3	2,500,000	4.17%	18.45%	86.50	27,700,000	144.17%	131.28%	
	4.01.4.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	74,565,100	23.00	101,870,300	12	52,569,600	1	8,746,700	4.17%	16.64%	23.50	110,617,000	195.83%	148.35%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.09.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	25,042,000	24.00	42,395,600	12	21,562,400	1	3,590,400	4.17%	16.65%	24.50	45,986,000	204.17%	183.64%	
4.01.4.01.09.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	5,600,000	24.00	10,920,000	12	40,800,000	1	27,050,900	4.17%	66.30%	24.50	37,970,900	204.17%	678.05%	
4.01.4.01.09.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (Bulan)	12.00	267,600,000	12.00	1,680,000	0	88,500,000	-	-	0.00%	0.00%	12.00	1,680,000	100.00%	0.63%	
			Surat Kabar Harian selama 1 tahun (Exp)			1800.00	4,507,000							1800.00	4,507,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.09.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu selama satu tahun (Bulan)	11.00	44,550,000	22.00	88,330,000	12	40,975,000	1	6,800,000	4.17%	16.60%	22.50	95,130,000	204.55%	213.54%	
4.01.4.01.09.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas (Orang)		281,400,000	24.00	166,207,833	12	166,345,000	1	88,113,048	6.25%	52.97%	24.75	254,320,881	#DIV/0!	90.38%	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan)	12.00		12.00	224,411,155							12.00	224,411,155	100.00%	#DIV/0!	
4.01.4.01.09.01.25		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan selama 1 Tahun (Bulan)	216.00	367,200,000	24.00	610,300,000	12	306,000,000	1	51,000,000	4.17%	16.67%	24.50	661,300,000	11.34%	180.09%	
									1,249,512,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.14%	21.46%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.01.4.01.03.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>95.00</b>	<b>17,063,404,728</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
4.01.4.01.03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat		8000.00	306,744,202			8000	97,500,000	555	21,300,000	6.94%	21.85%	555.00	21,300,000	6.94%	6.94%	
4.01.4.01.03.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		49.00	3,019,205,700			49	2,287,500,000	1	390,436,582	1.53%	17.07%	0.75	390,436,582	1.53%	12.93%	
								49		1		1.02%		0.50	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.03.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit bulan)	135.00	110,250,000			111	89,136,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
4.01.4.01.03.01.05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		45.00	160,678,886				151,940,486					0.00	-	0.00%	0.00%	
4.01.4.01.03.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor		28.00	848,124,938			0	759,362,000	1	97,071,000	0.00%	12.78%	0.75	97,071,000	2.68%	11.45%	
4.01.4.01.03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor		12.00	1,100,550,354			12	678,991,450	1	52,899,400	6.25%	7.79%	0.75	52,899,400	6.25%	4.81%	
4.01.4.01.03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12.00	417,506,855			12	198,587,400	1	49,170,000	6.25%	24.76%	0.75	49,170,000	6.25%	11.78%	
4.01.4.01.03.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		6.00	572,770,800				101,475,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
4.01.4.01.03.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan untuk Menunjang Kelancaran Aktivitas Kantor (Unit)	305.00	1,229,570,843			25	40,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
4.01.4.01.03.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15.00	212,006,012			0	204,100,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.12.2.12.01.01.21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Ketersediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor (Bulan)	12	88,000,000	24.00	168,370,000	12	85,200,000	1	13,900,000	6.25%	16.31%	24.75	182,270,000	206.25%	207.13%	
									1,528,048,442			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.25%	21.98%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.04.4.04.02.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>0.00</b>	<b>1,970,573,565</b>							0.00	1,970,573,565	#DIV/0!	105.38%	Badan Pendapatan Daerah
					1,870,000,000													
	4.04.4.04.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor (Paket)	2	700,000,000	4.00	387,851,000	3	598,650,000	-	-	0.00%	0.00%	4.00	387,851,000	200.00%	55.41%	
	4.04.4.04.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor (Paket)	1	500,000,000	7.00	373,650,465	5	236,000,000	-	-	0.00%	0.00%	7.00	373,650,465	700.00%	74.73%	
	4.04.4.04.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Penyediaan Meubeler Kantor (Paket)	2	120,000,000	3.00	232,348,000	2	100,000,000	-	-	0.00%	0.00%	3.00	232,348,000	150.00%	193.62%	
	4.04.4.04.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor (Paket)	1	100,000,000	2.00	207,790,000	1	130,000,000	-	-	0.00%	0.00%	2.00	207,790,000	200.00%	207.79%	
	4.04.4.04.02.02.47	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Bapenda (Paket)	1	150,000,000	4.00	305,467,000	3	216,000,000	-	-	0.00%	0.00%	4.00	305,467,000	400.00%	203.64%	
									1,280,650,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.10.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>85.00</b>	<b>341,125,087</b>	<b>0.00</b>	<b>224,636,290</b>						0.00	224,636,290	0.00%	65.85%	Dumai Kota
	4.01.4.01.10.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	2.00	50,000,000	-	-	0	28,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.01.4.01.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	6.00	15,000,000	4.00	27,500,000	3	3,005,000	1	510,000	16.67%	16.97%	4.50	28,010,000	75.00%	186.73%	
	4.01.4.01.10.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	6.00	30,000,000	-	-	7	21,995,000	1	11,490,000	7.14%	52.24%	0.50	11,490,000	8.33%	38.30%	
	4.01.4.01.10.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan (unit)	6.00	20,000,000	2.00	4,400,000	6	9,000,000	2	8,800,000	25.00%	97.78%	3.50	13,200,000	58.33%	66.00%	
	4.01.4.01.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	12.00	50,000,000	-	-	0	9,601,930	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.01.4.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (bulan)	12.00	72,280,000	24.00	134,139,290	12	66,448,200	1	17,980,000	6.25%	27.06%	24.75	152,119,290	206.25%	210.46%	
	4.01.4.01.10.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (bulan)	12.00	11,845,087	-	-	12	9,600,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.01.4.01.10.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (bulan)	12.00	22,000,000	24.00	58,597,000	12	19,970,000	1	1,650,000	6.25%	8.26%	24.75	60,247,000	206.25%	273.85%	
									167,620,130			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5.80%	24.12%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.02.1.02.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>100.00</b>	<b>3,296,465,594</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308,281,116</b>						0.00	2,308,281,116	0.00%	70.02%	Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	1.02.1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Item)	7.00	122,695,000	4.00	119,550,829	4	96,627,500	-	-	0.00%	0.00%	4.00	119,550,829	57.14%	97.44%		
	1.02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	1.00	88,727,300	3.00	405,610,000	1	114,800,000	-	-	0.00%	0.00%	3.00	405,610,000	300.00%	457.14%		
	1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun (unit)	10.00	736,662,185	19.00	925,868,987	10	746,813,000	1	118,430,819	5.00%	15.86%	19.50	1,044,299,806	195.00%	141.76%		
	1.02.1.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan AC dalam satu tahun (kal)	111.00	38,309,900	218.00	67,200,000	111	37,555,000	-	-	0.00%	0.00%	218.00	67,200,000	196.40%	175.41%		
	1.02.1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan printer dalam 1 tahun (kal)	204	44,729,350	407.00	81,150,000	195	216,848,000	-	153,890,000	0.00%	70.97%	407.00	235,040,000	199.51%	525.47%		
			Jumlah pemeliharaan komputer dalam 1 tahun (kal)	160	273.00	150	0.00%	273.00											170.63%
									1,212,643,500			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3.08%	9.77%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.05.4.05.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>415,150,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	4.05.4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1.00	199,150,000			1	179,931,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
	4.05.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		7.00	187,000,000			6	196,691,500	2	42,825,000	25.00%	21.77%	1.50	42,825,000	21.43%	22.90%		
	4.05.4.05.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer		79.00	29,000,000			12	25,500,000	1	6,150,000	6.25%	24.12%	0.75	6,150,000	0.95%	21.21%		
									402,122,500			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12.62%	12.18%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.02.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>85.00</b>	<b>272,394,498</b>	<b>0.00</b>	<b>371,030,785</b>							0.00	371,030,785	0.00%	136.21%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.1.05.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		12.00	28,287,680	9.00	24,500,000		6,000,000					9.00	24,500,000	75.00%	86.61%		
	1.05.1.05.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		6.00	67,402,528	8.00	77,250,570		46,920,000					8.00	77,250,570	133.33%	114.61%		
	1.05.1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang dipelihara (bulan)	20.00	162,995,490	38.00	264,930,215	12	151,790,000	1	22,455,000	6.25%	14.79%	38.75	287,385,215	193.75%	176.31%		
									204,710,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.63%	10.97%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.4.04.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>1,183,812,181</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,915,979</b>							0.00	1,062,915,979	0.00%	89.79%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	4.04.4.04.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 (Unit)	1.00	523,812,181	2.00	437,289,789	2	511,812,881	-	-	0.00%	0.00%	2.00	437,289,789	200.00%	83.48%		
	4.04.4.04.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia (Paket)	1.00	120,000,000	1.00	72,410,000	4	120,000,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	72,410,000	100.00%	60.34%		
	4.04.4.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung (Bulan)	12.00	20,000,000	1.00	98,815,000	12	90,000,000	1	-	6.25%	0.00%	1.75	98,815,000	14.58%	494.08%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.04.4.04.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Bulan)	12.00	300,000,000	24.00	454,401,190	12	317,162,400	1	28,915,000	6.25%	9.12%	24.75	483,316,190	206.25%	161.11%		
									1,038,975,281			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	2.45%	2.78%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.03.4.03.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>1,175,019,823</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,949,241</b>	<b>99</b>	<b>1,218,438,440.00</b>	<b>4.75</b>	<b>204,995,170.00</b>	<b>4.48%</b>	<b>16.82%</b>	4.75	1,703,944,411	4.75%	145.01%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.4.03.01.02.05		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (Unit)	0.00	-	-	-	1	280,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
4.03.4.03.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit)	40.00	200,000,000	4.00	29,745,000	40	159,720,000	2	9,900,000	4.38%	6.20%	5.75	39,645,000	14.38%	19.82%		
4.03.4.03.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	30.00	200,000,000	14.00	453,538,000	30	199,500,000	1	81,259,500	4.17%	40.73%	15.25	534,797,500	50.83%	267.40%		
4.03.4.03.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (Unit)	3.00	220,000,000	2.00	404,484,600	3	194,947,000	0	-	8.33%	0.00%	2.25	404,484,600	75.00%	183.86%		
4.03.4.03.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Kendaraan)	27.00	355,019,823	48.00	580,461,441	25	384,271,440	2	113,835,670	6.00%	29.62%	49.50	694,297,111	183.33%	195.57%		
									1,218,438,440			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.48%	16.82%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.13.2.13.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100</b>	<b>308,941,968</b>	<b>0.00</b>	<b>485,056,100</b>		<b>201,462,000</b>		<b>37,460,000</b>	<b>8.15%</b>	<b>18.59%</b>	0.00	522,516,100	0.00%	169.13%	Dinas Kependudukan, Olahragra Dan Pariwisata	
2.13.2.13.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang perlu dilakukan perawatan (unit)	6	179,542,000	10.00	327,121,100	6	174,872,000	1	25,410,000	8.33%	14.53%	10.50	352,531,100	175.00%	196.35%		
2.13.2.13.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan sarana kerja lainnya (unit)	18	36,940,000	1.00	52,775,000	18	26,590,000	1	12,050,000	6.94%	45.32%	2.25	64,825,000	12.50%	175.49%		
									201,462,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	8.15%	18.59%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.06.2.06.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>1,437,656,500</b>	<b>0.00</b>	<b>550,879,140</b>		<b>465,206,500</b>		<b>41,450,000</b>		<b>8.91%</b>	0.00	592,329,140	0.00%	41.20%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06.01.02.10		Pengadaan mebeleur		12.00	300,000,000				19,050,000					0.00	-	0.00%	0.00%		
2.06.2.06.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12.00	155,000,000	0.00	97,130,000		75,000,000					0.00	97,130,000	0.00%	62.66%		
2.06.2.06.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12.00	182,656,500	0.00	236,623,140	0	172,656,500	-	18,250,000	0.00%	10.57%	0.00	254,873,140	0.00%	139.54%		
2.06.2.06.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12.00	170,000,000	0.00	217,126,000	0	96,500,000	-	23,200,000	0.00%	24.04%	0.00	240,326,000	0.00%	141.37%		
2.06.2.06.01.02.45		Pengadaan komputer		0.00	200,000,000				102,000,000					0.00	-	#DIV/0!	0.00%		
									465,206,500			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	8.91%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.03.3.03.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		90	953,943,450	0.00	536,711,411		128,470,600		48,196,750		37.52%	0.00	584,908,161	0.00%	61.31%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
3.03.3.03.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	10	153,943,450	23.00	313,970,911	10	128,470,600	-	48,196,750	0.00%	37.52%	23.00	362,167,661	230.00%	235.26%	
									128.470.600				0.00%		37.52%			
2.10.2.10.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100.00	2,325,000,000				635,578,600		109,788,600	0.00%	17.27%	0.00	109,788,600	0.00%	4.72%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor		165.00	450,000,000			0	249,425,000	-	25,000,000	0.00%	10.02%	0.00	25,000,000	0.00%	5.56%	
2.10.2.10.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor		55.00	500,000,000			0	337,078,600	-	84,788,600	0.00%	25.15%	0.00	84,788,600	0.00%	16.96%	
2.10.2.10.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12.00	75,000,000				49,075,000					0.00		0.00%	0.00%	
									635.578.600				0.00%		17.27%			
2.05.2.05.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100	5,088,883,910	0.00	6,467,082,575		3,832,975,300		592,623,100	6.34%	15.46%	0.00	7,059,705,675	0.00%	138.73%	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (%)	7	200,000,000	32.00	43,743,500	70	48,166,900	19	38,160,000	26.79%	79.22%	50.75	81,903,500	725.00%	40.95%	
2.05.2.05.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (%)	5	248,358,510	4.00	274,511,000	70	80,200,000	-	-	0.00%	0.00%	4.00	274,511,000	80.00%	110.53%	
2.05.2.05.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (bulan)	12	4,340,525,400	24.00	5,596,362,265	12	3,684,588,400	1	554,463,100	6.25%	15.05%	24.75	6,150,825,365	206.25%	141.71%	
2.05.2.05.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (%)	80	120,000,000	24.00	61,000,000	80	20,020,000	-	-	0.00%	0.00%	24.00	61,000,000	30.00%	50.83%	
									3.832.975.300				6.34%		15.46%			
1.03.1.03.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100.00	9,500,000,000	0.00	13,809,260,292		13,809,260,292		120,945,940	0.34%	0.88%	0.00	13,930,206,232	0.00%	146.63%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.02.03		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Fasilitas Umum / Perkantoran Kota Dumai Yang Dibangun (Unit)	2.00	4,350,000,000	2.87	10,809,400,115	2.87	10,809,400,115	0	16,683,035	0.17%	0.15%	2.88	10,826,083,150	143.75%	248.88%	
1.03.1.03.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Bulan)	12.00	700,000,000	23.73	864,062,500	23.73	864,062,500	-	-	0.00%	0.00%	23.73	864,062,500	197.75%	123.44%	
1.03.1.03.01.02.21		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kebutuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas (Bulan)	12.00	150,000,000	20.68	135,039,100	20.68	135,039,100	-	-	0.00%	0.00%	20.68	135,039,100	172.33%	90.03%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.1.03.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Bulan)	12.00	800,000,000	20.73	944,096,177	20.73	944,096,177	1	104,262,905	3.04%	11.04%	21.36	1,048,359,082	178.00%	131.04%	
1.03.1.03.01.02.45		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kebutuhan Pemeliharaan Rutin Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	1,500,000,000	15.67	1,056,662,400	15.67	1,056,662,400	-	-	0.00%	0.00%	15.67	1,056,662,400	130.58%	70.44%	
									13,809,260,292		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.34%	0.88%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.02.2.02.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>6,369,229,642</b>				<b>264,830,000</b>		<b>71,825,000</b>	<b>18.58%</b>	<b>17.38%</b>	0.00	71,825,000	0.00%	1.13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.02.2.02.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (unit)	6.00	36,719,642			5	117,000,000	1	43,425,000	25.00%	37.12%	1.25	43,425,000	20.83%	118.26%	
2.02.2.02.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas operasional (bulan)	1.00	9,000,000			12	128,480,000	1	25,800,000	4.17%	20.08%	0.50	25,800,000	50.00%	286.67%	
			Terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas (orang)					2		1		25.00%		0.50		#DIV/0!	#DIV/0!	
2.02.2.02.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (bulan)	12.00	14,610,000			12	9,600,000	1	1,800,000	6.25%	18.75%	0.75	1,800,000	6.25%	12.32%	
2.02.2.02.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (bulan)	12.00	14,460,000			12	9,750,000	1	800,000	6.25%	8.21%	0.75	800,000	6.25%	5.53%	
									264,830,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	18.58%	17.38%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.01.1.01.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>95.00</b>	<b>3,500,000,000</b>		<b>1,844,716,320</b>		<b>1,564,775,000</b>		<b>6,200,000</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.40%</b>	0.00	1,850,916,320	0.00%	52.88%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.02.03		Pembangunan gedung kantor		90.00	3,000,000,000	91.00	1,294,625,000	0	1,117,000,000	-	-	0.00%	0.00%	91.00	1,294,625,000	101.11%	43.15%	
1.01.1.01.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		90.00	500,000,000	106.25	550,091,320	100	247,775,000	1	6,200,000	0.75%	2.50%	107.00	556,291,320	118.89%	111.26%	
1.01.1.01.01.02.45		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor							200,000,000					0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
									1,564,775,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.12%	0.40%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.08.2.08.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>590,432,091</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486,719,000</b>		<b>28,200,000</b>		<b>8,500,000</b>	<b>6.25%</b>	<b>30.14%</b>	0.00	1,495,219,000	0.00%	253.24%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (Bulan)	12.00	233,465,760	24.00	219,390,000	12	9,600,000	1	2,400,000	6.25%	25.00%	24.75	221,790,000	206.25%	95.00%	
2.08.2.08.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (Bulan)	12.00	21,224,160	24.00	30,430,000	12	18,600,000	1	6,100,000	6.25%	32.80%	24.75	36,530,000	206.25%	172.12%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									28,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		6.25%	30.14%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.06.3.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		98.00	145,830,000	0.00	278,082,500		124,270,000		23,800,000	7.12%	19.15%	0.00	301,882,500	0.00%	207.01%	Dinas Perdagangan
	3.06.3.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor UPT Kemetrollogian Daerah (%)	100.00	76,600,000	2.00	182,300,000	100	76,600,000	-	-	0.00%	0.00%	2.00	182,300,000	2.00%	237.99%	
	3.06.3.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur kantor (Unit)	9.00	24,265,000	18.00	59,625,500	9	16,300,000	2	16,300,000	25.00%	100.00%	20.25	75,925,500	225.00%	312.90%	
	3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor (Unit)	1.00	15,000,000	13.00	26,907,000	1	15,000,000	0	7,500,000	25.00%	50.00%	13.25	34,407,000	1325.00%	229.38%	
	3.06.3.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor (Bulan)	12.00	29,965,000	12.00	9,250,000	12	16,370,000	1	-	6.25%	0.00%	12.75	9,250,000	106.25%	30.87%	
									124,270,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		7.12%	19.15%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100.00	3,692,424,518	0.00	5,308,296,226		2,103,967,125		724,086,030	0.00%	33.47%	0.00	6,032,382,256	0.00%	163.37%	Dinas Perhubungan
	2.09.2.09.01.02.03	Pembangunan gedung kantor		2.00	300,000,000	2.00	212,575,000	0	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	232,405,000	100.00%	77.47%	
								0	324,800,000		19,830,000	0.00%	6.11%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
								0	-		-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.09.2.09.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		10.00	217,364,518	3.00	287,725,000		90,000,000		-			3.00	287,725,000	30.00%	132.37%	
	2.09.2.09.01.02.10	Pengadaan mebeleur		10.00	70,000,000	2.00	14,400,000	0	113,200,000		112,920,000	0.00%	99.75%	2.00	127,320,000	20.00%	181.89%	
	2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		3.00	800,000,000	8.00	1,960,319,265		248,910,000		-			8.00	1,960,319,265	266.67%	245.04%	
	2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		26.00	900,000,000	12.00	1,157,382,361	0	513,634,000		239,583,030	0.00%	46.64%	12.00	1,396,965,391	46.15%	155.22%	
	2.09.2.09.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12.00	900,000,000	12.00	1,562,501,600	0	813,423,125		351,753,000	0.00%	43.24%	12.00	1,914,254,600	100.00%	212.69%	
									2,103,967,125	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	33.47%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			306,981,704	0.00	703,555,967		321,850,011		28,506,900	13.32%	0.28%	0.00	732,062,867	#DIV/0!	238.47%	Dinas Perikanan
	3.01.3.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor (unit)	0.00	-	1.00	17,000,000	2	8,000,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	17,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.01.3.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit mebeleur (unit)	0.00	-	-	-	2	9,500,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.01.3.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas (unit)	26.00	290,945,704	13.00	643,448,767	12	288,414,011	1	27,604,900	10.42%	9.57%	14.25	671,053,667	54.81%	230.65%	
			Tersedianya BBM kendaraan dinas (voucher)	672.00	-	2409.00	-	482	-	55	-	11.41%		2464.00	-	366.67%	#DIV/0!	
			Terlaksananya servis kendaraan dinas (kall)	43.00	-	51.00	-	8	-	2	-	21.88%		52.75	-	122.67%	#DIV/0!	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terpeliharanya jumlah unit kendaraan dinas (unit)			50.00								50.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.01.3.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya rutinitas service peralatan kantor (kali)	44.00	16,036,000	87.00	43,107,200	32	15,936,000	2	902,000	5.47%	5.66%	88.75	44,009,200	201.70%	274.44%	
									321,850,011			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	13.32%	0.28%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.11.2.11.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>140,976,440</b>	<b>0.00</b>	<b>564,838,084</b>		<b>196,218,040</b>		<b>38,945,000</b>	<b>6.39%</b>	<b>19.85%</b>	0.00	603,783,084	0.00%	428.29%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	2.11.2.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terawalnya gedungkantor dan sarana kerja lainnya (tahun)	1.00	4,400,000	2.00	249,655,000	1	4,400,000	0	2,000,000	12.50%	45.45%	2.13	251,655,000	212.50%	5719.43%	
	2.11.2.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (bulan)	12.00	121,251,440	24.00	240,403,329	12	176,493,040	1	32,945,000	6.25%	18.67%	24.75	273,348,329	206.25%	225.44%	
	2.11.2.11.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawalnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya (tahun)	1.00	15,325,000	2.00	43,725,000	1	15,325,000	0	4,000,000	6.25%	26.10%	2.06	47,725,000	206.25%	311.42%	
									196,218,040			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.39%	19.85%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.17.2.17.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>2,104,156,395</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,321,145</b>		<b>686,719,920</b>		<b>183,562,000</b>	<b>5.54%</b>	<b>26.73%</b>	0.00	1,687,883,145	0.00%	80.22%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.17.2.17.01.02.07	Pembangunan gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan gedung perpustakaan daerah kota dumai (dok)	1.00	589,869,910	1.00	424,784,000	4	940,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	424,784,000	100.00%	72.01%	
	2.17.2.17.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianyanperalatan gedung kantor (unit)	20.00	200,000,000	6.00	179,170,045	13	77,555,000	-	-	0.00%	0.00%	6.00	179,170,045	30.00%	89.59%	
	2.17.2.17.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur (unit)	15.00	200,000,000	3.00	29,214,000	4	120,324,000	0	99,900,000	6.25%	83.03%	3.25	129,114,000	21.67%	64.56%	
	2.17.2.17.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional (bulan)	12.00	800,000,000	12.00	671,679,100	12	487,900,920	1	83,662,000	6.25%	17.15%	12.75	755,341,100	106.25%	94.42%	
									686,719,920			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5.54%	26.73%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.04.1.04.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>85</b>	<b>1,015,092,825</b>	<b>7779643929.00</b>	<b>1,767,728,000</b>		<b>1,842,185,410</b>		<b>120,120,000</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.52%</b>	7779643929.00	1,887,848,000	#####	185.98%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	1.04.1.04.01.02.03	Pembangunan gedung kantor		2.00	12,150,000,000			0	1,018,956,666	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.04.1.04.01.02.05	pengadaan kendaraan dinas/operasional		1	266,706,082	0.00	247,200,000	0	210,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	247,200,000	0.00%	92.69%	
	1.04.1.04.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		4	148,000,000	0.00	449,168,000	0	2,896,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	449,168,000	0.00%	303.49%	
	1.04.1.04.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		20	200,000,000			0	74,500,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.04.1.04.01.02.10	Pengadaan mebeleur		10	100,000,000			0	74,933,544	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.1.04.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	24.00	200,000,000	0.00	1,071,360,000	0	392,499,200	-	112,470,000	0.00%	28.65%	0.00	1,183,830,000	0.00%	591.92%	
1.04.1.04.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	12	300,386,743			0	68,400,000	-	7,650,000	0.00%	11.18%	0.00	7,650,000	0.00%	2.55%	
									1,842,185,410	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	6.52%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.06.1.06.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>674,214,992</b>	<b>0.00</b>	<b>404,490,342</b>		<b>670,607,200</b>		<b>228,160,670</b>	<b>13.97%</b>	<b>34.02%</b>	0.00	632,651,012	0.00%	93.84%	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)	12.00	395,000,000	13.00	362,862,550	12	394,487,200	1	191,300,000	6.25%	48.49%	13.75	554,162,550	114.58%	140.29%	
1.06.1.06.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit)	6.00	279,214,992	10.00	350,117,539	6	276,120,000	2	36,860,670	25.00%	13.35%	11.50	386,978,209	191.67%	138.60%	
									670,607,200	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		13.97%	34.02%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.01.2.01.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>375,150,000</b>				<b>249,210,000</b>		<b>45,010,000</b>	<b>6.25%</b>	<b>18.06%</b>	0.00	45,010,000	0.00%	12.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Dinas (Bulan)	12.00	250,150,000			12	130,100,000	1	13,720,000	6.25%	10.55%	0.75	13,720,000	6.25%	5.48%	
2.01.2.01.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas (Bulan)	12.00	125,000,000			12	119,110,000	1	31,290,000	6.25%	26.27%	0.75	31,290,000	6.25%	25.03%	
									249,210,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		6.25%	18.06%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.02.4.02.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>348,372,342</b>	<b>0.00</b>	<b>589,886,840</b>		<b>339,576,000</b>		<b>120,923,000</b>	<b>11.21%</b>	<b>35.61%</b>	0.00	710,809,840	0.00%	204.04%	Inspektorat
4.02.4.02.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan (Unit)	5.00	37,369,142	4.00	47,906,000	4	49,149,120	1	41,350,000	25.00%	84.13%	5.00	89,256,000	100.00%	238.85%	
4.02.4.02.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	9.00	251,003,200	15.00	411,125,340	8	231,926,880	1	65,488,000	9.38%	28.24%	15.75	476,613,340	175.00%	189.88%	
4.02.4.02.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah biaya pemeliharaan perlengkapan kantor (Kali)	66.00	30,000,000	132.00	55,955,000	66	28,500,000	5	6,900,000	7.58%	24.21%	137.00	62,855,000	207.58%	209.52%	
4.02.4.02.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dirawat (Bulan)	12.00	30,000,000	24.00	59,900,500	12	30,000,000	1	7,185,000	6.25%	23.95%	24.75	67,085,500	206.25%	223.62%	
									339,576,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		11.21%	35.61%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.05.1.05.03.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>166,460,000</b>	<b>0.00</b>	<b>267,742,519</b>		<b>353,165,054</b>		<b>32,445,000</b>	<b>10.84%</b>	<b>9.19%</b>	0.00	300,187,519	0.00%	180.34%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terawat dengan baik (unit)	1.00	100,000,000	12.00	7,970,000	1	200,000,000	-	-	0.00%	0.00%	12.00	7,970,000	1200.00%	7.97%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
	1.05.1.05.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas terawat dengan baik (unit)	5.00	66,460,000	5.00	103,009,900	5	153,165,054	1	32,445,000	25.00%	21.18%	6.25	135,454,900	125.00%	203.81%		
									353,165,054			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	10.84%	9.19%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.02.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>840,829,377</b>							0.00	840,829,377	0.00%	40.04%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
	1.02.1.02.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100.00	700,000,000	122.00	610,485,560		1,261,700,000					122.00	610,485,560	122.00%	87.21%		
	1.02.1.02.02.02.10	Pengadaan mebeleur		100.00	350,000,000	6.00	11,136,000		15,000,000					6.00	11,136,000	6.00%	3.18%		
	1.02.1.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin mobil operasional dan ambulance (%)	100.00	430,000,000	1.00	200,397,817	100	411,220,000	4	58,387,655	3.55%	14.20%	4.55	258,785,472	4.55%	60.18%		
	1.02.1.02.02.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional		100.00	120,000,000	1.00	18,810,000		23,628,200					1.00	18,810,000	1.00%	15.68%		
									1,711,548,200			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.85%	3.41%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>750,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>745,503,440</b>							0.00	745,503,440	0.00%	99.40%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12.00	78,000,000			0	133,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
	1.05.1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas/ Operasional dipelihara (bulan)	12.00	250,000,000	24.00	540,524,440	12	191,827,000	1	13,200,000	6.25%	6.88%	24.75	553,724,440	206.25%	221.49%		
	1.05.1.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan peralatan gedung kantor dipelihara (bulan)	12.00	30,000,000	114.00	52,450,000	12	18,980,000	1	3,015,000	4.17%	15.89%	114.50	55,465,000	954.17%	184.88%		
									343,807,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3.72%	4.72%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.04.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>12.00</b>	<b>34,378,305,225</b>	<b>12.00</b>	<b>3,107,173,144</b>							12.00	3,107,173,144	100.00%	9.04%	Sekretariat DPRD	
	4.01.4.01.04.02.04	Pengadaan mobil jabatan		0.00					2,400,000,000										
	4.01.4.01.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		12.00	4,060,000,000				48,000,000					0.00		0.00%	0.00%		
	4.01.4.01.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		12.00	4,792,622,416			0				0.00%		0.00	17,600,000	0.00%	0.37%		
				0				0					0.00%						
				0					126,000,000				17,600,000		13.97%				
				0											0.00%				
	4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100.00	5,605,587,309	9.00	309,985,000	0	184,260,000		7,000,000	0.00%	3.80%	9.00	316,985,000	9.00%	5.65%		
	4.01.4.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		33.00	5,369,783,000	91.00	1,625,536,258	0	1,095,826,500		6,800,000	0.00%	0.62%	91.00	1,632,336,258	275.76%	30.40%		
	4.01.4.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12.00	4,249,062,500	24.00	173,109,761	0	199,250,000		2,700,000	0.00%	1.36%	24.00	175,809,761	200.00%	4.14%		
									4,053,336,500			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.41%					





No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.09.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		85.00	1,496,980,000	0.00	169,566,800							0.00	169,566,800	0.00%	11.33%	Sungai Sembilan
	4.01.4.01.09.02.05	pengadaan kendaraan dinas/operasional		0.00	300,000,000	0.00	-		34,000,000									
	4.01.4.01.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit)	0.00	135,000,000	8.00	38,799,800	20	115,000,000	-	14,800,000	0.00%	12.87%					
	4.01.4.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (Bulan)	12.00	214,680,000	12.00	14,085,000	12	14,680,000	1	1,675,000	4.17%	11.41%	12.50	15,760,000	104.17%	7.34%	
			Terawatnya Mobil Dinas/Operasional (Mobil)			1.00	14,680,000		163,680,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.37%	10.07%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.03.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		84.00	14,628,571,591									0.00	-	0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.01.4.01.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor (Unit)	1.00	496,125,000			2	300,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.01.4.01.03.02.05	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	2.00	1,000,000,000			3	1,000,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.01.4.01.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		28.00	526,708,350				294,015,317					0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.01.4.01.03.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		2.00	2,449,186,827			12	1,468,987,000	1	68,940,000	6.25%	4.69%	0.75	68,940,000	37.50%	2.81%	
	4.01.4.01.03.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1.00	1,379,680,628			12	1,009,939,500	1	102,000,000	6.25%	10.10%	0.75	102,000,000	75.00%	7.39%	
	4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		7.00	981,324,225				312,390,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.01.4.01.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		4.00	885,120,424			0	397,800,000	-	30,780,000	0.00%	7.74%	0.00	30,780,000	0.00%	3.48%	
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		64.00	4,368,732,852			12	1,841,112,000	1	110,552,500	6.25%	6.00%	0.75	110,552,500	1.17%	2.53%	
	4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		650.00	409,071,600			0	269,450,000	-	47,045,000	0.00%	17.46%	0.00	47,045,000	0.00%	11.50%	
	4.01.4.01.03.02.45	Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center		39.00	1,174,577,040			12	876,159,000	1	110,680,000	6.25%	12.63%	0.75	110,680,000	1.92%	9.42%	
	4.01.4.01.03.02.46	Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru		1.00	809,671,645			12	419,899,500	1	53,509,342	6.25%	12.74%	0.75	53,509,342	75.00%	6.61%	
									8,189,752,317	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		4.29%	6.39%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.12.2.12.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100	1,805,230,000	0.00	3,447,171,441							0.00	3,447,171,441	0.00%	190.95%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya		54.00	220,500,000				198,400,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									198,400,000									
	4.04.4.04.02.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			245,000,000	<b>0.00</b>	<b>250,720,694</b>							0.00	250,720,694	#DIV/0!	102.33%	Badan Pendapatan Daerah
	4.04.4.04.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur (Orang)	30	180,000,000	46.00	168,320,694	40	150,000,000	-	-	0.00%	0.00%	46.00	168,320,694	153.33%	93.51%	
	4.04.4.04.02.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pembinaan mental dan rohani aparatur (Kal)	12	65,000,000	22.00	82,400,000	12	58,000,000	1	7,250,000	4.17%	12.50%	22.50	89,650,000	187.50%	137.92%	
									208,000,000									
	4.01.4.01.10.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>85.00</b>	<b>25,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Kota
	4.01.4.01.10.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		12.00	25,000,000				10,500,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									10,500,000									
	1.02.1.02.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>371,216,400</b>	<b>0.00</b>	<b>614,616,400</b>							0.00	614,616,400	0.00%	165.57%	Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrasi kepegawaian (orang)	0.00	135,973,200	120.00	158,915,000	50	133,701,750	13	63,379,500	25.00%	47.40%	132.50	222,294,500	#DIV/0!	163.48%	
	1.02.1.02.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Tausiah bulanan (bulan)	11	235,243,200		455,701,400	5	202,840,000	1	36,300,000	15.00%	17.90%	0.75	492,001,400	6.82%	209.15%	
									336,541,750									
	4.05.4.05.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>55.00</b>	<b>369,800,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4.05.4.05.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		20.00	274,800,000				150,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									150,000,000									
	1.05.1.05.02.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>80.00</b>	<b>62,168,337</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000,000</b>							0.00	27,000,000	0.00%	43.43%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.1.05.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal		8.00	62,168,337	4.50	27,000,000		13,500,000					4.50	27,000,000	56.25%	43.43%	
									13,500,000									



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.04.4.04.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00	250,000,000	0.00	240,499,990							0.00	240,499,990	0.00%	96.20%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	20.00	250,000,000	0.00	240,499,990	20	250,000,000	3	-	12.50%	0.00%	2.50	240,499,990	12.50%	96.20%	
								250,000,000				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12.50%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.03.4.03.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20.00	531,212,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.05.04		Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani (Bulan)	12.00	200,000,000			12	89,880,000	1	20,840,000	6.25%	23.19%	0.75	20,840,000	6.25%	10.42%	
								89,880,000				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.25%	23.19%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.06.2.06.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00	163,623,706	0.00	550,879,140							0.00	550,879,140	0.00%	336.67%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.05.04		Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah		0.00	163,623,706				105,139,904					0.00	-	#DIV/0!	0.00%	
								105,139,904				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.03.1.03.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00	680,000,000	0.00	275,972,165	0	605,563,167					0.00	275,972,165	0.00%	40.58%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	40.00	680,000,000	29.24	275,972,165	69.24	605,563,167	-	-	0.00%	0.00%	29.24	275,972,165	73.10%	40.58%	
								605,563,167				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.01.1.01.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90.00	350,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal		80.00	350,000,000				90,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
								90,000,000				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3.06.3.06.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.00	95,716,000	0.00	66,700,510							0.00	66,700,510	0.00%	69.69%	Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur (Tahun)	1.00	95,716,000	35.00	66,700,510	1	55,700,000	-	7,880,000	0.00%	14.15%	35.00	74,580,510	3500.00%	77.92%	
								55,700,000				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	14.15%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.09.2.09.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00	55,182,714	0.00	89,955,000							0.00	89,955,000	0.00%	163.01%	Dinas Perhubungan

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.2.09.01.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal		5.00	55,182,714	12.00	89,955,000	0	53,000,000	-	14,000,000	0.00%	26.42%	12.00	103,955,000	240.00%	188.38%	
									53,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	26.42%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.17.2.17.01.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>87,601,500</b>	<b>0.00</b>	<b>81,500,000</b>							0.00	81,500,000	0.00%	93.03%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali)	22.00	87,601,500	18.00	81,500,000	6	58,500,000	-	-	0.00%	0.00%	18.00	81,500,000	81.82%	93.03%	
									58,500,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.06.1.06.01.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500,000</b>							0.00	31,500,000	0.00%	78.75%	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kelengkapan aparatur dalam memahami pekerjaan (bulan)	12.00	40,000,000	13.00	31,500,000	12	40,000,000	-	-	0.00%	0.00%	13.00	31,500,000	108.33%	78.75%	
									40,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.05.1.05.03.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>52,250,000</b>							0.00	52,250,000	0.00%	130.63%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.03.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya aparatur yang paham dengan ketentuan (bulan)	12.00	40,000,000	24.00	52,250,000	12	40,000,000	1	-	6.25%	0.00%	24.75	52,250,000	206.25%	130.63%	
									40,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.25%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.02.1.02.02.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100.00</b>	<b>2,280,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>2,618,291,500</b>							0.00	2,618,291,500	0.00%	114.84%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1.02.1.02.02.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan/kursus (%)	100.00	2,280,000,000	2860.00	2,618,291,500	100	420,000,000	6	95,299,000	5.67%	22.69%	2865.67	2,713,590,500	2865.67%	119.02%	
									420,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5.67%	22.69%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.05.1.05.01.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>75.00</b>	<b>130,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>122,519,480</b>							0.00	122,519,480	0.00%	94.25%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah personil Satpol PP Kota Dumai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.00	130,000,000	10.00	122,519,480	1	46,140,000	0	41,526,200	25.00%	90.00%	10.25	164,045,680	170.83%	126.19%	
									46,140,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25.00%	90.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
4.01.4.01.04.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>80.00</b>	<b>483,065,880</b>	<b>80.00</b>	<b>378,450,000</b>							80.00	378,450,000	100.00%	78.34%	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		50.00	483,065,880	61.00	378,450,000	0	1,250,000,000	-	253,340,958	0.00%	20.27%	61.00	631,790,958	122.00%	130.79%	
									1,250,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	20.27%				





No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									279,898,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8.23%	6.30%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.03.4.03.01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		5.00	132,176,298	0.00	73,600,000							0.00	73,600,000	0.00%	55.68%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	3.00	70,976,298	4.00	40,800,000	3	12,200,000	1	-	25.00%	0.00%	4.75	40,800,000	158.33%	57.48%	
4.03.4.03.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan (Dokumen)	2.00	61,200,000	2.00	32,800,000	2	6,300,000	0	-	12.50%	0.00%	2.25	32,800,000	112.50%	53.59%	
									18,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		20.74%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.13.2.13.01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	126,802,742	0.00	121,181,250							0.00	121,181,250	0.00%	95.57%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
2.13.2.13.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJ, LPPD, LKPJ dan Renja Diskopar (dokumen)	4	51,626,445	8.00	30,514,000	4	16,989,800	1	16,937,000	25.00%	99.69%	9.00	47,451,000	225.00%	91.91%	
2.13.2.13.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun kantor Diskopar (dokumen)	1	38,161,297	2.00	36,048,000	1	15,542,000	-	-	0.00%	0.00%	2.00	36,048,000	200.00%	94.46%	
2.13.2.13.01.06.05		Penyusunan rencana kerja anggaran	Jumlah dokumen rencana kerja (dokumen)	3	37,015,000	2.00	38,635,250	3	34,233,000	-	-	0.00%	0.00%	2.00	38,635,250	66.67%	104.38%	
									66,764,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		6.36%	25.37%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.06.2.06.01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00	245,016,000	0.00	243,773,994							0.00	243,773,994	0.00%	99.49%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0.00	114,775,000	0.00	100,737,994		77,200,460					0.00	100,737,994	#DIV/0!	87.77%	
2.06.2.06.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		0.00	65,000,000	0.00	42,880,000	0	35,000,000	-	18,450,000	0.00%	52.71%	0.00	61,330,000	#DIV/0!	94.35%	
2.06.2.06.01.06.05		Penyusunan laporan keuangan semesteran		0.00	65,241,000	0.00	49,581,000		35,241,000					0.00	49,581,000	#DIV/0!	76.00%	
									147,441,460	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	12.51%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3.03.3.03.01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2	136,000,000	0.00	123,622,979							0.00	123,622,979	0.00%	90.90%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
3.03.3.03.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya SOP Dinas (Laporan)	12	117,100,000		107,822,979	1		-	-	0.00%		0.00	107,822,979	0.00%	92.08%	
			Tersusunnya LKJ 2018 (Laporan)					1	71,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Tersusunnya Profile Dinas (Laporan)					1		-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.03.3.03.01.06.05		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran (Laporan)	2	18,900,000	2.00	15,800,000	2	18,900,000	-	5,150,000	0.00%	27.25%	2.00	20,950,000	100.00%	110.85%	
									89,900,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	5.73%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.10.2.10.01.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>100.00</b>	<b>80,000,000</b>								0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			4.00	40,000,000			30,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
2.10.2.10.01.06.03		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			2.00	20,000,000			16,529,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
2.10.2.10.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			1.00	20,000,000			10,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									56,529,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.05.2.05.01.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			100	120,000,000	<b>0.00</b>	<b>186,561,000</b>						0.00	186,561,000	0.00%	155.47%	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (bulan)	2	40,000,000	24.00	94,116,000	12	28,021,030	1	-	6.25%	0.00%	24.75	94,116,000	1237.50%	235.29%	
2.05.2.05.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan (bulan)	1	39,900,000	24.00	49,230,000	12	23,450,000	1	-	6.25%	0.00%	24.75	49,230,000	2475.00%	123.38%	
2.05.2.05.01.06.05		Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan penyusunan rencana kinerja OPD (bulan)	2	40,100,000	24.00	43,215,000	12	35,421,400	1	-	6.25%	0.00%	24.75	43,215,000	1237.50%	107.77%	
									86,892,430			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.25%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.03.1.03.01.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>100.00</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>393,650,850</b>						0.00	393,650,850	0.00%	78.73%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.00	150,000,000	19	133,896,200	2	68,041,500	0	22,400,000	8.25%	32.92%	19.09	156,296,200	954.25%	104.20%	
1.03.1.03.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1.00	90,000,000			1	74,150,000	0	22,400,000	7.50%	30.21%	0.08	22,400,000	7.50%	24.89%	
1.03.1.03.01.06.06		Penyusunan rencana kerja anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD Yang Dibuat (Dokumen)	2.00	260,000,000	20	214,900,350	2	190,754,200	-	-	0.00%	0.00%	19.94	214,900,350	997.00%	82.65%	
									332,945,700			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3.36%	13.46%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5X100		12
	2.02.2.02.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		4.00	71,109,500									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.02.2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKJ, LPPD, LKJP dan Resntra (dokumen)	4.00	36,275,000			4	31,415,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	2.02.2.02.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya rencana kerja anggaran murni dan perubahan (dokumen)	3.00	24,422,000			2	19,527,000	1	-	25.00%	0.00%	0.50	-	16.67%	0.00%	
	2.02.2.02.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1.00	10,412,500			1	5,545,000	0	5,545,000	25.00%	100.00%	0.25	5,545,000	25.00%	53.25%	
									56,487,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		11.10%	9.82%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.01.1.01.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		100.00	820,000,000	95.00	574,428,400							95.00	574,428,400	95.00%	70.05%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.1.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		95.00	570,000,000	7.50	217,213,500	0	281,144,300	-	-	0.00%	0.00%	7.50	217,213,500	7.89%	38.11%	
	1.01.1.01.01.06.05	Penyusunan laporan keuangan semesteran		90.00	250,000,000	86.00	357,214,900		244,577,387					86.00	357,214,900	95.56%	142.89%	
									525,721,687	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.08.2.08.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		100.00	138,720,833	0.00	98,763,750							0.00	98,763,750	0.00%	71.20%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.2.08.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKJ, LKJP, LPPD dan RENSTRA (Dokumen)	4.00	80,000,000	8.00	70,123,500	4	74,144,000	-	-	0.00%	0.00%	8.00	70,123,500	200.00%	87.65%	
	2.08.2.08.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan (Dokumen)	2.00	32,693,085	4.00	16,890,000	2	11,160,000	-	-	0.00%	0.00%	4.00	16,890,000	200.00%	51.66%	
	2.08.2.08.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1.00	26,027,748	2.00	11,750,250	1	4,577,550	-	-	0.00%	0.00%	2.00	11,750,250	200.00%	45.15%	
									89,881,550	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.06.3.06.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		14.00	100,000,000	0.00	135,939,000							0.00	135,939,000	0.00%	135.94%	Dinas Perdagangan
	3.06.3.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja berupa LAKIP dan RENJA (%)	100.00	45,950,000	178.00	77,105,000	100	24,750,000	2	2,334,059	2.25%	9.43%	180.25	79,439,059	180.25%	172.88%	
	3.06.3.06.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran (%)	100.00	30,000,000	179.00	30,514,000	100	14,600,000	-	-	0.00%	0.00%	179.00	30,514,000	179.00%	101.71%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD sampai dengan RPKD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.06.3.06.01.06.05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester (%)	100.00	24,050,000	175.00	28,320,000	100	12,250,000	-	-	0.00%	0.00%	175.00	28,320,000	175.00%	117.75%	
									51,600,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	1.08%	4.52%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.09.2.09.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100.00</b>	<b>90,499,650</b>	<b>0.00</b>	<b>134,922,250</b>							0.00	134,922,250	0.00%	149.09%	Dinas Perhubungan
	2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2.00	42,400,000	2.00	67,584,750		41,800,000					2.00	67,584,750	100.00%	159.40%	
	2.09.2.09.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		1.00	27,000,000	1.00	35,215,000		19,900,000					1.00	35,215,000	100.00%	130.43%	
	2.09.2.09.01.06.05	Penyusunan laporan keuangan semesteran		1.00	21,099,650	2.00	32,122,500		16,900,000					2.00	32,122,500	200.00%	152.24%	
									78,600,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	3.01.3.01.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100.00</b>	<b>79,884,113</b>	<b>0.00</b>	<b>139,953,300</b>							0.00	139,953,300	0.00%	175.20%	Dinas Perikanan
	3.01.3.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya update data website (kail)	12.00	59,914,113	16.00	67,950,200	5	-	-	0.00%	0.00%	16.00	67,950,200	133.33%	113.41%		
			Terlaksananya dokumen capaian kinerja (dokumen)	7.00	-	7.00	-	12	65,728,750	1	6.25%	0.00%	7.75	-	110.71%	#DIV/0!		
	3.01.3.01.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya CaLK Dinas Perikanan (dokumen)	1.00	19,970,000	101.00	53,108,100	1	19,947,500	-	-	0.00%	0.00%	101.00	53,108,100	10100.00%	265.94%	
									85,676,250	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	2.40%	0.00%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.11.2.11.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100.00</b>	<b>92,850,242</b>	<b>0.00</b>	<b>124,893,150</b>							0.00	124,893,150	0.00%	134.51%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	2.11.2.11.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Terlaksananya evaluasi laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya (dokumen)	3.00	37,931,171	3.00	50,225,600	3	20,742,180	1	18,942,180	25.00%	91.32%	3.75	69,167,780	125.00%	182.35%	
	2.11.2.11.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1.00	34,466,531	1.75	45,929,680	1	17,708,780	-	-	0.00%	0.00%	1.75	45,929,680	175.00%	133.26%	
	2.11.2.11.01.06.05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan keuangan semester (laporan)	1.00	20,452,540	2.00	28,737,870	1	15,053,170	-	-	0.00%	0.00%	2.00	28,737,870	200.00%	140.51%	
									53,504,130	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	9.69%	35.40%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.17.2.17.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100.00</b>	<b>72,868,000</b>	<b>0.00</b>	<b>129,805,000</b>							0.00	129,805,000	0.00%	178.14%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.2.17.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja OPD yang diselesaikan (laporan)	8.00	50,000,000	14.00	92,415,000	8	27,900,000	-	-	0.00%	0.00%	14.00	92,415,000	175.00%	184.83%	
2.17.2.17.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan (1)	1.00	22,868,000	2.00	37,390,000	0	20,400,000	-	-	0.00%	0.00%	2.00	37,390,000	200.00%	163.50%	
									48,300,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.04.1.04.01.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		100	170,207,000	<b>232427700.00</b>	<b>210,445,815</b>							232427700.00	210,445,815	232427700.00%	123.64%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12	72,260,000	0.00	75,956,059	0	52,324,000	-	6,850,000	0.00%	13.09%	0.00	82,806,059	0.00%	114.59%	
1.04.1.04.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		12	48,160,000	0.00	65,485,500	0	45,701,000	-	6,650,000	0.00%	14.55%	0.00	72,135,500	0.00%	149.78%	
1.04.1.04.01.06.05		Penyusunan rencana kinerja SKPD		12	49,787,000	0.00	69,004,256	0	44,778,000	-	7,300,000	0.00%	16.30%	0.00	76,304,256	0.00%	153.26%	
									142,803,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	14.57%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.06.1.06.01.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100.00</b>	<b>96,824,000</b>	<b>0.00</b>	<b>145,729,000</b>							0.00	145,729,000	0.00%	150.51%	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD (Renja, LPPD, LKJ DAN LKPJ) (Dokumen)	4.00	45,000,000	7.00	63,115,000	4	22,980,000	1	2,950,000	25.00%	12.84%	8.00	66,065,000	200.00%	146.81%	
1.06.1.06.01.06.03		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis SKPD (RKA dan RKAP dan Prognosis) (Dokumen)	2.00	27,824,000	4.00	46,300,000	2	28,587,000	1	12,950,000	25.00%	45.30%	4.50	59,250,000	225.00%	212.95%	
1.06.1.06.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan SKPD (Laporan)	1.00	24,000,000	2.00	36,314,000	1	22,440,000	0	16,790,000	25.00%	74.82%	2.25	53,104,000	225.00%	221.27%	
									74,007,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		25.00%	44.17%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.01.2.01.01.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>2.00</b>	<b>117,500,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Renstra, Renja dan Lakip APBD (Dokumen)	2.00	40,500,000			2	32,370,000	1	15,150,000	37.50%	46.80%	0.75	15,150,000	37.50%	37.41%	
2.01.2.01.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	2.00	38,000,000			2	21,273,800	1	21,273,800	37.50%	100.00%	0.75	21,273,800	37.50%	55.98%	
2.01.2.01.01.06.05		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan Semester (Dokumen)	2.00	39,000,000			2	31,060,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									84,703,800	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		23.75%	43.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.4.02.01.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		1.00	23,480,594	0.00	36,250,000							0.00	36,250,000	0.00%	154.38%	Inspektorat
4.02.4.02.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja (Dokumen)	1.00	13,725,202	2.00	23,900,000	1	13,467,100	0	-	25.00%	0.00%	2.25	23,900,000	225.00%	174.13%	
4.02.4.02.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	1.00	9,755,392	2.00	12,350,000	1	9,463,686	0	-	25.00%	0.00%	2.25	12,350,000	225.00%	126.60%	
									22,930,786			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	25.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.05.1.05.03.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		100.00	110,300,000	0.00	117,420,000							0.00	117,420,000	0.00%	106.46%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.03.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan evaluasi (dokumen)	4.00	23,275,000	4.00	38,910,000	4	23,275,000	-	-	0.00%	0.00%	4.00	38,910,000	100.00%	167.18%	
1.05.1.05.03.06.03		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis anggaran (dokumen)	2.00	23,275,000	2.00	39,005,000	2	23,275,000	-	-	0.00%	0.00%	2.00	39,005,000	100.00%	167.58%	
1.05.1.05.03.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1.00	63,750,000	1.00	39,505,000	1	55,675,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	39,505,000	100.00%	61.97%	
									102,225,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.02.1.02.02.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		100.00	120,000,000	0.00	208,968,825							0.00	208,968,825	0.00%	174.14%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1.02.1.02.02.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Pencapaian Kinerja SKPD (%)	100.00	39,952,865	101.00	71,829,800	100	38,207,750	23	34,950,000	22.87%	91.47%	123.87	106,779,800	123.87%	267.26%	
1.02.1.02.02.06.03		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Pelaporan Program Realisasi Anggaran (%)	100.00	39,847,135	101.00	67,992,425	100	35,937,450	24	34,950,000	24.31%	97.25%	125.31	102,942,425	125.31%	258.34%	
1.02.1.02.02.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		100.00	40,200,000	2.00	69,146,600		36,318,000					2.00	69,146,600	2.00%	172.01%	
									110,463,200			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	15.82%	63.28%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Rendah				
1.05.1.05.01.06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		100.00	520,925,000	0.00	173,225,000							0.00	173,225,000	0.00%	33.25%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Yang disusun (Dokumen)	2.00	465,450,000	4.00	69,050,000	2	29,520,000	0	13,620,000	12.50%	46.14%	4.25	82,670,000	212.50%	17.76%	
1.05.1.05.01.06.03		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		2.00	35,000,000	4.00	67,050,000	0	28,120,000	-	-	0.00%	0.00%	4.00	67,050,000	200.00%	191.57%	
1.05.1.05.01.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		1.00	20,475,000	2.00	37,125,000	0	15,412,000	-	-	0.00%	0.00%	2.00	37,125,000	200.00%	181.32%	
									73,052,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	5.05%	18.64%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				







No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	1.02.1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelatihan mutu kader posyandu (orang)	200	48.338,590	100.00	90,701,000	70		-		0.00%		100.00	90,701,000	50.00%	187.64%			
			Pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk (kasus)	220		101		120		89,222,700			0.00%		101.00		45.91%	#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) (RKT)	1	2,666,529,160	2.00	2,703,646,748	1		0		25.00%		2.25	2,768,696,748	225.00%	103.83%			
			Pelaksanaan pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) (kali)	2				2		247,005,750		65,050,000	0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!		
			Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi (kasus)	40			80.00		37				0.00%		80.00		200.00%	#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.16.17	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan (sekolah)			560.00	144,300,000	280				0.00%		560.00	147,800,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
							10			42,122,500		3,500,000	0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.16.18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan perkesmas kewilayahan (puskesmas)		43,395,652		14,020,903,300	10				0.00%		0.00	15,106,228,300	#DIV/0!	34810.47%			
			Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal (anak)				310.00		250				0.00%		310.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas (bulan)				24.00		12			1	6.25%		24.75		#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas (puskesmas)						8		12,641,080,000		1,085,325,000	0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis (orang)						200	100				0.00%		0.00	200	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Puskesmas yang mendapat Pembinaan puskesmas (kali)					4.00		2				0.00%		4.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.16.19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit	Pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit (kali)		122,988,710	3.00	115,886,500	3				0.00%		3.00	115,886,500	#DIV/0!	94.23%			
			Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS (triwulan)	4			4.00		4			0	6.25%		4.25		106.25%	#DIV/0!		
			Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas (kali)	2				3.00		2				0.00%		3.00		150.00%	#DIV/0!	
			Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dilbha (sarana)	18				4.00		16				0.00%		4.00		22.22%	#DIV/0!	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizihannya (orang)	55				20				0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!			
			Jumlah puskesmas yg memiliki 5 jenis ketenagaan (puskesmas)	10				10				0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!			
									387,147,783			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	4,74%						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		18.00	415,589,600	0.00	506,339,475							0.00	506,339,475	0.00%	121.84%	Dinas Kesehatan		
	1.02.1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	PMT pemulihan bagi balita gizi kurang/ buruk (balita)	50	171,288,900	36.00	227,396,875	30				0.00%		36.00	227,396,875	72.00%	132.76%			
			Pelaksanaan data bumil KEK dan PMT Bumil KEK (orang)	50				13	87,948,000				0.00%	0.00%	0.00		0.00%	#DIV/0!		
								0					0.00%							
			Jumlah balita yang mendapat vitamin (balita)	500		500.00		500					0.00%		500.00		100.00%	#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Peningkatan Kinerja Program Gizi (orang)	120	244,300,700	120.00	278,942,600	60				0.00%		120.00	278,942,600	100.00%	114.18%			
			Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium (kelurahan)	33				33	30,296,278				0.00%	0.00%	0.00		0.00%	#DIV/0!		
									118,244,278			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		100.00	1,340,560,000	0.00	1,780,731,800							0.00	1,780,731,800	0.00%	132.83%	Dinas Kesehatan		
	1.02.1.02.01.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan (dukumen)	2	1,340,560,000	2.00	1,780,731,800	2				0.00%		2.00	1,946,896,050	100.00%	145.23%			
			Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan (dukumen)	2		4.00		2					0.00%		4.00		200.00%	#DIV/0!		
			Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan (dukumen)	2		2.00		2	965,074,750	166,164,250			0.00%	17.22%	2.00		100.00%	#DIV/0!		
			Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan (dukumen)	2				2					0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!		
			Dokumen pelaksanaan pemucuan STBM dan stop BABS (dukumen)	1				1					0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
									965,074,750			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.1.02.01.22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>		1	2,961,541,202	0.00	4,018,755,887							0.00	4,018,755,887	0.00%	135.70%	Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah pelaksanaan fogging fokus (focus)	300	425,136,800	260.00	639,603,500	100	217,985,500	24	-	24.00%	0.00%	284.00	639,603,500	94.67%	150.45%	
	1.02.1.02.01.22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah ketersediaan insektisida DBD (liter)	250	343,062,342	292.00	109,048,000	200	152,165,250	-	44,528,000	0.00%	29.26%	292.00	153,576,000	116.80%	44.77%	
			Jumlah ketersediaan swing fog (unit)	3	-	-	-	1	-	0	-	25.00%	-	0.25	-	8.33%	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah (SD)	114	613,270,900	228.00	500,132,000	29	104,947,500	-	-	0.00%	0.00%	228.00	500,132,000	200.00%	81.55%	
			Pelaksanaan catch up campaign campak SD (SD)	114	-	144.00	-	29	-	-	-	0.00%	0.00%	144.00	-	126.32%	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelaksanaan PE DBD & lavarsidasi selektif (kasus)	300	1,155,144,000	231.00	1,690,974,457	200	593,305,000	-	-	0.00%	0.00%	231.00	1,690,974,457	77.00%	146.39%	
			Pelaksanaan lavarsida massal (kali)	-	-	3.00	-	2	-	-	-	0.00%	-	3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru (kasus)	250	-	437.00	-	250	-	-	-	0.00%	0.00%	437.00	-	174.80%	#DIV/0!	
			Pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS (puskesmas)	10	-	20.00	-	10	-	3	-	25.00%	-	22.50	-	225.00%	#DIV/0!	
			Pelaksanaan pengendalian penyakit IMS (puskesmas)	10	-	20.00	-	10	-	-	-	0.00%	-	20.00	-	200.00%	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB (kali)	3	191,055,300	5.00	726,440,930	3	116,050,000	-	-	0.00%	0.00%	5.00	726,440,930	166.67%	380.23%	
	1.02.1.02.01.22.12	Peningkatan imunisasi	Pelaksanaan pengelola rantai penyimpanan vaksin (bulan)	12	192,965,850	-	297,457,000	10	116,155,286	-	-	0.00%	0.00%	0.00	297,457,000	0.00%	154.15%	
			Pembinaan peningkatan cakupan UCI di 10 puskesmas (kali)	4	-	12.00	-	3	-	-	-	0.00%	-	12.00	-	300.00%	#DIV/0!	
									1,300,608,536		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	7.77%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.01.23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>		<b>100.00</b>	<b>14,809,451,849</b>	<b>45.00</b>	<b>3,116,964,645</b>	<b>45.00</b>						45.00	3,116,964,645	45.00%	21.05%	Dinas Kesehatan
		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dihasilkan per tahun (dokumen)	1	82,707,870	2.00	149,652,978	1	-	0	-	25.00%	-	2.25	165,502,978	225.00%	200.11%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	1.02.1.02.01.23.01		Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan per tahun (dokumen)	2		4.00		2	81,078,200	0	15,850,000	12.50%	19.55%	4.25		212.50%	#DIV/0!	
			Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan (dokumen)	2				2		0		12.50%		0.25		12.50%	#DIV/0!	
			Jumlah dokumen Penilaian Kinerja (PK) yang dihasilkan per tahun (dokumen)	2		4.00		2		0		12.50%		4.25		212.50%	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan (kali)	3	59,467,250		92,539,000	3				0.00%		0.00	92,539,000	0.00%	155.61%	
			Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun (dokumen)			2.00		1				0.00%		2.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah dokumen District Health Account (DHA) yang dihasilkan (dokumen)	1		2.00		1				0.00%		2.00		200.00%	#DIV/0!	
			Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan pertahun (dokumen)	1		3.00		1				0.00%		3.00		300.00%	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan (dokumen)	1	1,449,880,050	2.00	2,716,431,667	1				0.00%		2.00	2,772,824,538	200.00%	191.25%	
			Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan (kegiatan)	1		2.00		1				0.00%		2.00		200.00%	#DIV/0!	
			Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan (kegiatan)	1		2.00		2				0.00%		2.00		200.00%	#DIV/0!	
			Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (RS)	3		6.00		3	1,418,925,269		56,392,871	0.00%	3.97%	6.00		200.00%	#DIV/0!	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (puskesmas)	10				10				0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!	
			Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan (kegiatan)	2				1				0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan per tahun (dokumen)	4	270,221,400	7.00	158,341,000	4				0.00%	7.00	158,341,000	175.00%	58.60%		
			Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang dihasilkan (dokumen)	2		3.00		2				0.00%	3.00		150.00%	#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen Laporan Kemalian yang dihasilkan per tahun (dokumen)	1		2.00		1	171,380,000			0.00%	2.00		200.00%	#DIV/0!		
			Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan (dokumen)	1		2.00		1				0.00%	2.00		200.00%	#DIV/0!		
			Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan per tahun (dokumen)	1		2.00		2				0.00%	2.00		200.00%	#DIV/0!		
									1,723,678,979	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.73%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.02.23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>		<b>100.00</b>	<b>570,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>499,427,500</b>						0.00	499,427,500	0.00%	87.62%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
	1.02.1.02.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		100.00	570,000,000	1.50	499,427,500		361,114,000				1.50	499,427,500	1.50%	87.62%		
									361,114,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.01.23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>											0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan (Blud Pukesmas)	
	1.02.1.02.01.23.17	BLUD Puskesmas Dumai Kota	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	1,864,718,500	1	347,359,963	6.25%	18.63%	0.75	347,359,963	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.18	BLUD Puskesmas Dumai Barat	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	916,003,396	1	182,959,299	6.25%	19.97%	0.75	182,959,299	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.19	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	1,300,000,000	1	327,219,000	6.25%	25.17%	0.75	327,219,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.20	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	2,230,431,960	1	384,544,618	6.25%	17.24%	0.75	384,544,618	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.21	BLUD Puskesmas Medang Kampai	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	784,715,200	1	221,444,235	6.25%	28.22%	0.75	221,444,235	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.22	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	1,173,150,780	1	384,544,618	6.25%	32.78%	0.75	384,544,618	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.23	BLUD Puskesmas Bukit Timah	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	487,525,000	1	76,600,500	6.25%	15.71%	0.75	76,600,500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.24	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	2,160,680,000	1	525,320,595	6.25%	24.31%	0.75	525,320,595	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
	1.02.1.02.01.23.25	BLUD Puskesmas Purnama	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	829,759,049	1	140,426,720	6.25%	16.92%	0.75	140,426,720	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.23.26	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)					12	1,442,963,650	1	301,345,923	6.25%	20.88%	0.75	301,345,923	#DIV/0!	#DIV/0!		
									13,189,947,535				6.25%	21.92%					
	1.02.1.02.01.25	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>		<b>75.00</b>	<b>10,802,831,231</b>	<b>0.00</b>	<b>17,591,414,218</b>								0.00	17,591,414,218	0.00%	162.84%	Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.25.01	Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun (unit)	2.00	5,948,179,556	5.00	7,044,552,000	1	6,200,000,000	-	-	0.00%	0.00%	5.00	7,044,552,000	250.00%	118.43%		
	1.02.1.02.01.25.02	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun (unit)	1	463,705,500			2	381,500,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
	1.02.1.02.01.25.06	Rehap sedang/Berat Puskesmas	Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi atau renovasi (puskesmas)	3.00	570,606,100	4.00	3,467,488,000	2	7,825,922,078	-	-	0.00%	0.00%	4.00	3,467,488,000	133.33%	607.69%		
	1.02.1.02.01.25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas (puskesmas)	10.00	251,770,075	9.00	947,106,718	5	96,000,000	-	-	0.00%	0.00%	9.00	947,106,718	90.00%	376.18%		
	1.02.1.02.01.25.10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Jumlah pengadaan ambulans PSC (unit)	2	1,324,000,000	5.00	3,485,955,000	1	500,000,000	-	-	0.00%	0.00%	5.00	3,485,955,000	250.00%	263.29%		
	1.02.1.02.01.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Jumlah puskesmas pembantu/poskeskel yang direhabilitasi atau direnovasi (unit)	10.00	900,000,000	13.00	2,338,771,000	5	861,200,000	-	-	0.00%	0.00%	13.00	2,338,771,000	130.00%	259.86%		
	1.02.1.02.01.25.23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas (kal)	4.00	750,570,000	6.00	129,079,000	4	72,500,000	-	-	0.00%	0.00%	6.00	129,079,000	150.00%	17.20%		
									15,937,122,078				0.00%	0.00%					
	1.02.1.02.02.26	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata</b>		<b>100.00</b>	<b>63,471,226,888</b>	<b>0.00</b>	<b>88,249,354,363</b>								0.00	88,249,354,363	0.00%	139.04%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
	1.02.1.02.02.26.01	Pembangunan rumah sakit		100.00	27,301,226,888	26.98	24,008,932,368		21,043,300,000					26.98	24,008,932,368	26.98%	87.94%		
	1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		100.00	22,050,000,000	873.00	48,654,626,828		20,108,755,165					873.00	48,654,626,828	873.00%	220.66%		
	1.02.1.02.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Terpenuhi nya Obat-obat rumah Sakit (%)	100.00	7,000,000,000	24.00	8,678,635,842	100	2,154,200,000	1	58,870,729	0.68%	2.73%	24.68	8,737,506,571	24.68%	124.82%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	1.02.1.02.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)		100.00	1,500,000,000	1.38	154,770,000		46,601,000					1.38	154,770,000	1.38%	10.32%	
	1.02.1.02.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		100.00	3,500,000,000	35.80	5,288,557,950		2,142,879,835					35.80	5,288,557,950	35.80%	151.10%	
	1.02.1.02.02.26.27	Pengadaan logistik keperawatan	Terlaksannaya pengadaan Logistik Keperawatan RSUD Kota Dumai (%)	100.00	850,000,000	13.00	917,653,875	0	332,000,000	1	6,118,600	0.00%	1.84%	14.21	923,772,475	14.21%	108.68%	
								45,827,736,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.03%	0.14%						
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		100.00	4,200,000,000	0.00	6,482,441,592							0.00	6,482,441,592	0.00%	154.34%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
	1.02.1.02.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/berkala rumah sakit (%)	100.00	3,620,000,000	36.00	5,524,842,000	100	2,287,600,000	2	194,060,000	2.12%	8.48%	38.12	5,718,902,000	38.12%	157.98%	
	1.02.1.02.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		100.00	320,000,000	25.00	570,985,979		280,000,000					25.00	570,985,979	25.00%	178.43%	
								2,567,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1.89%	7.56%						
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		18	245,952,332	0.00	297,289,700							0.00	297,289,700	0.00%	120.87%	Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.29.01	Penyuluhan kesehatan anak balita	Pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak (puskesmas)	10	16,487,162	20.00	46,903,500	10		3		25.00%		22.50	52,903,500	225.00%	320.88%	
			Pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak (Paud/TK) (Paud/TK)			40.00		20	16,162,250		6,000,000	0.00%	37.12%	40.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDIDTK (puskesmas)	10		20.00		10				0.00%		20.00		200.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	1.02.1.02.01.29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Petugas Program Anak (kall)	1	229,465,170	2.00	250,386,200	1		0		25.00%		2.25	280,878,200	225.00%	122.41%	
			Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Anak (kall)	1		2.00		1	115,750,000		30,492,000	25.00%	26.34%	2.25		225.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
								131,912,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		22.96%	0.00%						
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		71.04	235,052,900	0.00	298,477,700							0.00	298,477,700	0.00%	126.98%	Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.1.02.01.30.06	Pelayanan kesehatan	Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia (kall)	2	235,052,900	4.00	298,477,700	1	84,210,000	-	47,068,750	0.00%	55.89%	4.00	345,546,450	200.00%	147.01%	
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja posyandu lansia (kall)					1		-		0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
									84,210,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.02.1.02.02.33	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD</b>		<b>100.00</b>	<b>11,864,215,841</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998,904,100</b>							0.00	16,998,904,100	0.00%	143.28%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
	1.02.1.02.02.33.01	Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD	Penyediaan tenaga kesehatan harian RSUD Kota Dumai (%)	100.00	11,664,215,841	644.00	16,860,600,000	100	10,025,470,000	3	1,364,510,000	3.40%	13.61%	647.40	18,225,110,000	647.40%	156.25%	
	1.02.1.02.02.33.02	Pelatihan dan Pendidikan tenaga Keperawatan RSUD	Terlaksananya pelatihan dan pendidikan keperawatan (%)	100.00	200,000,000	5.23	138,304,100	100	160,000,000	6	38,690,000	6.05%	24.18%	11.28	176,994,100	11.28%	88.50%	
									10,185,470,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3.44%	13.78%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.02.1.02.02.34	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>												0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)
	1.02.1.02.02.34.01	Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah						0	85,000,000,000	10	34,556,595,789	0.00%	40.65%	10.16	34,556,595,789	#DIV/0!	#DIV/0!	
									85,000,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	40.65%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.02.1.02.01.35	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>		<b>71.04</b>	<b>626,212,100</b>									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.35.01	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu (bulan)		626,212,100			12			1		6.25%	0.75		#DIV/0!	0.00%	
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program tidak penyakit menular dan keswa (puskesmas)			10				10		3			25.00%	2.50		25.00%	#DIV/0!		
Pelaksanaan vaksinasi meningitis calon jemaah haji (Calon jemaah haji)			300				300						0.00%	0.00		0.00%	#DIV/0!	
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji (Calon jemaah haji)							300			52			17.17%	51.50		#DIV/0!	#DIV/0!	
									466,790,250			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12.10%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
	2.02.2.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		18.00	169,160,400									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	2.02.2.02.01.15.02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Terlaksananya Kegiatan Lokakarya Agenda Politik Perempuan (orang)	10.00	169,160,400			20	41,035,470				0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									41,035,470					0.00%		0.00%			
	2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		85.00	1,631,221,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	2.02.2.02.01.16.03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender dan anak (Dokumen)	1.00	419,840,000			1					0.00%	0.00	20,921,906	0.00%	4.98%		
									373,971,510					5.59%					
														0.00%	0.00		0.00%	#DIV/0!	
														0.00%	0.00		0.00%	#DIV/0!	
	2.02.2.02.01.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya pembentukan dan pengukuhan Forum Anak 2019-2021 (orang)	40.00	103,020,000			100	93,657,000	25	53,790,000	25.00%	57.43%	25.00	53,790,000	62.50%	52.21%		
	2.02.2.02.01.16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak (orang)	32.00	178,124,000			30	168,837,020		45,854,670	0.00%	27.16%	0.00	45,854,670	0.00%	25.74%		
	2.02.2.02.01.16.07	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) (orang)	100.00	104,860,000			20	95,346,500		2,800,000	0.00%	2.94%	0.00	2,800,000	0.00%	2.67%		
	2.02.2.02.01.16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya Profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak (dokumen)	1.00	223,941,000			1	92,787,420		20,050,000	0.00%	21.61%	0.00	20,050,000	0.00%	8.95%		
														6.25		8.33%	#DIV/0!		
	2.02.2.02.01.16.13	Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya Pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak (kasus)	50.00	330,016,000			50	186,668,800	10	54,436,191	20.00%	29.16%	10.00	54,436,191	20.00%	16.50%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.02.2.02.01.16.14	Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat (*PATBM) (kelurahan)	25.00	166,560,000			15	148,479,890	0	52,152,890	1.67%	35.12%	0.25	52,152,890	1.00%	31.31%	
									1,159,748,140	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		5.78%	18.02%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.02.2.02.01.17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>		<b>85.00</b>	<b>574,711,325</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.02.2.02.01.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (orang)	100.00	176,310,000			35	167,987,310	9	155,213,250	25.00%	92.40%	8.75	155,213,250	8.75%	88.03%	
	2.02.2.02.01.17.02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT	MTerlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT (orang)	150.00	118,319,000			100	95,897,200	-	18,540,000	0.00%	19.33%	0.00	18,540,000	0.00%	15.67%	
	2.02.2.02.01.17.11	Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga	Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga perempuan (orang)	100.00	112,894,325			20	49,157,500	-	22,398,924	0.00%	45.57%	0.00	22,398,924	0.00%	19.84%	
	2.02.2.02.01.17.12	Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Terlaksananya upaya pencegahan dan perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dan Pembinaan tim KDRT di kelurahan (Persentase)	100.00	167,188,000			100	159,232,575	15	29,631,075	15.00%	18.61%	15.00	29,631,075	15.00%	17.72%	
									472,274,585	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		13.95%	47.81%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.02.2.02.01.18	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>		<b>70.00</b>	<b>763,791,450</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.02.2.02.01.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu (kegiatan)	45.00	447,500,000			2		-		0.00%		0.00	2,460,000	0.00%	0.55%	
			Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan (organisasi)	2.00				35	353,939,830	-	2,460,000		0.00%	0.70%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!
	2.02.2.02.01.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai (kelurahan)	33.00	165,788,450			10	65,673,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terlaksananya penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga (kecamatan)	7.00				1				0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!	
	2.02.2.02.01.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kecamatan)	7.00	150,503,000			7	101,533,500			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									521,146,330		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Pariwisata</b>															
	2.13.2.13.01.24	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>		<b>100.00</b>	<b>3,584,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555,785,600</b>							0.00	1,555,785,600	0.00%	43.41%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	2.13.2.13.01.24.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman Bukit Gelanggang (sarana)	3.00	1,200,000,000			2	772,050,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
	2.13.2.13.01.24.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah terbangunnya sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai (sarana)	4.00	2,384,000,000	6.00	1,347,111,000	1	190,000,000			0.00%	0.00%	6.00	1,347,111,000	150.00%	56.51%	
									962,050,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.13.2.13.01.25	<b>Program Pengembangan Kemirraan</b>		<b>100.00</b>	<b>628,523,112</b>	<b>0.00</b>	<b>442,652,734</b>							0.00	442,652,734	0.00%	70.43%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	2.13.2.13.01.25.03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemirraan pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing (orang)	900.00	284,445,000	1400.00	412,652,734	900	181,178,500	225	65,660,000	25.00%	36.24%	1625.00	478,312,734	180.56%	168.16%	
	2.13.2.13.01.25.04	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Dumai (dokumen)	1.00	150,000,000			1	129,850,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									311,028,500		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	14.56%	21.11%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Pengawasan</b>															
	4.02.4.03.01.20	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		<b>0.00</b>														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.02.4.03.01.20.25	Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah dokumen TEPR yang disusun (Dokumen)	0.00				4	159,720,000	0	4,920,000	6.25%	3.08%	0.25	4,920,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
									159,720,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.25%	3.08%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.4.02.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		70.00	5,020,328,410	0.00	3,647,324,450							0.00	3,647,324,450	0.00%	72.65%	Inspektoralat
	4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (LHP)	74.00	1,363,000,000	144.00	1,804,499,700	74	1,387,947,680	5	325,516,000	6.08%	23.45%	148.50	2,130,015,700	200.68%	156.27%	
	4.02.4.02.01.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan Hasil Reviu (LHR)	12.00	400,000,000	7.00	158,157,000	5	399,177,504	0	24,295,000	5.00%	6.09%	7.25	182,452,000	60.42%	45.61%	
	4.02.4.02.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Laporan Monitoring Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan (Laporan)	17.00	287,600,000	30.00	431,700,000	15	213,840,000	1	36,828,000	5.00%	17.22%	30.75	468,528,000	180.88%	162.91%	
	4.02.4.02.01.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1.00	150,000,000	2.00	72,327,850	68	61,464,000	6	20,670,000	9.19%	33.63%	8.25	92,997,850	825.00%	62.00%	
	4.02.4.02.01.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Gelanyasda, Jumlah Sidang/Rapat (Kall)	3.00	212,333,582	4.00	388,157,000	2	201,081,350	-	9,149,000	0.00%	4.55%	4.00	397,306,000	133.33%	187.11%	
	4.02.4.02.01.20.09	Monetisi / Menilai laporan wajib LP2P	Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat waktu (%)	100.00	90,000,000	280.00	160,743,000	100	81,445,300	-	-	0.00%	0.00%	280.00	160,743,000	280.00%	178.60%	
	4.02.4.02.01.20.11	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP (OPD)	8.00	121,923,614			8	90,128,114	1	12,665,000	6.25%	14.05%	0.50	12,665,000	6.25%	10.39%	
	4.02.4.02.01.20.14	Audit Khusus/Tertentu	Audit Tertentu (Laporan Hasil Pemeriksaan)	2.00	194,396,894	1.00	16,770,000	1	76,790,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	16,770,000	50.00%	8.63%	
	4.02.4.02.01.20.15	evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD (SKPD)	1.00	175,100,000	70.00	279,348,500	35	156,060,000	-	-	0.00%	0.00%	70.00	279,348,500	7000.00%	159.54%	
	4.02.4.02.01.20.16	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penilaian Mandiri yang dilaksanakan (OPD)	4.00	155,566,950	30.00	121,082,500	35	139,529,800	-	-	0.00%	0.00%	30.00	121,082,500	750.00%	77.83%	
	4.02.4.02.01.20.18	Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya pengendalian gratifikasi (Laporan)	1.00	153,050,000	1.00	106,827,900	1	151,953,500	-	55,844,000	0.00%	36.75%	1.00	162,671,900	100.00%	106.29%	
	4.02.4.02.01.20.19	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	Terlaksananya Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (%)	8.00	290,000,000	0.00		90	171,461,417	8	44,616,000	8.33%	26.02%	7.50	44,616,000	93.75%	15.38%	
	4.02.4.02.01.20.21	Reviu Penyerapan Anggaran SKPD	Laporan Triwulan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Kota Dumai (Laporan)	4.00	60,000,000	4.00	45,791,000	4	52,800,000	0	2,660,000	6.25%	5.04%	4.25	48,451,000	106.25%	80.75%	
	4.02.4.02.01.20.22	Peningkatan Kapabilitas APIP	Persentase Meningkatnya Kapabilitas APIP (%)	1.00	100,500,000	100.00	61,920,000	90	60,500,000	4	6,880,000	4.17%	11.37%	103.75	68,800,000	10375.00%	68.46%	
	4.02.4.02.01.20.24	Saber Pungli	Terbentuknya Tim Saber Pungli (%)	75.00	250,000,000			75	158,550,069	3	12,980,000	3.33%	8.19%	2.50	12,980,000	3.33%	5.19%	
									3,402,728,734		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.46%	16.23%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	4.02.4.01.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100.00	3,209,347,766									0.00		0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.02.4.01.03.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan	Jumlah paket yang dilelang oleh Pokja ULP (paket)	90.00	1,100,000,000			45	448,950,000	2	114,113,583	4.44%	25.42%	2.00	114,113,583	2.22%	10.37%	
	4.02.4.01.03.20.17	Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai	Peningkatan pelaksanaan layanan SPSE yang berkesambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	90.00	1,000,000,000			90	699,390,000	10	94,501,963	11.11%	13.51%	10.00	94,501,963	11.11%	9.45%	
									1,148,340,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	8.50%	18.17%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.02.4.02.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		50.00	382,500,000	0.00	464,453,000							0.00	464,453,000	0.00%	121.43%	Inspektoral
	4.02.4.02.01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/workshop/ seminar/pelatihan lainnya (Orang)	50.00	333,750,000	78.00	464,453,000	40	312,650,000	2	39,790,000	3.75%	12.73%	79.50	504,243,000	159.00%	151.08%	
	4.02.4.02.01.21.03	In House Training Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur yang mengikuti In House Training (Orang)	50.00	48,750,000	0.00		50	62,350,000		10,189,000	0.00%	16.34%	0.00	10,189,000	0.00%	20.90%	
									375,000,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	3.13%	13.33%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
				<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>														
	1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		58.35	68,583,712,833									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	Jumlah Panjang Jalan Yang dibangun (KM)	10.00	58,083,712,833			10	60,734,381,047		15,660,000	0.00%	0.03%	0.00	15,660,000	0.00%	0.03%	
	1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan Yang dibangun (Unit)	5.00	10,000,000,000			5	2,281,142,900			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan (Laporan)	5.00	500,000,000			5	152,050,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									63,167,573,947			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.02%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		71.20	9,800,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran Drainase Yang Dibangun dan Dipelihara (M)	1200.00	5,800,000,000			1200	4,247,125,950			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.16.05	Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara (KM)	3.00	4,000,000,000			3	3,143,451,200	0	14,000,000	0.08%	0.45%	0.00	14,000,000	0.08%	0.35%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									7,390,577,150	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.04%	0.19%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.03.1.03.01.17		<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>		<b>30.00</b>	<b>1,700,000,000</b>								0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.1.03.01.17.01		Perencanaan turap/talud/bronjong	Jumlah Buku Perencanaan / DED Turap (Buku)	13.00	850,000,000			13	270,080,200	0	22,750,308	2.12%	8.42%	0.28	22,750,308	2.12%	2.68%	
1.03.1.03.01.17.03		Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah Panjang Turap Yang Dibangun (M)	212.50	850,000,000			137.5	602,840,000	1	20,026,672	0.83%	3.32%	1.14	20,026,672	0.54%	2.36%	
									872,920,200	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	1.23%	4.90%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.03.1.03.01.18		<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>		<b>0.25</b>	<b>11,000,000,000</b>								0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.1.03.01.18.03		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Ruas Jalan Yang Direhabilitasi / Pelihara (Ruas)	5.00	8,000,000,000			5	3,405,483,600	0	36,400,000	0.25%	1.07%	0.01	36,400,000	0.25%	0.46%	
1.03.1.03.01.18.04		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Kebutuhan Jembatan Yang Direhabilitasi / Pelihara 1 Tahun (Unit)	12.00	3,000,000,000			10	1,898,006,500	0	28,000,000	0.38%	1.48%	0.04	28,000,000	0.31%	0.93%	
									5,303,490,100	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.29%	1.21%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.03.1.03.01.23		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>		<b>50.00</b>	<b>4,500,000,000</b>								0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.1.03.01.23.10		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah Alat - alat Berat Yang Dipelihara (Unit)	22.00	2,000,000,000			15	950,000,000	0	100,730,000	2.65%	10.60%	0.40	100,730,000	1.81%	5.04%	
1.03.1.03.01.23.12		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Alat - alat Ukur dan Laboratorium Yang Dipelihara (Unit)	15.00	600,000,000			6	350,000,000	0	25,200,000	1.79%	7.20%	0.11	25,200,000	0.72%	4.20%	
									1,300,000,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	2.42%	9.69%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.03.1.03.01.24		<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>		<b>16230.00</b>	<b>24,000,000,000</b>								0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.1.03.01.24.09		Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran Sungai Yang Dibersihkan (KM)	90.00	8,000,000,000			90	3,905,631,600	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
1.03.1.03.01.24.10		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kebutuhan Saluran Irigasi Yang dipelihara 1 Tahun (Bulan)	12.00	700,000,000			12	219,704,250	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
1.03.1.03.01.24.13		Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Jumlah Pintu Air Yang Dipelihara (Unit)	15.00	900,000,000			15	599,267,500	0	14,000,000	0.58%	2.34%	0.09	14,000,000	0.58%	1.56%	
1.03.1.03.01.24.14		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran Sungai Yang Dibersihkan (M)	1000.00	900,000,000			1000	657,729,050	4	11,200,000	0.43%	1.70%	4.25	11,200,000	0.43%	1.24%	
1.03.1.03.01.24.18		Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	Masyarakat Yang Terlayani Air Bersih (Jwa)	81150.00	11,500,000,000			21500	5,470,344,100	115	117,275,577	0.54%	2.14%	115.03	117,275,577	0.14%	1.02%	
									10,852,676,500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.33%	1.31%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	1.03.1.03.01.25	<b>Program penyediaan dan pengelolaan air baku</b>		25.00	2,000,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Jumlah Bangunan Prasarana Yang Dibangun (Unit)	1.00	2,000,000,000			1	110,901,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									110,901,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.03.1.03.01.28	<b>Program pengendalian banjir</b>		20.00	6,300,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.28.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Jumlah Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai Yang Dipelihara (M)	300.00	1,800,000,000			300	691,082,800	1	8,400,000	0.31%	1.22%	0.92	8,400,000	0.31%	0.47%	
	1.03.1.03.01.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai	Panjang Daerah Tangkapan Air Yang Mengendalikan Banjir (M)	100.00	1,200,000,000			100	649,129,300	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.28.08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Jumlah Pengendalian Banjir Yang Dibangun (Unit)	3.00	3,300,000,000			3	179,648,500	0	25,306,400	3.50%	14.09%	0.11	25,306,400	3.50%	0.77%	
									1,519,860,600			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.55%	2.22%				
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.03.1.03.01.29	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>		2.12	7,500,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.29.04	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.dumai Kota	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan ( Semenisasi ) Yang Dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000			6	85,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.29.05	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Timur	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan ( Semenisasi ) Yang Dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000			6	85,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.29.06	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Barat	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan ( Semenisasi ) Yang Dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000			6	73,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.29.07	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Selatan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan ( Semenisasi ) Yang Dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000			6	74,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.29.08	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan ( Semenisasi ) Yang Dibangun (Ruas)	6.00	1,100,000,000			6	57,768,350	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.29.09	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.medang Kampai	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan ( Semenisasi ) Yang Dibangun (Ruas)	6.00	1,000,000,000			6	98,155,500	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.03.1.03.01.29.10	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai sembilan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan ( Semenisasi ) Yang Dibangun (Ruas)	6.00	1,000,000,000			6	128,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									600,923,850			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.1.04.01.29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		4.00	14,642,388,000	7165800000.00	19,425,049,300							7165800000.00	19,425,049,300	#####	132.66%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
1.03.1.04.01.29.02		Pembangunan/peningkatan infrastruktur		70.00	14,642,388,000	0.00	18,594,934,638	0	8,557,349,040	-	28,178,000	0.00%	0.33%	0.00	18,623,112,638	0.00%	127.19%	
									8,557,349,040	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.33%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.03.4.01.11.29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		100.00	1,837,500,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dumail Selatan
1.03.4.01.11.29.50		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (persen)	100.00	137,500,000			100	45,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									45,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.03.4.01.09.29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		85.00	1,837,500,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Sungai Sembilan
1.03.4.01.09.29.50		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan		85.00	87,500,000				20,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									20,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.03.4.03.01.31		Program Perencanaan Tata Ruang		1.00	447,372,000	0.00	709,253,700							0.00	709,253,700	0.00%	158.54%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.03.4.03.01.31.10		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang (kali)	15.00	249,696,000	3.00	156,678,720	15	128,712,500	1	68,431,696	5.00%	53.17%	3.75	225,110,416	25.00%	90.15%	
1.03.4.03.01.31.13		Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman (Dokumen)	1.00	197,676,000	2.00	276,389,430	1	58,385,600	-	1,900,000	0.00%	3.25%	2.00	278,289,430	200.00%	140.78%	
									187,098,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		3.44%	37.59%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.03.1.03.01.31		Program Perencanaan Tata Ruang		100.00	800,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.31.10		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Laporan Tahunan (Dokumen)	10.00	300,000,000			1	750,347,500	0	97,084,190	3.25%	12.94%	0.03	97,084,190	0.33%	32.36%	
									750,347,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		3.25%	12.94%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.03.1.03.01.32		Program Pemanfaatan Ruang		0.00	290,000,000									0.00	-	#DIV/0!	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.32.01		Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen TABG (Dokumen)	48.00	100,000,000			48	94,912,500	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
1.03.1.03.01.32.05		Survey dan pemetaan	Jumlah Dokumen Survey Pemetaan (Dokumen)	1.00	100,000,000			1	38,850,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
1.03.1.03.01.32.07		Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi IMB (Orang)	50.00	90,000,000			50	88,166,100	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									221,928,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.03.1.03.01.33		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		100.00	130,000,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.1.03.01.33.05		Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan IMB (Dokumen)	1.00	130,000,000			1	108,296,100	0	3,400,000	0.75%	3.14%	0.01	3,400,000	0.75%	2.62%	
									108,296,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.75%	3.14%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.10.44		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		85.00	162,500,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Kota	
4.01.4.01.10.44.01		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur (laporan)	5.00	162,500,000			2	45,000,000	0	3,800,000	12.50%	8.44%	0.25	3,800,000	5.00%	2.34%	
									45,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12.50%	8.44%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.07.44		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		80.00	140,000,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Bukit Kapur	
4.01.4.01.07.44.01		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan		90.00	140,000,000				20,000,000				0.00	-	0.00%	0.00%		
									20,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.05.44		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		85.00	80,000,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Barat	
4.01.4.01.05.44.01		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur (Kelurahan)	4.00	80,000,000			4	20,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									20,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.06.44		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		80.00	121,000,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Timur	
4.01.4.01.06.44.01		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan (kegiatan)	90.00	121,000,000			5	20,000,000	1	-	15.00%	0.00%	0.75	-	0.83%	0.00%	
									20,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	15.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.08.44		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		90.00	1,600,000,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Medang Kampal	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
	4.01.4.01.08.44.01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Kelurahan (bulan)	4.00	50,000,000			2	20,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
									20,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
				Perencanaan															
	4.03.4.01.10.15	Program Pengembangan data/informasi		85.00	30,000,000										0.00		0.00%	0.00%	Dumai Kota
	4.03.4.01.10.15.09	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan		1.00	30,000,000			0	8,590,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
									8,590,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan data/informasi		90.00	572,220,000	0.00	524,489,748							0.00	524,489,748	0.00%	91.66%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4.03.4.03.01.15.07	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan (Aplikasi)	3.00	364,140,000	77.00	139,335,300	3	279,715,000		16,800,000	0.00%	6.01%	77.00	156,135,300	2566.67%	42.88%		
	4.03.4.03.01.15.08	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	Jumlah laporan SIPD (Laporan)	1.00	208,080,000			1	154,871,000		5,700,000	0.00%	3.68%	0.00	5,700,000	0.00%	2.74%		
									434,586,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	5.18%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.03.4.01.11.15	Program Pengembangan data/informasi		100.00	37,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dumai Selatan	
	4.03.4.01.11.15.09	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (Dokumen)	6.00	37,000,000			6	37,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
									37,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.03.4.03.01.16	Program Kerjasama Pembangunan		80.00	257,914,536	0.00	313,147,900							0.00	313,147,900	0.00%	121.42%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4.03.4.03.01.16.04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah (Bulan)	12.00	257,914,536	1.25	313,147,900	12	226,576,400	1	17,027,000	6.25%	7.51%	2.00	330,174,900	16.67%	128.02%		
									226,576,400			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.25%	7.51%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.03.4.03.01.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		1.00	208,080,000	0.00	141,857,994							0.00	141,857,994	0.00%	68.17%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4.03.4.03.01.17.03	koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat (Dokumen)	1.00	208,080,000		141,857,994	1	100,792,280		26,955,000	0.00%	26.74%	0.00	168,812,994	0.00%	81.13%		
									100,792,280			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	26.74%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.03.4.03.01.19		<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>		4.00	1,208,944,800	0.00	740,884,988							0.00	740,884,988	0.00%	61.28%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.19.02		Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi (Kali)	10.00		6.00	76,028,200	9	100,000,000	1	28,783,000	5.56%	28.78%	6.50	104,811,200	65.00%	#DIV/0!	
4.03.4.03.01.19.04		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (bulan)	12.00	141,494,400	1.00	127,554,991	12	133,773,850	-	28,612,768	0.00%	21.39%	1.00	156,167,759	8.33%	110.37%	
4.03.4.03.01.19.05		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri (Dokumen)	1.00	208,080,000	1.00	169,540,401	1	195,038,750	-	47,957,056	0.00%	24.59%	1.00	217,497,457	100.00%	104.53%	
4.03.4.03.01.19.09		Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun (Dokumen)	1.00	364,140,000	2.00	239,880,796	1	342,100,000	-	35,118,300	0.00%	10.27%	2.00	274,999,096	200.00%	75.52%	
4.03.4.03.01.19.11		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana (Dokumen)	1.00	149,817,600	1.00	127,880,600	1	144,000,000	-	54,728,550	0.00%	38.01%	1.00	182,609,150	100.00%	121.89%	
4.03.4.03.01.19.12		Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur (Kali)	10.00	147,736,800			9	125,982,700	1	55,930,724	5.56%	44.40%	0.50	55,930,724	5.00%	37.86%	
									1,040,895,300		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	1.21%	24.13%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.03.4.03.01.21		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		35.00	3,164,967,677	0.00	3,272,036,472							0.00	3,272,036,472	0.00%	103.38%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.21.01		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan (forum)	1.00	171,314,100		239,970,000	1	169,034,100	0	118,195,500	25.00%	69.92%	0.25	358,165,500	25.00%	209.07%	
4.03.4.03.01.21.08		Penyusunan rancangan RKPd	Jumlah dokumen RKPd dan dokumen Perubahan RKPd yang disusun (Dokumen)	2.00	130,000,000	77.00	480,185,700	2	244,368,400	-	30,256,500	0.00%	12.38%	77.00	510,442,200	3850.00%	392.65%	
4.03.4.03.01.21.09		Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional (Kali)	3.00	756,864,957	3.00	244,359,100	3	274,874,400	1	35,495,000	25.00%	12.91%	3.75	279,854,100	125.00%	36.98%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
4.03.4.03.01.21.11		Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKJP yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2.00	223,977,720	2.00	412,847,487	1	213,079,300	0	32,466,000	25.00%	15.24%	2.25	445,313,487	112.50%	198.82%		
4.03.4.03.01.21.12		Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Perlanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu (Dokumen)	2.00	254,393,100	2.00	353,176,769	1	178,700,000	0	1,210,000	25.00%	0.68%	2.25	354,386,769	112.50%	139.31%		
4.03.4.03.01.21.13		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD (Dokumen)	5.00	87,265,000	3.00	249,017,498	4	61,800,000	-	-	0.00%	0.00%	3.00	249,017,498	60.00%	285.36%		
4.03.4.03.01.21.21		Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK (Dokumen)	0.00	-	2.00	216,396,600	1	205,756,200	-	4,920,000	0.00%	2.39%	2.00	221,316,600	#DIV/0!	#DIV/0!		
4.03.4.03.01.21.24		Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s (Dokumen)	1.00	237,000,000	1.00	147,854,200	1	170,235,000	-	5,640,000	0.00%	3.31%	1.00	153,494,200	100.00%	64.77%		
4.03.4.03.01.21.25		Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) (Dokumen)	1.00	198,000,000			1	155,111,200	-	5,640,000	0.00%	3.64%	0.00	5,640,000	0.00%	2.85%		
									1,672,958,600			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	12.49%	13.98%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.03.4.01.03.21		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		100	310,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
4.03.4.01.03.21.13		Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1	150,000,000				99,799,600					0.00	-	0.00%	0.00%		
									99,799,600			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.03.4.03.01.22		<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>		<b>2.00</b>	<b>343,332,000</b>	<b>0.00</b>	<b>480,687,276</b>							0.00	480,687,276	0.00%	140.01%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.4.03.01.22.04		koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Dokumen)	1.00	208,080,000	2.00	328,013,276	1	188,864,210	-	42,484,660	0.00%	22.49%	2.00	370,497,936	200.00%	178.06%		
4.03.4.03.01.22.08		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi (Dokumen)	1.00	135,252,000	2.00	152,674,000	1	90,543,745	-	-	0.00%	0.00%	2.00	152,674,000	200.00%	112.88%		
									279,407,955			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	15.21%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.03.4.01.03.22		<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>		<b>100.00</b>	<b>412,286,474</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
4.03.4.01.03.22.12		Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah BUMD Kota Dumai yang di Bina (BUMD)	0.00	-			3	149,892,000	-	34,170,000	0.00%	22.80%	0.00	34,170,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
									149,892,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	22.80%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.03.4.03.01.23		<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>		<b>5.00</b>	<b>952,794,991</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299,397,400</b>							0.00	1,299,397,400	0.00%	136.38%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.03.4.03.01.23.03		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya (Dokumen)	1.00	202,878,000	91.00	361,264,600	1	185,368,200	-	38,684,600	0.00%	20.87%	91.00	399,949,200	9100.00%	197.14%	
4.03.4.03.01.23.04		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya (Dokumen)	1.00	161,262,000	3.00	198,777,200	1	104,343,000	-	13,788,000	0.00%	13.21%	3.00	212,565,200	300.00%	131.81%	
4.03.4.03.01.23.05		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	umlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM (Dokumen)	1.00	240,120,991	91.00	380,428,300	1	187,869,000	-	44,018,700	0.00%	23.43%	91.00	424,447,000	9100.00%	176.76%	
4.03.4.03.01.23.06		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur (Dokumen)	1.00	182,070,000	90.00	314,147,300	1	170,746,000	-	45,017,100	0.00%	26.36%	90.00	359,164,400	9000.00%	197.27%	
4.03.4.03.01.23.08		Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM (Dokumen)	1.00	166,464,000	1.00	44,780,000	1	132,054,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	44,780,000	100.00%	26.90%	
									780,380,200		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	18.13%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		<b>Pertanian</b>												0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.03.3.03.01.15		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>		<b>87.67</b>	<b>987,546,270</b>	<b>0.00</b>	<b>1,741,879,133</b>							0.00	1,741,879,133	0.00%	176.38%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
3.03.3.03.01.15.01		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Peternak yang dilatih (Orang)	80.00	70,000,000	170.00	99,094,400	30	17,413,400	-	-	0.00%	0.00%	170.00	99,094,400	212.50%	141.56%	
3.03.3.03.01.15.03		Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah Kelompok Tani yang terlatih dan dikembangkan (Kelompok)	1	437,546,270	31.00	1,150,717,450	20	-	-	-	0.00%	-	31.00	1,176,957,450	3100.00%	268.99%	
			Jumlah Even yang diikuti kelompok tani (Pra PEDA/PEDA/PENAS) (Kal)	15	-	-	-	1	539,505,000	-	26,240,000	0.00%	4.86%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!	
3.03.3.03.01.15.04		Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Pengembangan Tanaman Nenas (Ha)	11.00	430,000,000	-	492,067,283	5	-	-	-	0.00%	-	0.00	492,067,283	0.00%	114.43%	
			Pengembangan Tanaman Semangka (Ha)	-	-	-	-	4	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Pengembangan Tanaman Sayuran (Ha)	-	-	-	-	5	238,565,000	-	-	0.00%	-	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Pengembangan Tanaman Jagung Manis (Ha)	-	-	-	-	6	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
									795,483,400		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.03.3.03.01.18	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>		1.00	548,000,000	0.00	560,530,075							0.00	560,530,075	0.00%	102.29%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.03.3.03.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya Normalisasi Saluran Air di KPT (Paket)	10.00	418,000,000		362,084,000	1	200,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	362,084,000	0.00%	86.62%	
	3.03.3.03.01.18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya Demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan (Kali)	1.00	130,000,000		198,446,075	1	85,961,500	0	6,940,000	25.00%	8.07%	0.25	205,386,075	25.00%	157.99%	
									285,961,500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		7.52%	2.43%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.03.3.03.01.19	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>		85756.00	900,000,000	0.00	1,104,480,827							0.00	1,104,480,827	0.00%	122.72%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.03.3.03.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya Pelatihan Tanaman Perkebunan (Kali)	50.00	480,000,000		688,844,250	1	325,000,000	0	233,850,500	25.00%	71.95%	0.25	922,694,750	0.50%	192.23%	
									325,000,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		25.00%	71.95%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sedang					
	3.03.3.03.01.20	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>		1.00	600,365,000	0.00	1,339,969,700							0.00	1,339,969,700	0.00%	223.19%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.03.3.03.01.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya Pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan (Bulan)	12.00		23.00	471,385,200	12		1		6.25%		23.75	524,655,200	197.92%	#DIV/0!	
			Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/magang dan pelatihan penyuluh pertanian (Orang)	6.00		15.00		5		0		5.00%		15.25		254.17%	#DIV/0!	
									237,470,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		5.63%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.03.3.03.01.21	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>		7.00	685,294,939	0.00	867,232,455							0.00	867,232,455	0.00%	126.55%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.03.3.03.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya Pelayanan Keswan oleh Medik dan Paramedik Veteriner di Puskesmas (Bulan)	12.00	323,200,000	24.00	467,613,000	12				0.00%		24.00	509,613,000	200.00%	157.68%	
			Tersedianya Alat dan Bahan Vaksinasi Rabies, Jembrana dan SE (Kegiatan)	1.00		2.00		1	263,000,000		42,000,000	0.00%	15.97%	2.00		200.00%	#DIV/0!	
			Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan Pelayanan Keswan (Kegiatan)	1.00		2.00		1				0.00%		2.00		200.00%	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
	3.03.3.03.01.21.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Terlaksananya Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban (Kali)	1.00	310,000,000	2.00	399,619,455	1				0.00%		2.00	427,819,455	200.00%	138.01%		
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran BAH/HBAH (Bulan)	12.00		24.00		12	255,300,000		28,200,000	11.05%		24.00		200.00%	#DIV/0!		
									518,300,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah						
	3.03.3.03.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		6400.00	973,115,000	0.00	1,565,498,099							0.00	1,565,498,099	0.00%	160.87%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah Inseminasi Buatan yang dilakukan (IB) (1050)	1250.00	363,000,000	1400.00	1,014,141,100	0				0.00%		1400.00	1,032,341,100	112.00%	284.39%		
			Jumlah Inseminasi Buatan yang dilakukan (IB) (1050)					0				0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Inseminasi Buatan yang dilakukan (IB) (1050)					0				0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
	3.03.3.03.01.22.02		Tersedianya Operasional Perawatan Ternak (Bulan)					12	297,314,600		18,200,000	6.12%		0.75		#DIV/0!	#DIV/0!		
			Tersedianya Operasional Perawatan Ternak (Bulan)					12		1		6.25%		0.75		#DIV/0!	#DIV/0!		
			Tersedianya Operasional Perawatan Ternak (Bulan)					12		1		6.25%		0.75		#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Terlaksananya Seleksi Calon Petani Calon Lokasi (kelompok)	15.00	340,115,000	30.00	551,356,999	15				0.00%		30.00	551,356,999	200.00%	162.11%		
	3.03.3.03.01.22.03		Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Peternak (Bulan)	12.00				12	251,876,000			0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!		
									549,190,600			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	1.69%						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah						
	3.03.3.03.01.29	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan			850,000,000									0.00		#DIV/0!	0.00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
	3.03.3.03.01.29.01	Kegiatan pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)	Terlaksananya pemeliharaan persemaian tanaman kehutanan (Ha)	1	400,000,000			1	170,000,000		46,935,000	0.00%	27.61%	0.00	46,935,000	0.00%	11.73%		
		Kegiatan Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)	Terpeliharanya Tanaman Penghijauan di Luar Kawasan Hutan (Batang)		250,000,000			5000				0.00%		0.00	34,603,370	#DIV/0!	13.84%		
	3.03.3.03.01.29.02		Terlaksananya Pemeliharaan Tahun I Tanaman Penghijauan (Batang)	6.000				5000	250,000,000		34,603,370	0.00%		0.00		0.00%	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.03.3.03.01.29.03	Kegiatan Pembuatan Bangunan Konsevasi Tanah dan Air	Terlaksananya Pembuatan Embung dan Kantong Air (Buah)					3	640,870,000			0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Terlaksananya Pembuatan Sumur Resapan/ Biopori (Buah)					300				0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
									1,060,870,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	4.42%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	3.03.3.03.01.30	Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah		6,000	300,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.03.3.03.01.30.01	Kegiatan Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Terlaksananya Penanaman Pohon Penghijauan (Batang )	6,000	300,000,000			6000	450,000,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									450,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.04.4.03.01.15	Program Pengembangan Perumahan		100.00	364,140,000	0.00	468,001,039							0.00	468,001,039	0.00%	128.52%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.04.4.03.01.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai (Dokumen)	1.00	364,140,000	2.00	468,001,039	1	246,542,170		70,350,000	0.00%	28.53%	2.00	538,351,039	200.00%	147.84%	
									246,542,170			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	28.53%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.04.1.04.01.15	Program Pengembangan Perumahan		3	4,392,345,652	7655804000.00	9,309,978,902							7655804000.00	9,309,978,902	#####	211.96%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	1.04.1.04.01.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		0.00		0.00	3,179,697,363	0	524,950,000		47,924,101	0.00%	9.13%	0.00	3,227,621,464	#DIV/0!	#DIV/0!	
								0				0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
									524,950,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.04.1.04.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		3.00	9,200,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	1.04.1.04.01.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin		7.00	7,700,000,000			0	447,490,000		44,138,614	0.00%	9.86%	0.00	44,138,614	0.00%	0.57%	
	1.04.1.04.01.16.06	Peningkatan kualitas dan perijegahan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)		1.00	1,000,000,000			0	403,250,000			0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
									850,740,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	5.19%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	1.04.1.05.02.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		95.00	924,420,758	0.00	1,077,492,425							0.00	1,077,492,425	0.00%	116.56%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.04.1.05.02.19.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan ancaman bahaya kebakaran (orang)	100.00	36,188,680	98.00	40,537,000	40	15,905,000	-	-	0.00%	0.00%	98.00	40,537,000	98.00%	112.02%	
	1.04.1.05.02.19.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peralatan dan Mesin serta Mobil Pemadam Kebakaran yang diservis (14)	21.00	136,566,675	30.00	195,637,425	0	107,170,000	1	19,610,000	0.00%	18.30%	31.00	215,247,425	147.62%	157.61%	
	1.04.1.05.02.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (Kecamatan)	7.00	751,665,403	14.00	841,318,000	7	456,989,571	1	124,803,750	7.14%	27.31%	14.50	966,121,750	207.14%	128.53%	
									580,064,571			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5.63%	24.90%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.04.1.04.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman		16.00	1,315,717,195	1192877750.00	1,809,375,987							1192877750.00	1,809,375,987	#####	137.52%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	1.04.1.04.01.20.06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman		1.00	729,070,000	0.00	751,305,000	0	225,320,000	-	16,000,000	0.00%	7.10%	0.00	767,305,000	0.00%	105.24%	
	1.04.1.04.01.20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman		12.00	586,647,195	0.00	1,058,070,987	0	360,368,500	-	78,773,721	0.00%	21.86%	0.00	1,136,844,708	0.00%	193.79%	
									585,688,500			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	16.18%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.06.1.06.01.23	Program pengelolaan areal pemakaman		100.00	350,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial
	1.06.1.06.01.23.01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya tempat pemakaman Pahlawan (bulan)	0.00	-			12	249,953,945	1	46,952,600	6.25%	18.78%	0.75	46,952,600	#DIV/0!	#DIV/0!	
									249,953,945			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.25%	18.78%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Pertanahan												0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.04.4.01.03.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		100.00	945,171,600									0.00	-	0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	2.04.4.01.03.16.03	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai		10.00	380,132,700			0	281,226,900	-	25,051,500	0.00%	8.91%	0.00	25,051,500	0.00%	6.59%	
	2.04.4.01.03.16.06	Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai			230,000,000			0	177,357,800	-	31,028,000	0.00%	17.49%	0.00	31,028,000	#DIV/0!	13.49%	
									458,584,700			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	12.23%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.04.4.01.03.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		5.00	294,119,377									0.00	-	0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	2.04.4.01.03.17.01	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		5.00	294,119,377			0	221,666,000	-	46,392,000	0.00%	20.93%	0.00	46,392,000	0.00%	15.77%	
									221,666,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	20.93%				



No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD sampai dengan RPKD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5X100		12	
			<b>Keuangan</b>																
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																
4.04.4.04.02.17					7,904,000,000	0.00	5,873,882,664								0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Pendapatan Daerah
4.04.4.04.02.17.30		Pemeliharaan SIMPATDA	Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (Bulan)	12.00	487,000,000	12.00	470,624,615	12	483,086,600	1	53,636,000	6.25%	11.10%	12.75	524,260,615	106.25%	107.65%		
4.04.4.04.02.17.31		Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya Sarana Promosi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Media)	3.00	430,000,000	3.00	379,364,688	3	276,099,000	-	60,524,640	0.00%	21.92%	3.00	439,889,328	100.00%	102.30%		
4.04.4.04.02.17.32		Monitoring Penyampaian SPPT PBB	Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB (Kecamatan)	7.00	460,000,000	7.00	356,378,650	7	428,300,000	-	900,000	0.00%	0.21%	7.00	357,278,650	100.00%	77.67%		
4.04.4.04.02.17.34		Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah (Kali)	4.00	150,000,000	4.00	101,635,667	4	109,119,000	-	-	0.00%	0.00%	4.00	101,635,667	100.00%	67.76%		
4.04.4.04.02.17.35		Pengnahan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Wajib Pajak dan Objek Pajak yang Dilagih (SKPD/SKRD)	200.00	300,000,000	100.00	207,760,800	200	242,299,400	-	-	0.00%	0.00%	100.00	207,760,800	50.00%	69.25%		
4.04.4.04.02.17.36		Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Wajib Pajak dan Objek Pajak yang Didala (WP/WR)	3000.00	350,000,000	3500.00	281,290,640	3000	349,070,500	-	65,607,439	0.00%	18.79%	3500.00	346,898,079	116.67%	99.11%		
4.04.4.04.02.17.37		Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kola Dumai	Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan pajak dan retribusi daerah (Laporan)	4.00	200,000,000	4.00	154,229,455	4	169,280,000	-	9,719,382	0.00%	5.74%	4.00	163,948,837	100.00%	81.97%		
4.04.4.04.02.17.49		Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah	Peningkatan Pelayanan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah (Berkas)	50.00	150,000,000	149.00	112,140,000	30	120,000,000	-	22,682,224	0.00%	18.90%	149.00	134,822,224	298.00%	89.88%		
4.04.4.04.02.17.56		Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMOP)	Terpeliharanya Aplikasi SISMOP (Bulan)	12.00	640,000,000	12.00	534,512,421	12	595,469,250	1	119,777,192	6.25%	20.11%	12.75	654,289,613	106.25%	102.23%		
4.04.4.04.02.17.66		Penyusunan Basis Data OP PBB P2	Tersedianya Database PBB P2 yang Valid (Paket)	2.00	650,000,000	2.00	378,032,184	1	316,691,700	-	26,549,212	0.00%	8.38%	2.00	404,581,396	100.00%	62.24%		
4.04.4.04.02.17.68		Verifikasi Penetapan Pajak	Tersedianya hasil verifikasi penetapan pajak (WP)	500.00	300,000,000	500.00	247,472,778	500	223,810,000	25	29,998,945	5.00%	13.40%	525.00	277,471,723	105.00%	92.49%		
4.04.4.04.02.17.69		Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak	Terlaksananya pengawasan, penertiban dan penindakan objek pajak (Persen)	50.00	150,000,000	90.00	69,911,500	25	157,302,000	-	-	0.00%	0.00%	90.00	69,911,500	180.00%	46.61%		
4.04.4.04.02.17.73		Pemeriksaan Wajib Pajak daerah	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah (Kali)	3.00	400,000,000	4.00	355,155,780	4	304,223,500	-	89,875,896	0.00%	29.54%	4.00	445,031,676	133.33%	111.26%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.04.4.04.02.17.74	Validasi Data piutang PBB P2	Tersedianya Data Piutang dan Penghapusan Piutang PBB P2 yang Valid (Kecamatan)	1.00	305,000,000	1.00	222,352,921	4	343,636,900	-	-	0.00%	0.00%	1.00	222,352,921	100.00%	72.90%	
	4.04.4.04.02.17.75	Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perda)	5.00	250,000,000	5.00	242,755,500	5	199,871,000	-	12,481,232	0.00%	6.24%	5.00	255,236,732	100.00%	102.09%	
	4.04.4.04.02.17.76	Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah	Terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD)	4500.00	150,000,000	4650.00	53,330,000	4500	57,019,200	-	2,100,000	0.00%	3.68%	4650.00	55,430,000	103.33%	36.95%	
	4.04.4.04.02.17.80	Penilaian individual objek pajak non standar	Terlaksananya Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standar (OP)	10.00	350,000,000	30.00	284,478,024	10	335,240,400	-	152,910,000	0.00%	45.61%	30.00	437,388,024	300.00%	124.97%	
	4.04.4.04.02.17.81	Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana Promosi dan Informasi (Paket)	1.00	115,000,000	1.00	97,640,000	1	114,025,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	97,640,000	100.00%	84.90%	
	4.04.4.04.02.17.84	Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR	Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 (Kelurahan)	7.00	287,000,000	7.00	177,203,032	7	205,172,850	-	41,019,542	0.00%	19.99%	7.00	218,222,574	100.00%	76.04%	
	4.04.4.04.02.17.87	Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah	Sistem Online Pembayaran Pajak (Aplikasi)	1.00	200,000,000	1.00	261,147,916	1	50,000,000	-	12,350,000	0.00%	24.70%	1.00	273,497,916	100.00%	136.75%	
	4.04.4.04.02.17.88	Penyusunan prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah	Tersusunnya dokumen prediksi pendapatan (Dokumen)	2.00	100,000,000	2.00	63,385,700	2	99,965,250	-	-	0.00%	0.00%	2.00	63,385,700	100.00%	63.39%	
	4.04.4.04.02.17.89	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang PBBP2	Pelugas mendapatkan kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang PBB P2 (Orang)	20.00	250,000,000	47.00	155,789,805	30	206,101,000	-	2,620,000	0.00%	1.27%	47.00	158,409,805	235.00%	63.36%	
	4.04.4.04.02.17.103	Verifikasi BPHTB	Terlaksananya verifikasi BPHTB (OP)	150.00	100,000,000	80.00	53,562,766	200	100,000,000	-	53,648,776	0.00%	53.65%	80.00	107,211,542	53.33%	107.21%	
	4.04.4.04.02.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah (Persen)	90.00	30,000,000			90	30,000,000	-	1,200,000	0.00%	4.00%	0.00	1,200,000	0.00%	4.00%	
									5,515,782,550		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	1.43%	13.74%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.4.01.10.17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>												0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dumai Kota
	4.04.4.01.10.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan inventaris barang milik perangkat daerah (laporan)					1	18,979,000	-	2,251,000	0.00%	11.86%	0.00	2,251,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
									18,979,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	11.86%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
	4.04.1.02.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	50,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan	
	4.04.1.02.01.17.111	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Inventaris barang milik daerah (dokumen)	1	50,000,000			1		-			0.00%	0.00	15,583,750	0.00%	31.17%		
			Jumlah penyusunan laporan barang milik daerah tahunan (dokumen)	1			1	50,000,000		-	15,583,750		0.00%	31.17%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!	
			Jumlah pengamanan barang milik daerah (dokumen)	1			1				-			0.00%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!	
								50,000,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.04.4.05.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	4.04.4.05.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah		2.00	30,000,000			2	7,250,000	0	3,500,000	12.50%	48.28%	0.25	3,500,000	12.50%	11.67%		
								7,250,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12.50%	48.28%				
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.04.1.05.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	4.04.1.05.02.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah		12.00	30,000,000				27,150,000					0.00	-	0.00%	0.00%		
								27,150,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.04.4.04.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		95.00	9,337,391,011	0.00	6,212,516,104							0.00	6,212,516,104	0.00%	66.53%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	4.04.4.04.01.17.02	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah buku standar harga (Laporan)	1.00	173,392,380	1.00	158,625,380	1	171,292,380	0	1,890,000	12.50%	1.10%	1.13	160,515,380	112.50%	92.57%		
	4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Perda)	1.00	1,100,000,000	1.00	1,024,804,314	1	1,096,372,275	-	29,185,370	0.00%	2.66%	1.00	1,053,989,684	100.00%	95.82%		
	4.04.4.04.01.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Perwa)	1.00	180,000,000	1.00	119,564,702	1	154,555,500	-	-	0.00%	0.00%	1.00	119,564,702	100.00%	66.42%		
	4.04.4.04.01.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Perda perubahan APBD (Perda)	1.00	650,000,000	1.00	201,360,035	1	618,641,850	-	-	0.00%	0.00%	1.00	201,360,035	100.00%	30.98%		
	4.04.4.04.01.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perwa perubahan APBD (Perwa)	1.00	165,000,000	1.00	89,023,550	1	150,215,300	-	-	0.00%	0.00%	1.00	89,023,550	100.00%	53.95%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.04.4.04.01.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda (Perda)	1.00	720,000,000	1.00	447,206,794	1	686,267,300	-	-	0.00%	0.00%	1.00	447,206,794	100.00%	62.11%	
	4.04.4.04.01.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perwa (Perwa)	1.00	152,000,000	1.00	131,297,496	1	100,211,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	131,297,496	100.00%	86.38%	
	4.04.4.04.01.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta Bimtek (Orang)	120.00	476,000,000	15.00	378,993,511	120	472,313,990	-	-	0.00%	0.00%	15.00	378,993,511	12.50%	79.62%	
	4.04.4.04.01.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah peserta Bimtek dan sosialisasi manajemen aset/barang milik daerah (Orang)	130.00	240,897,000	240.00	236,959,071	130	237,968,340	-	-	0.00%	0.00%	240.00	236,959,071	184.62%	98.37%	
	4.04.4.04.01.17.20	Inventarisasi Aset	Jumlah laporan penelusuran BMD penerimaan hibah dari APBN, APBD Prov, dan pihak ketiga lainnya (Dokumen)	2.00	252,000,000	2.40	242,477,358	2	250,176,700	-	24,854,889	0.00%	9.93%	2.40	267,332,247	120.00%	106.08%	
	4.04.4.04.01.17.21	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan administrasi, fisik dan hukum (Laporan)	1.00	100,000,000	36.00	64,350,000	1	99,700,000	-	-	0.00%	0.00%	36.00	64,350,000	3600.00%	64.35%	
	4.04.4.04.01.17.24	Penerbitan Aset	Jumlah Laporan (Laporan)	1.00	175,000,000	36.00	62,609,875	1	172,435,000	-	-	0.00%	0.00%	36.00	62,609,875	3600.00%	35.78%	
	4.04.4.04.01.17.27	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Bulan)	1.00	300,000,000	1.00	149,813,900	12	295,300,000	1	13,427,618	6.25%	4.55%	1.75	163,241,518	175.00%	54.41%	
	4.04.4.04.01.17.61	Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah	Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD (Buku)	36.00	140,000,000	36.00	94,238,950	36	94,238,950	219	-	607.64%	0.00%	254.75	94,238,950	707.64%	67.31%	
			Register SP2D per SKPD (Lembar)	3500.00	-	3500.00	-	3500	-	-	-	-	-	3500.00	-	100.00%	#DIV/0!	
			Register SP2D BL dan BTL Perbulan (Lembar)	15000.00	-	1500.00	-	1500	-	-	-	-	-	1500.00	-	10.00%	#DIV/0!	
	4.04.4.04.01.17.63	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Tersusunnya laporan daftar BMD (Laporan)	1.00	230,000,000	1.00	92,141,250	1	228,946,000	0	16,610,300	6.25%	7.26%	1.06	108,751,550	106.25%	47.28%	
			Tersusunnya rekapitulasi daftar mutasi barang (Laporan)			1.00	-							1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.04.4.04.01.17.64	Rekonsiliasi Aset SKPD	Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi (rekon tahun 2016 dan semester I tahun 2017) (Laporan)	1.00	196,655,150	36.00	196,638,750	1	196,272,150	0	96,110,000	6.25%	48.97%	36.06	292,748,750	3606.25%	148.86%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.04.4.04.01.17.72	Penilaian Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang dilakukan penilaian (Laporan)	1.00	143,510,620	36.00	61,717,000	1	142,741,620	-	7,820,000	0.00%	5.48%	36.00	69,537,000	3600.00%	48.45%	
	4.04.4.04.01.17.77	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah pejabat pengurus barang pengelola yang memahami pengelolaan BMD (Orang)	17.00	185,000,000	15.00	177,498,800	17	185,000,000	-	50,000,000	0.00%	27.03%	15.00	227,498,800	88.24%	122.97%	
	4.04.4.04.01.17.78	Penyusunan standar biaya	Buku standar biaya (Dokumen)	1.00	210,000,000	1.00	184,518,728	1	209,262,050	0	72,010,709	18.75%	34.41%	1.19	256,529,437	118.75%	122.16%	
	4.04.4.04.01.17.83	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan (Laporan)	1.00	260,000,000	36.00	247,826,175	1	241,418,150	0	-	6.25%	0.00%	36.06	247,826,175	3606.25%	95.32%	
	4.04.4.04.01.17.85	Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah	Rekapitulasi daftar mutasi barang, tersusnya barang milik daerah, daftar barang milik daerah, rekapitulasi daftar mutasi barang, rekapitulasi daftar mutasi barang (laporan)	1.00	154,000,000	-	-	1	117,439,500	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.04.4.04.01.17.92	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)	77.00	200,000,000	-	-	77	198,685,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.04.4.04.01.17.93	Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran	Laporan kerja pelaksana anggaran (laporan)	1.00	230,000,000	-	-	1	221,426,264	0	37,377,277	6.25%	16.88%	0.06	37,377,277	6.25%	16.25%	
	4.04.4.04.01.17.94	Rekonsiliasi belanja tidak langsung	Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung (Laporan)	8.00	125,000,000	8.00	124,444,535	8	124,916,625	1	-	6.25%	0.00%	8.50	124,444,535	106.25%	99.56%	
	4.04.4.04.01.17.95	Rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi	Data dana transfer dan provinsi yang valid (Laporan)	1.00	230,000,000	1.00	213,123,661	1	223,902,260	0	53,231,044	6.25%	23.77%	1.06	266,354,705	106.25%	115.81%	
	4.04.4.04.01.17.96	Bimtek implementasi penyusunan laporan keuangan daerah	Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan daerah (Orang)	210.00	140,000,000	0.00	-	210	140,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.04.4.04.01.17.97	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai (Laporan)	1.00	170,000,000	1.00	77,347,500	1	169,513,000	0	3,000,000	25.00%	1.77%	1.25	80,347,500	125.00%	47.26%	
	4.04.4.04.01.17.98	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Dumai	Laporan keuangan semesteran kota Dumai (Laporan)	1.00	174,000,000	1.00	53,990,000	1	120,711,000	-	3,000,000	0.00%	2.49%	1.00	56,990,000	100.00%	32.75%	
	4.04.4.04.01.17.99	Penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai	Jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai (Laporan)	1.00	240,000,000	1.00	237,707,961	1	238,267,886	0	29,020,500	6.25%	12.18%	1.06	266,728,461	106.25%	111.14%	
	4.04.4.04.01.17.100	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah	Jumlah dokumen yang dipelihara (Dokumen)	500.00	178,000,000	-	-	500	199,800,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.04.4.04.01.17.105		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Laporan pengelolaan barang milik daerah (Laporan)	1.00	50,544,149			1	49,356,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
4.04.4.04.01.17.106		Pelaksanaan Pengeluaran / Belanja Semester I dan II akhir Tahun Anggaran	Laporan pengeluaran/belanja (Laporan)	1.00	150,000,000			1	148,892,000	-	41,870,221	0.00%	28.12%	0.00	41,870,221	0.00%	27.91%		
4.04.4.04.01.17.107		Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Rancangan Perda pengelolaan keuangan daerah (Dokumen)	1.00	120,000,000			1	262,972,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
4.04.4.04.01.17.108		Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtanganan barang milik daerah (Laporan)	1.00	235,000,000			1	234,004,900	0	11,650,000	6.25%	4.98%	0.06	11,650,000	6.25%	4.96%		
4.04.4.04.01.17.109		Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPMD	Dokumen RKBMD dan RKPMD (Dokumen)	2.00	106,000,000			1	104,484,000	0	5,400,000	6.25%	5.17%	0.06	5,400,000	3.13%	5.09%		
4.04.4.04.01.17.110		Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)	Sistem Informasi BMD (SIM-BMD) & Entry SIMDA BMD (Paket)	1.00	235,391,712	1.00	221,182,709	1	233,442,000	0	34,432,559	25.00%	14.75%	1.25	255,615,268	125.00%	108.59%		
									8,591,140,990	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		10.08%	6.18%						
											<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.04.4.03.01.17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>90.00</b>	<b>30,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.04.4.03.01.17.105		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (%)	90.00	30,000,000			90	23,808,800	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
									23,808,800	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%						
											<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.04.2.13.01.17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>100.00</b>	<b>30,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	
4.04.2.13.01.17.109		Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPMD	Terdatanya aset milik perangkat daerah yang terpelihara (dokumen)	1.00	30,000,000			1	25,488,300	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
									25,488,300	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%						
											<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.04.2.06.01.17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>100.00</b>	<b>30,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4.04.2.06.01.17.105		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah		12.00	30,000,000				30,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%		
									30,000,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%						
											<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.04.3.03.01.17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>30,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Kelautan Pangan Dan Pertanian	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	4.04.3.03.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100	30,000,000			100	30,000,000	-	5,350,000	0.00%	17.83%	0.00	5,350,000	0.00%	17.83%	
									30,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	17.83%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.2.05.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	30,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Lingkungan Hidup
	4.04.2.05.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengelolaan inventarisasi barang milik daerah (%)	12	30,000,000			100	15,750,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									15,750,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.1.03.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	275,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	4.04.1.03.01.17.17	Peningkatan manajemen investasi daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset (Dokumen)	2.00	275,000,000			2	178,510,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									178,510,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.2.02.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.00	30,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	4.04.2.02.01.17.112	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah (dokumen)	2.00	30,000,000			2	30,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									30,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.1.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		95.00	75,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	4.04.1.01.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah		100.00	75,000,000			100	73,323,805	4	10,157,201	3.50%	13.85%	3.50	10,157,201	3.50%	13.54%	
									73,323,805	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		3.50%	13.85%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.3.06.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan
	4.04.3.06.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Tercapainya data inventarisasi aset barang milik daerah yang lengkap dan akurat (%)	100.00	30,000,000			100	17,720,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									17,720,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						Dinas Perhubungan
	4.04.2.09.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	50,000,000									0.00			0.00%	0.00%
	4.04.2.09.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah		12.00	50,000,000				39,658,800					0.00			0.00%	0.00%
									39,658,800									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						Dinas Perikanan
	4.04.3.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00			0.00%	0.00%
	4.04.3.01.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terlaksananya pendataan dan pengamanan BMD (%)	1.00	30,000,000			100	30,000,000					0.00			0.00%	0.00%
									30,000,000									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	4.04.2.11.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00			0.00%	0.00%
	4.04.2.11.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terlaksananya pendataan aset (laporan)	100.00	30,000,000			1	30,000,000					0.00			0.00%	0.00%
									30,000,000									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	4.04.2.17.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00			0.00%	0.00%
	4.04.2.17.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terpeliharanya dan terdatanya aset milik perangkat daerah (unit)	500.00	30,000,000			500	30,000,000					0.00			0.00%	0.00%
									30,000,000									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	4.04.1.04.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	50,000,000									0.00			0.00%	0.00%
	4.04.1.04.01.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah		100	50,000,000			0	15,369,200					0.00			0.00%	0.00%
									15,369,200									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						Dinas Sosial
	4.04.1.06.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00			0.00%	0.00%
	4.04.1.06.01.17.20	Inventarisasi Aset	Terpelihara dan terdatanya aset milik perangkat daerah (%)	100.00	30,000,000			100	29,713,800	6	10,384,000	6.25%	34.95%	6.25	10,384,000	6.25%	34.61%	
									29,713,800									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			6.25%	34.95%				
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.04.2.01.01.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.04.2.01.01.17.105		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola (%)	100.00	30,000,000			100	30,000,000					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
									30,000,000					0.00%	0.00%			
4.04.4.02.01.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.00	30,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Inspektoral
4.04.4.02.01.17.105		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventaris barang milik daerah (Dokumen)	1.00	30,000,000			1	30,000,000					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
									30,000,000					0.00%	0.00%			
4.04.1.05.03.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.04.1.05.03.17.105		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik Perangkat Daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100.00	30,000,000			100	30,000,000					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
									30,000,000					0.00%	0.00%			
4.04.1.05.01.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	30,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
4.04.1.05.01.17.63		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan		2.00	15,000,000			0	10,000,000					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
									10,000,000					0.00%	0.00%			
4.04.4.01.04.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		90.00	30,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Sekretariat DPRD
4.04.4.01.04.17.105		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah		100.00	30,000,000				30,000,000					0.00		0.00%	0.00%	
									30,000,000					0.00%	0.00%			
4.04.4.01.11.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	50,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dumai Selatan

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	4.04.01.11.17.105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Dinventarisasikan Selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	50,000,000			12	19,192,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									19,192,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.01.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	1,084,600,000	0.00	1,575,919,584							0.00	1,575,919,584	0.00%	145.30%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.04.01.03.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SDM yang Mengikuti BIMTEK (orang)	15	255,000,000	30.00	286,221,901	15	169,740,000	0	8,000,000	1.67%	4.71%	30.25	294,221,901	201.67%	115.38%	
	4.04.01.03.17.24	Penertiban Aset	Jumlah Laporan Penertiban Aset, Inventarisasi Aset dan Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai (Laporan)	1	210,000,000	4.20	271,336,744	1	70,431,421	0	10,930,000	2.50%	15.52%	4.23	282,266,744	422.50%	134.41%	
	4.04.01.03.17.25	Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah	Jumlah Konsultasi, Komunikasi dan koordinasi Keuangan Daerah dan Aset (Kali)	48	321,700,000	81.00	576,693,624	55	299,270,700	5	29,156,367	9.09%	9.74%	86.00	605,849,991	179.17%	188.33%	
	4.04.01.03.17.64	Rekonsiliasi Aset SKPD	Rekonsiliasi Aset tahun 2018 dan Rekonsiliasi Aset Semester I tahun 2019 (Rekonsiliasi)	2	60,000,000	4.00	86,414,629	2	58,795,276	0	18,649,376	12.50%	31.72%	4.25	105,064,005	212.50%	175.11%	
	4.04.01.03.17.83	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Selda tahun 2018 dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Selda tahun 2019 (Rekonsiliasi)		74,900,000	4.00	86,326,980	2	56,422,110	0	21,022,375	12.50%	37.26%	4.25	107,349,355	#DIV/0!	143.32%	
	4.04.01.03.17.91	Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah	Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah (Bulan)	12	163,000,000	24.00	268,925,706	12	160,527,000	1	5,550,000	6.25%	3.46%	24.75	274,475,706	206.25%	168.39%	
									815,186,507	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		6.90%	11.45%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.04.2.12.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	30,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.04.2.12.01.17.111	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah		1	30,000,000			0	20,267,326	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
								0		-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
									20,267,326	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi /Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.10.2.10.01.24	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		100.00	40,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.10.2.10.01.24.01	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah		85.00	40,000,000				29,995,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									29,995,000									
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			0.00%	0.00%				
										<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.05.47	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		85.00	50,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dumal Barat
	4.01.4.01.05.47.01	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah laporan, pengelolaan barang inventaris milik perangkat daerah (Laporan)	1.00	50,000,000			1	6,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									6,000,000									
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			0.00%	0.00%				
										<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Lingkungan Hidup</b>												0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.05.4.01.10.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>		85.00	1,113,400,000	0.00	961,641,490							0.00	961,641,490	0.00%	86.37%	Dumal Kota
	2.05.4.01.10.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan (bulan)	12.00	59,600,000	24.00	961,641,490	12	480,603,000	1	71,295,000	6.25%	14.83%	24.75	1,032,936,490	206.25%	1733.11%	
									480,603,000									
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			6.25%	14.83%				
										<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.05.2.05.01.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>		5.00	6,144,508,800	0.00	10,333,640,564							0.00	10,333,640,564	0.00%	168.18%	Dinas Lingkungan Hidup
	2.05.2.05.01.15.01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah (dokumen)	1.00	300,000,000			1	290,711,800	-	2,400,000	0.00%	0.83%	0.00	2,400,000	0.00%	0.80%	
	2.05.2.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang disediakan (bulan)	10.00	500,000,000	12.00	281,883,414	12	1,430,000,000	1	-	6.25%	0.00%	12.75	281,883,414	127.50%	56.38%	
	2.05.2.05.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara (bulan)	5.00	5,344,508,800	24.00	10,051,757,150	12	5,430,328,100	1	785,398,800	6.25%	14.46%	24.75	10,837,155,950	495.00%	202.77%	
									7,151,039,900									
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			6.00%	11.02%				
										<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.05.4.01.07.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>		85.00	208,815,748	0.00	99,202,600							0.00	99,202,600	0.00%	47.51%	Bukit Kapur
	2.05.4.01.07.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan (Bulan)	90.00	141,400,000	24.00	99,202,600	12	49,887,600	0	2,800,000	2.08%	5.61%	24.25	102,002,600	26.94%	72.14%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									49,887,600		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	2.08%	5.61%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.05.4.01.05.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		85.00	570,908,000	0.00	546,443,500							0.00	546,443,500	0.00%	95.71%	Dumai Barat
2.05.4.01.05.15.04		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan (Bulan)	12.00	30,000,000	24.00	546,443,500	12	297,095,500	1	80,260,000	6.25%	27.01%	24.75	626,703,500	206.25%	2089.01%	
									297,095,500		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.25%	27.01%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.05.4.01.11.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		100.00	796,863,250	0.00	578,675,750							0.00	578,675,750	0.00%	72.62%	Dumai Selatan
2.05.4.01.11.15.04		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan (Bulan)	12.00	336,905,250	12.00	288,547,750	12	289,296,000	1	50,879,000	6.25%	17.59%	12.75	339,426,750	106.25%	100.75%	
									289,296,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.25%	17.59%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.05.4.01.06.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		100.00	901,447,765	0.00	797,743,000							0.00	797,743,000	0.00%	88.50%	Dumai Timur
2.05.4.01.06.15.04		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan dan kelurahan yang dibayar dalam 1 (satu) tahun (%)	90.00	54,247,765	24.00	797,743,000	80	401,196,500	4	62,200,000	4.69%	15.50%	27.75	859,943,000	30.83%	1585.21%	
									401,196,500		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.69%	15.50%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.05.4.01.08.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		85.00	120,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Medang Kampal
2.05.4.01.08.15.04		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan & Kelurahan (bulan)	12.00	120,000,000			12	32,198,250	1	7,376,250	6.25%	22.91%	0.75	7,376,250	6.25%	6.15%	
									32,198,250		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	6.25%	22.91%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.05.4.01.09.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		85.00	33,099,000	0.00	55,468,000							0.00	55,468,000	0.00%	167.58%	Sungai Sembilan
2.05.4.01.09.15.04		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		12.00	33,099,000	24.00	55,468,000	12	27,393,000	1	2,800,000	4.17%	10.22%	24.50	58,268,000	204.17%	176.04%	
									27,393,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.17%	10.22%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.05.2.05.01.16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		85.0	922,132,388	0.00	1,118,771,506								0.00	1,118,771,506	0.00%	121.32%	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.16.01		Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Persentase penilaian kota sehat adipura (%)	85.00	130,000,000	85.00	119,699,119	75	38,700,000	-	-	0.00%	0.00%	85.00	119,699,119	100.00%	92.08%			
2.05.2.05.01.16.16		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat (%)	50.00	55,132,388	50.00	19,967,200	50	16,300,000	-	-	0.00%	0.00%	50.00	19,967,200	100.00%	36.22%			
2.05.2.05.01.16.17		Pengendalian pencemaran air	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	70.00	145,000,000	160.00	283,893,999	70	142,533,452	3	16,329,900	4.29%	11.46%	163.00	300,223,899	232.86%	207.05%			
2.05.3.03.01.17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		15	600,620,500	0.00	1,081,665,000								0.00	1,081,665,000	0.00%	180.09%	Dinas Kelautan Pangan Dan Pertanian	
2.05.3.03.01.17.06		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Pengamatan dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun (Kali)	15	600,620,500	30.00	1,081,665,000	15	567,025,000	1	139,928,400	5.00%	24.68%	30.75	1,221,593,400	205.00%	203.39%			
2.05.2.05.01.18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam		1	180,359,706										0.00		0.00%	0.00%	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.18.02		Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam yang terlaksana (%)	1	180,359,706			85	332,500,000	1	10,403,600	1.47%	3.13%	1.25	10,403,600	125.00%	5.77%			
2.05.2.05.01.19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		85.00	523,754,326	0.00	651,990,207								0.00	651,990,207	0.00%	124.48%	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.19.02		Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia (dokumen)	2.00	175,000,000	4.00	201,621,900	2	15,800,000			0.00%	0.00%	4.00	201,621,900	200.00%	115.21%			
2.05.2.05.01.20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi		85.00	110,530,000	0.00	94,859,049								0.00	94,859,049	0.00%	85.82%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	2.05.2.05.01.20.07	Pengujian polusi udara ambien	persentase status mutu udara ambien kota dumai (%)	70.00	110,530,000	80.00	94,859,049	70	85,000,000	3	10,690,000	4.64%	12.58%	83.25	105,549,049	118.93%	95.49%	
									85,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.64%	12.58%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		21	4,040,424,537	0.00	7,066,597,203							0.00	7,066,597,203	0.00%	174.90%	Dinas Lingkungan Hidup
	2.05.2.05.01.24.06	Pemeliharaan RTH	Persentase taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara (%)	80	3,350,738,937	155.00	6,152,177,703	80	2,823,994,315	3	377,914,800	4.06%	13.38%	158.25	6,530,092,503	197.81%	194.89%	
									2,823,994,315			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.06%	13.38%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.05.1.05.02.29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan			8,379,843,500									0.00		#DIV/0!	0.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.1.05.02.29.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kebakaran di wilayah yang rentan kebakaran (unit barang)	170.00	6,734,843,500			221	6,122,585,000	-	19,261,411	0.00%	0.31%	0.00	19,261,411	0.00%	0.29%	
	1.05.1.05.02.29.02	Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya	Terlaksananya Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi terkait lainnya (6)	3.00	230,000,000			0	161,175,000	-	1,225,000	0.00%	0.76%	0.00	1,225,000	0.00%	0.53%	
	1.05.1.05.02.29.03	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Apel Slaga Tingkat Kota	Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Apel Slaga Tingkat Kabupaten (1)	1.00	45,000,000			0	29,550,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.05.1.05.02.29.04	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Terdampaknya kebakaran hutan dan lahan (laporan)	120.00	770,000,000			1	125,000,000	-	17,069,000	0.00%	13.66%	0.00	17,069,000	0.00%	2.22%	
									6,438,310,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.58%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.05.2.05.01.29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan			391,765,000									0.00		#DIV/0!	0.00%	Dinas Lingkungan Hidup
	1.05.2.05.01.29.05	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi	Jumlah papan informasi pencegah kebakaran hutan dan lahan (unit)	24	283,800,000			23	283,800,000	-	1,800,000	0.00%	0.63%	0.00	1,800,000	0.00%	0.63%	
									283,800,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.63%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	3.03.3.03.01.31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan		20	500,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Kelautan Pangan Dan Perikanan
		Kegiatan Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Penanaman Aren (Ha))	Terlaksananya Penanaman Aren (Ha)	20	500,000,000			50		-		0.00%		0.00		0.00%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.03.3.03.01.31.01	Tanamati Kentanany	Terlaksananya Penanaman Kelengkeng (Ha)					10	980,000,000			0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Terlaksananya Penanaman Jagung (Ha)					5				0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
									980,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.03.1.03.01.38	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air		5.00	2,000,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.38.01	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air		5.00	2,000,000,000				1,978,402,500					0.00		0.00%	0.00%	
									1,978,402,500			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.05.1.05.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		100.00	1,717,400,000	0.00	1,629,330,337							0.00	1,629,330,337	0.00%	94.87%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.1.05.03.15.07	Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah	Jumlah Anggota Kominda yang aktif (orang)	33.00	182,400,000	33.00	520,939,320	33	167,329,981	8		25.00%	0.00%	41.25	520,939,320	125.00%	285.60%	
	1.05.1.05.03.15.08	Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya	Terkumpulnya data Ormas, LSM, Yayasan (bulan)	10.00	165,000,000	10.00	157,813,000	10	158,407,000	1	23,419,200	7.50%	14.78%	10.75	181,232,200	107.50%	109.84%	
	1.05.1.05.03.15.09	Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah	Orang Asing dan Twnaga Kerja Asing yang dipantau (bulan)	10.00	250,000,000	10.00	275,140,000	10	243,627,000	1	30,193,000	7.50%	12.39%	10.75	305,333,000	107.50%	122.13%	
	1.05.1.05.03.15.10	Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah	Rencana dan Kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik (bulan)	10.00	670,000,000	90.00	675,438,017	10	661,966,748	1	110,659,900	7.50%	16.72%	90.75	786,097,917	907.50%	117.33%	
			Meningkatnya koordinasi Forkopimda (bulan)	8.00	450,000,000				1,231,330,729			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	9.88%	13.34%	0.00		0.00%	0.00%
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.05.1.05.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		85.00	2,100,000,000	0.00	2,842,295,500							0.00	2,842,295,500	0.00%	135.35%	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1.05.01.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Trantibum (Kegiatan)	3.00	452,980,000	7.00	741,881,000	3	277,285,000		10,360,000	0.00%	3.74%	7.00	752,241,000	233.33%	166.06%	
	1.05.1.05.01.15.13	Pengamanan dan penerbitan	Jumlah Kegiatan diamankan (Kali)	6.00	467,500,000	3.00	187,622,500	4	150,500,000	0	11,519,000	6.25%	7.65%	3.25	199,141,500	54.17%	42.60%	
	1.05.1.05.01.15.14	Pembinaan dan pendampingan pengawas perda di kecamatan dan kelurahan		12.00	112,620,000	1.00	114,282,000	0	25,290,000			0.00%	0.00%	1.00	114,282,000	8.33%	101.48%	
	1.05.1.05.01.15.15	Penyilapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Bulan Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksinya (Bulan)	12.00	941,900,000	24.00	1,718,110,000	12	833,075,000	1	202,110,000	6.25%	24.26%	24.75	1,920,220,000	206.25%	203.87%	
									1,286,150,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.78%	17.42%				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9=8/7x100%	10 = 6 + 8	11=10/5x100	12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.01.16	<b>Program pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>		85.00	723,130,000	0.00	926,437,672					0.00	926,437,672	0.00%	128.11%			Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1.05.01.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Kegiatan yang diikuti (Kali)	2.00	265,754,250	4.00	377,782,090	1	4,425,000	0	4,425,000	25.00%	100.00%	4.25	382,207,090	212.50%	143.82%	
	1.05.1.05.01.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI dan kejaksaan		2.00	288,920,000	3.00	385,800,000	0	243,535,000	-	-	0.00%	0.00%	3.00	385,800,000	150.00%	133.53%	
	1.05.1.05.01.16.07	Pengawasan terhadap penegakan Perda perzinahan dan non perzinahan di Kota Dumai	Jumlah Usaha yang memiliki izin lengkap di kota dumai (Usaha)	200.00	168,455,750	200.00	162,855,582	200	65,519,000	9	11,669,000	4.50%	17.81%	209.00	174,524,582	104.50%	103.60%	
									313,479,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		1.29%	5.13%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.03.17	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>		100.00	295,000,000	0.00	174,951,620					0.00	174,951,620	0.00%	59.31%			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.1.05.03.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya kegiatan FKUB (kegiatan)	5.00	146,413,158		84,356,620	5	47,150,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	84,356,620	0.00%	57.62%	
	1.05.1.05.03.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan FPK (kegiatan)	5.00	148,586,842		90,595,000	5	46,850,000	-	6,210,000	0.00%	13.26%	0.00	96,805,000	0.00%	65.15%	
									94,000,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	6.61%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.01.19	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keterbiban dan keamanan</b>		85.00	340,200,000	0.00	478,813,000					0.00	478,813,000	0.00%	140.74%			Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1.05.01.19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Linmas TPS, Linmas Cadangan Tk. Kota, Tk. Kecamatan dan Tk. Kelurahan (Orang)	184.00	150,000,000	184.00	134,210,000	184	134,060,000	-	-	0.00%	0.00%	184.00	134,210,000	100.00%	89.47%	
	1.05.1.05.01.19.04	Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai	Terlaksananya HUT Satpol PP dan Linmas, serta Lomba Poskamling Tingkat Kota Dumai (Kali)	1.00	190,200,000	1.00	168,010,000	1	67,720,000	0	64,620,000	25.00%	95.42%	1.25	232,630,000	125.00%	122.31%	
									201,780,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		8.39%	32.02%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.03.21	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>		100.00	1,080,300,700							0.00	-	0.00%	0.00%			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.1.05.03.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data partai politik yang akurat (kegiatan)	100.00	400,000,000			1	78,522,450	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	1.05.1.05.03.21.08	Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Terlaksananya bantuan keuangan partai politik (%)	1.00	200,000,000			100	126,986,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									205,508,450	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
	1.05.4.01.03.21	Program pendidikan politik masyarakat		16	170,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
	1.05.4.01.03.21.07	Bimbingan teknis pembuatan LPJ bantuan keuangan partai politik	Jumlah Pengurus Parpol yang mengikuti Bimtek (Parpol)	16	170,000,000			16	149,182,300	-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									149,182,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.05.1.05.02.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		85.00	276,204,990	0.00	138,858,961							0.00	138,858,961	0.00%	50.27%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.1.05.02.22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		12.00	86,727,868	16.60	60,971,000		23,850,000					16.60	60,971,000	138.33%	70.30%		
	1.05.1.05.02.22.05	Identifikasi Potensi dan Dampak Bencana		1.00	189,477,122	1.34	77,887,961		41,610,000					1.34	77,887,961	134.00%	41.11%		
									65,460,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.05.1.05.02.24	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		95.00	1,000,000,000	0.00	310,325,000							0.00	310,325,000	0.00%	31.03%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.1.05.02.24.02	Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Jumlah kejadian penanganan bencana (kali kejadian (hotspot))	150.00	1,000,000,000	123.00	310,325,000	100	788,950,000	6	203,500,000		6.25%	25.79%	129.25	513,825,000	86.17%	51.38%	
									788,950,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		6.25%	25.79%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.05.1.05.02.25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		95.00	159,189,236	0.00	135,904,800							0.00	135,904,800	0.00%	85.37%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.1.05.02.25.01	Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana		10.00	159,189,236	21.00	135,904,800		72,075,000					21.00	135,904,800	210.00%	85.37%		
									72,075,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.01.4.01.10.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan		85.00	120,425,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Kota	
	4.01.4.01.10.30.02	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTO/STO Tingkat Kecamatan yang diadakan (jenis lomba)	4.00	120,425,000			4	104,705,000	-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									104,705,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.01.4.01.07.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan		85.00	87,172,040									0.00	-	0.00%	0.00%	Bukit Kapur	
	4.01.4.01.07.30.02	Pembinaan Kehidupan Beragama		1.00	87,172,040				87,050,000					0.00	-	0.00%	0.00%		
									87,050,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.01.4.01.05.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan		85.00	120,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Barat	
	4.01.4.01.05.30.02	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTO/STO Tingkat Kecamatan (Lomba)	5.00	120,000,000			4	105,550,000	-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									105,550,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.11.30		Program pengembangan wawasan kebangsaan		100.00	152,500,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Selatan	
4.01.4.01.11.30.02		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan (Jenis Lomba)	2.00	152,500,000			2	145,605,325			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									145,605,325	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.06.30		Program pengembangan wawasan kebangsaan		100.00	181,000,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Timur	
4.01.4.01.06.30.02		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan yang diadakan (%)	90.00	181,000,000			80	90,730,000	3	1,380,000	3.13%	1.52%	2.50	1,380,000	2.78%	0.76%	
									90,730,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3.13%	1.52%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.08.30		Program pengembangan wawasan kebangsaan		85.00	140,000,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Medang Kampai	
4.01.4.01.08.30.02		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan 4 jenis lomba (jenis lomba)	4.00	140,000,000			4	91,070,000	1	12,000,000	18.75%	13.18%	0.75	12,000,000	18.75%	8.57%	
									91,070,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	18.75%	13.18%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.09.30		Program pengembangan wawasan kebangsaan		85.00	99,400,000								0.00	-	0.00%	0.00%	Sungai Sembilan	
4.01.4.01.09.30.02		Pembinaan Kehidupan Beragama		6.00	99,400,000				91,700,000				0.00	-	0.00%	0.00%		
									91,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.03.30		Program pengembangan wawasan kebangsaan		100	9,471,517.50	0.00	7,106,839,398						0.00	7,106,839,398	0.00%	#VALUE!	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
4.01.4.01.03.30.01		Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi		1	1,450,850,000	1.00	3,806,522,458	0	947,752,040	-	22,800,000	0.00%	2.41%	1.00	3,829,322,458	100.00%	263.94%	
4.01.4.01.03.30.02		Pembinaan Kehidupan Beragama			860,667,500	9.00	409,252,290	0	495,250,000	-	149,788,600	0.00%	30.25%	9.00	559,040,890	#DIV/0!	64.95%	
4.01.4.01.03.30.03		Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai		75	1,350,000,000	208.00	837,776,150	0	1,186,715,500	-	38,211,260	0.00%	3.22%	208.00	875,987,410	277.33%	64.89%	
4.01.4.01.03.30.04		Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan			2,900,000,000	9.00	2,053,288,500	0	1,995,500,000	-	35,000,000	0.00%	1.75%	9.00	2,088,288,500	#DIV/0!	72.01%	
									4,625,217,540	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	5.31%						
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Energi dan Sumber Daya Mineral																

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.05.1.04.01.17	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>		17.00	13,150,557,223	0.00	25,582,490,518							0.00	25,582,490,518	0.00%	194.54%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	3.05.1.04.01.17.02	Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum		1.00	2,407,288,542	0.00	2,938,205,418	0	1,797,828,000	-	150,944,299	0.00%	8.40%	0.00	3,089,149,717	0.00%	128.32%	
	3.05.1.04.01.17.03	Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum		12.00	10,743,268,681	0.00	22,644,285,100	0	10,474,865,500	-	1,641,259,562	0.00%	15.67%	0.00	24,285,544,662	0.00%	226.05%	
								12,272,693,500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			0.00%	14.60%					
									<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		<b>Kepegawaian</b>																
	4.05.4.05.01.28	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		0.15	4,918,707,400									0.00	-	0.00%	0.00%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4.05.4.05.01.28.02	Seleksi Penerimaan calon PNS		0.00	-			5000	150,000,000	40	49,083,998	0.81%	32.72%	40.25	49,083,998	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.05.4.05.01.28.03	Penempatan PNS		0.00	-			175	119,000,000	10	29,666,000	5.71%	24.93%	10.00	29,666,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.05.4.05.01.28.04	Penalaian sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS		0.00	-			700	233,938,000	125	49,546,921	17.86%	21.18%	125.00	49,546,921	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.05.4.05.01.28.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah		4000.00	358,500,000			4000	335,400,000	250	60,899,109	6.25%	18.16%	250.00	60,899,109	6.25%	16.99%	
	4.05.4.05.01.28.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi		0.00	-			200	123,440,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.05.4.05.01.28.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		0.00	-			5	39,613,700	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.05.4.05.01.28.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas		1.00	148,992,000			2	150,950,000	-	5,280,000	0.00%	3.50%	0.00	5,280,000	0.00%	3.54%	
	4.05.4.05.01.28.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan		30.00	969,500,000			40	1,066,811,000	-	27,767,000	0.00%	2.60%	0.00	27,767,000	0.00%	2.86%	
	4.05.4.05.01.28.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		36.00	65,000,000			37	85,200,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	4.05.4.05.01.28.17	Pelaksanaan Sumpah / Janji PNS		0.00	-			220	24,410,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.05.4.05.01.28.18	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian		4000.00	199,000,000			4000	189,110,000	250	56,800,000	6.25%	30.04%	250.00	56,800,000	6.25%	28.54%	
	4.05.4.05.01.28.19	Penyelenggaraan diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah		0.00	-			29	320,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.05.4.05.01.28.24	Seleksi/Uji Kompetensi PNS		0.00	-			27	743,524,000	-	35,376,174	0.00%	4.76%	0.00	35,376,174	#DIV/0!	#DIV/0!	
								3,581,396,700	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			2.31%	8.78%					
									<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.05.4.01.03.28	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>			560,000,000									0.00	-	#DIV/0!	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	4.05.4.01.03.28.25	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (1)	1	200,000,000			0	124,921,100	0	5,815,000	0.00%	4.65%	0.01	5,815,000	1.25%	2.91%	
	4.05.4.01.03.28.26	Penyusunan Peta Jabatan	Dokumen Peta Jabatan (1)	1	250,000,000			0	124,903,350	0	7,094,350	0.00%	5.68%	0.01	7,094,350	1.25%	2.84%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									249,824,450		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	5.17%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Administrasi Kependudukan dan Sipil</b>											0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
2.06.2.06.01.15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		100.00	3,171,263,000	0.00	3,446,847,657					0.00	3,446,847,657	0.00%	108.69%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06.01.15.03		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		12.00	871,563,000	0.00	1,734,147,100	0	1,012,132,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	1,734,147,100	0.00%	198.97%	
2.06.2.06.01.15.06		Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		12.00	250,000,000			0	136,601,936	-	90,081,350	0.00%	65.94%	0.00	90,081,350	0.00%	36.03%	
2.06.2.06.01.15.07		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		12.00	473,450,000	0.00	537,208,499	0	578,000,000	-	209,685,000	0.00%	36.28%	0.00	746,893,499	0.00%	157.76%	
2.06.2.06.01.15.08		Pengembangan data base kependudukan		12.00	560,400,000	0.00	464,782,417	0	215,000,000	-	7,350,000	0.00%	3.42%	0.00	472,132,417	0.00%	84.25%	
2.06.2.06.01.15.15		Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat		0.00	300,000,000			0	92,450,000	-	28,650,000	0.00%	30.99%	0.00	28,650,000	#DIV/0!	9.55%	
									2,034,183,936		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	16.51%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.06.2.06.01.16		<b>Program Pendataan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil</b>		100.00	750,000,000	0.00	638,947,900					0.00	638,947,900	0.00%	85.19%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06.01.16.03		Pendataan akta kelahiran		12.00	150,000,000	0.00	196,627,600		100,000,000			0.00	196,627,600	0.00%	131.09%			
									100,000,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Sosial</b>											0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
1.06.1.06.01.15		<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>		53.00	565,025,047	0.00	620,043,709					0.00	620,043,709	0.00%	109.74%		Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.15.07		Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Verivali data PBI JKN (Jiwa)			61382.00	434,570,073	61414			0.00%		61382.00	511,883,609	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Tersedianya data PMKS dan PSKS (KK)	17804.00	319,296,047	31764.00		17804	316,594,000		77,313,536	0.00%	24.42%	31764.00	178.41%	0.00%		
1.06.1.06.01.15.08		Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)	Tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH (KK)	6186.00	245,729,000	6720.00	185,473,636	6186	243,639,000		24,480,000	0.00%	10.05%	6720.00	209,953,636	108.63%	85.44%	
									560,233,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	4.37%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.06.1.06.01.16		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		53.00	1,123,959,284	0.00	2,139,157,992					0.00	2,139,157,992	0.00%	190.32%		Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.16.04		Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan, dan anak nakal yang mengikuti pelatihan (orang)	Jumlah anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan, dan anak nakal yang mengikuti pelatihan (orang)	12.00	65,000,000	16.00	53,566,700	12	59,758,000	1	12,792,217	6.25%	21.41%	16.75	66,358,917	139.58%	102.09%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.1.06.01.16.10		Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah PMKS yang dilayani paska kejadian darurat (KK)	200.00	200,000,000	239.00	297,476,896	200	149,552,000	4	27,680,953	1.75%	18.51%	242.50	325,157,849	121.25%	162.58%	
1.06.1.06.01.16.12		Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan	Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai (orang)	50.00	270,000,000	12	297,120,781	50	247,910,000	1	20,150,000	2.00%	8.13%	13.00	317,270,781	26.00%	117.51%	
1.06.1.06.01.16.13		Pelesatarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiaakwaan Sosial	Terlaksananya kajian sejarah keperintisan, kejuangan dan kesetiaakwaan sosial (dokumen)	50.00	110,940,000		86,158,143	1	50,765,000	-	7,620,000	0.00%	15.01%	0.00	93,778,143	0.00%	84.53%	
1.06.1.06.01.16.16		Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE)	Adanya tenaga pendamping untuk pengembangan usaha bersama yang dilaksanakan secara kontinue (KUBE)	50.00	68,019,284	100.00	84,536,251	70	59,852,000	-	13,640,000	0.00%	22.79%	100.00	98,176,251	200.00%	144.34%	
1.06.1.06.01.16.19		Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan	PMKS yang dilayani (%)	100.00	190,000,000	104.00	312,551,800	100	166,022,120	6	17,100,000	6.25%	10.30%	110.25	329,651,800	110.25%	173.50%	
1.06.1.06.01.16.22		Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat	Terlaksananya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masyarakat (KK)	8481.00	220,000,000			8481	199,023,000	2,120	4,070,000	25.00%	2.04%	2120.25	4,070,000	25.00%	1.85%	
									932,882,120			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	7.66%	11.05%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.06.4.01.03.16		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>100.00</b>	<b>1,119,631,971</b>	<b>0.00</b>	<b>375,261,982</b>							0.00	375,261,982	0.00%	33.52%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
1.06.4.01.03.16.21		Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai		6.00	398,501,476	29.50	168,322,862	0	328,940,000	-	28,059,000	0.00%	8.53%	29.50	196,381,862	491.67%	49.28%	
1.06.4.01.03.16.23		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan pangan non tunai		100.00	250,000,000				149,600,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									478,540,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	5.86%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.06.1.06.01.18		<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>		<b>30.00</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>89,297,600</b>							0.00	89,297,600	0.00%	52.53%	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.18.04		Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang diperdagunakan di lingkungan masyarakat (orang)	50.00	170,000,000	73141506.00	120	162439106	220,588,605	-	37,538,200	0.00%	17.02%	73141506.00	37,538,320	146283012.00%	22.08%	
									220,588,605			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	17.02%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.06.1.06.01.19		<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>		<b>30.00</b>	<b>129,315,381</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.1.06.01.19.04		Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Anak asuh yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (orang)					165		41		25.00%		41.25	75,803,098	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Bantuan Panti Jompo (orang)					55	140,658,054	14	75,803,098	25.00%	53.89%	13.75	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Terlaksananya pelatihan khusus bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	200.00	129,315,381			33		8		25.00%		8.25	-	4.13%	0.00%	
								140,658,054		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		25.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.06.1.06.01.20		<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>		<b>30.00</b>	<b>189,719,000</b>	<b>0.00</b>	<b>209,824,152</b>							0.00	209,824,152	0.00%	110.60%	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.20.01		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah pecandu narkoba yang direhab di panti rehabilitasi kecanduan narkoba dan jumlah PMKS yang diberikan ilmu keterampilan berusaha (orang)	10.00	62,719,000	12.00	62,280,152	6	62,675,500	-	-	0.00%	0.00%	12.00	62,280,152	120.00%	99.30%	
1.06.1.06.01.20.03		Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Jumlah gepeng dan penyakit sosial lainnya yang dikembalikan ke tempat asalnya (orang)	150.00	127,000,000	180.00	147,544,000	150	118,700,000	7	20,400,000	4.67%	17.19%	187.00	167,944,000	124.67%	132.24%	
									181,375,500		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	3.05%	11.25%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.06.1.06.01.21		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>200.00</b>	<b>300,341,500</b>	<b>0.00</b>	<b>274,637,572</b>							0.00	274,637,572	0.00%	91.44%	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.21.02		Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya pemahaman dunia usaha dalam keikutsertaan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (orang)	68.00	73,000,000		48,163,900	68		-	-	0.00%		0.00	48,163,900	0.00%	65.98%	
			Meningkatnya pemahaman dunia usaha dalam keikutsertaan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (orang)						68	70,618,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1.06.1.06.01.21.03		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peningkatan kualitas SDM yang menjadi Mitra kerja sosial (orang)	190.00	227,341,500		226,473,672	190	224,959,100	-	-	0.00%	0.00%	0.00	226,473,672	0.00%	99.62%	
									295,577,100		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		<b>Perdagangan</b>																

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.06.3.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		573.00	516,931,725	0.00	1,900,189,513							0.00	1,900,189,513	0.00%	367.59%	Dinas Perdagangan
	3.06.3.06.01.15.04	Pengembangan Pelayanan UPT Metrologi Legal	Terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP ()	1833.00	344,131,725	1726.00	323,289,963	1833	94,120,548	-	7,350,000	0.00%	7.81%	1726.00	330,639,963	94.16%	96.08%	
	3.06.3.06.01.15.05	Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrotlogian	Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha (UTTP)	500.00	172,800,000	1000.00	1,576,899,550	500	81,900,000	-	22,500,000	0.00%	27.47%	1000.00	1,599,399,550	200.00%	925.58%	
									176,020,548			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	16.96%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	3.06.3.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		15000.00	290,000,000	0.00	1,041,683,458							0.00	1,041,683,458	0.00%	359.20%	Dinas Perdagangan
	3.06.3.06.01.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah	Terlaksananya partisipasi pada pasar lelang luar daerah (%)	100.00		166.00	156,560,958	100	40,188,500	-	-	0.00%	0.00%	166.00	156,560,958	166.00%	#DIV/0!	
	3.06.3.06.01.18.09	Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah penambahan sarana dan prasarana pasar (Pasar)	1.00		3.00	679,638,750	3	301,371,500	-	-	0.00%	0.00%	3.00	679,638,750	300.00%	#DIV/0!	
	3.06.3.06.01.18.10	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat (Kecamatan)	7.00		14.00	205,483,750	7	79,440,000	-	-	0.00%	0.00%	14.00	205,483,750	200.00%	#DIV/0!	
									421,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	3.06.4.01.03.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		100.00	209,700,645	0.00	369,860,900							0.00	369,860,900	0.00%	176.38%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	3.06.4.01.03.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kontribusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terhadap Sektor Ekonomi dalam Menjaga Kestabilan Harga (Laporan)	1.00	209,700,645	2.00	369,860,900	1	149,882,000	-	35,380,000	0.00%	23.61%	2.00	405,240,900	200.00%	193.25%	
									149,882,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	23.61%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	3.06.3.06.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		10.00	131,724,000	0.00	109,703,000							0.00	109,703,000	0.00%	83.28%	Dinas Perdagangan
	3.06.3.06.01.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Frekuensi terlaksananya penataan dan penertiban PKL dan asongan (Bulan)	3.00	99,044,000	1.00	79,353,000	3	75,701,450	-	4,900,000	0.00%	6.47%	1.00	84,253,000	33.33%	85.07%	
	3.06.3.06.01.19.07	Pendataan Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima (Kegiatan)	1.00	32,680,000	1.00	30,350,000	1	5,900,000	-	-	0.00%	0.00%	1.00	30,350,000	100.00%	92.87%	
									81,601,450			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	6.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																		
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>		1.00	312,120,000	0.00	416,338,528							0.00	416,338,528	0.00%	133.39%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2.07.4.03.01.15	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan (Dokumen)	1.00	312,120,000	2.00	416,338,528	1	240,282,000	-	14,141,000	0.00%	5.89%	2.00	430,479,528	200.00%	137.92%	
									240,282,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	5.89%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>		100.00	716,632,267	0.00	1,043,326,700							0.00	1,043,326,700	0.00%	145.59%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	2.07.4.01.03.15.06	Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu		100.00	304,479,621	0.00	250,607,000	0	47,797,500	-	6,100,000	0.00%	12.76%	0.00	256,707,000	0.00%	84.31%	
	2.07.4.01.03.15.08	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)		100.00	412,152,646	4.00	792,719,700	0	321,712,619	-	7,356,000	0.00%	2.29%	4.00	800,075,700	4.00%	194.12%	
									369,510,119			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	3.64%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>		100.00	205,422,000	0.00	335,860,300							0.00	335,860,300	0.00%	163.50%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
	2.07.4.01.03.16.08	Pembinaan dan Pengawasan lembaga ekonomi Kelurahan		80.00	205,422,000			0	159,875,600	-	30,930,000	0.00%	19.35%	0.00	30,930,000	0.00%	15.06%	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UEK-SP (80%)	0.00	1,002,438,200	100.00	335,860,300		159,875,600			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	19.35%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>																Dumai Kota
	4.01.4.01.10.34.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 (dokumen)					1	41,730,000	0	41,730,000	25.00%	100.00%	0.25	41,730,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
									41,730,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	25.00%	100.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>				0.00	50,100,000							0.00	50,100,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Bukit Kapur
	4.01.4.01.07.34.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (Dokumen)			1.00	50,100,000	1	25,700,000	0	25,700,000	25.00%	100.00%	1.25	75,800,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
									25,700,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	25.00%	100.00%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>				0.00	87,576,000							0.00	87,576,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dumai Barat



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	4.01.4.01.05.34.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (Kecamatan dan Kelurahan)			2.00	87,576,000	5	43,270,000	1	43,270,000	25.00%	100.00%	3.25	130,846,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
									43,270,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25.00%	100.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	4.01.4.01.11.34	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>				<b>0.00</b>	<b>72,890,000</b>							0.00	72,890,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dumai Selatan
	4.01.4.01.11.34.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 2019 (Dokumen)			1.00	72,890,000	1	42,050,000	0	41,950,000	25.00%	99.76%	1.25	114,840,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
									42,050,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25.00%	99.76%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	4.01.4.01.06.34	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>				<b>0.00</b>	<b>47,020,000</b>							0.00	47,020,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dumai Timur
	4.01.4.01.06.34.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan (kegiatan)			12.00	47,020,000	6	27,240,000	2	27,240,000	25.00%	100.00%	13.50	74,260,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
									27,240,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25.00%	100.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	4.01.4.01.08.34	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>				<b>85.00</b>	<b>78,910,000</b>							0.00	-	0.00%	0.00%	Medang Kampai
	4.01.4.01.08.34.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (dokumen)			1.00	78,910,000	1	51,560,000	1	51,560,000	75.00%	100.00%	0.75	51,560,000	75.00%	65.34%	
									51,560,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		75.00%	100.00%					
										Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Tinggi					
	4.01.4.01.09.34	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>				<b>85.00</b>	<b>41,900,000</b>	<b>0.00</b>	<b>64,400,000</b>					0.00	64,400,000	0.00%	153.70%	Sungai Sembilan
	4.01.4.01.09.34.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Dokumen Musrenbang di Kecamatan Sungai Sembilan (Dok)			1.00	41,900,000	2.00	64,400,000	1	32,200,000	25.00%	100.00%	2.25	96,600,000	225.00%	230.55%	
									32,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25.00%	100.00%					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		<b>Perindustrian</b>																
	3.07.2.11.01.16	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>				<b>40.00</b>	<b>205,313,680</b>	<b>0.00</b>	<b>219,841,954</b>					0.00	219,841,954	0.00%	107.08%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	3.07.2.11.01.16.07	Bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM	Peningkatan pengelolaan dan manajemen usaha serta meningkatnya kemasan dan merek bagi IKM kampung binaan (km)			21.00	89,750,000	180.00	140,968,024	21	76,148,185	0.00%	23.13%	180.00	158,578,024	857.14%	176.69%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									76,148,185		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	23.13%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3.07.2.11.01.17		<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>		300.00	568,606,000	0.00	1,018,463,259							0.00	1,018,463,259	0.00%	179.12%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.07.2.11.01.17.02		Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Menumbuhkan wirausaha baru, terlatihnya IKM hand craft (orang)	25.00	238,606,000	15.00	133,288,950	12	83,206,935	-	12,793,477	0.00%	15.38%	15.00	146,082,427	60.00%	61.22%	
3.07.2.11.01.17.05		Pembinaan Industri kerajinan dan Industri kreatif	Adanya motif desain tenun kola dumai dan cendramala kola dumai (%)	100.00	200,000,000	101.00	499,609,397	100	198,156,400	-	3,566,400	0.00%	1.80%	101.00	503,175,797	101.00%	251.59%	
									281,363,335		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	5.81%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>															
2.08.2.08.01.15		<b>Program Keluarga Berencana</b>		88.00	5,928,134,808	0.00	3,470,924,291							0.00	3,470,924,291	0.00%	58.55%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Pembinaan Keluarga Berencana	Terbinanya kelompok kegiatan keluarga sejahtera (Kelompok)	7.00	3,928,134,808	10.00	1,506,065,800	7				0.00%		10.00	1,522,989,800	142.86%	38.77%	
2.08.2.08.01.15.05			Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kota Dumai (Bulan)	0.00		12.00		12	394,993,750		16,924,000	0.00%	4.28%	12.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
									394,993,750		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.08.2.08.01.17		<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>		87.00	1,317,104,375	0.00	454,511,150							0.00	454,511,150	0.00%	34.51%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terselenggaranya kegiatan Pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes, MOP dan Daerah Galcitas (Kegiatan)	4.00	800,000,000	7.00	454,511,150	4				0.00%		7.00	495,116,950	175.00%	61.89%	
2.08.2.08.01.17.02			Terselenggaranya Work Shop bagi Bendahara Materil dan Pelugas Gudang Aikun (Faskes)	25.00				25	1,269,800,300		40,605,800	0.00%	3.20%	0.00		0.00%	#DIV/0!	
			Terselenggaranya Promosi Kespro pada PUS (Kegiatan)	1.00	100,000,000			1				0.00%		0.00		0.00%	0.00%	
									1,269,800,300		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.08.2.08.01.20		<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>		87.00	362,094,696	0.00	477,151,204							0.00	477,151,204	0.00%	131.78%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.2.08.01.20.04		Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya ajang prestasi remaja (kelompok PIK) tingkat Kota Dumai (Kelompok)	28.00	362,094,696	50.00	477,151,204	27	100,000,000	7	99,299,600	25.00%	99.30%	56.75	576,450,804	202.68%	159.20%	
									100,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25.00%					
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
2.08.2.08.01.23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		87.00	669,630,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.23.01		Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Pelatihan dan pembinaan bagi kader pendamping tribina (Kelompok)	5.00	669,630,000			5	598,248,100	1	389,107,850	25.00%	65.04%	1.25	389,107,850	25.00%	58.11%	
									598,248,100			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25.00%	65.04%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sedang				
2.08.2.08.01.25		Program Pengendalian Penduduk		91.00	1,179,970,476									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.25.01		Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan	Jumlah insitusi formal informal dan masyarakat yang mendapatkan materi Pendidikan Kependudukan (Insitusi / kampung kb)	10.00	279,756,776			10	267,577,000	3	197,084,000	25.00%	73.66%	2.50	197,084,000	25.00%	70.45%	
2.08.2.08.01.25.02		Advokasi KIE Program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang memiliki sarana prasarana KIE (Kampung KB)	7.00	586,213,700			7	460,460,000	2	136,175,000	25.00%	29.57%	1.75	136,175,000	25.00%	23.23%	
2.08.2.08.01.25.03		Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK	Ratio PKB / PLKB yang kompeten (PKB/PLKB)	16.00	314,000,000			16	314,000,000	1	33,400,000	4.69%	10.64%	0.75	33,400,000	4.69%	10.64%	
									1,042,037,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	18.88%	35.19%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			<b>Perhubungan</b>															
2.09.2.09.01.15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		10.00	5,745,713,361	0.00	7,535,566,425							0.00	7,535,566,425	0.00%	131.15%	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.15.01		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		4.00	582,713,361				395,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
2.09.2.09.01.15.04		Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan		4.00	463,000,000	0.00	120,486,000		169,907,600					0.00	120,486,000	0.00%	26.02%	
2.09.2.09.01.15.08		Monitoring evaluasi dan pelaporan		2.00	350,000,000	0.00	-		44,595,100					0.00	-	0.00%	0.00%	
2.09.2.09.01.15.09		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara		12.00	3,450,000,000	12.00	7,316,280,425	0	3,341,488,300	-	596,530,000	0.00%	17.85%	12.00	7,912,810,425	100.00%	229.36%	
									3,950,991,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	15.10%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12	
	2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		50.00	662,192,562	0.00	736,584,660							0.00	736,584,660	0.00%	111.23%	Dinas Perhubungan	
	2.09.2.09.01.16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor		5.00	160,000,000	0.00			87,813,000					0.00		0.00%	0.00%		
	2.09.2.09.01.16.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya		12.00	502,192,562	12.00	736,584,660		304,871,200					12.00	736,584,660	100.00%	146.67%		
									392,684,200	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.09.2.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan		0.68	2,179,717,183	0.00	2,541,170,050							0.00	2,541,170,050	0.00%	116.58%	Dinas Perhubungan	
	2.09.2.09.01.17.10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah		12.00	1,266,230,275	12.00	1,781,692,550	0	948,019,300		138,380,000			0.00%	14.60%	12.00	1,920,072,550	100.00%	151.64%
	2.09.2.09.01.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan		3.00	100,000,000				51,513,200					0.00		0.00%	0.00%		
	2.09.2.09.01.17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		2.00	100,000,000				64,475,000					0.00		0.00%	0.00%		
	2.09.2.09.01.17.18	Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru		3.00	463,486,908	2.00	759,477,500		388,095,000					2.00	759,477,500	66.67%	163.86%		
									1,452,102,500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			0.00%	9.53%					
										<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		25.00	2,269,334,388	0.00	5,184,846,000							0.00	5,184,846,000	0.00%	228.47%	Dinas Perhubungan	
	2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas		2.00	100,000,000	333.00	1,110,173,000		280,000,000					333.00	1,110,173,000	16650.00%	1110.17%		
	2.09.2.09.01.19.02	Pengadaan marka jalan		10.00	700,000,000	6.00	2,616,732,000		699,888,000					6.00	2,616,732,000	60.00%	373.82%		
	2.09.2.09.01.19.04	Operasi Penerbitan dan Penegakan Hukum		5.00	280,000,000	5.00	604,915,000		240,955,000					5.00	604,915,000	100.00%	216.04%		
	2.09.2.09.01.19.05	Pengadaan Traffic Light dan Warning Light		5.00	350,000,000	2.00	654,846,000		299,700,000					2.00	654,846,000	40.00%	187.10%		
	2.09.2.09.01.19.06	Pembangunan trotoar, median jalan dan pulau jalan		1.00	100,000,000	0.00	198,180,000		100,100,000					0.00	198,180,000	0.00%	198.18%		
									1,620,643,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>			0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.09.2.09.01.20	Program peningkatan kelangkaan pengoperasian kendaraan bermotor		2.00	250,000,000									0.00		0.00%	0.00%	Dinas Perhubungan	
	2.09.2.09.01.20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor		2.00	150,000,000				471,000,000					0.00		0.00%	0.00%		
	2.09.2.09.01.20.03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor		6.00	100,000,000				36,000,000					0.00		0.00%	0.00%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									507,000,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Komunikasi dan Informatika</b>															
2.10.2.10.01.15		<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>		<b>95.00</b>	<b>4,685,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.15.02		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi		36.00	2,100,000,000			0	1,500,128,748	-	51,612,053	0.00%	3.44%	0.00	51,612,053	0.00%	2.46%	
2.10.2.10.01.15.05		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi		85.00	355,000,000			0	242,867,500	-	17,520,000	0.00%	7.21%	0.00	17,520,000	0.00%	4.94%	
2.10.2.10.01.15.07		Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai		1.00	200,000,000			0	181,900,000	-	19,600,403	0.00%	10.78%	0.00	19,600,403	0.00%	9.80%	
2.10.2.10.01.15.09		Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai		1.00	350,000,000				143,375,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
2.10.2.10.01.15.10		Pengadaan alat studio, komunikasi dan jaringan		8.00	325,000,000				300,000,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
2.10.2.10.01.15.11		Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai		1.00	250,000,000			0	680,000,000	-	4,500,000	0.00%	0.66%	0.00	4,500,000	0.00%	1.80%	
2.10.2.10.01.15.12		Pengadaan dan pemeliharaan alat studio dan komunikasi		10.00	115,000,000			0	103,000,000	-	2,500,000	0.00%	2.43%	0.00	2,500,000	0.00%	2.17%	
									3,151,271,248		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	3.04%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.10.2.10.01.17		<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>		<b>100.00</b>	<b>315,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.17.01		Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		36.00	185,000,000			0	118,632,000	-	26,856,000	0.00%	22.64%	0.00	26,856,000	0.00%	14.52%	
2.10.2.10.01.17.02		Pelatihan SDM dalam bidang kehumasan		8.00	130,000,000				114,100,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
									232,732,000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	11.54%					
											<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.10.2.10.01.18		<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>		<b>100.00</b>	<b>3,060,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.01		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		4.00	610,000,000				544,676,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
2.10.2.10.01.18.03		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		4.00	95,000,000			0	80,440,000	-	5,373,781	0.00%	6.68%	0.00	5,373,781	0.00%	5.66%	
2.10.2.10.01.18.04		Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan informasi		12.00	490,000,000			0	457,040,000	-	70,161,279	0.00%	15.35%	0.00	70,161,279	0.00%	14.32%	
2.10.2.10.01.18.05		Penyebarluasan informasi hari-hari besar		2.00	180,000,000				165,870,000					0.00	-	0.00%	0.00%	
2.10.2.10.01.18.06		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan		7.00	135,000,000			0	103,726,000	-	9,104,700	0.00%	8.78%	0.00	9,104,700	0.00%	6.74%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.10.2.10.01.18.07	Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah	-	7.00	1,550,000,000			0	1,406,500,000	-	52,950,699	0.00%	3.76%	0.00	52,950,699	0.00%	3.42%		
				4.00					2,758,252,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	4.99%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!	
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																
	2.11.2.11.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif		1575.00	396,664,637	0.00	608,430,116							0.00	608,430,116	0.00%	153.39%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
	2.11.2.11.01.15.13	Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah	Terlaksananya pembinaan UMKM yang produktif disetiap kecamatan (kecamatan)	7.00	250,000,000	13.50	292,005,425	7	230,654,225	-	27,925,000	0.00%	12.11%	13.50	319,930,425	192.86%	127.97%		
									230,654,225			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	12.11%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.11.4.01.03.15	Program penciptaan iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif		100	255,000,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
	2.11.4.01.03.15.02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah (peserta)	90	255,000,000			50	124,550,000	-	18,400,000	0.00%	14.77%	0.00	18,400,000	0.00%	7.22%		
									124,550,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	14.77%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		90.00	495,180,400	0.00	822,974,750							0.00	822,974,750	0.00%	166.20%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
	2.11.2.11.01.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap koperasi dikota dumai (kecamatan)	7.00	92,000,000	13.50	140,066,100	7	38,375,000	-	10,150,000	0.00%	26.45%	13.50	150,216,100	192.86%	163.28%		
	2.11.2.11.01.18.12	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi (koperasi)	70.00	310,000,000	140.00	539,251,450	10	71,540,000	-	12,600,000	0.00%	17.61%	140.00	551,851,450	200.00%	178.02%		
	2.11.2.11.01.18.13	Pelatihan Perpajakan Bagi Pengurus Koperasi	Terlaksananya pelatihan perpajakan bagi pengurus koperasi (koperasi)	25.00	93,180,400			25	66,509,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
									176,424,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	12.90%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			<b>Penanaman Modal</b>																
	2.12.4.01.03.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100.00	205,028,505	0.00	402,435,004							0.00	402,435,004	0.00%	196.28%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
	2.12.4.01.03.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi		1.00	205,028,505	2.00	402,435,004		148,220,000					2.00	402,435,004	200.00%	196.28%		
									148,220,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						


No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	2.12.2.12.01.15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		169.00	1,012,639,000	0.00	877,779,349							0.00	877,779,349	0.00%	86.68%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.12.2.12.01.15.02	Pengembangan polensi unggulan daerah	Informasi Polensi dan Peluang Investasi (Bulan)	1.00	110,000,000	1.00	112,625,438	12	146,959,000	1	8,100,000	6.25%	5.51%	1.75	120,725,438	175.00%	109.75%	
	2.12.2.12.01.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Rencana Umum Penanaman Modal (Dokumen)	1.00	252,639,000			1	24,970,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	2.12.2.12.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rafor/pre sentasi investasi (Event)	1.00	195,000,000	2.00	494,402,611	2	142,950,500	-	5,050,000	0.00%	3.53%	2.00	499,452,611	200.00%	256.13%	
									314,879,500			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	2.92%	4.18%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.12.2.12.01.29	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu</b>		4230.00	2,305,450,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.12.2.12.01.29.01	Sosialisasi Pelayanan Terpadu		12.00	400,000,000			0	274,123,910	1	49,996,000	0.00%	18.24%	0.75	49,996,000	6.25%	12.50%	
	2.12.2.12.01.29.02	Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Koordinasi Penerbitan Izin (Bulan)	12.00	500,000,000			12	266,438,000	1	24,440,000	6.25%	9.17%	0.75	24,440,000	6.25%	4.89%	
	2.12.2.12.01.29.03	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Pemantauan izin usaha yang telah diterbitkan (Bulan)	12.00	360,450,000			12	78,119,800	1	-	6.25%	0.00%	0.75	-	6.25%	0.00%	
	2.12.2.12.01.29.04	Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	Pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan (Bulan)	12.00	300,000,000			12	166,486,300	1	16,219,000	6.25%	9.74%	0.75	16,219,000	6.25%	5.41%	
	2.12.2.12.01.29.05	Survey penerbitan perizinan	Izin usaha yang akan diterbitkan (Bulan)	12.00	595,000,000			12	217,530,000	1	54,150,000	6.25%	24.89%	0.75	54,150,000	6.25%	9.10%	
									1,002,698,010			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	4.54%	14.44%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>																
	2.13.2.13.01.16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>		100.00	883,359,536	0.00	1,308,866,800	95	644,626,150.00		44,176,500.00	2.84%	6.85%	0.00	1,353,043,300	0.00%	153.17%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	2.13.2.13.01.16.10	Seleksi dan Pembinaan Paskibraka	Jumlah peserta Paskibraka yang terlatih (orang)	40.00	642,308,981	135.00	1,121,918,050	35	513,302,891	1	44,176,500	3.57%	8.61%	136.25	1,166,094,550	340.63%	181.55%	
	2.13.2.13.01.16.11	Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband	Jumlah peserta marchingband yang terlatih (orang)	80.00	198,725,000	80.00	186,948,750	60	131,323,259	-	-	0.00%	0.00%	80.00	186,948,750	100.00%	94.07%	
									644,626,150			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	2.84%	6.85%				
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.13.2.13.01.20	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>		100.00	657,778,051	0.00	1,671,592,850		357,993,200		10,661,000	0.67%	2.98%	0.00	1,682,253,850	0.00%	255.75%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	2.13.2.13.01.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rekreasi (Car Free day) (bulan)			43.00	282,978,000	11	105,421,100	0	10,661,000	2.27%	10.11%	43.25	293,639,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	2.13.2.13.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kab/kota yang mengikuti kompetisi bola volly Walikota Cup (kab/kota)	12.00	287,477,697	18.00	487,601,100	12	252,572,100	-	-	0.00%	0.00%	18.00	487,601,100	150.00%	169.61%	
									357,993,200	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.67%	2.98%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Statistik</b>															
	2.10.2.10.01.21	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>		<b>100.00</b>	<b>525,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.10.2.10.01.21.01	Penyusunan Profil Kominfo Kota Dumai		1.00	175,000,000			0	147,566,000	-	19,620,000	0.00%	13.30%	0.00	19,620,000	0.00%	11.21%	
									147,566,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	13.30%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Persandian</b>															
	2.10.2.10.01.19	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah</b>		<b>82.00</b>	<b>339,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.10.2.10.01.19.02	Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah		65.00	185,000,000			0	92,366,000	-	20,000,000	0.00%	21.65%	0.00	20,000,000	0.00%	10.81%	
									92,366,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	21.65%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			<b>Kebudayaan</b>															
	2.16.1.01.01.15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>		<b>80.00</b>	<b>800,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	2.16.1.01.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		80.00	520,000,000			100	390,130,000	2	25,974,356	1.75%	6.66%	1.75	25,974,356	2.19%	5.00%	
									390,130,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		1.75%	6.66%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.16.1.01.01.17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>		<b>100.00</b>	<b>1,254,000,000</b>	<b>75.00</b>	<b>1,356,610,794</b>	<b>100</b>	<b>734,132,000</b>	<b>4</b>	<b>53,120,000</b>	<b>1.80%</b>	<b>7.24%</b>	78.50	1,409,730,794	78.50%	112.42%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	2.16.1.01.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		90.00	800,000,000	140.00	1,267,310,653	100	353,911,000	0	4,720,000	0.25%	1.33%	140.25	1,272,030,653	155.83%	159.00%	
	2.16.1.01.01.17.07	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya		0.00	-			100	380,221,000	3	48,400,000	3.25%	12.73%	3.25	48,400,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
									734,132,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		1.80%	7.24%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.16.1.01.01.18	<b>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</b>		<b>80.00</b>	<b>700,000,000</b>									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	2.16.1.01.01.18.03	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah		80.00	700,000,000			0	185,022,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									185,022,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%					
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					



No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		<b>Perpustakaan</b>																	
	2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		22500.00	1,075,692,000	0.00	381,669,077	2257	503,384,000	0	22,650,000	0.00%	4.50%	0.00	404,319,077	0.00%	37.59%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
	2.17.2.17.01.15.03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang dibina (perpustakaan)	4.00	250,000,000	4.00	93,946,200	4	104,593,000	-	22,650,000	0.00%	21.66%	4.00	116,596,200	100.00%	46.64%		
	2.17.2.17.01.15.08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah lomba yang dilaksanakan (lomba)	4.00	250,000,000	3.00	287,722,877	2	103,566,000	-	-	0.00%	0.00%	3.00	287,722,877	75.00%	115.09%		
	2.17.2.17.01.15.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah koleksi perpustakaan (judul e-book)	17086.00	200,000,000			2250	225,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
	2.17.2.17.01.15.12	Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)	Jumlah kegiatan otomasi perpustakaan yang dilaksanakan (aplikasi)	1.00	75,692,000			1	70,225,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
									503,384,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	4.50%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		<b>Kearsipan</b>																	
	2.18.2.17.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		8	152,594,500	3200	26,891,500	8	80,780,200	0	11,270,000	0.00%	13.95%	3200.00	38,161,500	40000.00%	25.01%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
	2.18.2.17.01.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah OPD/unit kerja yang dilata dan didata (OPD/Unit kerja)	5.00	71,035,500			5	46,978,200	-	11,270,000	0.00%	23.99%	0.00	11,270,000	0.00%	15.87%		
	2.18.2.17.01.16.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen arsip yang diduplikat dalam bentuk informatika (dokumen)	3.00	81,559,000	3200.00	26,891,500	3	33,802,000	-	-	0.00%	0.00%	3200.00	26,891,500	106666.67%	32.97%		
									80,780,200			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	13.95%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.18.4.01.03.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		80.00	327,383,331	1720.00	139,955,000		73,095,000					1720.00	139,955,000	2150.00%	42.75%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
	2.18.4.01.03.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		3000.00	327,383,331	1720.00	139,955,000		73,095,000					1720.00	139,955,000	57.33%	42.75%		
									73,095,000			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%					
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100		12
	2.18.2.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		105.00	351,750,000									0.00	-	0.00%	0.00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.18.2.17.01.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kearsipan (orang)	105.00	200,000,000			35	93,237,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
									93,237,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>												<b>2%</b>	<b>10%</b>					
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>												<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>					

WALIKOTA DUMAI,  
  
**H. ZULKIFLI, AS**



# **LAMPIRAN II**

Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2019  
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Dumai Tahun 2020

**PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DUMAI TAHUN 2020**

<b>No</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>No</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20	Inspektorat
2	Dinas Kesehatan	21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Dinas Perhubungan	22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	24	Badan Pendapatan Daerah
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	Sekretariat Daerah Kota Dumai
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	27	Sekretariat DPRD
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	29	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
11	Dinas Perdagangan	30	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	31	Kecamatan Bukit Kapur
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32	Kecamatan Dumai Barat
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33	Kecamatan Dumai Kota
15	Dinas Lingkungan Hidup	34	Kecamatan Dumai Selatan
16	Dinas Perikanan	35	Kecamatan Dumai Timur
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	36	Kecamatan Medang Kampai
18	Dinas Sosial	37	Kecamatan Sungai Sembilan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika		



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

## **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **DINAS PERIKANAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **DINAS KESEHATAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PERHUBUNGAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PEMUKIMAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **SEKRETARIAT DPRD**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **KECAMATAN BUKIT KAPUR**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

## **KECAMATAN DUMAI BARAT**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **KECAMATAN DUMAI KOTA**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **KECAMATAN DUMAI SELATAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **KECAMATAN DUMAI TIMUR**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

## **KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PERDAGANGAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

# SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **DINAS SOSIAL**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **INSPEKTORAT**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

## **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2020

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2019



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**TAHUN 2019**